Abdul Jamil Wahab, dkk

FUNGSI MASJID SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA PADA MASA PANDEMI

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Abdul Jamil Wahab, dkk.

FUNGSI MASJID SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA PADA MASA PANDEMI

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan
Moderasi Beragama Pada Masa Pandemi

x + 378 hlm; 145 x 205 mm
Cetakan I, Desember 2021
ISBN: 9789-623-6925-37-9

Tim Penulis:
Anik Farida dan Mary Silvita, Kustini & Rahmah Nur Fitriyani, Setyo Boedi Oetomo, Asnawati, Suhanah, Ahsanul Khalikin, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, Abdul Jamil Wahab, Ibnu Hasan Muchtar, Raudatul Ulum, Fatimah Zuhrah, Wakhid Sugiyarto, Warnis, Elma Haryani, Saprillah, Arnis Rachmadhani, Reslawati dan Deva Sebayang

Penyunting:
Abd. Malik

Editor:
Hatim Gazali & Ahsanul Khalikin

Desain Cover:
Linkmed Pro

Layout:
cetakjogja.id

Diterbitkan oleh:
Litbangdiklat Press
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340 Telp. 021 3920425

Dicetak oleh:
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT buku hasil *Penelitian Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama pada Masa Pandemi* ini dapat terlaksana dengan baik.

Buku ini adalah bermaksud untuk menggali informasi tentang masjid dijadikan sebagai unit analisis penelitian pada kajian saat ini, dengan alasan sebagai "kontra narasi" yang menyatakan bahwa masjid sudah terpapar radikalisasi. Asumsinya bahwa ada prototipe masjid lain yang bercorak *wasatiyah* (tengah) yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai cara aksentuasi bahwa sebagai rumah Tuhan" masjid harus menebarkan perdamaian. Diharapkan kajian ini akan dapat menemukan model pendidikan moderasi beragama di masjid yang akan dikaji yang kemudian dapat dijadikan model (replika) untuk masjid yang lain.

Tujuan penelitian ini; telah dilakukan penggalian pendidikan moderasi beragama pada masa pandemi yang dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya dapat terdeskripsikan pendidikan moderasi beragama yang ada di Indonesia melalui berbagai fungsi masjid.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penelitian ini sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan ini sesuai yang diharapkan. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua narasumber, moderator, tim Peneliti, serta narasumber daerah (informan) yang telah banyak membantu kegiatan ini sehingga kegiatan penelitian ini terlaksana sesuai yang direncanakan.

Semoga buku penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan kebijakan pimpinan.

Jakarta,   Juni 2021

Ketua Pelaksana

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN

Dengan segala rahmat dan hidayah-Nya buku *Penelitian Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama pada Masa Pandemi* ini melalui tahapan akhir dengan dilaksanakannya *evaluasi, pembahasan executive summary* dan *Policy Breaf*.

Buku hasil penelitian ini telah dilakukan kajian pustaka, pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Ada beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan seminar, pelaporan dan sosialisasi.

Kelanjutan dari hasil penelitian ini bisa menjadi; 1) sosialisasi konsep moderasi beragama di masjid; 2) penentuan pola pendidikan moderasi beragama berbasis masjid; 3) melibatkan ormas-ormas keagamaan untuk penyebarluasan pengarusutamaan moderasi beragama di masyarakat.

Terima kasih kami ucapkan kepada terutama kepada penulis desain operasional, narasumber, tim Peneliti, informan serta pemerintah daerah. Semoga amal ibadah kita semua mendapat ganjaran yang mulia dari Tuhan Yang Maha Esa, amin yarabbal alamiin.

Jakarta,   Juni 2021

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Prof. Dr. H Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

NIP. 197009161992031002

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Urgensi & Konteks

Dalam diskursus akademik sering disinggung tentang wacana radikalisme dan fundamentalisme dalam beragama. Dua istilah ini sering didekatkan dengan istilah ekstremisme dalam beragama, walaupun beberapa pendapat kedua istilah yang disebut pertama tidak terkait dengan istilah yang disebut terakhir. Ekstremisme yang pada beberapa peristiwa meletup menjadi tindakan kekerasan menjadikan alasan mengapa ekstremisme jauh lebih berbahasa ketimbang radikalisme maupun fundamentalisme.

Tidak mengherankan memang, dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan kebenaran orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Salah satu ciri awal ekstremisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut

Kementerian Agama sendiri telah menengarai merebaknya hal ini. Ujaran-ujaran kebencian (hate speeches) merebak di tempat ibadah, termasuk sering kali terjadi di masjid. Jika selama ini konten dakwah bermuatan kebencian dan menganggap keyakinan sendiri paling benar dan menyalahkan keyakinan lain terjadi di lembaga di luar masjid, seperti perguruan tinggi dan sekolah, ternyata tidak seterusnya demikian. Justru masjid belakangan menjadi lahan subur bagi mencuatnya ujaran kebencian yang dikemas dalam kegiatan dakwah.

Untuk mengurangi konten dakwah yang bermuatan permusuhan dan jauh dari kedamaian itu, Kemenag telah melakukan revisi terhadap konten-konten ajaran terkait dengan topik khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, 2 Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar. Kemenag melakukan revisi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah (CNN Indonesia, 2019).

Kebijakan di atas beriringan dengan program pengarusutamaan moderasi beragama yang digagas Kementerian Agama. Moderasi beragama di sini sering dipadankan dengan istilah wasatiyyah. Artinya, Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam Wasathiyyah, berasal dari dua kata yaitu Islam dan “wasathiyyah”. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Kata “al-wasathiyyah” berakar pada kata “alwasth” (dengan huruf sin yang di-sukunkan) dan “al-wasth” (dengan huruf sin

yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyyah, menurut Zamimah (2018) sebagaimana dikutip Fahri & Zainuri (2019), juga seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “almuqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam

Selanjutnya, Al-Qardawi mendefinisikan wasathiyyah yaitu sikap atau sifat moderat, adil antar a dua pihak yang berhadapan atau yang saling bertentangan, sehingga salah satu dari mereka berpengaruh dan mempengaruhi pihak lain, dan tidak ada pihak yang mengambil alih haknya yang lebih banyak dan mengintimidasi pihak lain (Munir & Saputra, 2019).

Oleh sebab itu, memahami lanskap ekstremisme, atau keberagamaan garis keras, baik secara konseptual maupun empirik, menjadi penting untuk dapat lebih memahami signifikansi penguatan visi moderasi beragama. Sikap keberagamaan yang ekstrem merupakan tantangan sepanjang masa bagi umat beragama. Di masa pandemi yang sudah berlangsung dalam separuh tahun ini sikap keberagaman yang ekstrem juga merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan. Potensi tersebut beberapa kali muncul selama masa pandemi.

Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan kebenaran orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul terma “garis keras”, atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama.

Salah satu ciri awal ekstremisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekedar menolak, seorang penganut garis keras lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan. Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ekstremis atau penganut garis keras umumnya lebih 'nyaring' dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (silent majority).

Secara konseptual, pandangan dan praktik keagamaan seorang yang ekstrem sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berpikirnya, membuat kelompok garis keras memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Hilmy, Kompas 4/7/2019). Jika cara pandang, cara berpikir atau paradigma ekstrem dalam beragama menjelma menjadi sebuah ideologi yang bersifat sosial politik, maka disebutlah sebagai radikalisme.

Memahami lanskap ekstremisme, atau keberagamaan garis keras, baik secara konseptual maupun empiris, menjadi penting untuk dapat lebih memahami signifikansi penguatan visi moderasi beragama. Sikap keberagamaan yang ekstrem merupakan tantangan sepanjang masa bagi umat beragama. Di masa pandemi yang sudah berlangsung dalam separuh tahun ini sikap keberagaman yang ekstrem juga merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan. Potensi tersebut beberapa kali muncul selama masa pandemi.

Ketika wabah COVID-19 menyerang warga kota Wuhan, China, hingga menginfeksi puluhan ribu orang, Di media sosial sepeti Facebook dan Twitter, mereka berkata bahwa wabah yang menyerang China adalah azab (hukuman Tuhan) bagi rakyat China yang bertindak zalim pada etnis Uyghur. Sebagian lain mengatakan, bahwa virus ini akibat warga China gemar memakan-makanan haram.

Ada pula yang mengatakan bahwa Korona hanya menyerang mereka yang tidak shalat. Ucapan yang keluar dari seorang pria paruh baya berjubah putih dalam sebuah video yang viral baru-baru lalu. Pria paruh baya tersebut berkelahi dengan aparat setelah dia menolak untuk menaati aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, dan berdalih bahwa Korona hanya menyerang mereka yang tidak beriman pada Tuhan. Juga ketika MUI mengeluarkan fatwa MUI No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 yang dikeluarkan pada 16/3/2020. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni'am mengingatkan agar umat Islam menjadikan rumah sebagai sentra kegiatan ibadah. Masyarakat harus memahami Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah virus COVID-19. MUI menyebut sejumlah

ibadah, seperti majelis taklim, salat Jumat berjamaah, salat wajib berjamaah, salat tarawih, dan salat I'ed.

Dengan fatwa tersebut, masyarakat harus mulai terbiasa menyelenggarakan ibadah Ramadhan dengan kebiasaan baru, di situasi dan kondisi yang baru, namun tetap dalam tuntunan syariat Islam. Fatwa tersebut juga mengandung pengertian bahwa hendaknya masyarakat untuk tidak berkerumun di masjid atau musala selama bulan Ramadhan lantaran adanya pergeseran kegiatan ibadah. Namun, masjid dan musala tetap menjadi pusat penyiaran. Seperti azan yang dikumandangkan sebagai penanda waktu shalat.

Senada dengan MUI, Menteri Agama Fachrul Razi juga meminta umat Islam untuk melakukan tarawih dan tadarus di rumah masing-masing selama Ramadhan. Imbauan Menag ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut pemerintah menghimbau agar pelaksanaan shalat Tarawih cukup dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Kebijakan ini diambil agar physical distancing (jaga jarak) dapat terpatuhi sehingga laju penyebaran virus bisa terkendali.

Melakukan physical distancing banyak dipengaruhi cara pandang keagamaan. Contohnya betapa cara pandang keagamaan seseorang mempengaruhi apakah dia bersikap terbuka, konservatif, moderat atau ekstrem. Meski ini bukan satu-satunya variabel cara pandang keagamaan. Dikatakan bahwa " ingin saya tekankan paradigma keagamaan sangat menentukan sikap seseorang. Kalau cara pandang keagamaannya misalnya terbuka, maka ragam narasi agama ketika menyikapi COVID-19 ini juga akan terbuka,

dan sebaliknya kalau tertutup maka menyikapinya juga pasti akan tertutup".

Pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak, tidak bersalaman dan cium tangan atau berinteraksi secara fisik. Namun, kata dia, imbauan itu tidak akan berhasil apabila ada tokoh agama yang membuat narasi tindakan itu tetap diperbolehkan. Terkait dengan hal ini Forum Silaturahmi Takmir Masjid se-Jakarta menemukan masih banyaknya masjid atau musala yang tetap mengadakan shalat berjamaah di masjid.

Dalam kondisi pandemi, sikap moderat dalam beragama di antaranya yaitu pertama, bersabar menghadapi musibah COVID-19. Sabar merupakan manifestasi keyakinan teologis (akidah) yang diimplementasikan dalam sikap (Akhlak) menghadapi praksis kehidupan sehari-hari. Kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19. Ketiga, mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masholih atau menghilangkan kemudharatan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat.

Merespons kebutuhan di atas, maka diperlukan pendidikan berbasis masyarakat yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengedepankan sikap beragama yang moderat. Salah satunya adalah memberikan dukungan dan fasilitasi pada masjid-masjid yang sudah memiliki program dan kegiatan moderasi beragama. Upaya ini akan dapat mengembalikan ruh fungsi masjid sebagai pusat peradaban, termasuk dalam merespons upaya penanganan pandemi. Pada akhirnya masjid dapat dikembangkan fungsinya seperti halnya masjid Nabawi di Madinah yang dibangun

oleh Nabi SAW di tengah masyarakat Madinah yang multi etnis dan multi agama.

Jauh sebelum wabah COVID-19 menjalar, beberapa masjid sudah melakukan upaya-upaya penguatan moderasi beragama yang dikemas melalui pendidikan. Masjid selain menjadi tempat dakwah juga pusat pendidikan moderasi Islam, sehingga masjid tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi juga institusi sosial.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid, sehingga tidak hanya berfungsi hanya sebagai tempat ibadah ritual, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Diterbitkannya Standar Pembinaan Manajemen Masjid ditujukan agar masjid memiliki pedoman terkait pembinaan dan pengelolaan di bidang idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Masjid sebagai pusat pendidikan moderasi dikembangkan melalui beberapa kegiatan pendidikan keagamaan antara lain taklim, taman pendidikan al-Qur'an, pendidikan kader remaja masjid, dan sebagainya. Dalam situasi pandemi ini apakah masjid tetap dapat memainkan perannya sebagai pusat pendidikan moderasi beragama. Oleh karena itu diperlukan studi yang bertujuan untuk menggali data dan informasi ini.

Dalam kerangka itulah, buku yang berasal dari penelitian ini akan menjawab empat pertanyaan kunci: Pengembangan pendidikan moderasi beragama di masjid di masa pandemi ini dilakukan dalam bentuk apa? Isu keagamaan apa yang sering kali berkembang di masyarakat dan direspons oleh masjid dalam bentuk

moderasi beragama? Bagaimana model pengembangannya? Faktor pendukung dan penghambat?

Untuk mendapatkan jawaban tersebut, maka dilakukan penelitian di berbagai wilayah di Indonesia yang diidentifikasi memiliki bangunan masjid dengan fungsi sebagai pusat pendidikan moderasi beragama. Sebagai "representasi" wilayah yang dipilih adalah rural (pedesaan) dan "urban" (perkotaan), di pulau Jawa dan luar Jawa.

Mengapa masjid yang disasar, padahal fungsi pusat pendidikan moderasi beragama tidak hanya diperankan oleh masjid, tetapi juga oleh rumah ibadah lain. Masjid dijadikan sebagai unit analisis penelitian pada kajian saat ini, dengan alasan sebagai "kontra narasi" temuan studi di atas yang menyatakan bahwa masjid sudah terpapar radikalisasi. Asumsinya bahwa ada prototipe masjid lain yang bercorak wasatiyah (tengah) yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai cara aksentuasi bahwa sebagai "rumah Tuhan" masjid harus menebarkan perdamaian. Diharapkan kajian ini akan dapat menemukan model pendidikan moderasi beragama di masjid yang akan dikaji yang kemudian dapat dijadikan model (replika) untuk masjid yang lain.

Untuk itu, sejumlah teknik pengumpulan data dilakukan. Selain melakukan kajian Pustaka, penggalian data ditempuh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber melalui metode bola salju. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informan baru bermodalkan informasi dari narasumber yang telah diwawancarai. Wawancara akan berakhir begitu peneliti merasa jenuh, dalam arti tidak ada kebaruan informasi yang didapat. Pengamatan lapangan dari para peneliti, selama melakukan penelitian lapangan, juga diharapkan dapat membantu penelitian

ini agar menjadi se-objektif mungkin. Hal ini dilakukan bila keadaan memungkinkan, mengingat berbagai keterbatasan yang melingkupi penelitian ini.

Penelitian ini akan dilaksanakan di 16 kota/kabupaten, yaitu: Kota Tegal, Kota Depok, Kota Surakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Sukabumi, Jakarta Selatan, Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Medan, dan Kota Padang.

Pemilihan 16 daerah tersebut, didasarkan bahwa daerah-daerah tersebut sesuai kriteria masjid moderat: 1) Takmir masjid berasal dari ragam paham keagamaan, ormas keagamaan kultur keagamaan, 2) Khatib, penceramah mengakomodir lintas mazhab, 3) ritual peribadatan mengakomodir ragam mazhab, 4) isi ceramah/ khutbah menghargai berbagai mazhab dan paham keagamaan; 5) sumber bacaan mengakomodasi kitab-kitab lintas mazhab; dan 6) kelima karakteristik dimaksud terlembagakan dalam pendidikan moderasi beragama.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yakni pengurus masjid dan masyarakat (jamaah). Informan yang mewakili pengurus masjid adalah siapa saja yang terlibat secara aktif dalam proses moderasi beragama. Sementara dari kalangan masyarakat jamaah adalah masyarakat dan/ atau jamaah yang memiliki rekam jejak dalam proses moderasi beragama.

Dalam pemetaan awal, informan pengurus masjid dapat diwakili oleh pengurus takmir masjid dan dewan syariah masjid maupun ormas-ormas keagamaan, Kepala Kemenag. Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat (jamaah) dapat diwakili

oleh imam, muazin, marbud, jamaah shalat 5 waktu, pengelola yayasan pendidikan masjid, pengelola berbagai kegiatan masjid yang lainnya, panitia penyelenggara hari besar Islam (PHBI), pengurus MUI, NU dan/atau Muhammadiyah dan lain lainnya, sebagai ormas yang secara terang-benderang menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Namun demikian, Sehubungan dengan fokus yang ingin didalami dan berbagai keterbatasan yang melingkupinya, penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah bagaimana pengurus masjid dan masyarakat (jamaah) melaksanakan moderasi beragama, guna memelihara dan meningkatkan moderasi beragama yang ada di berbagai masjid yang ada di wilayah Indonesia. Dalam bahasa lain, apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh pengurus masjid beserta ormas keagamaan dan masyarakat (jamaah) yang tergabung dalam organisasi, yang memiliki konsentrasi untuk mewujudkan toleransi aktif melalui moderasi beragama.

Dalam moderasi beragama yang dimaksud, penelitian ini menggali masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama dalam aspek: (1) pendidikan moderasi beragama di masjid yang dilakukan; (2) pengembangan pendidikan moderasi beragama dipilih sebagai salah satu program kemasjidan; (3) ide pendidikan moderasi beragama dipelopori dan respons jamaah serta masyarakat sekitar; (4) model pengembangannya; dan (5) faktor pendukung dan penghambat.

Adapun variabel untuk menggali pendidikan moderasi beragama tersebut adalah (1) cara pandang, sikap, dan praktik beragama; (2) harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) masjid sebagai pusat kontemplasi, pusat ritual, dan pusat kajian; (4) relasi agama dan negara berupa keberterimaan terhadap Pancasila sebagai

bentuk nyata moderasi dalam konteks negara-bangsa; dan (5) faktor pendukung dan penghambat; (6) perkembangan teknologi informasi berupa new media yang terejawantahkan dalam bentuk berbagai platform online seperti whatsapp dan facebook misalnya, dilihat sebagai faktor yang turut memengaruhi moderasi beragama.

B. Kerangka Konseptual

1. Fungsi Masjid

Istilah "masjid" merupakan bentuk derivatif dari sa-ja-da (menundukkan kepala, bersujud) (Maqayis al-Lugah, juz III: 133), "masjid" diartikan tempat sujud, dan pada akhirnya istilah ini menjadi nama tempat yang biasa digunakan umat Islam untuk melaksanakan salat (Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. II, 2004: 437). Dalam salah satu kitab kanonik hadis, Shahih Muslim, istilah ``masjid`` bisa ditemukan dalam bentuk singular (masjid) dan maupun plural (masajid). Khusus dalam bentuk plural, Nabi hanya menyebut istilah "masajid" secara eksplisit pada tujuh isu saja, yaitu tentang pahala berjalan menuju masjid, lisensi perempuan salat di masjid, kenyamanan masjid, penghormatan terhadap masjid, kecintaan generasi muda terhadap masjid, pahala salat di masjid Nabi, keutamaan masjid Nabi, dan fungsi masjid (Asrar Mabrur Faza; 5 Februari 2018).

Imam Muslim telah merilis beberapa hadis terkait dengan fungsi masjid, di antaranya adalah: "Sesungguhnya (masjid-masjid) ini hanyalah untuk (tempat) dzikrullah, salat, dan qira'ah Alquran" (Shahih Muslim, kitab al-Thaharah/2, bab Wujub Gasl al-Baul wa Ghairihi/30, no. hadis 100, 1998: 164). Hadis ini sebenarnya adalah satu fragmen dari matan hadis tentang ``aksi nekat`` seorang arab Badui yang kencing di dalam masjid, kemudian Nabi memberinya

nasehat dengan kalimat di atas. Hadis ini dinilai sahih, karena para rawinya berkualitas tsiqah, selain 'Ikrimah bin 'Ammar yang hanya dinilai shaduq (Taqrib al-Tahdzib, juz I, 1993: 83, 111, 315, 685, 728, 111). Menurut penulis, hadis ini pun memiliki matan yang relatif aman dari problem distorsi-reduktif teks yang serius (Asrar Mabrur Faza; 5 Februari 2018).

Meminjam istilah yang dipakai Darodjat dan Wahyudiana (Dosen Unmuh Purwokerto), fungsi masjid secara bahasa, masjid berarti tempat sujud (Cyril Glasse, 2002: 262). Kata sujud, menurut Quraish Shihab, mengandung beberapa pengertian, misalnya pertama, pengakuan dan penghormatan kepada pihak lain (seperti sujudnya Malaikat kepada Adam seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 30). Kedua, kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan atas kebenaran pihak lain (misalnya sujudnya para ahli sihir raja Firáun setelah Musa menunjukkan mukjizat dan mengalahkan sihir mereka. Lihat Q.S Thaha [20] ayat 20). Ketiga, sujud berarti mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah/sunnatullah (misalnya sujudnya bintang-bintang, tetumbuhan dan sebagainya. Lihat Q.S ar-Rahman [55] ayat 6). Dari beberapa arti tersebut bila dikaitkan dengan arti masjid, yaitu tempat sujud, maka bias dipahami bahwa maksud dari kata "sujud" adalah dalam arti luas. Sujud adalah aktivitas untuk mengakui keagungan Tuhan, menghormatiNya, pengakuan atas kesalahan diri sendiri dan kebenaran-Nya, dan sujud juga berarti pernyataan ketundukan terhadap semua aturan-aturan Allah SWT.

Menurut istilah syara', masjid adalah suatu bangunan yang merupakan tempat ibadah umat Islam, yang biasanya digunakan untuk melaksanakan shalat jamaah (Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 1.119). ada yang membedakan masjid dari mushalla, misalnya

dinamakan masjid adalah kalau dipergunakan untuk shalat Jumat, sementara kalau mushalla tidak. Jadi perbedaan itu bukan karena ukurannya, yaitu dinamakan masjid apabila ukurannya besar dan dinamakan mushalla apabila ukurannya kecil. Bukan demikian, jadi bias saja disebut masjid walau ukurannya kecil namun dia dipergunakan untuk shalat Jumat. Sementara ada masjid berukuran besar namun disebut mushalla dikarenakan tidak dipergunakan untuk shalat Jumat. Yang dimaksud dengan masjid dalam tulisan ini adalah bangunan dalam bentuk tertentu milik umat Islam yang khususnya dipergunakan untuk shalat jamaah.

Ketika membicarakan fungsi masjid, Quraish Shihab merujuk pada Q.S an-Nur [24] ayat 36-37, yang intinya bahwa fungsi masjid adalah untuk bertasbih. Namun tasbih di sini bukan hanya dalam arti mengucapkan kata "subhanallah", melainkan lebih luas lagi, yaitu takwa (Shihab, 1996: 461).

Jadi secara umum fungsi masjid adalah untuk melaksanakan takwa, di mana makna takwa adalah "memelihara diri dari siksaan Allah, dengan menjalankan semua perintahNya dengan penuh ketaatan dan menjauhi segala laranganNya berupa maksiat dan kejahatan"(Ahmad Umar Hasyim, 2007: 618). Dalam konsep Islam, takwa sendiri merupakan predikat tertinggi, karena dia merupakan akumulasi dari iman, Islam dan ihsan (Yuhanar Ilyas, 2002: 18-20).

Dengan merujuk kepada makna takwa di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi masjid itu sangat luas. Ia sebagai tempat hamba mengekspresikan keimanannya kepada Allah SWT, melaksanakan ibadah kepada-Nya dan berbuat ihsan atas nama-Nya. Mengekspresikan bidang keimanan, misalnya di masjid seorang hamba dalam dzikirnya menyatakan keEsaan Allah, mentasbihkanNya, mentahmidkanNya, mentakbirkanNya

serta memuji dengan berbagai pujian lainnya. Dalam bidang ibadah, seorang hamba bias melaksanakan berbagai macam shalat, tadarus al-Qurán, membayar zakat, menyembelih hewan kurban dan ibadah lainnya. Dalam bidang ihsan, seorang hamba melaksanakan infak dengan memasukkan uang ke dalam kotak amal atau menyerahkannya kepada takmir masjid secara langsung, bertutur kata sopan, menunjukkan sikap ramah dalam pergaulan dan sebagainya.

Menurut al-Qurán, masjid dibangun harus berlandaskan/ motif taqwa (Q.S. at-Taubah [9] ayat 108). Motif-motif sebaliknya, misalnya untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara memecah belah umat Islam, adalah dilarang (Q.S. at-Taubah [9] ayat 107). Demikian juga motif-motif lain yang berlawanan dengan motif takwa, misalnya motif pribadi, ekonomi atau ideologi, juga termasuk yang dilarang (Ali, 1987: 31).

Pada zaman Rasul SAW masjid berfungsi untuk berbagai kegiatan. M. Quraish Shihab, misalnya menyatakan banyak peranan masjid, di antaranya: sebagai tempat ibadah (shalat), tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah ekonomi, sosial dan budaya, tempat pendidikan, tempat santunan sosial, tempat latihan militer, tempat pengobatan, aula dan tempat menerima tamu, tempat menawan tahanan, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, pusat penerangan dan pembelaan agama (Shihab, 1996: 462).

Dalam analisis Quraish Shihab, fungsi dan peranan masjid seperti disebutkan di atas bukan hanya apa pada masa Rasulullah, namun juga pada masa-masa sesudahnya dalam era keemasan Islam, terutama untuk masjid besar (Shihab, ibid: 462-463). Istilah masjid besar di sini, maksudnya adalah masjid jamiʾ, yaitu masjid

induk, masjid yang berukuran lebih besar dari mushalla atau masjid lain di suatu desa, yang karena besar dan lengkapnya sarana yang dimiliki sehingga dijadikan pusat kegiatan-kegiatan penting seperti shalat Jumat, memotong hewan kurban, pengumpulan zakat dan sebagainya.

Masih menurut Shihab, mestinya sekarang pun, khususnya masjid besar harus mampu memerankan kesepuluh peran masjid seperti disebutkan di atas. Untuk itu masjid besar dituntut agar memiliki sarana memadai, menarik perhatian dan menyenangkan umat dari semua kalangan, baik tua, muda, anak-anak, pria dan wanita, terpelajar dan tidak, kaya maupun miskin (Ibid: 463).

Menurut peruntukkannya, masjid tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya shalat dengan segala rangkaiannya, namun masjid juga berfungsi sosial – seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan sosial lainnya- dan juga berfungsi politis – yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi Negara dan tempat berlangsungnya berbagai permusyawaratan bidang politik (Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 1120).

2. Pendidikan Berbasis Masjid

Seperti disinggung di atas, fungsi pendidikan masjid masih cukup relevan bilamana melihat potensi masjid dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada para jamaahnya. Masjid menjadi institusi keagamaan yang sulit dipisahkan dari keberadaan komunitas muslim dan oleh sebab itu, melalui masjid dapat diselenggarakan pendidikan secara kultural dan non formal. Hal ini karena jamaah masjid beragam baik dari sisi usia, pendidikan dan juga jenis pekerjaan.

Yoyon Suryono & Entoh Tohani (2016: 5) menuliskan, pada awal perkembangannya, pendidikan nonformal muncul dalam istilah pendidikan sosial (PS) sejalan dengan istilah pendidikan masyarakat (PM) dalam konteks pembangunan masyarakat. Berkembang kemudian, terutama di Indonesia, PS menjadi pendidikan luar sekolah (PLS) yang di dunia internasional praktik PLS hanya ada di Jepang. PLS berubah menjadi pendidikan nonformal (PNF) sejalan dengan hasil kajian UNESCO dan OECD yang lebih menitikberatkan pada konteks pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan. Istilah PNF sendiri banyak ditemui di negara-negara berkembang dalam konteks pendidikan sepanjang hayat.

Di negara maju PS, PLS, dan PNF kurang dikenal, lebih dikenal istilah pendidikan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan meski masih dalam konteks yang sama pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian, perkembangan PNF dimulai awal tahun 1970-an dalam bentuk pendidikan keaksaraan dalam konteks pendidikan dasar, dan pendidikan keterampilan dalam konteks pendidikan kejuruan untuk masyarakat. Bingkainya adalah pendidikan sepanjang hayat untuk membangun masyarakat menjadi masyarakat belajar.

Di negara maju PS, PLS, dan PNF kurang dikenal, lebih dikenal istilah pendidikan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan meski masih dalam konteks yang sama pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian, perkembangan PNF dimulai awal tahun 1970-an dalam bentuk pendidikan keaksaraan dalam konteks pendidikan dasar, dan pendidikan keterampilan dalam konteks pendidikan kejuruan untuk masyarakat. Bingkainya adalah pendidikan sepanjang hayat untuk membangun masyarakat menjadi masyarakat belajar.

Berkembangnya pemikiran pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan berpengaruh pada pendidikan nonformal yang kemudian mengadaptasi menjadi pendidikan nonformal berbasis pendidikan kecakapan hidup yang berkembang lagi kemudian menjadi pendidikan nonformal yang berbasis pendidikan kewirausahaan. Maka muncul antara lain, pendidikan kewirausahaan masyarakat. Pada tahap sebelumnya telah berkembang pula pemikiran dan praktik pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekonomi dan sosial-budaya.

Mengambil pengertian tersebut, pendidikan non formal berpotensi untuk diselenggarakan di masjid, termasuk untuk melakukan pendidikan non formal pada isu moderasi beragama. Pendidikan moderasi beragama berpotensi disebarluaskan kepada masyarakat secara non formal dan dilakukan secara andragogi, dengan mengandalkan pendekatan pendidikan orang dewasa. Isu moderasi beragama akan sangat signifikan apabila menggunakan cara pendidikan non formal semacam ini, misalnya melalui pengajian, ceramah, kajian halaqoh dan seterusnya.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education) sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masjid (Education Based Mosque). Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) merupakan model pendidikan yang di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara. Model PBM ini merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara. Di Indonesia, model PBM ini telah lama ada jauh sebelum kemerdekaan RI.

Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) merupakan mekanisme yang memberi peluang bagi setiap orang di dalam

masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup (Zubaedi, 2009). PBM merupakan wujud dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. (Suharto, 2011) Implikasi PBM terhadap masyarakat adalah:

a. masyarakat diberdayakan,
b. masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuan,
c. masyarakat diberi kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai diri. (Sudira, n.d.)

Jadi, inti dari konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) adalah dari, oleh dan untuk masyarakat (Sihombing, 2001). Ada benang merah antara konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) dengan posisi masjid yang esensinya berasal dari umat, oleh umat dan untuk umat juga. Integrasi antara keduanya memunculkan alternatif model pendidikan yang disebut "Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid" (PMBM).

Model PMBM ini tetap menempatkan masyarakat atau umat sebagai pemegang keputusan dalam segala hal yang itu didasarkan pada asas musyawarah dengan masjid sebagai poros atau pusat pengendalian pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat atau umat. Independensi dan demokratisasi pendidikan ini mendorong model PMBM bebas mengakomodasi berbagai teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (multiple inteligence), belajar sosial (social learning), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam PMBM sebagaimana diterapkan pada PBM.

3. Moderasi Beragama

Secara etimologis, kata 'moderasi' berasal dari Bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti "penguasaan diri" (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata 'moderasi', yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan (belief), moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasa⌧ atau wasa⌧īyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassu⌧ (tengah-tengah), i'tidāl (adil), tawāzun (berimbang), dan khiyaru (terbaik). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wāsi⌧. Dalam bahasa Arab pula, kata wasa⌧īyah diartikan sebagai "pilihan terbaik". Dalam buku ini, kata wasa⌧īyah selanjutnya akan ditulis washatiyah saja.

Lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatarruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna ekstreme, radical, dan excessive dalam bahasa Inggris. Kata extreme juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya". Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai "paling ujung, paling tinggi, dan paling keras".

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata extreme, yaitu al-guluw, dan tasyaddud. Meski kata tasyaddud secara harfiyah tidak disebut dalam al-Quran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata syadīd, syidād, dan asyadd. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari extreme atau tasyaddud (Hanafi [ed.], 2012: 14).

Sikap moderat selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrem; memiliki kecenderungan ke arah dimensi jalan tengah; mempertimbangkan pertimbangan pihak lain. Dari sana, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama.

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antar a dua hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta secara berpasangan: keseimbangan akal dan wahyu, antar a jasmani dan rohani, jasad dan ruh, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antar a keharusan dan kesukarelaan, antar a teks agama dan ijtihad tokoh agama, antar a gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antar a masa lalu dan masa depan.

Selain keseimbangan, prinsip dasar lainnya dalam moderasi adalah sikap adil. Dalam KBBI, kata "adil" diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi (wasathiyah) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu.

Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar mampu mendialogkan keragaman, berinteraksi dengan aneka peradaban, ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga tradisi dan adat istiadat lokal. Kehadiran Islam wasathiyah sangat perlu dan dibutuhkan baik di lingkungan umat Islam sendiri, maupun di tengah pergulatan Islam dengan beragam agama dan sistem dunia lainnya.

Istilah wasathiyah juga dipakai dalam bahasan Arab untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik (khiyaru). Kata 'awsath' bisa dimaknai yang terbaik atau yang paling unggul. Dari makna kata ini, istilah 'ummatan wasatho' yang disematkan pada umat Islam memiliki padanan dengan makna dalam ayat lain yaitu 'khairu ummah' yanag artinya umat yang terbaik.

Untuk konteks Indonesia, moderasi beragama dapat dicirikan ke dalam beberapa indikator moderasi beragama yang mencakup empat hal yaitu: 1) komitmen kebangsaan; setia pada konsensus bangsa Indonesia yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, 2) toleransi; sikap memberi ruang untuk tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, meskipun hal itu berbeda dengan yang kita yakini, 3) anti kekerasan; menolak penyelesaian masalah melalui kekerasan, pengrusakan, persekusi, intimidasi, ataupun teror, 4) Akomodatif terhadap budaya; menerima unsur-unsur kultural yang menjadi

tradisi masyarakat, yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai budaya sebagai tradisi masyarakat di wariskan dari generasi demi generasi, umumnya memiliki integratif yang positif bagi pembangunan.

Norma umum yang ingin dikembangkan dalam moderasi beragama berupa setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik, harus saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (centripetal), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan, makna 'wasatha' adalah 'adil', yaitu sikap tidak memihak atau ditengah di antar a dia kelompok/ golongan yang saling bermusuhan. Sikap di tengah tersebut, bisa dimaknai berada di antar a dua kutub ekstrem (ghuluw). Dari uraian tersebut, bisa dipahami bahwa kata wasathiyan merupakan lawan kata dari ekstrem atau al-guluw, dan tasyaddud.

Moderasi beragama dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Abou El-Fadl yang menyatakan bahwa moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis dan menghargai tradisi-tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian (Chafid Wahyudi, 2011).

Toleransi Aktif

Toleransi dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai suatu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, mengemukakan pandangan sekaligus menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama dan/atau paham masing-masing. Toleransi aktif ini diperlukan untuk mewujudkan harmoni sosial, dengan fondasi berupa modal sosial (social capital), jaringan keterlibatan warga (civic engagement), dan kerja sama(resiprokal) antar warga lintas keyakinan.

Modal sosial (social capital) ini diperlukan sebagai syarat toleransi aktif, misalnya sebagaimana disebutkan oleh Robert Putnam. Ia menyebutkan bahwa semakin kuat jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan komunal antar warga (Putnam, 1993). Senada dengan Putnam, Ashutosh Varshney mengatakan bahwa jaringan kewargaan antar komunitas berupa partisipasi warga dalam kegiatan bersama (civic engagement) dapat mencegah potensi konflik. Varshney membagi kegiatan bersama menjadi bersifat formal (intercommunal association) dan informal (quotidian interaction). Kekokohan organisasi kewargaan merupakan alasan utama kedamaian komunal secara keseluruhan dapat bertahan (Varshney, 2002).

Adapun aspek kerja sama (resiprokal) disinggung oleh Bahrul Hayat (Hayat, 2012) yang menyebutkan bahwa kondisi ideal keharmonisan umat beragama dapat terwujud jika memiliki tiga komponen utama, yakni (1) sikap saling mengakui dan menyadari pluralitas; (2) sikap saling menghormati (toleransi); dan (3) sikap saling bekerja sama (resiprokal).

4. Pandemi

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan semakin merebaknya virus korona. Betapa tidak, setidaknya lebih dari 200 negara hingga kini telah dipaksa untuk berurusan dengan virus yang juga dipanggil SARS-CoV-2 ini. Tercatat, virus yang pertama kali di temukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu ini telah menginfeksi lebih dari 700.000 orang di seluruh dunia, dan menewaskan puluhan ribu di antaranya. Tak mengherankan, jika WHO pun akhirnya menetapkan ini sebagai pandemi global.

Ditetapkannya Virus Korona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang. Dan memang itulah yang terjadi saat ini, dengan belum satu pun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Cabang ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit disebut sebagai epidemiologi.

Dalam kamus epidemiologi, wabah menjadi bagian paling kecil dalam penularan penyakit. Sampai saat ini belum ada kriteria spesifik yang menentukan status pandemi. Ini juga tidak ditentukan oleh jumlah kasus atau kematian yang diakibatkan. Namun setidaknya ada tiga kriteria umum sebuah penyakit dikatakan sebagai pandemi. Pertama, virus dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Kedua, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkontrol. Ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia.

Penetapan status pandemi global ini bukan kali pertama dilakukan. Dari data Centers for Disease Control (CDC), sebuah Lembaga Pemerintahan di Atlanta, Amerika Serikat, ada beberapa wabah virus di masa lalu yang pernah ditetapkan sebagai pandemi. Di antaranya influenza 1918 atau flu Spanyol. Disebabkan oleh virus H1N1 dengan gen asal burung, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan diperkirakan menginfeksi 500 juta orang.

C. Kajian Terdahulu

Masjid juga berfungsi untuk mempersatukan umat Islam (tauhidul ummah) dikarenakan masjid menjadi tempat berkumpul manusia dari berbagai latar belakang etnis, budaya, suku, paham keagamaan bahkan aliran politiknya. Namun beberapa tahun belakangan ini ada data hasil penelitian menunjukkan beberapa masjid terpapar oleh ide dan pandangan bermuatan radikalisme dan intoleran (CSRC, 2019 dan P3M dan Rumah Kebangsaan, 2018).

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, 2017 tentang Peta Penyiaran Keagamaan Islam berbasis Masjid menunjukkan peta dakwah di masjid-masjid di Indonesia cenderung moderat dan menghindari berbagai perdebatan khilafiyah dan ujaran kebencian (hate speech), juga masih pada koridor kebangsaan. Selain itu, juga menemukan beberapa dakwah di masjid disampaikan oleh tokoh agama yang berafiliasi pada ormas radikal. Namun salah satu masjid di Ambon masih terdengar dakwah agama yang mengedepankan ujaran kebencian pada kelompok agama lain. Sementara di Bandung, ada masjid yang menolak kedatangan Ustadz, baik untuk berceramah atau menjadi imam shalat jamaah jika Ustadz dimaksud berasal

dari kelompok atau paham Islam lainnya yang dianggap sesat (Haris Burhani, 2019; 3).

Kekhawatiran berbagai pihak tentang masjid menjadi persemaian paham radikalisme juga tidak tampak. Hanya 6,98% responden mengaku pernah menemukan materi ceramah yang berisi ajakan untuk memusuhi agama dan etnis tertentu, dan hanya 2,03% yang setuju dengan materi tersebut (Dewan Masjid Indonesia).

Penelitian ini dimaksudkan ingin menemukan dan mendeskripsikan masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama yang mencakup aspek; pusat kontemplasi (berfungsi sebagai tempat ``dzikrullah``), pusat ritual (berfungsi sebagai tempat salat), dan pusat kajian (masjid adalah tempat ``qira'ah Alquran``).

Penelitian Ideologi Masjid di Solo dan Jawa Tengah (2005), yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syahid Jakarta. Penelitian kualitatif ini menemukan fakta bahwa mayoritas pengelolaan dan pembinaan masjid sudah dikuasai oleh kalangan Salafi.

Pandangan Masyarakat terhadap Penyiaran/Dakwah Agama (2007), yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, mendapatkan kesimpulan bahwa penyiaran agama dari masing-masing agama dilakukan dengan semangat kebersamaan, toleran, saling hormat-menghormati dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama;

Buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama RI, Tahun 2019 yang intinya adalah Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran

sejauh menyangkut tafsir agama. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seseorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Dikatakan juga bahwa moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara, Sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi ditengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Sikap semacam itulah yang perlu diterapkan dalam berdakwah baik di Masjid maupun dilingkungan luar masjid.

Memberdayakan Rumah Ibadat memakmurkan Umat (2015), yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Penelitian kualitatif ini mendapatkan kesimpulan bahwa rumah ibadat memiliki peran dalam upaya melakukan pemberdayaan umat di masyarakat.

BAB II

MASJID PUSAT PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA PADA MASA PANDEMI PADA 16 KOTA/KABUPATEN

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Bogor dan Masjid Baitul Maghfirul Padabenghar, Babakan Pasar Kota Bogor

Oleh: Kustini & Rahmah Nur Fitriyani

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman (understanding) dan kedalaman informasi dari subjek yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian mengambil subjek para pengurus dan pihak-pihak yang terlibat di masjid raya Bogor. Untuk menggali data, penelitian ini menggunakan tiga teknik penggalian data yaitu, observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pengurus DKM Masjid Raya Bogor dan juga Masjid Baitul Maghfiroh yang terletak di Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah, Kota madya Bogor. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung subjek dan lokasi penelitian. Adapun studi dokumen dilakukan dengan membaca hasil penelitian sebelumnya dan juga dokumen terkait dengan topik ini.

Penelitian ini dilangsungkan di Kota Bogor, yaitu dengan mengambil subjek penelitian para pengurus DKM Masjid Raya Bogor dan pengurus DKM Masjid Baitul Maghfiroh di Kampung Padabenghar, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Adapun pelaksanaan penelitian dari tanggal 1 Juli hingga 12 Juli 2020.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Bogor dulunya dikenal dengan nama Pakuan, ibu kota Kerajaan Pajajaran. Hari jadinya diperingati setiap tanggal 3 Juni, seiring dengan dinobatkannya Prabu Siliwangi pada 3 Juni 1482. Kujang. Senjata khas Kerajaan Pajajaran, lalu dijadikan lambang kota Bogor dan diabadikan menjadi landmark kota dalam bentuk monumen. Salah satu yang terbesar terletak di Jalan Pajajaran.

Bogor (dulu Buitenzorg) pernah berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu sejak Gubernur Jenderal Van Alting (1780). Kota ini pada awalnya dibentuk dengan penguasaan dan pengolahan lahan perkebunan oleh tuan tanah yang akhirnya berkembang setelah dihubungkan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang dibangun mulai 1811 oleh Daendels dan belakangan oleh jalur kereta api (Batavia-Buitenzorg) pada 1873. Artefak fisik kota yang dibangun pada masa kolonial di kota ini masih cukup kuat dikenali, salah satunya adalah istana Bogor (dulu bernama vila Buitenzorg) yang didirikan atas prakarsa Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff. Bangunan ini juga sempat berfungsi sebagai kantor resmi Gubernur Jenderal VOC maupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada akhirnya dijadikan Istana Kepresidenan RI. Halaman istana Buitenzorg tersebut dibangun menjadi Kebun Raya (Botanical Garden) oleh seorang ahli Botani

Jerman yaitu Prof. R.C. Reinwardth dan diresmikan sebagai Kebun Raya Bogor pada tahun 1887.

Luas wilayah Kota Bogor mencapai 11.850 Ha yang terbagi dalam 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Enam (6) kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sereal. Adapun wilayah Kota Bogor dikepung oleh wilayah di Kabupaten Bogor dengan perbatasan masing-masing, wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Ciomas, wilayah timur berbatasan dengan Sukaraja dan Ciawi, wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede serta Kecamatan Sukaraja dan wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijecuk dan Kecamatan Caringin.

Jumlah penduduk Kota Bogor terus mengalami tren peningkatan. Tahun 2010, jumlah penduduk 958.115. Lantas, tahun 2016 melonjak menjadi 1.064.687. Sedangkan total angka sementara terakhir tahun 2017, sebesar 1.081.009. Rata-rata laju pertumbuhannya 1,53 persen. Kota Bogor juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dilihat dari 6 kecamatan, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 12.897 per Km2. Sementara untuk Bogor Selatan sebesar 6,544 per Km2, Bogor Timur sebesar 10,446 per Km2, Bogor Utara sebesar 11,064 Km2, Bogor Barat sebesar 7,302 Km2 dan Tanah Sareal sebesar 12,346 Km2.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, lajunya cenderung terus bertumbuh. Hal ini bisa dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Kota Bogor 2011-2017 yang tercantum dalam buku Bogor Dalam Angka Tahun 2018. Pada

tahun 2013, PDRB rata-rata Rp 22,20 juta dengan pertumbuhan 4,16 persen. Sedangkan 2014 meningkat menjadi Rp 23,12 juta, pertumbuhan 4,19 persen. Adapun jumlah masjid adalah 762 masjid.

Penduduk beragama Islam di Kota Bogor mencapai 994.616 dari total populasi 1.064.687 jiwa. Jika dipersentase, jumlah umat Islam di Kota Bogor mencapai angka sekitar 94 persen dari seluruh populasi penduduk Kota Bogor.

B. Pembahasan

1. Sejarah Masjid Raya Bogor

Sebelum tahun 1965, di Kota Bogor belum terdapat masjid yang lengkap dengan Islamic Centre dan lembaga pendidikannya. Adalah Walikota Bogor Ahmad Syam, seorang perwira menengah militer, menawarkan gagasan untuk membangun masjid yang lengkap dengan fasilitas pendidikan. Gayung bersambut dengan datangnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Departemen Agama.

Awalnya rapat mengarahkan lokasi masjid di Jalan Juanda yang sekarang digunakan sebagai kantor Kejaksaan. Namun karena kurang luas, maka rencana tersebut dipindahkan. Dipilihlah sebuah lokasi di Baranangsiang yang saat itu masih sepi penduduk dan belum terbangun jalan tol serta gedung perkantoran. Kebanyakan, penghuni kawasan ini adalah keturunan Tionghoa. Namun pada akhirnya lokasi yang sekarang ini tetap disepakati dan dimintalah FX Silaban, arsitek yang juga mengarsiteki Masjid Istiqlal untuk membuat rancangan bangunan masjid ini hingga bentuknya sekarang yang memang arsitekturnya sangat mirip dengan Masjid

Istiqlal, Jakarta. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan sendiri oleh Ahmad Syam pada tahun 1970.

Dana awal pembangunan mencapai kurang lebih Rp 1 miliar dan dana tersebut ditanggung berbagai pihak, termasuk potongan Rp 25,00 per bulan dari gaji para PNS Bogor. Bantuan juga diterima dari gubernur Jawa Barat serta dari pemerintah pusat lewat Kepala Biro Proyek-Proyek Bantuan Presiden, Zahid Husein, seorang haji yang saat itu juga memimpin Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) pusat dan berlatar belakang dari kelompok Penghayat Sumarah. Lalu pada tanggal 29 Juni 1979 masjid ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Setelah beroperasi, pengelolaan hal ihwal ibadah (ubudiyah) masjid ini diserahkan kepada Kemenag Kota Bogor.

Kini, Masjid Raya Bogor dimonitor oleh Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Islamic Center-nya versi ICMI khusus untuk Kota Bogor. PPIB merupakan lembaga di bawah Pemkot Bogor. Penyatuan manajemen masjid raya Bogor dengan PPIB terjadi mulai tahun 2004 mengiringi serah terima ketua DKM dari Baratsendjaja kepada Endang Oman. Saat itu juga di bawah pimpinan Walikota Bogor, direncanakan pembangunan menara dan renovasi bangunan lainnya. Atas dasar ini, masjid ini mendapat pantauan khusus dari pihak Walikota Bogor. Paling tidak, dari sisi penganggaran untuk pemeliharaan mendapat porsi khusus dari Pemerintah Kota Bogor. Begitu pula dengan susunan kepengurusan di Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bogor, yang disupervisi oleh Pemkot Bogor.

Selain dari kedua lembaga tersebut, peran Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga sangat kental. Pada sisi model pengelolaan masjid dan juga acuan vertikal pengelolaan masjid kepada DMI, khususnya DMI Kota Bogor. Begitu pula peran Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Bogor yang dalam beberapa aspek ikut mewarnai pengelolaan masjid ini. Tidak ketinggalan pula peran Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor. Kelima lembaga yang memonitor masjid raya ini, tiga institusi yakni Pemkot Bogor, PPIB dan DMI merupakan tiga lembaga yang langsung bersentuhan dengan pengelolaan masjid ini. Ditambah lagi kantor sekretariat PPIB, DMI, dan MUI berada di depan masjid ini.

Mungkin muncul pertanyaan, mengapa masjid ini menyandang status "raya", padahal berlokasi di ibu kota provinsi. Diperoleh keterangan, masjid Raya ini tetap dipertahankan namanya Raya karena secara historis ia menjadi masjid Keresidenan wilayah I yang meliputi Keresidenan Bogor dan Banten. Masjid Raya ini terletak di jantung Kota Bogor, tepatnya tidak jauh dari Terminal Bis Baranangsiang. Oleh karena itu, di Jawa Barat terdapat 2 (dua) masjid Raya, yaitu di Bandung dan di Bogor. Di Kota Bogor sendiri juga memiliki masjid agung, yaitu Masjid Agung Bogor yang terletak di Pasar Anyar. Masjid disebut terakhir ini sekarang masih dalam tahap renovasi.

PPIB sendiri juga cukup unik. Sebagai Islamic Center versi Pemerintah Kota Bogor, lembaga ini menjadikan Kota Bogor secara langsung bersentuhan dengan pengembangan Islam. Sebab secara kebetulan di Bogor banyak dijumpai Islamic Centre yang dikelola masyarakat sendiri, yang banyak kemiripan dengan pesantren sebenarnya. Dengan pendirian PPIB, memberi kesempatan bagi semua kelompok dan mazhab dalam Islam untuk melakukan kegiatan dakwah di Masjid Raya Bogor. Namun, disyaratkan bagi penceramahnya harus menguasai mazhab-nya, dan tidak sepotong-sepotong.

Persoalan literasi jamaah ini menjadi perhatian pengurus DKM Masjid Raya Bogor. Di serambi masjid dapat dijumpai dua rak buku besar yang memajang kitab-kitab turats mengenai kitab Hadits dan juga ensiklopedi tentang Keislaman. Di samping itu, juga ditemukan buku-buku mengenai kesehatan, ilmu fisika dan seterusnya. Buku-buku tersebut merupakan cetakan lama. Bentuk fisik dari buku-buku itu sendiri juga sebagian telah usang.

Masjid ini sekarang menjadi sarana ibadah yang menampung jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari para musafir yang singgah di terminal Baranangsiang, kemudian juga para guru dan siswa dari SMA 2 Bogor, SMA 3 Bogor, serta para pegawai pemerintah dan swasta di sekitar masjid ini.

2. Sejarah Masjid Baitul Maghfiroh

Sekitar 2 kilometer dari Masjid Raya Bogor, terletak di wilayah Kampung Pecinan di Kota Bogor, berdirilah Masjid Baitul Maghfiroh. Masjid ini dikepung oleh hunian yang padat. Menuju masjid ini lebih enak ditempuh dengan jalan kaki dari jalan masuk Jalan Roda II, maupun dari Jalan Suryakencana, seberang Kebon Raya Bogor. Mendengar nama jalan ini, tentu tidak salah jika mengingatkan pembaca pada pusat kuliner Kota Bogor. Bukan hanya itu, jalan ini juga merupakan pintu gerbang menuju kampung pecinan yang didesain Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu muatan historisnya sangat kuat, terkait kebijakan rasialisme ala kolonial.

Pemerintah kolonial membagi lokasi hunian Kota Bogor saat itu dengan tiga enklave, yaitu enklave Eropa yang jejaknya sekarang dapat dijumpai di sekitar Kebon Raya, yaitu Jalan Juanda dan sekitarnya, kemudian Kampung Pecinan yang sekarang berada di Kelurahan Babakan Pasar atau Jalan Surya Kencana dengan diapit

Ciliwung dan Sungai Cipakancilan, serta kampung Arab dan Pribumi di Kawasan Sukahati.

Ketika mengunjungi masjid ini untuk pertama kali, tanggal 2 Juli 2020, tim peneliti berhasil menemui Ketua DKM masjid ini, yaitu Ikhwan Tirtana, yang sehari-hari bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bogor. Ketika menemui tim penelitian, ia ditemani beberapa tokoh penting di masjid ini, antara lain imam masjid, Muhtarom, tokoh pendiri masjid ini disertai bendahara Masjid Cecep dan amil atau marbot masjid, Dudun.

Disebutkan bahwa tanah tempat berdirinya masjid ini dimiliki seorang keturunan Tionghoa bernama Edi Chafik yang telah menjadi muallaf. Luas tanah seharusnya sekitar 300an meter persegi, namun belum seluruhnya tanah tersebut dimiliki masjid karena beberapa meter masih dikuasai penduduk. Kawasan ini dulu sebenarnya pernah menjadi lokasi pabrik sabun dan di sekitar masjid ini dulunya merupakan mess para karyawan pabrik sabun tersebut. Perubahan kota yang demikian cepat, seiring dengan biaya hidup yang tinggi, membuat tanah begitu berharga di sini. Populasi pun semakin padat. Pada akhirnya, hunian pun menjadi padat dan jalan untuk menuju jalan utama hanya berupa gang kecil.

Masjid yang dibangun menjadi bentuknya sekarang tahun 2005 hingga 2007 dengan dana awal swadaya masyarakat bahkan `dikumpulkan melalui kenclengan di Jalan Suryakencana. Saat ini, sumber daya lokal lebih diberdayakan, mulai dari imam, penceramah hingga khatib Jumat. Di masjid ini memperkerjakan 8 orang marbot dengan pengeluaran rutin bulanan untuk keseluruhan marbot berjumlah Rp. 1,2 juta. Dana sejumlah itu dibagi habis untuk seluruh marbot dengan jumlah yang diterima setiap marbot tidak sama. Dana rutin dari masjid diperoleh dari infak masjid setiap

Jumat berkisar pada angka Rp. 300 ribu. Secara pengorganisasian, masjid ini berlindung di bawah payung DMI Kota Bogor.

Mekanisme pemilihan kepengurusan di masjid ini, bahwa pengurus ditunjuk oleh sesepuh warga, yang pemilihannya berdasarkan musyawarah, atas dasar penilaian warga. Oleh karena itu, dalam pemilihan ini sebenarnya melibatkan seluruh warga, setelah terjadi kesepakatan, lalu baru dibuat susunan pengurus dan kemudian dikirim ke DMI Kota Bogor.

3. Upaya Pendidikan Moderasi di Masjid Raya Bogor

Di Masjid Raya Bogor, kegiatan keagamaan yang berlangsung dipantau langsung baik oleh DKM maupun PPIB. Peran DKM dan PPIB dalam mengawasi berlangsungnya kegiatan dakwah di masjid ini sangat jelas terlihat jika melihat pada struktur DKM maupun PPIB. Ketua DKM dan Ketua PPIB adalah orang yang sama. Di atas PPIB, pantauan langsung oleh Pemkot Bogor dalam hal ini Walikota Bogor. Begitu pula, terhadap pengelolaan masjid ini, peran dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bogor juga sangat jelas.

Karena statusnya terbuka untuk umum, di masjid ini terbuka bagi berbagai kalangan paham keislaman dan kelompok usia. Dilihat dari sisi usia misalnya untuk kalangan ibu-ibu dibedakan dengan kalangan perempuan muda milenial. Secara berseloroh, Ketua DKM Masjid Raya Bogor Ade Sarmili mengatakan, “Emak-emak biasanya cukup hanya shalawatan dan ceramah. Sementara kalangan milenial perlu LCD untuk presentasi”.

Pada sisi keterbukaan kepelbagaian paham keagamaan, sebagai bentuk menjaga moderasi paham keislaman, di masjid ini selain memberikan peluang bagi penceramah yang membawa paham keislamannya dengan catatan dengan keutuhan pemahamannya, berlaku pula mekanisme pengawasan dan sortir buku-buku

keagamaan yang masuk dan perlu tidaknya ditayangkan di perpustakaan masjid. Buku-buku yang datang dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat yang disumbangkan ke masjid ini di-tahkik terlebih dahulu oleh PPIB. Hal ini memungkinkan karena PPIB berposisi di atas DKM Masjid Raya.

Figur yang sangat sentral dalam pengelolaan Masjid Raya Bogor ada pada diri Ade Sarmili, yang tidak lain juga Ketua DKM Masjid Raya Bogor, Ketua PPIB serta Ketua DMI Kota Bogor. Di lingkungan Kemenag Kota Bogor sendiri, Ade Sarmili juga menjadi sosok penting karena menjabat sebagai Kasi Bimas Islam di Kemenag Kota Bogor. Beberapa kali tim peneliti untuk menggali informasi dalam penelitian ini sempat menemuinya.

Dirinya mengatakan, pengelolaan masjid di wilayah Kota Bogor dikondisikannya agar para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) tergantung (secara positif) kepada DMI. Kata "tergantung" itu menunjukkan beberapa makna. Pertama, mereka (DKM) perlu pembinaan untuk mengarahkan dan memberikan panduan. Kedua mereka membutuhkan saluran bagaimana agar DKM bisa survive, Karena itu DMI selalu hadir untuk mereka. Ketiga ketika ada persoalan pergantian kepengurusan, ke mana mereka harus merujuk, dan juga apa saja syaratnya. Karena itu, mereka merasa mempunyai tempat untuk mengadu, misalnya termasuk jika ada masalah pemecatan DKM oleh pengurus.

> "Karena itu kalau ada SK DKM sampai ke kami dan pengurus minta dilantik, kami teliti dulu beberapa hal: (1) ada atau tidak berita acara musyawarah pemilihan pengurus DKM; (2) pernyataan tidak ada konflik kepengurusan baik antara pengurus dengan jamaah maupun antar pengurus. Pernyataan tersebut berrmaterai;

(3) bukti presensi/daftar hadir ketika proses pergantian kepengurusan." (Wawancara dengan Ade Sarmili, 6 Juli 2020).

Ade Sarmili meneruskan, beberapa konflik yang dialami DKM antara lain: ada DKM yang dituntut untuk dipecat padahal bukan kesalahan DKM. Persoalannya adalah ketika ada tukang kerja yang di masjid, tukang itu tidak puasa, masyarakat keberatan. Padahal itu bukan kesalahan DKM. "Kita sampaikan bahwa hal itu bukan kesalahan DKM, harus diselesaikan dengan musyawarah", terang Ade Sarmili.

Ia juga mencontohkan keberadaan kasus di masjid Al Muhajirin yang berada di lingkungan masyarakat the have. Di masjid ini, DKM-nya sudah 30 tahun dan tidak bersedia diganti. Masyarakat kemudian mengadu ke DMI bagaimana supaya bisa ada pergantian DKM. Lalu disarankan, agar mereka membuat AD/ART yang menyebutkan masa bakti DKM. Sama halnya juga ada masjid Al Muslimun yang masyarakatnya kalangan the have. Di lingkungan ini tinggal mantan pejabat kepala dinas dan mantan pejabat lainnya. Namun tatkala menyinggung urusan masjid, mereka takluk ke ketua DKM. Oleh sebab itu, akan lebih teratur apabila terdapat kejelasan untuk periodisasi kepengurusan DKM masa bakti 5 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode. Ketika DKM dilantik, jamaah harus hadir. Biasanya sekalian dengan tabligh akbar misalnya (Wawancara dengan Ade Sarmili, Jumat, 3 Juli 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor).

Dalam beberapa sisi, moderasi beragama di masjid ini dijalankan dengan berbagai upaya walaupun tidak secara langsung menyebut hal demikian ini sebagai program moderasi beragama. Khusus menyangkut pengelolaan kegiatan keagamaan yang

menjamin supaya tetap berlangsung moderasi beragama, maka di masjid ini diberlakukan apa yang disebut mimbar kecil, mimbar sedang, dan mimbar besar. Untuk menyebut yang terakhir, mimbar besar, salat Jumat adalah termasuk mimbar besar, dan dalam peristiwa ini jamaah dipaksa harus ada.

Hal demikian ini seperti layaknya penyaringan (screening) yang dilakukan oleh pengurus DKM masjid ini terhadap isi dakwah yang berlangsung di masjid ini. Pertanyaannya adalah bagaimana proses screening itu dilakukan. Disebutkan Ade Sarmili, bahwa proses screening tersebut terjadi secara alami, yaitu masyarakat yang memilih. Meski penceramah terkenal, tetapi karena tidak dikenal jamaah masjid ini, maka yang datang turut mendengarkan hanya sedikit. "Misalnya seorang profesor dari UIN Jakarta, kita undang. Tapi ternyata yang hadir sedikit. Kalau yang kita undang Ustadz di Bogor yang sudah dikenal, yang hadir itu banyak karena jamaah sudah kenal", terang Ade Sarmili.

Pada masa normal sebelum terjadi pandemi COVID-19 di masjid ini rutin diselenggarakan kegiatan pengajian, termasuk menampung pengajian kalangan perempuan yang dibedakan antara kelompok ibu-ibu dan juga kalangan perempuan muda. Dua kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kalangan ibu-ibu di atas 40-an tahun lebih diwarnai dengan gaya kepraktisan dan lebih banyak melafal dan mendengar, seperti membaca shalawat dan ceramah yang berisikan materi yang tidak terlalu berat dan dibumbui banyak humor. Berbeda dengan kalangan ibu-ibu muda yang cenderung milenial dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi multimedia.

Tidak hanya pada sisi materi pengajian dan model pengajian yang diperhatikan oleh pengurus DKM masjid ini. Pengawasan

terhadap tata cara atau amaliyah ibadah di masjid ini juga mendapat perhatian. Hal ini pula yang membuat posisi pemimpin ibadah, imam salat misalnya di masjid ini juga diseleksi dan tidak sembarang memberi tempat pada orang yang belum dikenal latar belakangnya. Salah satu imam rawatib yang menjadi imam tetap di masjid ini, Asep Saefullah, yang menyatakan dirinya telah lama mengenal Ade Sarmili sejak dirinya belajar di jamiyatul quro wal huffadz Bogor. Kemampuannya dalam menguasai beberapa model bacaan Alquran dan seni baca Alquran (qiroah) inilah yang sebenarnya mengantarkannya menjadi imam masjid raya Bogor. Ia pun telah aktif di DMI sejak 1996 bersama dengan Ade Sarmili.

Seiring perjalanan waktu, ia ditarik Ade Sarmili menjadi imam di masjid Agung Pasar Anyar, kemudian pindah ke masjid Al Taqwa Balai Kota Bogor dan sekarang ditempatkan di masjid Raya Bogor. Pengalamannya dulu pernah mengikuti MTQ tingkat Bogor dan sekarang ditunjuk menjadi hakim MTQ tingkat Kota Bogor. Metode belajar Alquran yang sekarang dijalankan menggunakan Iqro, setelah tidak lagi menggunakan metode al Baghdadi.

Saat ini, ia setiap hari datang ke masjid raya untuk bersiap menggantikan (imam badal) jika imam besar berhalangan. Jabatannya staf fungsional di bagian imarah masjid raya bogor. Karena itu ia setiap hari berkantor di Masjid Raya. Peran paling nyata dijalaninya yaitu menjadi imam rawatib, terutama pada masa pandemi ini. Situasi pandemi ini menjadikan imam besar masjid raya berhalangan hadir. Selain aktif di masjid Raya Bogor, Asep Saefullah juga sering diminta menjadi pembaca tilawah al Quran di acara-acara keluarga dan acara-acara pengajian. Dirinya tidak pernah menentukan tarif, karena ia berpandangan bahwa tidak dapat dihargai dengan materi berapa huruf Alquran. Ia hanya minta

dihargai perjalanan dari rumah ke lokasi saja (Wawancara dengan Asep Saefullah, imam Masjid Raya Bogor, 7 Juli 2020)..

Atas apa yang disampaikan Asep selaku imam fungsional di masjid ini, diakui pula oleh Ade Sarmili bahwa selama ini menentukan orang yang tepat merupakan salah satu strateginya mengembangkan dakwah. Untuk hal ini Ade Sarmili menuturkan,

"Ruang public apa pun di Bogor, kita distribusikan kader atau orang kita. Kalau belum ada yang mampu saya masuk duluan, untuk memberi jalan. Saya buka jalan dulu, jadi tameng. Ketikan ruang atau jalan sudah terbuka, saya berikan ke kader. Pertama ia secara kultur sudah biasa. Kedua, anatomi organisasi dia harus sudah paham. Dengan jalan itu saya berharap semua kader punya peran, dan masyarakat maupun Pemda melihat kontribusi kader kitaz" (Wawancara tanggal 3 Juli 2020).

Selain itu, di masjid ini juga terjadwal pengajian dan khatib dari berbagai spesialisasi serta latar belakang institusi. Misalnya khatib untuk tema wawasan multikultural dan relasi antar umat beragama diisi oleh Ustadz Kyai Hasbullah pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Bantar Kemang Kota Bogor. Cara lain yang dilakukan pengurus DKM Masjid Raya Bogor dalam mengantisipasi adanya kelompok yang memanfaatkan keberadaan masjid raya sebagai masjid moderat adalah dengan melarang diadakannya penggalangan dana oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di masjid ini.

Kegiatan keagamaan berbagai ormas Islam diperbolehkan, hanya saja dilarang untuk mengumpulkan dana. Proses kegiatan itu pun dipantau. Pernah suatu ketika kegiatan pengajian kemudian dilakukan pengumpulan dana, pihak DKM kemudian memutuskan aliran listrik agar sound systemnya tidak menyala. Selesai acara,

dana yang telah terkumpul tersebut kemudian ditahan oleh pengurus DKM dan kemudian dijelaskan ketentuan pelarangan penggalangan dana tersebut. Namun, akhirnya dana tersebut dikembalikan kepada pihak penyelenggara.

4. Pendidikan Moderasi di Masjid Baitul Maghfiroh

Sebagai masjid yang dimiliki oleh masyarakat setempat, tataran moderasi beragama di Masjid Baitul Maghfiroh dilakukan dengan cara selektif menggunakan jasa penceramah dan khatib masjid dari luar kawasan. Moderasi mereka diterapkan dengan cara membatasi pengaruh paham dari luar dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayah sekitar masjid. Hanya dalam situasi tertentu, masjid mengundang muballigh atau penceramah dari luar kampung Padabenghar dan sekitarnya, misalnya dari Majelis Ikhya di luar kecamatan. Terbatasnya orang luar dalam mengisi momen keagamaan di masjid ini menjadi cara yang ditempuh masjid ini untuk membentengi dari pengaruh paham yang dianggap tidak sesuai dengan garis pemerintah.

Tokoh utama yang dianggap kharismatik di masjid ini adalah Juwaini, eks Anggota DPRD Bogor. Ia alumnus sebuah pesantren, dan menamatkan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun (UIK). Ustadz ini menulis sendiri bahan ceramahnya dengan huruf pegon yang dibumbui ayat Alquran dan Hadits.

> "Pak Haji Juwaeni yang kita anggap sebagai tokoh ulama yang kita rujuk dalam segala hal. Memilih imam / khatib atas rekomendasi beliau, sekaligus beliau sebagai pengajar setiap malam Kamis. Beliau tokoh masyarakat sini, pensiunan PNS, mantan DPRD Bogor. Beliau dulu juga di MUI, tinggal di dekat sini. Usia sudah di atas 70an, dalam

keadaan sakit. Satu-satunya ulama asli sini. Kami sempat khawatir karena beliau sudah sakit2an begitu juga dengan Ustadz Muhtarom. Ini lampu kuning buat kami, karena belum ada pembinaan kader Ustadz muda.

Selama ini materi lebih banyak permintaan dari jamaah. Ustadz, minggu ini maunya materi ini (fikih, misalnya), kalau materinya belum selesai dari A-Z maka akan dibahas terus sampai selesai, baru beralih ke materi yang lain. Sayangnya, selama ini memang belum ada pengajian khusus seperti Al-Qur'an itu belum ada, baru pengajian biasa yang malam Kamis dan Sabtu, kita berniat memanggil Ustadz khusus mengajarkan Al Quran (Wawancara dengan Dudung, amil dan marbot masjid Baitul Maghfiroh, 5 Juli 2020).

Namun begitu, pengurus Masjid Baitul Maghfiroh, sekretaris DKM Hendy dan Penasihat DKM Zainal Abidin, mengaku belum pernah kerja sama dengan kalangan non muslim. Sebenarnya, seperti disinggung di atas, tidak jauh dari masjid ini didapati komunitas Tionghoa yang menganut agama selain Islam. Tidak jauh dari masjid ini bahkan terdapat setidaknya dua Vihara. Dalam peristiwa tertentu seperti pada saat Imlek dan Cap Go Meh, masyarakat Tionghoa yang non muslim ternyata lebih memilih aparat RT/RW untuk bekerja sama, dalam bentuk pembagian kupon bantuan misalnya. Pihak masjid tidak pernah dilibatkan, walaupun praktiknya kupon itu pun terdistribusikan ke warga jamaah masjid Baitul Maghfiroh. Pada saatnya waktu Cap Go Meh, banyak orang Islam (berjilbab) ikut mengantre pembagian sumbangan di klenteng. Begitu pula pada saat pembagian sembako pada Bulan Ramadhan, tempat distribusi itu di Vihara dan bukan di masjid ini (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Situasi seperti ini sebenarnya kurang menyenangkan bagi sebagian pengurus DKM masjid ini. Namun apa boleh buat, di dekat wilayah ini dijadikan area cagar budaya dan pariwisata budaya oleh pemerintah daerah.

"Jangankan orang lokal, kan Walikota yang memperkenalkan mereka, katanya kan unsur Budaya. Kita sih ga mau persoalkan masalah etnis, tapi memang pribumi kita agak tersingkir (yang jualan di pasar) semenjak ada keputusan Walikota tentang tata kota yang lebih menonjolkan etnis mereka, termasuk keberadaan lampion di gang-gang dan sebagainya. Padahal kita Kota Bogor yang terkenal dengan pasundannya. Kalau bicara politik, takutnya masa depannya dikuasai oleh Non Muslim. Budaya mereka sangat menonjol dari segi fisik. Ada juga organisasi Kokolot Bogor yang menonjolkan Kesundaan. Herannya orang orang MUI dan DPRD Bogornya pada diem saja. Kita miris pada kondisi saat ini, mereka lebih menguasai ekonomi. Pedagang-pedagang lokal dijagain setiap saat, dengan rezim saat ini mereka lebih berkuasa" (Wawancara tanggal 5 Juli 2020).

Ringkasnya, pada level akidah dan agama, mereka tidak pernah bekerja sama. Bahkan terjadi kontestasi dan kecurigaan terpendam seperti tersebut di atas. Namun pada level muamalah, mereka sedapat saling bekerja sama. Misalnya perniagaan di pasar. Begitu pula dalam suasana kasual kehidupan sehari-hari. Malah mereka heran sebab kalangan Non muslim dengan mudahnya mengucapkan kata-kata hamdalah, insya Allah dan seterusnya kepada Muslim. Sementara mereka tetap berkeyakinan non Muslim. Hal ini yang menyebabkan mereka masih menghargai non Muslim di sekitar mereka dan menepis perasaan tidak senang sebab keberadaan mereka kurang dianggap.

Dalam hati kecil sebagian pengurus DKM masjid ini, mereka sebetulnya keberatan dengan penambatan cagar budaya yang dicanangkan Pemkot Kota Bogor yang faktanya lebih memperhatikan budaya Tionghoa dan meminggirkan budaya lokal, Sunda Bogor. Mereka tidak berani berkata terus terang, sebab pemerintah Bogor di bawah Walikota Bima Arya memberlakukan cagar budaya di wilayah sekitar, seperti di Pulo Geulis.

5. Moderasi dan Sikap Masjid Terhadap COVID-19

a. Masjid Raya Bogor

Datangnya pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kegiatan ibadah di Masjid Raya Bogor. DKM masjid ini mengikuti anjuran yang dikeluarkan MUI maupun DMI untuk mengadakan salat dan kegiatan ibadah lainnya di rumah. Karena itu pun selama lebih kurang 1,bulan masjid ini tidak mengadakan kegiatan ibadah secara terbuka.

Ketika idul fitri ada sekitar 30% masjid di Kota Bogor tetap melakukan shalat idul fitri di masjid. Akan hal ini, Ade Sarmili menuturkan,

> "Kami dari DMI memberikan pemahaman tentang pentingnya tidak melakukan shalat idul fitri di masjid supaya tidak terjadi kerumuman. Sementara itu selama masa PSBB, sebanyak 80% masjid telah menghentikan seluruh kegiatannya" (Wawancara dengan Ade Sarmili, 9 Juli 2020).

Dalam mengawal fatwa MUI dan juga DMI, Ade Sarmili mengaku terus melakukan sosialisasi terkait aturan beribadah di rumah ibadat (masjid). Alasannya, jika ada yang pingsan di mall, di pasar atau di aula itu tidak dipermasalahkan. Akan tetapi jika

ada yang pingsan di masjid maka isunya akan panjang, dan bisa dipolitisasi. Padahal sesungguhnya yang harus dikhawatirkan bukan masjid, tetapi tempat ibadah agama lain seperti gereja, atau pura, bukan masjid. Hal ini karena jamaah gereja datang dari mana-mana. Mereka juga relatif agak berat untuk mengikuti protokol kesehatan, karena ada tradisi cipika-cipiki. Makanya menurut Ade Sarmili, kluster pertama di Kota Bogor adalah kluster jamaah GPIB yang melakukan kegiatan di Aston. Sementara jamaah masjid kebanyakan dari masyarakat sekitar. Jadi sangat mudah mendeteksi ketika ada yang sakit

Penolakan dari tokoh agama ulama pun banyak juga karena mereka menyatakan bahwa kasus COVID-19 itu daruratnya tidak nyata. Dari aspek bahwa ini wabah yang harus dihindari, tidak terlihat. Akan tetapi pelaksanaan shalat Jumat hakikat, kelihatan wajibnya dan wabah tidak kelihatan kecuali sudah tergeletak. "Kita tetap meyakinkan bahwa boleh jadi orang itu sehat, kuat tanpa gejala, imunnya kuat tapi dia carrier dan bisa menularkan virus ke yang lain misalnya ke ibunya yang lansia", tandas Ade Sarmili.

Lebih lanjut Ade Sarmili menuturkan,

> "Ketika mau nutup masjid banyak juga yang gak setuju. Kami konsultasi dengan para ulama di kampong atau di masjid lain. Masjid Raya ini kan etalase bagi masyarakat Bogor. Dari DMI tidak pernah bikin aturan. Surat perintah dari MUI dan Kemenag sudah jelas. Tapi tiap masjid melakukan maklumat. (contoh maklumat ada di foto lampiran)" (Wawancara dengan Ade Sarmili)

Sebelum pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masjid raya Bogor telah diterapkan protokol kesehatan, dengan cara mengukur suhu tubuh misalnya. Jadi ketika PSBB, anjuran

protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 tinggal meneruskan.

Sampai sejauh ini, kegiatan keagamaan rutin di masjid masih belum ada rencana untuk dimulai. Disebutkan bahwa pihak DKM Masjid Raya masih menunggu wilayah ini menjadi zona hijau. Selama COVID-19 ini kajian di masjid berhenti, tetapi kajian melalui zoom tetap berjalan. Pada kegiatan salat Jumat, physical distancing selalu dilaksanakan. Tempat yang tidak diizinkan untuk diduduki diberi tanda silang. Khutbah Jumat pada saat penelitian ini berlangsung pun di masjid ini berjalan secara singkat, mengikuti anjuran MUI dan DMI.

Sebagai masjid rujukan di Kota Bogor, realisasi antisipasi penyebaran COVID-19 juga terus dilaksanakan dengan cara penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan masjid. Begitu pula bagi para pengunjung, ketika memasuki gerbang masjid dicegat oleh petugas untuk diukur suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun. Di bagian sisi kiri masjid tersedia tempat cuci tangan, lengkap dengan kran dan sabun cair. Tepat di pintu masuk masjid juga dipasang bilik disinfektan yang menyemburkan cairan disinfektan begitu pengunjung melewati bilik yang tertutup plastik tersebut.

b. Masjid Baitul Maghfiroh Padabenghar, Babakan Pasar

Antisipasi penyebaran COVID-19 di masjid Baitul Maghfiroh, Babakan Pasar, Bogor juga dilakukan. Paling tidak masjid ini tidak menyelenggarakan salat Jumat selama 6 kali. Selain itu, pihak DKM juga melaksanakan anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

"Kami mencoba mengikuti anjuran pemerintah selama pandemi ini, yaitu sajadah sendiri, penyediaan hand sanitizer dll. Paling yang belum bisa disiplin adalah penggunaan masker, tapi

berdasarkan masukan Ketua DKM dan Pak Haji Juwaeni pengajian belum lanjut karena masih pandemi. Salat Jumat telah dilaksanakan setelah koordinasi dengan pihak Kelurahan. Kita juga cari informasi ke Gugus Tugas Kota terkait perkembangan status zona pandemi. Shalat Jumat dibuka seminggu sebelum Lebaran" (Wawancara tanggal 5 Juli 2020)

Menurut DKM Baitul Maghfiroh, pihaknya juga menerima pembagian masker sebanyak 300 buah. Namun, masker tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar, bukan khusus ke jemaat. Masker tersebut dibagikan ke tiap-tiap RT.

Pada saat penelitian ini, ditemukan protokol COVID-19 telah dilakukan dengan penjarakan jamaah di dalam masjid dengan diberi tanda silang. Jarak antar jamaah lebih kurang 1 meter. Begitu pula di depan pintu masuk masjid juga disediakan hand sanitizer.

C. Simpulan

Fungsi masjid sebagai pendidikan moderasi pada dua masjid yang diteliti tidak dilaksanakan secara bulat sebagai model moderasi beragama, melainkan secara tersirat dipraktikkan untuk menjaga agar masjid mereka tidak mengundang kontroversi. Di Masjid Raya Bogor, kegiatan keagamaan yang berlangsung dipantau langsung baik oleh DKM maupun PPIB. Struktur DKM maupun PPIB. Ketua DKM dan Ketua PPIB adalah orang yang sama. Di atas PPIB, pantauan langsung oleh Pemkot Bogor dalam hal ini Walikota Bogor. Masjid ini juga memberikan peluang bagi penceramah yang membawa paham keislamannya dengan catatan dengan keutuhan pemahamannya, berlaku pula mekanisme pengawasan dan sortir buku-buku keagamaan yang masuk dan perlu tidaknya ditayangkan di perpustakaan masjid.

Selebihnya, penyaringan (screening) yang dilakukan oleh pengurus DKM masjid ini terhadap isi dakwah yang berlangsung di masjid ini. Proses screening tersebut terjadi secara alami, yaitu masyarakat yang memilih. Meski penceramah terkenal, tetapi karena tidak dikenal jamaah masjid ini, maka yang datang turut mendengarkan hanya sedikit.

Adapun pada Masjid Baitul Maghfiroh, fungsi masjid sebagai pendidikan moderasi beragama secara tidak langsung diterapkan dengan cara membatasi pengaruh paham dari luar dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayah sekitar masjid. Hanya dalam situasi tertentu, masjid mengundang muballigh atau penceramah dari luar kampung Padabenghar dan sekitarnya, misalnya dari Majelis Ikhya di luar kecamatan. Terbatasnya orang luar dalam mengisi momen keagamaan di masjid ini menjadi cara yang ditempuh masjid ini untuk membentengi dari pengaruh paham yang dianggap tidak sesuai dengan garis pemerintah.

Adapun di masa pandemi COVID-19, dua masjid tersebut secara ketat mengikuti protokol antisipasi penyebarluasan virus seperti yang telah disampaikan pemerintah. Beberapa minggu tidak dilaksanakan salat Jumat, tidak menyelenggarakan salat tarawih secara terbuka dan juga dilakukan penjarakan antar jemaat.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Jami' Jatisari Kota Semarang

Oleh: Setyo Boedi Oetomo

Sasaran penelitian ini ada dua masjid, yaitu Masjid Raya Baiturrahman Semarang dan Masjid Jami' Jatisari Semarang. Pemilihan dua masjid ini untuk mendapatkan gambaran dari masjid yang berbeda dan dari kondisi paparan COVID-19 yang berbeda.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid utama tingkat Provinsi (Raya), berada di pusat kota, lingkungan sekitarnya perkantoran dan pertokoan (mal), pada masa pandemi COVID-19 berada di zona merah. Masjid Raya (MR) Baiturrahman Semarang berada di pusat kota dan diresmikan sejak tahun 1974. Pengurusnya adalah para tokoh agama tingkat Jawa Tengah dari ormas keagamaan mainstreams (NU dan Muhammadiyah strukturalis). Ritus amaliyah cenderung mengikuti NU, tetapi tidak memiliki basis jamaah salat rawatib yang kuat.

Masjid Jami' Jatisari merupakan masjid utama di tingkat Kelurahan (Jami'), lokasinya ada di pinggiran kota dalam area perumahan yang besar, berada di zona 'putih'/'hijau' pada masa pandemi COVID-19. Masjid Jami' (MJ) Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang berada di ujung barat daya berbatasan dengan Kabupaten Kendal. MJ Jatisari dibangun sejak tahun 2011 s/d 2016 oleh warga Perumahan Jatisari, di mana pada saat itu setiap RW sudah memiliki masjid/musholla. Pengurus harian saat ini gabungan dari warga NU, Muhammadiyah, dan Salafi (non struktural) dengan latar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta. Dewan pembinanya juga gabungan dari NU, Muhammadiyah, dan Salafi. Basis jamaah salat rawatibnya kuat (banyak),

A. Temuan

1. Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Baiturrahman Semarang (MRBS)

Pendidikan moderasi beragama di MRBS pada aspek idarah antara lain: 1) MRBS yang dikelola oleh Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) pengurusnya dominan dari tokoh-tokoh NU dan beberapa dari Muhammadiyah, baik dari perguruan tinggi, pondok pesantren, perwakilan pemerintah, unsur masyarakat lainnya; 2) Takmir MRBS aktif di FKUB Jawa Tengah, FKUB Kota Semarang, Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah; 3) Imam salat rawatib, Jumat, Ied diseleksi dengan standar NU, diutamakan hafidz Qur'an; 4) Pengurus menolak kelompok intoleran/pro khilafah menyelenggarakan kegiatan di MRBS; 5) Pengurus MRBS bersama pengurus Masjid Agung Semarang-Kauman (MAS) dan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) membuat MoU menjadi pelopor

melaksanakan kebijakan pemerintah menghadapi situasi darurat COVID-19 dengan tidak melaksanakan salat Jumat pada tanggal 27 Maret 2020; 6) Struktur bangunan masjid mengandung nilai sejarah kebangsaan, terkait dengan tinggi menara (45m) bermakna tahun Kemerdekaan RI 1945, ujung atap masjid (biasanya 'kubah') berupa bintang 5 sudut bermakna Pancasila dan Rukun Islam, dan berada di dekat Lapangan Pancasila Semarang.

Pendidikan moderasi beragama di MRBS pada aspek imarah antara lain: 1) MRBS aktif menyelenggarakan PHBI dan tradisi keagamaan Islam di Jawa, seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, dll; 2) Menyelenggarakan Tabligh Akbar bersama Kyai-kyai yang moderat; 3) Menyelenggarakan kajian umum terkait Islam dan kebangsaan untuk pemuda muslim: Gambang Syafa'at bersama Cak Nun (setiap tanggal 25), Ngaji Budaya Bersama Prie GS (setiap Minggu Wage, selapanan), Ngaji Nom-noman (car free day) KH. Anashom, M.Hum & tim; 4) Beberapa kajian (taklim) untuk pemuda/remaja mengangkat tema Islam dan kebangsaan; 5) Remas IKAMABA aktif dalam kegiatan sosial bersama pemuda dari rumah ibadah agama lain; 6) ATM beras untuk kaum duafa dari latar paham keagamaan apa pun.

Pendidikan moderasi beragama di MRBS pada aspek ri'ayah antara lain: 1) Responsif protokol COVID-19 dengan melaksanakan physical distancing dalam shaf salat, lipat karpet, memasang keran untuk hand washing dan penyiapan hand sanitizer, cek temperature (Thermo Gun), wajib masker, pasang banner protokol kesehatan melawan COVID-19; 2) Aula dan lapangan parkir terbuka untuk umum lintas agama; 3) Masjid terbuka untuk beribadah umat Islam dari kelompok/paham apa pun.

2. Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Jami' Jatisari Mijen (MJJM)

Pendidikan moderasi beragama di MJJM pada aspek idarah antara lain: 1) Struktur pengurus harian berasal dari berbagai paham keagamaan dengan dari kelompok NU, Muhammadiyah, Salafi (jamaah biasa, non struktural); 2) Penasihat berasal dari tokoh-tokoh/ulama NU, Muhammadiyah, Salafi; 3) Imam salat rawatib daan muadzin disepakati dari NU, sedangkan imam salat Jumat dan salat Ied berdasar hasil rapat pengurus (bisa dari NU, MH, Salafi); 4) Pengurus melarang Ustadz yang ceramahnya menyerang kelompok Islam lain (beda paham) melakukan ceramah di MJJM;

Pendidikan moderasi beragama di MJJM pada aspek imarah antara lain: 1) Ada konsensus salat rawatib imamnya menggunakan amaliyah NU (subuh dengan qunut), dzikir bakda salat dengan sir, dan tidak ada puji-pujian sebelum iqamah; 2) Ada konsensus khotib dan imam salat Jumat sesuai dengan amaliyah masing-masing, tetapi muadzin dengan tradisi NU; 3) MJJM menyelenggarakan PHBI/tradisi keagamaan Islam Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, dll; 4) MJJM menyelenggarakan kajian terbuka (tabligh akbar) melibatkan penceramah nasional dari berbagai latar paham keagamaan (Ust. Yusuf Mansur, Ust. Abdul Shomad, Aa' Gym, Sech Ali Jaber, Gus Mus, Gus Muwafiq, KH Syarif Rahmad, Kang Abiq, Bunda Astri Ivo, Peggy MS); 5) Berbagai majelis taklim dengan karakter paham keagamaan Islam masing-masing (Tradisionalis: Majelis Sholawat, Badko TPQ Mijen, Al Hikam Ibnu Athoillah, Rothibul Hadad, Jami'atul Mubalighin (JAMMU), Kajian Tasawuf untuk lansia - Prof. Dr. Amin Syukur, KajianTafsir&Fiqh kontemp; Puritan: Muhammadiyah KISS, MT Al Hikmah Mijen, Kajian Dhuha – PP Baitussalam, Al Barokah – PP Baitussalam, KPMI,

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia), 6) Membina UMK 25 unit termasuk ada yang non muslim; 7) Mobil Ambulan untuk umum/lintas agama gratis (kota) dan hanya ganti BBM untuk luar kota, sopir dari Babinkamtibmas Polsek Mijen; 8) Klinik kesehatan untuk umum; 9) Bantuan Sembako di masa pandemi COVID-19 untuk umum; 10) Bantuan korban bencana lintas propinsi (ACT/TTB) untuk umum; 11) Kegiatan seni, olah raga, dan kajian untuk sahabat disabilitas (tuna netra).

Pendidikan moderasi beragama di MJJM pada aspek ri'ayah antara lain: 1) Membuat sumur dan kamar mandi untuk umum warga sekitar jika air PDAM macet; 2) Menyediakan kamar transit untuk musafir; 3) Masjid selalu terbuka untuk siapa saja; 4) Responsif protokol COVID-19 dengan melaksanakan physical distancing dalam shaf salat, lipat karpet, memasang keran untuk hand washing dan penyiapan hand sanitizer, cek temperature (Thermo Gun), wajib masker, pasang banner protokol kesehatan melawan COVID-19.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Moderasi Beragama di MRBS

Pendidikan moderasi beragama di MRBS berjalan dengan baik, sudah mapan dan dikenal sebagai masjid yang menerima jamaah dari kelompok mana pun. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan ada faktor pendukung yang bisa dikembangkan ada faktor penghambat yang perlu direduksi.

Faktor pendukung pendidikan moderasi beragama di MRBS antara lain: 1) Pengelolanya para tokoh-tokoh moderat dari warga NU (mayoritas) dan sedikit Muhammadiyah; 2) Remaja Masjid (IKAMABA) aktif menyelenggarakan kegiatan kajian Islam dan kebangsaan; 3) Mendapat dukungan politis dan dana dari Pemprov

Jawa Tengah; 4) Memiliki lembaga pendidikan formal (PAUD, TK, SD) sebagai tempat persemaian moderasi beragama; 5) Lokasi yang strategis di tengah kota dan dekat Lapangan Pancasila.

Faktor penghambat pendidikan moderasi beragama di MRBS antara lain: 1) Sejarah pendiri masjid yang dominan dari NU membatasi ruang bagi kelompok lain untuk terlibat di kepengurusan masjid; 2) Pembatasan akses bagi kelompok/majelis taklim non-NU untuk melakukan kajian di MRBS; 3) Stigma umum MRBS sebagai masjid NU; 4) MRBS tidak memiliki basis jamaah salat rawatib.

4. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan moderasi beragama di MJJM

Faktor pendukung pendidikan moderasi beragama di MJJM antara lain: 1) keragaman paham keagamaan di MJJM menjadi arena interaksi lintas kelompok untuk saling memahami; 2) Pembina MJJM terdiri dari figur moderat dan tokoh di kelompoknya; 3) Pengurus harian memiliki otoritas untuk menyeleksi ustadz/kyai yang akan mengisi di MJJM dan penentuannya berdasar rapat pengurus; 4) Dukungan dari aparat Polri, sebagai sopir ambulans MJJM.

Faktor penghambat pendidikan moderasi beragama di MJJM antara lain: 1) Masih ada kecurigaan dari tokoh NU di luar MJJS terhadap aktivitas kelompok Salafi; 2) Stigma umum MJJM sebagai titik pengembangan kelompok Islam garis keras/intoleran/pro khilafah; 3) Aktivitas keagamaan masing-masing kelompok masih terpisah-pisah, masih sedikit yang dilakukan kolaboratif; 4) Dukungan dana masih dominan dari jamaah, dan mayoritas jamaah dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah

5. Strategi Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di MRBS

Strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama di MRBS antara lain: 1) Melakukan seleksi calon pengurus dari sisi kompetensi, visi kebangsaan, dan track record-nya di masyarakat; 2) Menghindari calon pengurus yang tidak sejalan dengan visi-misi yayasan; 3) Penempatan pengurus dengan memperhatikan 'right man on the right job'; 4)

Takmir MRBS berkomitmen menjaga marwah masjid dalam rangka membantu pemerintah mengelola umat dan menjadi contoh masjid di Jawa Tengah; 5) Komitmen pengurus untuk meneruskan visi para pendiri bahwa MRBS mengembangkan Islam yang tengah (washatiyah) agar jamaah tetap tidak bingung; 6) Komitmen pengurus untuk mengedepankan Islam rahmatan lil 'alamin, menerima pihak lain yang berbeda, tidak saling ganggu, tidak memiliki sikap mimikri seperti bunglon, dan bisa menjadi titik temu kebersamaan; 7) Taat dan mendukung kebijakan pemerintah, seperti menjadi pionir dalam menjalankan Fatwa MUI 14/2020.

6. Strategi Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di MJJM

Strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama di MJJM antara lain: 1) Komitmen pengurus/Takmir MJJM menjadi pelayan bagi jamaah dari semua kelompok; 2) Komitmen pengurus/ Takmir bahwa MJJM tetap netral dan tidak mengikuti salah satu kelompok Islam tertentu; 3) Komitmen pengurus/Takmir MJJM tidak akan menjadi pengurus ormas keagamaan tertentu; 4) Melarang ustadz/penceramah dan jamaah melakukan celaan atau ujaran kebencian terhadap ritual amaliyah dan paham keagamaan yang diikuti kelompok lain; 5) Menghormati kelompok dengan

paham keagamaan apa pun selama kelompok itu tidak dilarang pemerintah dengan tidak melarang mereka berdakwah di MJJM; 6) Meminimalisasi kelompok garis keras keluar dari masjid, dan bebas berbicara/pengajian di rumah-rumah anggotanya karena berbahaya; 7) Dalam membuat video berisi konten keagamaan, pengurus mewajibkan ada bendera merah putih di meja penceramah; 8) Mengikuti kebijakan pemerintah, misalnya dalam penanggulangan COVID-19, meskipun masih dalam kawasan hijau (putih) tetapi tetap mengikuti aturan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan.

B. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa MRBS dan MJJM mematuhi kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa pengurus kedua masjid memberikan contoh kepada jamaah pentingnya taat kepada pemimpin negara/pemerintah (ulil amri).

Gambaran model pendidikan moderasi beragama di MRBS dan MJJM di atas menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak bisa diseragamkan, karena konteks sosial dan kondisi di dalam masjid tidak semua sama. Penyeragaman pola pendidikan moderasi beragama (standardisasi) bisa berakibat kontraproduktif bagi harmoni masyarakat. Karena hal itu akan memungkinkan kelompok yang tidak signifikan dalam suatu masyarakat akan menuntut representasi kelompoknya di dalam kepengurusan masjid.

Praktik di MRBS yang selama ini sudah mapan dan dikenal sebagai basis pengembangan Islam wasahatiyah, tetapi di sisi lain tidak menerima kehadiran kelompok lain (notabene intoleran dan pro khilafah). Apakah hal tersebut menjadikan MRBS tidak

moderat? Apakah standar idarah untuk struktur pengurus dalam SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid akan mendorong agar masjid seperti MRBS ini harus mengikuti standar itu? Hal ini rasanya perlu didiskusikan lebih lanjut.

Masjid-masjid yang dibangun masyarakat yang heterogen rawan terjadi konflik dan ini menjadi kondisi penunjang mudahnya penyusupan kelompok-kelompok intoleran. Hal ini pernah dialami MJJM. Best practice di MJJM bisa menjadi inspirasi bagaimana meramu keragaman paham keagamaan yang ada kemudian masing-masing pihak menyadari pentingnya berbagai ruang dan menghargai pihak lain. Kesadaran tersebut mendorong mereka membuat konsensus bersama bahwa MJJM harus tetap di tengah, tidak cenderung ke NU, Muhammadiyah, Salafi 'A', Salafi 'B', dan lainnya. Fenomena ini seperti yang disampaikan Dahrendorf bahwa konflik akan menggiring munculnya konsensus.

Stigma negatif MJJM sebagai salah satu simpul pengembangan Islam garis keras justru menjadikan spirit untuk menguatkan integrasi internal. Kedatangan ulama Salafi dari STIDIS Jember tahun 2016 yang menguatkan stigma tersebut. Sehingga relasi dengan PP Darussalam (ditengarai berafiliasi pada PP Al Mukmin Ngruki) dan kerja sama pengembangan ekonomi umat dengan KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) yang berafiliasi pada kelompok Salafi (Sururiyun) semakin menguatkan pandangan negatif pihak luar. Kondisi inilah yang mendorong para pengurus bertekad membuktikan bahwa MJJM memosisikan diri di tengah di antar a keragaman jamaah. Sehingga sampai sekarang moderasi beragama yang ada MJJM masih terus berproses, dan proses tersebut pada jalan yang mengarah pada kebaikan bersama. Peneliti

optimis suatu saat MJJM akan menjadi model pendidikan moderasi beragama yang bisa jadi inspirasi masjid lain yang mengalami kondisi serupa.

Masyarakat, khususnya jamaah di MJJM, secara tidak langsung telah mendapatkan pendidikan moderasi beragama dari praktik yang mereka lakukan sendiri. Inilah bentuk pendidikan non formal yang ada di masyarakat yang telah mengajarkan kepada mereka untuk saling menghargai, menerima, dan memahami perbedaan. Dengan bersatunya umat di MJJM, terbukti kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah semakin baik, bahkan warga non muslim pun mendapatkan manfaat dari keberadaan MJJM.

C. Simpulan

Model pendidikan moderasi beragama di MRBS dan MJJM memiliki karakteristik yang berbeda, masing-masing dalam mengembangkan Islam wasathiyah berangkat dari kondisi yang berbeda. MRBS mengembangkan model moderasi beragama dari komposisi jamaah yang relatif homogen dan sudah mapan cukup lama sebelum perkembangan gerakan Islam transnasional yang cenderung intoleran mengalami eskalasi. MJJM mengembangkan model moderasi beragama berangkat dari komposisi jamaah yang sangat heterogen dan ada kontestasi antar kelompok. Konsensus yang dibuat pengurus MJJM menjadi pijakan proses moderasi beragama bagi pengurus, jamaah, dan Ustadz yang masuk ke MJJM
.

Model moderasi di MRBS adalah untuk masjid yang sudah mapan dengan tipologi umat Islam yang homogen. Model di MRBS rawan menimbulkan masalah ketika dikembangkan di daerah yang komposisi antar kelompok Islam seimbang. Model pendidikan

moderasi beragama di MJJS bisa menjadi referensi bagi stakeholder terkait dalam membangun harmoni antar kelompok Islam pada masjid dengan komposisi jamaah heterogen.

Praktik baik (best practice) dari MBRS dan MJJM bisa menjadi sumber inspirasi dalam membuat model masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Model di MRBS tidak bisa diterapkan pada masjid yang baru berkembang dengan struktur jamaah seperti yang ada di MJJM. Demikian pula, model di MJJM tidak bisa serta merta diterapkan pada masjid yang sudah mapan semacam MRBS.

D. Rekomendasi

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pihak terkait:

a. Pengurus MRBS perlu memberi ruang lebih luas kepada tokoh agama moderat di luar NU untuk terlibat dalam kepengurusan masjid. Dan kegiatan keagamaan di MRBS.

b. Pengurus MJJM perlu meningkatkan intensitas pertemuan/ komunikasi antar Ustadz dari berbagai paham agar terbangun kesamaan cara pandang (worldview) tentang pembinaan umat dalam rangka penguatan NKRI.

c. Jajaran Kementerian Agama setempat perlu mengoptimalkan peran aparatur di lapangan (Penyuluh Agama Islam) untuk terus memantau perkembangan di MJJM dan memberikan dukungan dalam proses penguatan moderasi beragama.

d. Ditjen Bimas Islam perlu mereviu standar idarah mengenai standar struktur pengurus masjid "harus merepresentasikan berbagai kelompok Islam setempat" sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Realitasnya saat

ini banyak masjid yang sudah mapan tetapi pengurusnya hanya dari satu kelompok (monokultur), namun mereka dari kelompok moderat.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Besar Almukarromah dan Masjid Jami' Baiturrahim Kabupaten Bekasi

Oleh: Asnawati

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayahnya 127.388 Ha ibu Kotanya Cikarang, dipimpin oleh Bupati Hj. Neneng Hasanah Yasin dan wakil Bupati H. Rohim Mintareja terdiri dari 23 kecamatan, yakni 182 desa dan 7 kelurahan. Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; selatan: Kabupaten Bogor ; barat: DKI Jakarta dan Kota Bekasi ; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang.

Fokus penelitian di Kecamatan Tambun Selatan sebagai ibu kota kecamatan dan di Kecamatan Cikarang Utara. Kabupaten Bekasi sebagaimana kota lainnya juga memiliki kearifan lokal yang senantiasa terjaga dengan baik. Masyarakat warga Bekasi sangat berpengaruh dengan ketokohan KH. Nur Ali, pria kelahiran

Bekasi, 15 Juli 1914, wafat pada 29 Januari 1992, termasuk Pahlawan Nasional sejak tahun 2006 lalu adalah sebagai tokoh yang menjadi panutan masyarakat yang mampu merekatkan keadaan.

Tambun Selatan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Bekasi. Demikian pula halnya dengan kepadatan penduduk di Cikarang, mengingat banyak industri yang didirikan, sehingga banyak pula tenaga kerja datang dari luar Cikarang bahkan datang dari luar kota untuk bekerja dan tinggal di Cikarang. Cikarang menjadi terkenal sebagai kota kawasan industri terluas di Asia Tenggara.

Dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi yang mayoritas beragama Islam, banyak pula berdiri bangunan rumah ibadat bagi umat Islam, baik masjid maupun mushalla, yang difungsikan sebagai tempat melaksanakan shalat berjamaah maupun untuk berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sementara itu tersedianya sarana ibadah bagi umat muslim berupa masjid berjumlah 1.178 unit, mushalla/langgar 1.478, gereja 30, pura bagi umat Hindu berjumlah 3, dan 12 untuk Vihara bagi umat Buddha. Tempat-tempat ibadat tersebut merupakan sarana bagi masing-masing umatnya untuk melaksanakan ibadah serta untuk meningkatkan keimanannya.

Kabupaten Bekasi juga memiliki visi sebagai kabupaten yang Islami. Salah satunya bangunan masjid yang menjadi perhatian di Cikarang adalah Masjid Besar Almukarromah, tepatnya di Kecamatan Cikarang Utara. Masjid lainnya yang menjadi fokus penelitian ada di Kecamatan Tambun Selatan, berada di wilayah Desa Tridaya Sakti yaitu Masjid Baiturrahim.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masjid bukan sekedar tempat ritual shalat saja, melainkan juga sebagai pusat pembinaan iman, pembentukan akhlakul karimah dan sosial kemasyarakatan. Masjid diharapkan mampu mengubah umat Islam menuju kualitas kehidupan keagamaannya dan kehidupan sosialnya. Seperti kita ketahui Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa membangun untuk Allah sebuah masjid, meskipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. (Budiman Mustof: 2007, 88). Mengingat masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membangun umat termasuk di wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi fokus penelitian di Cikarang Utara yaitu Masjid Besar Almukarromah dan Masjid Baiturrahim di kecamatan Tambun Selatan. Untuk mengetahui bagaimana fungsi masjid dalam menerapkan moderasi beragama di saat pandemi COVID-19, maka perlu di diuraikan hasil temuan lapangan, sebagai berikut:

1. Profil Masjid Besar Almukarromah

Beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 Desa Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara. Masjid besar ini memiliki Jargon MANGJAKA (Masyarakat Nyang Jaga Kampung), artinya kalau bukan kita, siapa lagi. Bekasi Bersih, Bekasi Sehat.

Latar belakang berdirinya masjid Almukarromah berasal dari tanah wakaf seorang mualaf bernama H. Abdul Karim. Berhubung H. Abdul Karim punya hubungan yang baik dan dekat dengan H. Abdul Fatah sebagai Bupati ketika itu, maka dibangunlah masjid pada tahun 1980-an dan masjid ini di bawah yayasan Almukarromah.

Dalam perkembangan selanjutnya seiring berjalannya waktu, masjid dipercantik sebagaimana kondisi sudah seperti sekarang

ini sekitar tahun 1998-1999. Tujuan merenovasi masjid seiring perkembangan masa serta keinginan dari para jamaah, selain masjid menjadi lebih indah dan nyaman, berupaya menjadikan masjid ini sebagaimana yang dicontohkan nabi Rasulullah SAW, ketika mendirikan masjid di Quba.

Selain itu memakmurkan masjid juga merupakan taqarrub (upaya mendekatkan diri) kepada Allah SWT yang paling utama. Karena itu masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah shalat, sebagai ibadah-ibadah ritual saja, melainkan juga sebagai pusat kegiatan agama, sebagai pusat sosial dan pusat ekonomi. Masjid Almukarromah memang cukup bagus dan megah serta terawat rapi dan bersih.

Lokasi masjid Besar Almukarromah dekat dengan Pasar Baru Cikarang dan Sentra Grosir Cikarang (SGC). Masjid Besar Almukarromah tampak megah bangunannya serta cukup luas pula area untuk halaman parkir kendaraan mobil maupun motor bagi para jamaah bisa tertampung. Bagian depan maupun sisi samping halaman masjid dilapisi dengan keramik. Sehingga bila jamaah yang hadir cukup banyak bisa menggunakannya selain ruangan utamanya. Hampir seluruh area masjid ini merupakan area suci, alas kaki hanya diperkenankan di pakai di area parkir, selebihnya alas kaki harus dibuka.

Masjid Besar Almukarromah menyediakan ruangan khusus untuk kaum wanita shalat, termasuk juga fasilitas tempat wudhu yang terpisah bagi pria dan wanita. Lokasi masjid cukup strategis, mudah terjangkau bagi umat Islam yang ingin melaksanakan shalat dan istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan jauhnya. Mengingat luasnya tanah masjid yang mencapai 3500 M2, karena masih tersedia lahan kosong direncanakan akan didirikan Taman

Kanak-Kanak Islam dan Sekolah Dasar Islam. Selama ini sudah ada tempat untuk belajar bagi anak-anak, sebuah Taman Pendidikan Al-Qur'an bagi para anak-anak, maka tak heran suasana di masjid tersebut tidak pernah sepi.

Profil DKM: DKM Masjid Al-Mukarramah, H. Ir. Abdul Aziz HN (Usia 50 tahun)

Abdul Aziz putra salah seorang tokoh agama (H. Naili), diminta oleh para sesepuh dan jamaah untuk kesediaannya menggantikan posisi ayahnya untuk menjabat sebagai pengurus di masjid Almukarromah sebagai ketua DKM. Alhasil sesuai kesepakatan ditetapkan sebagai ketua DKM pada tahun 2006 sampai sekarang (masuk dalam angkatan ke 5).

Sebagai ketua DKM meski begitu dalam perjalanan mengemban tugasnya dengan mengelola masjid agar menjadi tempat tumpuan umat dalam meningkatkan keimanan, terkadang masih saja ada yang kurang berkenan di hati jamaah dengan diiringi komentar-komentarnya yang kurang baik untuk ditanggapi (terutama dalam menghadapi saat COVID-19). (Petikan wawancara dengan Ketua DKM Abdul Aziz, 7 Juli 2020 bertempat di Masjid Besar Almukarromah).

Abdul Aziz juga menambahkan bahwa umat muslim terutama takmir masjid harus mengetahui bagaimana manajemen untuk memakmurkan masjid dengan nuansa Islami. Tujuannya agar masjid itu sendiri dapat menjadi petunjuk bagi umat dan dapat berguna sebagaimana mestinya. Hal tersebut disampaikannya sebagaimana yang Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 18.

Fasilitas/layanan masjid:

Menurut Abdul Aziz, (ketua DKM) mengatakan bahwa di masjid Almukarromah ada keunikannya tersendiri. Bila ada jamaah yang menginginkan penampilan alas kakinya (sepatu) tampak bersih dan mengkilap, maka di masjid Almukarromah ada tersedia layanan untuk semir sepatu kepada jamaah. Jasa semir sepatu ini tidak di tetapkan nilai ongkosnya, keikhlasan bagi yang mau menggunakan jasa ini. Selain semir sepatu, jasa lain yang diberikan masjid kepada para jamaah adalah gratis parkir kendaraan mobil atau motor, namun bagi yang akan memberikan merupakan infaq bukan tarif parkir.

Menurut ketua DKM Abdul Aziz, masjid tidak menetapkan tarif parkir, kalaupun ada yang memberi bukan masuk ke kantong pribadi petugas. Hasil perolehannya dimasukkan ke dalam kotak amal yang telah disediakan masjid. Atas lelahnya para penyemir sepatu dan tukang parkir akan diberikan tips dari kotak amal, yang dibuka tiap minggu sekali pada hari Jumat, bersama dengan panitia lainnya untuk laporan keuangan.

Ketua DKM mengizinkan kepada anak-anak memberikan jasa semir sepatu dengan syarat masih sebagai pelajar. Mereka berjumlah 6 orang dan bertugas dengan cara bergantian waktunya. Alasan DKM mengizinkan perlu kejelasan status dan bertanggung jawab dengan tugasnya serta memanfaatkan waktunya juga untuk belajar.

Abdul Aziz sejak menjabat sebagai ketua DKM tahun 2006, telah pula melakukan perbaikan ekonomi bagi para pedagang yang terlilit hutang dengan rentenir. Para pedagang tersebut berjumlah 10 orang di antaranya 8 orang terlilit hutang rentenir. Oleh sebab itu menurut Aziz sebagai DKM harus ada action dan bukan hanya

prihatin, kemudian dilakukan pembinaan oleh Abdul Aziz. Maka dari zakat pribadi Abdul Aziz, diberikan kepada para pedagang yang berada di belakang masjid itu di beri tambahan modal sebagai pedagang binaan, sehingga terlepas dari rentenir.

Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan shalat saja, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial. Di Masjid Besar Almukarromah melaksanakan kegiatan sosial dengan memberikan beras setiap bulan kepada 80 orang kaum duafa binaan. Selain itu juga ada 115 anak yatim, di mana setiap bulannya juga di berikan santunan berupa uang. Uang yang berada dalam kotak besar itulah yang diberikan kepada anak yatim, dikumpulkan baik yang dari jamaah maupun masyarakat, yang seminggu sekali di buka bersama dengan panitia lainnya.

Yang menarik lagi di masjid Besar Almukarromah ada khitanan masal sudah sejak tahun 2000-an (DKM H. Naili (Alm), ayahnya DKM Abdul Aziz). Acara khitanan massal di umumkan dua (2) bulan sebelumnya dengan spanduk di pasang di pagar masjid. Sebelum acara di mulai, anak-anak yang akan di khitan berjumlah 50 di arak dengan menaiki mobil odong-odong, yang diawali dengan membakar petasan saat berangkat maupun kembali ke tempat, terkadang di hadiri bupati diacara pelepasannya.

Setiap anak yang di khitan di berikan amplop berisi uang Rp. 100.000 untuk setiap anak. Hadiah lainnya ada kopiah, sarung, atau tas dan makanan/snack bagi anak-anak yang di khitan. Semua hadiah itu sudah ada kaplingnya masing-masing yang memberikannya, dan bahkan dari etnis China non muslim ikut berpartisipasi memberikan bantuannya.

Dalam pelaksanaannya ada kerja sama dengan salah seorang dokter, di mana anak dan menantunya juga berprofesi sebagai

dokter. Namanya dokter Soewarno sejak awal sudah terlibat bila ada khitanan massal dan juga tidak mau menerima bayaran menghitan. Bahkan sampai obat-obatan diberikan secara cuma-cuma, gratis kepada anak-anak yang di khitan. Yang menarik dari keluarga dokter ini adalah akan marah apabila tidak dilibatkan di acara khitanan anak-anak terebut. Keterlibatan penduduk sekitar masjid dalam acara khitanan karena sudah terjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama. Karena di belakang masjid banyak perumahan dan warganya dari berbagai suku dan agama. Bagi warga yang etnis China, mereka juga merasa aman dan nyaman sehingga terjalin hubungan yang baik. Bahkan dipastikan setiap akan dilaksanakan khitanan massal, ada satu yang non muslim terdaftar sebagai peserta.

Masjid Besar Almukarromah di kecamatan Cikarang Utara ini cukup megah dan mewah merupakan masjid pusat kegiatan besar tingkat kabupaten, karena letaknya yang strategis dan memiliki halaman yang luas. Bangunan masjid yang cantik dengan sirkulasi udara yang bagus, sehingga ruangannya dingin meski tidak menggunakan AC, karena banyak ventilasinya. Sehingga jamaah nyaman dan shalat tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan di saat Pandemi.

Masjid sebagai tempat shalat pada dasarnya hanyalah salah satu peran dari bangunannya saja, sebab andaikata fungsi masjid itu hanya sebutan sebagai tempat shalat saja, fungsi itu sebenarnya telah dapat di cukupi oleh tempat apa pun ataupun ruangan yang lainnya yang bertebaran di muka bumi ini seperti di rumah, perkantoran, pabrik-pabrik bahkan lapangan terbuka. (Siswanto "Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2005, hal 26).

2. Profil Masjid Jami' Baiturrahim Desa Tridaya Sakti

Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, juga merupakan tempat berkumpul untuk melakukan shalat secara berjamaah. Masjid dibangun selain untuk shalat, juga merupakan pusat dakwah dan kegiatan-kegiatan yang lain, agar lebih banyak memanfaatkan dari fungsi masjid, untuk lebih bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi di kalangan umat Islam, demikian pula halnya dengan dibangunnya masjid Jami' Baiturrahim bagi warga desa Tridaya Sakti.

Menurut Kepala Dusun (Saadi Sadirja usia 52 tahun) sekaligus sebagai ketua DKM, mengatakan bahwa Masjid Baiturrahim merupakan tanah wakaf dari Bapak Nying bin Tigung (orang tua dari bapak Saadi Sadirja). Sebelumnya berupa musholla yang didirikan pada tahun 1995. Seiring berjalannya waktu dan untuk memenuhi kebutuhan warga desa di RW 1/RT 1 untuk bisa beribadah di masjid, karena selama ini bila akan melaksanakan shalat Jumat harus ke masjid di luar lingkungan RW 1. Oleh sebab itu atas kesepakatan dan keinginan warrga Desa Tri Daya Sakti, maka pada tahun 1999 barulah di bangun dari mushalla direnovasi menjadi masjid yang diberi nama Masjid Jami' Baiturrahim. Alamatnya: Jln. Kali Baru RT 1/RW 1, Dusun 1 Desa Tri Daya Sakti Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Masjid Jami' Baiturrahim dibangun dua (2) lantai cukup megah juga, di mana dinding dan lantai di keramik dan di desain dengan sirkulasi udara yang cukup, agar ruangan sejuk dipasang cukup banyak jendela-jendela sebagai ventilasi. Berkat keinginan besar warga desa mempunyai tempat ibadat berupa masjid, dengan semangat dan swadaya warga desa Tri Daya Sakti berhasil membangun sebuah masjid.

Akhirnya warga desa Tri Daya Sakti telah mempunyai masjid Jami' Baiturrahim yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Tri Daya Sakti untuk melakukan ibadah shalat fardhu lima (5) waktu dan shalat Jumat dengan berjamaah.

Berjalannya kegiatan di masjid tidak lepas dari usaha keras dan tekunnya ketua DKM Saadi Sadirja untuk membangun kebersamaan untuk memakmurkan masjid dengan berbagai program kegiatan. Dengan melibatkan para sesepuh desa sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk meramaikan masjid selain ibadah-ibadah shalat, diisi juga dengan kegiatan taklim. Taklim yang diprogramkan dan sudah berjalan yakni taklim untuk kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian bagi anak-anak dan kaum remaja, yang berbeda harinya, agar masjid senantiasa ramai terus dengan taklim.

Dalam melaksanakan tugas, Saadi Sadirja sebagai Ketua DKM, tentunya tidak dapat bekerja sendiri dalam berorganisasi tanpa ada kerja sama dengan pihak lain. Sebab dengan kerja sama tentunya diperlukan juga kekompakan dalam upaya memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan. Dengan kekompakan kepengurusan akan berpengaruh dalam kegiatan, sehingga masjid hidup dengan taklim-taklim. Hal yang wajar dalam berorganisasi, ada kendalanya, namun hambatan dapat diatasi bersama. Oleh karena itu melalui pembagian tugas yang sudah disepakati bersama, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masing-masing yang sudah ditunjuk sesuai tugasnya. Yang menjadi khatib Jumat berjumlah 7 personil yakni: Drs. H. Zuber Sofwan; H. Abdul Kodir Jaelani; H. Masri Ismail; H. Mursidi; Ustadz Habib Sholeh; H. Saadi Sadirja; dan Ustadz Ubat

Demikianlah tugas yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai khatib Jumat yang telah disepakati bersama bekerja sesuai jadwal yang sudah dibuat. Tidak hanya penunjukan sebagai khatib Jumat saja, untuk Imam shalat telah pula di bentuk berdasarkan kesepakatan yakni; Ustadz Ismail; Ustadz Abdurrahman; Ustadz Halimi; Ustadz Wahyudi; Ustadz Ubaidillah dan Ustadz H. Arsani. Kepada Khotib maupun yang ditunjuk sebagai Imam shalat, tidak lain adalah untuk menghidupkan masjid sesuai dengan fungsinya untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dan menarik jamaah senantiasa untuk shalat fardhu maupun shalat berjamaah di masjid.

Untuk menjaga protes warga jamaah yang kurang pas dengan penunjukan khatib maupun imam untuk melaksanakan tugasnya, dengan keputusan yang disepakati bersama dengan penunjukan pada Ustadz/tokoh agama/ulama setempat/lokal. Memang sekali waktu ketua DKM bersama pengurus lainnya, sepakat mencari khotib dari luar desa Tri Daya Sakti sebagai selingannya, yang masih kategori Ustadz lokal.

Saadi Sadirja sebagai ketua DKM, sangat memperhatikan kebutuhan masjid untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan bagi kelompok bapak-bapak, kelompok kaum ibu, anak-anak dan remaja. Kegiatan pengajian untuk kaum bapak di Masjid Baiturrahim sudah terjadwal pada malam Senin ba'da shalat maghrib, dan bagi kelompok remaja dijadwalkan ba'da shalat isya'. Demikian pula untuk taklim bagi kelompok kaum ibu-ibu. Selain itu pula, ketua DKM senantiasa yakin kepada Ustadz lokal dalam ceramahnya tidak ada yang mengarah pada politik ataupun yang mengujar pada kebencian.

3. Cara Pandang dan Sikap Terhadap Moderasi Beragama

Menurut Azyumardi Azra, moderasi beragama di Indonesia yang sangat terlihat adalah umat Islam. Pengertian Moderasi beragama dalam konteks umat Islam kemudian disebut Islam Wasathiyah. Kondisi moderasi beragama di Indonesia saat ini sudah mapan dengan adanya Islam Wasathiyah. Artinya, dalam memahami agama tidak banyak masyarakat Indonesia yang ekstrem kanan ataupun yang ekstrem kiri.

Demikian pula halnya pandangan moderasi beragama bagi pengurus masjid maupun bagi masyarakat warga jamaah di lokasi yang menjadi sasaran penelitian di Masjid Besar Almukarromah Kecamatan Cikarang Utara dan di Masjid Jami' Baiturrahim Kecamatan Tambun Selatan, berdasarkan hasil wawancara yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

Moderasi beragama menurut Abdul Aziz sebagai ketua DKM Masjid Besar Almukarromah bahwa sepanjang dapat saling menjaga tali silaturrahim dengan sesama umat beragama, saling menghormati serta dapat menerima perbedaan keyakinan, dengan demikian tercapai hidup damai dan harmoni. Sebagaimana halnya terdapat di belakang masjid Besar Almukarromah banyak perumahan non muslim, dan mereka merasa nyaman dan senang juga dalam membantu untuk kegiatan masjid.

Sebagai ketua DKM Abdul Aziz senantiasa memperhatikan kesepakatan antara pengurus masjid dengan jamaah agar tetap terjaga harmonisasi. Komitmen menjaga kesepakatan tampak di suatu saat datang satu komunitas tertentu minta izin untuk mengisi acara pengajian di masjid, namun dengan komitmen oleh DKM di tolak keinginannya tersebut. Namun DKM akan mengizinkannya untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid dan bukan

untuk kalangannya sendiri. Sebab bila diizinkan dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir bagi jamaah masjid, sehingga komunitas tersebut tidak terima dengan alasan penolakan ketua DKM Abdul Aziz.

Lain halnya ketika kumpulan anak muda/mahasiswa ingin memakai masjid untuk acara seminar dengan mengundang misalnya tema terkait tentang "usaha". Keinginan mahasiswa mengadakan acara seminar, disambut baik oleh ketua DKM dengan di izinkan untuk memakai masjid, asalkan tetap menjaga kebersihan dan di beri waktu untuk mengakhiri kegiatan menjelang masuknya shalat dhuhur. Prinsip demikian menurut ketua DKM Abdul Aziz selaku pengurus karena mengemban amanat dari jamaah dan kesepakatan bersama pengurus lainnya. Sikap tegas DKM tetap terjaga dengan melakukan seleksi kepada para mubaligh atau penceramah yang dari luar kota bila tidak mencerminkan sikap moderasinya, maka akan ditolak.

Sementara itu terkait dengan moderasi beragama dilingkungan masjid Baiturrrahim Desa Tri Daya Sakti, maka usaha yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam hal ini ketua DKM Saadi Sadirdja dengan pengurus yang lainnya yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keimanan masyarakat jamaah di desa Tri Daya Sakti. Sebab dengan demikian masjid tidak hanya untuk melaksanakan shalat-shalat ibadah saja, melainkan difungsikan dalam kegiatan keagamaan.

Oleh sebab itu ketua DKM Saadi Sadirdja sebagai penanggung jawab untuk memakmurkan masjid dengan mengoptimalkan kegiatannya tidak hanya kepada kaum bapak dan ibu saja, tetapi juga kepada anak-anak dan remaja. Sebab sudah menjadi tanggung

jawab ketua DKM untuk menjaga dan melestarikan masjid yang selama ini di idamkan warga desa Tri Daya Sakti.

Menurut Kepala Desa Tri Daya Sakti (Suwardi Wada, sudah yang ke 3 kalinya diangkat) bahwa jumlah masyarakatnya yang heterogen ini dengan komposisi jumlah pribumi 45%, pendatang justru mencapai 55%, hidup mereka dalam kerukunan saling menghormati satu sama lain, terjaga harmonisasi.

Yang dimaksud dengan penduduk pribumi adalah warga bekasi yang disebut sebagai betawi pinggiran, yang berada di kecamatan Tambun Selatan. sebagai Bekasi Tambun dengan logat bahasa ora (campuran dengan Jawa Cirebon dan Banten). (Wawancara dengan Kepala Desa)

Warga Desa Tri Daya Sakti hidupnya rukun, saling bergotong royong, kerja bakti membangun desa, dapat membaur sehingga terjalin hubungan antar umat beragama. Sebagai kepala desa senantiasa menjaga kerukunan, di mana ada rasa toleransi dengan membentuk kelompok olah raga dalam berbagai kompetisi. Tidak hanya kepada umat yang berbeda keyakinan terjalin hubungan yang harmonis, dalam intern umat Islam juga terjaga harmonisasi, karena sebagai warga desa Tri Daya Sakti.

Sebagai ketua DKM Masjid Jami' Baiturrahim senantiasa bekerja sama dengan sesama pengurus yang lainnya untuk saling mengingatkan, jangan sampai terjadi salah paham. Saat peneliti berkunjung ke masjid Jami' Baiturrahim sungguh kagum dengan keguyuban antar pengurus, kompak hadir, termasuk hadir kepala Desa Suwardi Wada.

Desa Tri Daya Sakti yang berada di RW 1, merupakan desa yang unik dalam membangun paguyuban "Suling" yang merupakan ide cemerlang dari Kepala Desanya. Yang dimaksud dengan

"Suling" yaitu guyub antara DKM di lingkungan RW 1. Adapun kata "Suling" kepanjangan dari "subuh keliling".

4. Praktik Pendidikan Moderasi Beragama

Dalam konteks Pendidikan Islam, moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain, demikian Prof. Komaruddin Hidayat (Guru Besar Bidang Filsafat Islam).

Dalam kaitannya dengan praktik moderasi beragama, maka baik masjid Besar Almukarromah di kecamatan Cikarang Utara maupun masjid Jami' Baiturrahim di Desa Tri Daya Sakti Kecamatan Tambun Selatan yang menjadi fokus penelitian di Kabupaten Bekasi, dapat disampaikan dari hasil temuan lapangan adalah sebagai berikut:

Sejak Masjid Almukarromah berdiri dan melakukan aktivitasnya sudah melaksanakan pendidikan moderasi beragama dalam rangka meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan kajian Islam. Kajian taklim dari kaum bapak, kaum ibu maupun untuk tingkat anak-anak dan kelompok remaja pada hari-hari yang sudah terjadwal dan semua berjalan aktif. Untuk penceramahnya atau guru maka dari ketua DKM senantiasa juga memberdayakan Ustadz lokal pada taklim pengajian mingguan.

Lain halnya bila dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan, seperti acara Maulidan dan Rajaban maka atas kesepakatan pengurus dengan ketua DKM, disepakati dengan mengundang penceramah dari luar Bekasi, tetapi tetap melalui seleksi, karena itu tidak ada isi ceramah yang mengujar kebencian.

Yang terpenting menurut ketua DKM, dalam ceramah yang disampaikan jamaah bisa mendapatkan ilmu.

Untuk pengajian kaum ibu-ibu dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Sabtu pagi, dengan Ustadzah lokal. Berbeda kalau pengajian "Usdatul Ummah" sebulan sekali pada hari rabu pagi dengan penceramah Hj. Atiqoh Nur, putrinya KH. Nur Ali (alm), karena masjid Almukarromah juga merupakan pusatnya BKMT sekabupaten Bekasi.

Sehubungan adanya virus Pandemi COVID-19 yang melanda negeri Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Bekasi, tidak bisa dianggap biasa saja. Semua warga diminta untuk menjalankan aturan tidak melakukan kumpul-kumpul yang dapat membawa efek berantainya virus COVID-19, seperti halnya di masjid Besar Almukarromah. Tetapi sejak ada imbauan dari Bupati Kabupaten Bekasi, Nomor 360/Kep.246-BPBD/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, diizinkan untuk melakukan shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid dengan membawa sajadah sendiri dan rumah ibadah lainnya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selain itu warga juga wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, dan warga pun wajib memakai hand sanitizer sebelum masuk ke lingkungan rumah ibadat.

Begitu pula halnya praktik pendidikan moderasi beragama sudah lama dilaksanakan, ketika masih berupa mushalla sudah banyak pula kegiatan taklimnya. Artinya pengajian di masjid Baiturrahim mulai dari kaum bapak, di ikuti juga dengan kaum ibu dan anak-anak tingkat PAUD sampai pada remaja. Pengajian yang sudah lama dilaksanakan bukan karena adanya moderasi,

melainkan untuk memenuhi kebutuhan warga desa mengais ilmu agama dari para tokoh agama.

Pengajian yang dimotori oleh Ketua DKM sebelum ada virus Pandemi COVID-19, diadakan setiap malam Selasa kegiatan ibu-ibu dengan mengaji Alquran, yang sebelumnya tidak bisa mengaji. Dengan ketekunan guru yang mengajar dan ibu-ibu yang tekad berniat bisa membaca al-qur'an, di mulai belajar dari iqro' dan sekarang sudah bisa membaca Quran dengan pengajar Ustadzah Yunu. Aktivitas taklim bagi ibu-ibu selain belajar mengaji, pada hari Sabtu pagi dibimbing oleh Ustadzah Mimin Mintarsih, dan malam Jumat dengan acara yasinan. Sementara untuk kaum bapak setiap malam Senin dan bagi anak-anak dan remaja pun sudah terjadwal kegiatannya. Namun dengan kondisi pandemi, kegiatan pengajian belum kembali dimulai, berkat pengertian dan dukungan dan respons positif dari jamaah, karena khawatir walau sudah jaga jarak, meski sudah di katakan new normal.

Dalam wawancara peneliti dengan kepala desa Suwardi Wada, menurutnya belum pernah mendengar ada warganya yang terkena pandemi COVID-19. Meski banyak keluhan warga yang sudah merasa jenuh, dengan kondisi saat Pandemi yang entah sampai kapan berakhir, karena harus tetap tinggal di rumah saja. Memang ada pembagian bantuan berupa sembako, tetapi tidak semuanya dapat bagian. Sehingga walau bagaimanapun kondisinya, meski Tambun Selatan masuk zona merah, tetap saja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan untuk penghidupan dengan tetap berjualan, misalnya. Sikap warga jamaah masjid Jami' Baiturrahim dengan kondisi Pandemi tetap mematuhi imbauan ketua DKM untuk tidak melaksanakan shalat Jumat dan shalat fardhu berjamaah di masjid. Sehingga ketika hari Maulid nabi misalnya semua kegiatan di

masjid di tiadakan untuk sementara waktu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan kegiatan "Suling", berawal dari RW 1 di masjid Baiturrahim (ide pak Lurah Suwardi Wada). Suling ini dari subuh sampai pkl.06.30, ada tausiah dari Ustadz lokal, dan disediakan sarapan dari jamaah masjid yang ditunjuk secara bergilir, peserta dari jamaah dan para DKM.

C. Simpulan

1. Pendidikan moderasi beragama di masjid yang menjadi sasaran penelitian sudah berjalan lama dengan berbagai kegiatan atau taklim, dari kelompok kaum bapak, ibu-ibu, anak-anak dan remaja. Di masjid Besar Almukarromah moderasi beragama menurut Abdul Aziz, dapat hidup saling menjaga harmonisasi dengan menerima perbedaan etnis suku dan agama. Komitmen dipegang teguh oleh ketua DKM kepada salah satu komunitas yang tampaknya berseberangan jalan. Sementara itu di Masjid Jami' Baiturrahim Desa Tri Daya Sakti, dalam melakukan moderasi beragama beriringan bersama dengan jamaah juga, menjaga tali silaturrahim dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mematuhi imbauan pemerintah dan MUI. Karena Pandemi, sementara kegiatan-kegiatan taklim dihentikan, meskipun itu untuk meningkatkan keimanan jamaah dalam mengais ilmu agama karena masjid sebagai pusat dakwah.
2. Pendidikan moderasi beragama yang diberikan saat pandemi di masjid, otomatis selama berlangsungnya virus COVID-19 semua di hentikan untuk sementara waktu. Baru dilaksanakan shalat Jumat pada tanggl 20 Juni baik masjid Besar Almukarromah maupun masjid Jami' Baiturrahim dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan shaf dengan

berjarak antar jamaah satu meter (1), memakai masker dan membawa sajadah sendiri. Masjid menyiapkan masker apabila ada jamaah yang terlupa tidak membawa dan memakainya.

3. Selama Pandemi, cara pandang, sikap dan praktik pendidikan moderasi di masjid yang menjadi sasaran penelitian, seperti di masjid Besar Almukarromah maupun di masjid Jami' Baiturrahim, menghentikan kajian dan taklim baik bagi kelompok kaum bapak, kaum ibu, anak-anak dan remajanya. Mereka mematuhi imbauan Bupati kabupaten Bekasi tentang PSBB. Namun selain itu pun dengan Pandemi dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat sehubungan dengan penghasilan kehidupannya. Pengurus DKM cepat mengambil sikap dengan memberikan bantuan sembako, dan melihat langsung ke masyarakat, karena banyak yang berpenghasilan sampai nol.
4. Suka-dukanya sebagai pengurus masjid dalam hal ini ketua DKM perlu mempunyai hati dan jiwa yang lapang dada. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi ini ada saja komen atau teguran untuk memperbolehkan shalat berjamaah di masjid. Sebagai pengurus masjid, tetap kukuh tidak melaksanakan dulu shalat berjamaah. Semua ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai bertambah dan justru ini untuk memutuskan mata rantai pandemi.

Berdasarkan realitas dan fakta di atas, maka penulis merekomendasikan bahwa:

1. Kepada ketua DKM dengan kondisi Pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya dan agar masjid kembali ke fungsinya untuk mencerdaskan umat, bisa dihidupkan kembali aktivitas taklimnya, namun juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila

terlalu lama masjid tidak ada aktivitas taklim, dikhawatirkan bagi yang sudah semangat untuk mengais ilmu agama, menjadi melemah.

2. Kepada ketua DKM karena memikul amanah untuk memakmurkan masjid, harus berlapang dada di saat ada saja yang tidak bisa menerima kebijakan pengurus sebagai pengelola masjid.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang dan Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Serang di Kota Serang

Oleh: Suhanah

A. Letak Geografis dan Profil

Penelitian ini sasarannya adalah masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang dan masjid Al-Ikhlas Kecamatan Serang. Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Kota ini berada pada bagian utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota Serang dilintasi Jalan Tol Jakarta–Merak. Kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Amanat pembentukan Kota Serang bermula sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten yang menetapkan Serang sebagai ibukota bagi provinsi yang baru dibentuk itu. Kota Serang resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

Kota Serang terdiri dari 6 Kecamatan dan 66 Kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan agama di kota Serang sebagai berikut: a) Islam 331.954 jiwa; b) Kristen 3,776 jiwa; c) Katolik 4.332 jiwa; d) Hindu 350 jiwa; e) Buddha 1.607 jiwa dan f) Konghucu 42 jiwa. Sedangkan Jumlah rumah ibadat berdasarkan agama sebagai berikut : a) Masjid 564 buah; b) Musholla 557 buah; c) Gereja Protestan 3 buah; d) Gereja Katolik 1 buah; e) Pure 1 buah dan f) Vihara 4 buah.

1. Profil Masjid Agung Ats Tsauroh

Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang (dulu disebut Masjid Pegantungan karena berada di kampung Pegantungan, desa Cimuncang, Kota Serang). Berdiri di atas tanah Wakaf dari Raden Tumenggung Basudin Tjandranegara (1848 – 1870 M) mantan Bupati Serang ke 4. Masjid ini tipologinya adalah masjid Agung, tanah yang ditempati sekarang oleh Masjid Agung seluas + 2,6 Ha. Awalnya yang dibangun hanya masjid tanpa menara. Dalam perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali renovasi. Tahun 1930 Tuan Nurdin menata masjid seperti Masjid Kesultanan Banten tetapi tanpa menara. Dan pada tahun 1956 Bapak Ayif Usman, KH. Sochari, dan lain-lainnya, menyempurnakan bangunan dengan mendirikan menara.

Tahun 1968 semasa Bupati Kabupaten Serang yakni Bapak Letkol H. Suwandi, masjid itu diberi nama menjadi Masjid Ats-Tsauroh yang berarti Masjid Pejuangan, Tahun 1974 bangunan masjid dirubah. Pembangunan itu di pimpin oleh Bapak Ayif Samin salah satu tokoh di Kabupaten dan dikerjakan oleh kontraktor Bapak H. Mulya Syarif.

Tahun 1993, Bupati Serang waktu itu Bapak H. Sampurna memprakarsai untuk merenovasi bangunan masjid. Maka

dibentuklah panitia pembangunan antara lain H. Ma'mun Sochari, H. Aman Sukarso, H. Embay Mulya Syarif, H. Hilmi serta yang lainnya. Dan pada tahun 1997 Masjid Ats- Tsauroh resmi dijadikan Masjid Agung Kabupaten Serang.

Periode Tahun 2008 di bawah kepemimpinan H. Panji Tirtayasa, selaku Asda II Kabupaten Serang dan dengan bantuan dana dari APBD Kabupaten Serang, Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang ini ditata kembali dengan menambah fasilitas-fasilitas di luar bangunan utama Masjid, seperti: 1) Membuat tempat wudhu di luar bangunan utama Masjid, 2) Menata halaman Parkir, 3) Menata Pertamanan, 4) Membuat unit Usaha Masjid berupa pertokoan di sebelah Timur dan Selatan halaman Masjid. 5) Membuat penulisan kaligrafi diruang utama masjid. 6) Memfasilitasi Sekretariat Masjid dengan sarana komputer dan lain-lain. 7) Membuat Gedung Perpustakaan Masjid. 8) Membuat Gedung Futsal, 9) Membeli kendaraan operasional berupa satu unit mobil dan satu unit motor, 10) Mendirikan divisi Keamanan Masjid (satpam masjid)

Visi Masjid Agung Ats-Tsauroh adalah "Menjadi Pusat Pembinaan Ummat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menuju Masyarakat Madani". Adapun misinya adalah: 1) Mempererat dan mempersatukan umat, 2) Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai syiar dan dakwah Islamiyah. 3) Membentuk Kepribadian umat yang memiliki akidah yang kuat dan berakhlakul karimah. 4) Melayani umat dalam meningkatkan ibadah. 5) Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan sosial keagamaan. 6) Memberdayakan zakat dan wakaf secara profesional untuk meningkatkan ekonomi umat. 7) Sebagai pusat pembinaan kemasjidan kota/kabupaten Serang.

Masjid Agung Ats-Tsauroh Menyelenggarakan Peringatan/ Perayaan Hari Besar Islam dengan meriah, aman dan menyenangkan, menjadikan perayaan/peringatan hari besar sebagai media untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan intelektual umat, menyemarakkan Syiar dan dakwah Islam. Adapun kegiatan PHBI yang sampai saat ini terus dilaksanakan meliputi:

a. Syiar Muharram kegiatan meliputi Dakwah, Khitanan Massal dan kegiatan sosial lainnya
b. Syiar Ramadhan, kegiatan meliputi Shalat tarawih, Kuliah Ba'da Isa dan Subuh, Tadarus Alquran, Bazzar Ramadhan, Kajian Tematik, Buka Puasa Bersama, aneka lomba Islami untuk anak, musik religi (sejak tahum 2013 bekerja sama dengan Global TV menyelenggarakan acara Musikal Kampoeng Ramadhan, dan menjalani kerja sama dengan beberapa TV swasta lainnya)
c. Menyelenggarakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus penyembelihan Hewan Qurban.
d. Perayaan Maulid Nabi bekerja sama dengan Pemkot Serang dan Warga Masyarakat Kampung Pegantungan.
e. Menyelenggarakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus penyembelihan Hewan Qurban.
f. Bekerja sama dengan berbagai kelompok/lembaga keagamaan dan masyarakat dalam mengelola acara rutin pengajian (minggu pagi, rabu, kamis dan Sabtu)

2. Profil Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas ini tipologinya adalah masjid Jami', berada di Perumahan Bumi Agung Permai 1 RT.03/18 Kecamatan Serang Kelurahan Unyur Serang, dibangun pertama kali pada tahun 1997 di atas tanah Fasilitas Umum (Fasum) dari PT Aria Agung seluas

12 x 9 meter. Pembangunan masjid dilakukan oleh warga di pimpin oleh salah satu tokoh masyarakat H. Irfanudin dan Barkat, dengan dana berasal dari sumbangan /swadaya warga setempat.

Visi Masjid Al-Ikhlas adalah "Mewujudkan masjid sebagai pusat kegiatan, pembinaan dan menjadikannya sebagai bagian dari solusi persoalan umat." Adapun misinya adalah: 1) Membentuk Kepribadian umat yang memiliki akidah yang lurus dan kuat (salimul aqidah), mampu beribadah dengan benar (Sahihul Ibadah) dan memiliki akhlakul karimah; 2) Mengoptimalkan fungsi masjid sebagai syiar dan dakwah Islamiyah; 3) Melayani umat dalam meningkatkan ibadah; 4) Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan sosial keagamaan. 5) Mengoptimalkan pemberdayaan zakat dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat; 6) Membebaskan masyarakat dari jeratan Riba (Bank keliling); 7) Menjadikan masjid sebagai posko logistik.

Masjid Al-Ikhlas bertujuan Memberikan kenyamanan dalam beribadah dan memberikan tarbiyah kepada umat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, baik Hablum minallah maupun Hablum minannas, mencetak Ummat yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dijelaskan bahwa fungsi dan peranan Masjid Al-Ikhlas adalah: 1) Menjadikan Pusat Kajian Islam. 2) Menjadikan Pusat Pembinaan Ummat, baik mental maupun spiritual.3) Menjadikan Pusat Pengembangan Ekonomi Syari'ah. 4) Menjadikan Pusat Pengembangan Kemandirian Ummat. 5) Menjadikan Pusat Pendidikan Islam Unggulan, untuk kaderisasi pemimpin umat.

Beberapa program kegiatan Masjid Al-Ikhlas adalah: Pertama, Kajian Minggu Ba'da Maghrib dengan susunan sebagai berikut: Minggu pertama, membahas Kitab RIYADUSHALIHIN, Minggu

kedua, membahas Kitab TAFSIR IBNU KATSIR, Minggu ketiga, membahas masalah HADITS, Minggu keempat, membahas masalah FIKIH Minggu kelima, TEMATIK. Kedua, Pengajian Ahad Ba'da SUBUH, Setelah selesai shalat subuh, diadakan pengajian, sarapan dan ngopi sambil ngobrol bersama (Setiap Ahad Subuh). Ketiga, Bhakti Sosial Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis (3 Bulan sekali), bekerja sama dengan Kimia Farma dan LAZ Harfa. Keempat, Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah TPA diadakan Sore Hari.

Kelima, Al-Ikhlas Jumat Berbagi yang meliputi 1) Pemberian Snack dan Minuman kepada Jamaah Shalat Jumat, diberikan setelah pelaksanaan Shalat Jumat 2) Santunan Duafa Dan Yatim. Yaitu Pemberian 10 (sepuluh) paket sembako kepada 40 mustahik di sekitar masjid, dengan cara diserahkan secara langsung kepada mustahik dengan mendatangi ke rumah mustahik secara bergantian setiap ba'da Jumat. Pemberian santunan kepada anak yatim berupa uang jajan setiap ba'da Jumat. Keenam, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Masjid, Pemberian Pinjaman Uang untuk keperluan modal usaha dan konsumsi bagi anggota/jamaah.

Adapun orang-orang yang biasa menjadi Imam: 1) Ustaz Munjin; 2) Ustaz H, Makmun; 3) Ustaz Yadi Heryadi; 4) Ustaz Mukhlis; 5) Ustaz Abdul Rauf; 6) Ustaz H. Irfan; 7) Ustadz Mutobiin. Orang-orang yang menjadi Khatib : 1) Ustaz Munjin; 2) Ustaz H. Makmun; 3) Ustaz Yadi Haryadi; 4) Ustaz Mukhlis; 5) Ustaz Abdur Rouf. Orang-orang yang biasa menjadi penceramah di Masjid Al-Ikhlas : 1) Ustaz Muhyi, S.Ag; 2) Ustaz Asmuni, LC; 3) Ustaz Syarif; 4) Ustaz Asep Saefuddin.

B. Cara Pandang dan Sikap Terhadap Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Menurut Caknur, bahwa Islam moderat adalah yang menjunjung nilai-nilai inklusivisme dan pluralisme. (Bakti, 2005). Sedangkan menurut Gus Dur, Islam moderat adalah sebuah pemahaman yang mengedepankan demokrasi, menjamin kemurnian ideologi nasional (Pancasila) dan kesatuan konstitusi. Karakteristiknya adalah mengacu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, yang mendukung pembangunan.(Wahid, 1985). Menurut Lukmanul Hakim Saifuddin, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.(Kementerian Agama RI, 2019). Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa moderasi beragama adalah dalam memahami atau menjalankan ajaran agama tidak boleh terlalu fanatik dengan pendapat kita sendiri saja yang paling benar dan pemahaman keagamaan orang lain kita anggap salah. Yang benar adalah kita harus saling memahami pendapat orang lain dan saling mengharga perbedaan itu,

Pengertian Moderasi (wasatiyah), di mana dikatakan bahwa Wasatiyah adalah tengah-tengah, dalam artian kita harus menempatkan pada posisinya, yaitu pemahaman yang tidak berlebihan dan jangan beranggapan hanya pendapat kita saja yang paling benar. Salah satu contoh kita sesama umat Islam ada perbedaan dalam masalah furuiyyah, ini tidak masalah, kita hargai perbedaan itu kecuali dalam masalah akidah. Sedangkan hubungan dengan umat non muslim ini harus kita perhatikan karena akidahnya beda, tidak boleh toleransi sampai kebablasan, seperti mengucapkan selamat natal. Oleh karena itu yang terpenting

kita sesama umat beragama tidak saling mengganggu dan mencela mereka, tetapi kita tetap hidup rukun dan menghargai perbedaan itu (wawancara dengan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, 4 Juli 2020).

Sedangkan istilah pandemi COVID-19 adalah suatu wabah penyakit yang kita tidak mengetahui ilmunya, maka dari itu kita ikuti saja anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa MUI, seperti anjuran melakukan ibadah di rumah, melakukan protokol kesehatan, semuanya ini kita ikuti seperti pakai masker, pengecekan suhu, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Di masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang ini demi kenyamanan dan kedamaian masyarakat shalat tarawih dan shalat Idulfitri tidak dilaksanakan, kecuali di rumah saja. (Wawancara dengan Ketua DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh (Baidhowi), 4 Juli 2020).

Di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Serang ini sebelum adanya wabah pandemi memang sudah ada gerakan menabung dengan diberikan sebuah celengan bagi setiap jamaah yang disimpan di rumahnya dan nanti selama 2 minggu sekali dari panitia masjid mengambil kembali celengan tersebut. Jadi tabungan ini tidak memaksa umat berapa besarnya per hari mereka menyisihkan uang itu dimasukkan ke dalam celengan. Dengan adanya uang tabungan tersebut ketika terjadi COVID-19, maka panitia masjid langsung mendata ada berapa warganya yang terkena efek dari musibah COVID-19 itu. Panitia masjid membeli sembako berupa beras, minyak, terigu, gula dan mi instan untuk dibagikan kepada warganya.

Menurut ketua DKM masjid Al-Ikhlas bahwa wabah pandemi COVID-19 ini merupakan suatu ujian bagi orang yang beriman, bagaimana kita menghadapi peristiwa ini. Tentunya kita sebagai orang Islam supaya bisa saling mengoreksi diri dan banyak

hikmahnya untuk bisa saling berbagi dan saling tolong-menolong sesama umat tanpa melihat agama, suku dan golongan apa pun. Karena dari peristiwa COVID-19 ini efeknya banyak sekali, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi ada yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu di Masjid Al-Ikhlas ini karena sudah ada koperasi maka pihak DKM membeli sembako itu lewat koperasi. Diadakannya koperasi ini pada prinsipnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat berbelanja dekat, lebih murah dan dapat meminjam uang ketika sedang ada kesulitan ekonomi. Karena masyarakat di sekitar kompleks perumahan Bumi Agung Permai Serang ini ada yang suka meminjam uang melalui Bank keliling yang pakai bunga berbunga per hari.

Oleh karena itu pada masa pandemi COVID-19 ini ada salah seorang tukang ojek online dan ia sebagai jamaah di masjid Al-Ikhlas ini, bercerita kepada pengurus masjid, bahwa ia meminjam uang pada Bank keliling dan sekarang ini tidak mampu lagi membayar karena tidak ada penumpang yang mau memesan ojek online dan tidak dapat mencari pekerjaan lain. Dari pihak Bank menagih terus, bunga selalu bertambah kalau tidak dibayar. Akhirnya mereka bingung cari uang ke mana, makan saja susah, apalagi bayar hutang. Mendengar keluhan itu , akhirnya atas musyawarah ketua DKM dan panitia masjid maka si tukang ojek itu dipanggil, dinasihati dan berjanji jangan terulang kembali meminjam uang dengan Bank keliling itu. Panitia masjid akan melunasi utang si ojek online ini kepada pihak Bank keliling. Nanti kalau si tukang ojek ini sudah punya uang baru membayarnya ke pihak panitia Masjid tanpa bunga berbunga. Dan tukang ojek online itu ditawarkan untuk bekerja membersihkan masjid sekaligus ikut membantu tukang yang sedang memperbaiki masjid. Dengan melihat kejadian itu

keberadaan koperasi masjid al-ikhlas dapat bermanfaat sekali bagi orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam penanganan COVID-19 tidak ada kerja sama antara umat Islam dengan umat non muslim. Memang untuk pelaksanaan protokol kesehatan di masjid agung ini semuanya dibantu dari pemerintah. Masjid Agung ini selama ada COVID-19 ditutup, semua aktivitas keagamaan tidak ada yang dilaksanakan, ibadah di rumah saja (sesuai anjuran pemerintah beribadah di rumah). Tetapi di masjid ini disediakan protokol kesehatan, seperti: Sanitazer, sabun untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, Sejak 12 Juni di Masjid Agung Ats-Tsauroh baru diadakan Shalat Jumat, shalat 5 waktu berjamaah tetapi harus mematuhi protokol kesehatan.

C. Praktik Pendidikan Moderasi beragama

Praktik pendidikan moderasi beragama bagi anak di Sekolah Taman Kanak-kanak sejak dulu guru mengajarkan muridnya untuk saling bekerja sama, saling berbagi, saling membantu dan tolong menolong antar sesama teman. Selama adanya COVID-19 lembaga pendidikan TK Ats-Tsauroh ditutup dan hingga kini belum dibuka kembali. Dalam praktiknya bentuk pendidikan moderasi beragama di masa pandemi ini anak-anak didik diliburkan dan pihak guru memberikan tugas-tugas, namun pemberian tugas itu sebagian ada yang melaksanakannya dan sebagian lainnya tidak mau mengerjakan tugas itu. Akhirnya guru-guru itu tidak secara rutin memberikan tugas, dalam satu bulan hanya 2 kali saja, seperti menulis huruf hijaiyyah dan mewarnai gambar-gambar. Di dalam ajaran Islam memang kita diajarkan atau didik untuk saling tolong menolong, saling berbagi dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Oleh karena itu di TK Ats-tsauroh ini sudah terbiasa anak-anak diajarkan oleh gurunya untuk saling berbagi. Contohnya

: Si A membawa makanan banyak , Si B tidak membawa makanan, maka si A itu berbagi kepada si B.

Umat Islam yang memiliki perbedaan mazhab/aliran atau pemikiran keagamaan, Bapak Baidhowi mengatakan bahwa perbedaan pemahaman selama dalam masalah muamalah tidak ada masalah, sepanjang diskusi-diskusi dipersilahkan, walaupun beda pemahaman, kecuali masalah keyakinan. Contoh seperti Ahmadiyah, Syiah dan LDII. Di Masjid Agung ats-Tsauroh semua kelompok atau golongan apa pun boleh mendengarkan atau mengikuti kegiatan keagamaan di sini. Namun berdasarkan kesepakatan pengurus, bila ada penceramah yang diundang kemudian isi ceramahnya menjelek-jelekkan pemerintah dan mencaci kelompok lain maka penceramah tersebut tidak diundang lagi, tetapi sampai saat ini belum ada. (Wawancara dengan ketua DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh, 2 Juli 2020).

Di lingkungan masyarakat masjid Agung Ats-Tsauroh ini, agama-agama non muslim relasinya dengan umat beragama Islam, biasa-biasa saja yaitu tidak ada saling mengganggu, tetapi saling menghargai perbedaan. Para muballigh yang ada di sekitar wilayah kota Serang berpendapat bahwa hubungan antar umat beragama pada masyarakat di sekitar masjid ini secara formal tidak ada, tetapi bila mereka mau menumpang parkir mobil dalam acara Natalan boleh-boleh saja, karena bertetanggaan antara Gereja dengan Masjid.

Begitu juga Pandangan dari H. Irfan tentang umat Islam yang berbeda pemahaman dalam masalah amaliah biarkan saja, tetapi Syiah, Ahmadiyah dan jamaah tabligh, amaliahnya tidak berdasarkan kitab-kitab tetapi berdasarkan guru, apa kata gurunya diikuti, Meskipun demikian saya salut juga dengan kelompok

jamaah tabligh dalam hal ibadah mereka mengajak umat Islam untuk shalat tepat waktu ke masjid-masjid atau ke mushalla-mushalla.

Di daerah-daerah di Indonesia, kelompok Jamaah Tabligh selalu mendatangi rumah-rumah yang dekat sekitar masjid atau mushalla dengan tujuan silaturrahmi sambil memperkenalkan diri mereka berasal dari mana. Kemudian ketika shalat tiba waktunya seperti shalat magrib, maka mereka langsung mengajak orang yang punya rumah itu supaya bersama-sama ke masjid atau mushalla itu. (Wawancara dengan H. Irfan, 3 Juli 2020). Memang tujuan khuruj bagi orang Jamaah Tablig dari masjid ke masjid atau dari mushalla-ke mushalla berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya supaya umat Islam meramaikan masjid.

Perlu diketahui pula bahwa pada umumnya jamaah di Masjid Agung Ats-Tsauroh ini kebanyakan berpaham Ahlus Sunnah Wal-jamaah (NU), tetapi orang yang berpaham Muhammadiyah, Persis, Math-laul Anwar dan yang lainnya juga ikut bergabung (hadir) dalam kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Masjid Agung ini. Antar jamaah saling menyatu duduk bersama tanpa membedakan golongan atau pemahaman keagamaannya. Selain itu antar jamaah saling melakukan komunikasi antara seseorang dengan orang yang lainnya, walaupun berbeda pemahaman keagamaannya mereka tetap saling menjaga kerukunan, tolong-menolong, hormat menghormati dan harga menghargai dan tidak ada saling mencela di antara mereka (wawancara dengan Kepala KUA, 8 Juli 2020). Namun demikian selama adanya COVID-19 ini masjid ditutup dan baru dibuka kembali sejak 12 Juli 2020 namun kegiatan pengajian belum dilaksanakan lagi.

Masjid Agung Ats-Tsauroh aktivitas keagamaannya berupa pengajian internal dan eksternal. Pengajian internal rutin yang dilaksanakan oleh masjid Agung Ats-Tsauroh yang diadakan pada setiap hari minggu yang dimulai dari jam 10.00 s/d selesai. Materi ceramah dan penceramah ditentukan oleh DKM dan pengurus masjid. Ada pengajian rutin setiap rabu malam kamis kegiatan dimulai setelah selesai shalat Isya sampai menjelang shalat subuh dengan melakukan zikir bersama, jamaah yang hadir hingga mencapai 100 orang ini dari tarekat Naqsyabandiyah.

Pengajian yang eksternal dilakukan oleh majelis taklim dari luar dengan meminjam tempat di masjid ini penceramah dan materi ditentukan sendiri dari majelis taklim atau lembaga yang meminjam tempat ini.

D. Kesimpulan

1. Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang tipologinya adalah masjid Agung, sedangkan Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Serang tipologinya adalah Masjid Jami'.
2. Masjid Agung Ats-Tsauroh bisa dikatakan moderat, karena di Masjid ini kegiatan pengajian ada dua kategori yaitu pengajian yang sipatnya internal dan ada pengajian yang bersifat eksternal, dan dalam kegiatan pengajian, kelompok apa pun boleh ikut;
3. Pengajian internal adalah pengajian yang biasa dilakukan oleh pengurus dari orang-orang Masjid Ats-Tsauroh itu sendiri sifatnya rutin seperti pengajian mingguan yang dilakukan setiap minggu dimulai dari pagi hari sampai dengan selesai; ada juga yang hari Rabu, Kamis dan Sabtu

4. Pengajian eksternal adalah pengajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga/ Masjid dari luar seperti :.pengajian yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal melakukan kegiatan pengajiannya dengan memakai tempat di Masjid Agung Ats-Tsauroh ini. Ada juga pengajian-pengajian yang dilakukan oleh TV-TV Swasta seperti TV One, Indosiar dan Global TV.
5. Kalau di Masjid Al-Ikhlas yang tampak adalah koperasinya dapat membantu warganya yang miskin bisa simpan pinjam uang kepadanya;
6. Di Masjid Al-Ikhlas ini juga disediakan celengan bagi jamaah yang mau menabung berapa saja sisa dari uang belanja mereka; Celengan itu nantinya setiap minggu diambil oleh petugas Masjid;
7. Pengajiannya internal saja dilakukan oleh jamaah warga itu sendiri, ada yang dilakukan setiap minggu ba'da maghrib;
8. Ada juga pengajian yang dilaksanakan ba'da shalat subuh, dengan diakhiri makan snack dan ngopi bersama.
9. Di Masjid Al-Ikhlas ini ada juga disediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis, dengan bekerja sama dari pihak Kimia Farma dan LAZ.
10. Di masa pandemi ini Masjid Al-Ikhlas ada gerakan amal umat yaitu memberikan sembako bagi warga yang terkena dampak peristiwa COVID-19 tanpa melihat agama dan sukunya.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan dan Masjid Agung Kota Sukabumi

Oleh: Ahsanul Khalikin

Penelitian ini dilakukan di Kota Sukabumi yang diidentifikasi memiliki bangunan masjid dengan fungsi sebagai pusat pendidikan moderasi beragama. Masjid dijadikan sebagai unit analisis penelitian pada kajian saat ini, dengan alasan sebagai "kontra narasi". Asumsinya bahwa ada prototipe masjid yang bercorak wasatiyah (tengah) yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai cara aksentuasi bahwa sebagai "rumah Tuhan" masjid harus menebarkan perdamaian. Diharapkan kajian ini dapat menemukan model pendidikan moderasi beragama di masjid yang dapat dijadikan model (replika) untuk masjid yang lain.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi, yaitu Masjid Agung Kota Sukabumi dan Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros. Pemilihan kedua masjid tersebut didasarkan bahwa sesuai kriteria masjid moderat: 1) pengurus masjid berasal dari ragam paham

keagamaan, ormas keagamaan kultur keagamaan, 2) Khatib, penceramah mengakomodasi lintas mazhab, 3) ritual peribadatan mengakomodasi ragam mazhab, 4) isi ceramah/khutbah menghargai berbagai mazhab dan paham keagamaan; 5) sumber bacaan mengakomodasi kitab-kitab lintas mazhab; dan 6) kelima karakteristik dimaksud terlembagakan dalam pendidikan moderasi beragama.

Penelitian ini diawali dengan kajian pustaka berupa pengumpulan dan pemilihan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan menjadi informasi dan/atau pemetaan awal para peneliti sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya, penggalian data ditempuh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber melalui metode bola salju. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informan baru bermodalkan informasi dari narasumber yang telah diwawancarai. Wawancara akan berakhir begitu peneliti merasa jenuh, dalam arti tidak ada kebaruan informasi yang didapat. Pengamatan lapangan selintas peneliti, selama melakukan penelitian lapangan, diharapkan dapat membantu penelitian ini agar menjadi seobjektif mungkin.

Informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yakni pengurus masjid dan masyarakat. Informan yang mewakili pengurus masjid adalah siapa saja yang terlibat secara aktif dalam proses moderasi beragama. Sementara dari kalangan masyarakat adalah masyarakat dan/atau jamaah yang memiliki rekam jejak dalam proses moderasi beragama.

Dalam pemetaan awal, informan pengurus masjid dapat diwakili oleh pengurus masjid maupun ormas Islam, kepala/pejabat Kementerian Agama Kota Sukabumi. Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat dapat diwakili oleh imam, muazin, jamaah,

pengelola yayasan pendidikan masjid, pengelola berbagai kegiatan masjid yang lainnya, panitia penyelenggara hari besar Islam (PHBI), pengurus ormas Islam lainnya, sebagai ormas yang secara terang-benderang menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Sehubungan dengan fokus yang ingin didalami dan berbagai keterbatasan yang melingkupinya, penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana pengurus masjid dan masyarakat melaksanakan moderasi beragama, guna memelihara dan meningkatkan moderasi beragama yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Dalam bahasa lain, apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh pengurus masjid beserta ormas keagamaan dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi, yang memiliki konsentrasi untuk mewujudkan toleransi aktif melalui moderasi beragama.

Dalam moderasi beragama yang dimaksud, penelitian ini menggali masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama dalam aspek: (1) pendidikan moderasi beragama di masjid yang dilakukan; (2) pengembangan pendidikan moderasi beragama dipilih sebagai salah satu program kemasjidan; (3) ide pendidikan moderasi beragama dipelopori dan respons jamaah serta masyarakat sekitar; (4) model pengembangannya; dan (5) faktor pendukung dan penghambat.

Adapun variabel untuk menggali pendidikan moderasi beragama tersebut adalah (1) cara pandang, sikap, dan praktik beragama; (2) harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) masjid sebagai pusat kontemplasi, pusat ritual, dan pusat kajian; (4) relasi agama dan negara berupa keberterimaan terhadap Pancasila sebagai bentuk nyata moderasi dalam konteks negara-bangsa; dan (5) faktor pendukung dan penghambat.

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kota Sukabumi

Awalnya daerah Sukabumi bernama Gunung Parang, dengan ibu kota Cikole. Daerah Sukabumi dari tahun 1815 sampai dengan pertengahan tahun 1921 merupakan bagian dari Afdeling (wilayah administratif) Kabupaten Cianjur dengan status Kabupaten Sukabumi di samping Gemeente (kotamadya) Sukabumi yang dibentuk tanggal 1 April 1914. Pada 1914 Sukabumi dijadikan Burgelijk Bestuur (pemerintah daerah) yang dipimpin oleh seorang Burgemeester (kepala daerah). Sejak tahun 1926 Gemeente Sukabumi dijadikan daerah otonom hingga tahun 1942. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, Gemeente Sukabumi diubah menjadi Sukabumi Shi dengan kepala pemerintah disebut Shityo (Eddy Sunarto, dkk. 2011)

Kemudian ketika Indonesia merdeka, status Kota Sukabumi berubah menjadi Kota Kecil Sukabumi yang dipimpin oleh Walikota hingga tahun 1957. Memasuki tahun 1958 hingga 1965 berubah menjadi Kotapraja Sukabumi. Statusnya kemudian berubah kembali menjadi Kota madya Sukabumi hingga tahun 1999 dengan kepala daerahnya Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi. Terakhir menjadi Kota Sukabumi sejak tahun 1999 hingga sekarang (Eddy Sunarto, dkk. 2011)

2. Keadaan Geografis

Kota Sukabumi secara geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106 ˚45’50” Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut,

dan berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung).

Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi: Sebelah Utara: Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Sebelah Selatan: Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Sebelah Barat: Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sebelah Timur: Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum. Jarak terjauh dari balai kota adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 Km. (Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Sukabumi)

3. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

Kota Sukabumi merupakan wilayah administratif tingkat II di provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi pertengahan tahun, jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2013 sebesar 311.822 jiwa dengan rincian: 158.175 penduduk laki-laki (50,73%) dan 153,647 penduduk perempuan (49,27%). Dengan luas wilayah sekitar 48 km2, kepadatan penduduk di Kota Sukabumi sekitar 6.496 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi berada di kecamatan Citamiang yang merupakan wilayah kecamatan tersempit dan berlokasi dekat dengan pusat perbelanjaan dan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Lembursitu (Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Sukabumi)

Di Kota Sukabumi, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Pada tahun 2013 hampir semua penduduk (sekitar 95.86%) tercacat beragama Islam, sedangkan selebihnya menganut agama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan lainnya. Hal tersebut secara

tidak langsung juga akan mempengaruhi jumlah tempat peribadatan yang ada, yakni masih didominasi oleh tempat peribadatan umat Islam yaitu Masjid, Mushola, dan Langgar sebanyak 1.129 atau 98,26% dari 1.149 tempat ibadah yang ada. (Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Sukabumi)

B. Temuan Lapangan-Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan

1. Sejarah Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan

Masjid Jami Ama Haji Umar atau yang sekarang dikenal sebagai Masjid Jami Ad-Da'wah, merupakan masjid bersejarah yang berada di wilayah Balandongan, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini didirikan pertama kali oleh Ama Haji Umar bin Abah H. Idum Rahimahumallah Ta'ala, seorang Tuan Tanah yang menguasai hampir seluruh tanah di wilayah kelurahan Sudajaya Hilir termasuk Balandongan, sebagian wilayah gedong Panjang, Lembur Pasir, Pasir Pogor hingga Pemakaman di Pangkalan.

Hingga kini hampir seluruh warga Balandongan merupakan keturunan Ama Haji Umar. Tercatat sudah ada enam generasi keturunan Ama Haji Umar yang ada di Balandongan. Jika satu generasi saja terdiri dari 50 orang, maka sedikitnya 300 penduduk Balandongan merupakan keturunan Ama Haji Umar. Ini tak mengherankan karena semasa hidupnya Almarhum Ama Haji Umar mempunyai empat orang istri. Dari keempat istrinya inilah lahir keturunan Ama Haji Umar yang hingga kini terus menyebar di wilayah Balandongan dan sekitarnya.

a. Warisan Ama Haji Umar

Meski dikenal mempunyai banyak anak dan istri, namun Ama Haji Umar merupakan suami yang sangat bertanggung jawab. Seluruh isteri dan keturunannya diberikan warisan berupa rumah, sawah maupun kebun. Begitu luasnya tanah yang dimiliki Ama Haji Umar, sehingga cucu dan cicit Ama Haji Umar hingga kini masih bisa menikmati sisa-sisa tanah warisan peninggalan Ama Haji Umar.

Banyak kisah yang diceritakan secara turun temurun terkait luasnya tanah Ama Haji Umar. Satu versi menyebutkan kala itu Ama Haji Umar keturunan orang terkaya di wilayah Sukabumi Cianjur yang kala itu dipimpin keresidenan oleh Balandongan sehingga seluruh tanah dibelinya. Saking banyaknya uang yang dimiliki Ama Haji Umar, sampai-sampai harus mengubur uangnya di kebun untuk mengelabui penjajah yang kerap merampas harta pribumi.

Sedangkan versi lain menyebutkan pada masa itu, wilayah Balandongan merupakan pusat Kota Sukabumi. Sehingga banyak jawara yang berdatangan dari berbagai wilayah untuk mengadu ilmu kanuragan di pusat Kota Sukabumi ini. Ama Haji Umar salah satu di antara jawara yang datang dari Banten dan berhasil mengalahkan jawara-jawara lainnya sehingga tanah miliknya menjadi yang paling luas.

Namun apa pun cerita turun temurun tersebut, fakta di lapangan, tanah warisan Ama Haji Umar memang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Sebagian anak dan keturunan Ama Haji Umar hingga kini masih memiliki tanah warisan Ama Haji Umar tersebut. Tidak hanya di Balandongan, melainkan menyebar dari wilayah gedong panjang, pasir pogor hingga lembur pasir.

Bahkan hingga kini tanah warisan Ama Haji Umar tersebut telah pindah tangan turun temurun hingga cucu dan cicitnya yang tersebar di wilayah kelurahan Sudajaya Hilir dan sekitarnya. Walaupun sebagian lainnya telah dijual dan berpindah tangan keluar garis keturunan Ama Haji Umar.

b. Periode Awal Masjid Jami Ama Haji Umar

Selain kaya raya, Ama Haji Umar juga dikenal agamis bahkan sebagian menyebutnya Mualim atau Kyai. Di masa hidupnya, Ama Haji Umar sempat mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk dijadikan masjid yang akan menjadi cikal bakal Masjid Jami Ad-Dawah yang kini berdiri megah. Meski tidak ada yang tahu secara pasti kapan Ama Haji Umar pertama kali mendirikan masjidnya, namun diperkirakan Ama Haji Umar telah mendirikan masjid ini sebelum tahun 1850-an Masehi. Sebab di batu nisan almarhum yang berada di Pemakaman Umum Pangkalan yang juga tanah wakafnya, tertulis tahun wafat almarhum tahun 1137 Hijriyah atau 302 tahun yang lalu.

Tahun 1137 Hijriyah Jika dikonversi ke tahun Masehi maka sama dengan tahun 1716 Masehi. Jadi bisa ditarik benang merah jika masjid yang didirikan Ama Haji Umar ini merupakan masjid Jami tertua yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir dan sekitarnya. Pada saat itu menurut para orang tua, warga yang berada di sekitar Lio, Cicadas, Ciwaringin, Pasir Pogor, Pangkalan dan Lembur Pasir, melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami Ama Haji Umar ini.

Pertama kali didirikan, konstruksi masjid yang dibangun Ama Haji Umar tidak semewah sekarang. Namun masih menggunakan bilik bambu dengan design bangunan panggung layaknya rumah tradisional sunda pada masa itu. Lantai masjid masih menggunakan

anyaman bambu atau dalam bahasa sunda disebut talupuh dengan luas bangunan diperkirakan sekitar 6m X 9m yang berada di tengah kebun agak menjorok ke dalam dari jalan utama.

Meski ukurannya relatif kecil, namun masjid ini sudah menyandang masjid Jami yang digunakan untuk salat Jumat. Hal ini sangat memungkinkan karena jumlah penduduk pada masa itu masih sangat sedikit. Masyarakat yang kala itu tinggal di sekitar Balandongan seperti Lio, Cicadas, Ciwaringin, Pasir Pogor, Pangkalan dan Lembur Pasir, melaksanakan salat Jumat di masjid yang didirikan oleh Ama Haji Umar ini. Sehingga pada masa itu masyarakat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Jami Ama Haji Umar karena dibangun oleh Ama Haji Umar di tanah milik Ama Haji Umar sendiri.

Diperkirakan kondisi masjid Ama Haji Umar pertama kali dibangun seperti ini (Istimewa). Di masa Ama Haji Umar, masjid ini sempat digunakan sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Termasuk seluruh anak-anak Ama Haji Umar dikenal aktif memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya anak bungsu Ama Haji Umar, almarhum Haji Sambas.

Haji Sambas yang juga anak bungsu Ama Haji Umar, terlebih dahulu hijrah dari Balandongan ke wilayah Cipoho, usai dikejar-kejar tentara Kolonial di masa pendudukan Belanda dan Jepang. Haji Sambas yang waktu itu masih bernama Soma, sampai harus mengganti namanya usai pulang menjalankan ibadah haji ke tanah suci, menjadi Haji Sambas guna menghilangkan jejak dari kejaran tentara Kolonial.

Hal ini mengakibatkan keturunan almarhum Haji Sambas dan keturunan Ama Haji Umar lainnya yang kebanyakan sejak lama

tinggal menetap di Balandongan harus kembali saling dikenalkan karena sempat terputus hubungan keluarga usai kepindahannya ke wilayah Cipoho. Memasuki tahun 1999, keturunan almarhum Haji Sambas mulai banyak yang kembali membangun rumah dan tinggal menetap bersama keturunan Ama Haji Umar lainnya di Balandongan.

c. Estafet Kasepuhan Masjid

Sejak kali pertama didirikan. Masjid ini di Kasepuhan oleh Ama Haji Umar hingga wafatnya. Lantas estafet perjuangan Kasepuhan masjid dilanjutkan putra pertamanya yang bernama almarhum Ama Cece Asy'ari dari istri ketiganya almarhumah Umi Ucung. Di masa ini masjid sempat dijuluki sebagai masjid Jami Asy'ariyah mengambil nama belakang Ama Cece Asy'ari yang menjadi Kasepuhan masjid Ama Haji Umar. Ama Cece meneruskan perjuangan ayahandanya Ama Haji Umar memakmurkan masjid dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga wafatnya sekitar tahun 1960-an.

Sepeninggal almarhum Ama Cece Asy'ari, Kasepuhan masjid kemudian dilanjutkan oleh putra pertama Ama Cece Asy'ari yang bernama KH. Sulaiman. Namun karena kondisi negara sedang mengalami pergolakan dan banyaknya gerombolan yang mengincar para kyai. Maka KH. Sulaiman sekitar tahun 1965 hijrah ke wilayah Kebon Kawung setelah selamat dari incaran pembunuhan. KH. Sulaiman berhasil menyelamatkan diri dari upaya pembunuhan usai salat subuh di masjid Ama Haji Umar.

Gerombolan yang kala itu sudah mengepungnya dan sempat masuk ke dalam masjid mencari KH. Sulaiman. Qadarallah, Allah menjadikan orang-orang yang berniat jahat kepada KH. Sulaiman tidak bisa melihat keberadaan KH. Sulaiman yang sedang berada

di Paimaran Imam. Maka berkat pertolongan Allah SWT, KH. Sulaiman akhirnya bisa keluar dari masjid Ama Haji Umar dengan selamat.

Untuk menjaga keselamatan keluarganya, KH. Sulaiman memutuskan hijrah ke wilayah Kebon Kawung bersama anak istrinya yang berdekatan dengan lokasi hijrah pamannya almarhum Haji Sambas. Selama hijrahnya KH. Sulaiman ke wilayah Kebon Kawung, estafet Kasepuhan masjid diteruskan oleh suami adik kandungnya yang bernama almarhum Mualim Oking.

Mualim Oking merupakan suami Almarhumah Ma Ciah anak kedua almarhum Mama Cece Asy'ari adik kandung KH. Sulaiman. Di masa itu, KH Sulaiman sempat membuka pesantren di wilayah Kebon Kawung sambil melanjutkan dakwahnya pulang pergi dari Kebon Kawung ke Balandongan.

Di masa KH. Sulaiman dan Mualim Oking, khatib Jumat dan penceramah di Masjid Jami Ama Haji Umar dilakukan secara bergiliran dengan mendatangkan seluruh Kasepuhan dari masjid-masjid kecil yang ada di sekitar Masjid Jami Ama Haji Umar. Dari masjid Al-Istiqomah kala itu diwakili oleh almarhum Mualim Zakariya, suami almarhumah Umi Jajah putri dari almarhum Haji Sambas, cucu Ama Haji Umar.

Dari masjid Wetan yang sekarang berubah nama menjadi masjid Jami Al-Mizan diwakili oleh almarhum Mualim Oking. Dari Kyai setempat diwakili almarhum Mualim Faung. Dari masjid Ath-Thohiriyah diwakili oleh almarhum Mualim Sholeh atau Mualim Oleh. Serta dari masjid Tanjakan Asem diwakili oleh almarhum Mualim Aos. Sehingga seluruh masjid yang kala itu berada di sekitar Masjid Jami Ama Haji Umar menjadi terwakili dan persatuan umat sangat terasa hingga awal tahun 1977-an.

d. Masjid Jami Ama Haji Umar berubah menjadi Masjid Jami Ad-Da'wah

Sepeninggal almarhum KH. Sulaiman dan Mualim Oking, estafet Kasepuhan masjid dilanjutkan oleh adik kandung KH. Sulaiman yang merupakan anak kelima Mama Cece Asy'ari yang bernama almarhum Mualim Zainal Abidin atau yang dikenal sebagai Mualim Idin. Di masa Mualim Idin masjid Jami Ama Haji Umar mengalami renovasi. Dinding bagian bawahnya mulai dibangun menggunakan tembok yang terbuat dari campuran bata merah, kapur dan tanah liat yang dibakar. Sehingga bangunan masjid kala itu menjadi semi permanen.

Pada masa inilah perkembangan Islam semakin dinamis. Adakalanya terjadi perbedaan pendapat terkait masalah furuiyah atau cabang dalam ibadah sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid lainnya di masa perkembangan Islam kala itu. Fanatisme ke-madzhaban masih sangat kental. Kadang kala masalah qunut dan tidak qunut bisa menjadi permasalahan serius. Untuk itulah para Kasepuhan di masjid yang berada di sekitar masjid Jami Ama Haji Umar memilih mendirikan masjid Jami sendiri dan melaksanakan salat Jumat terpisah dari masjid Jami Ama Haji Umar. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik horizontal antar jamaah.

Di antara yang memisahkan diri adalah almarhum Mualim Zakariya yang menjadikan masjid Al-Istiqomah menjadi Masjid Jami Al-Istiqomah dan memilih melaksanakan salat Jumat sendiri bersama jamaah masjid almarhum Mualim Oleh. Demikian pula almarhum Mualim Faung memilih mendirikan masjid sendiri bernama masjid Al-Ikhlas yang berada tak jauh dari Masjid Jami Ama Haji Umar untuk memfasilitasi jamaahnya yang bermadzhab Syafi'i yang qunut setiap salat subuh. Yang masih bertahan

hanyalah jamaah masjid wetan yang tetap salat Jumat di Masjid Ama Haji Umar hingga penghujung tahun 2016.

Memasuki tahun 1978, almarhum Mualim Idin yang berguru pada almarhum KH. Dadun Kohar Cibadak merubah nama masjid yang sebelumnya dikenal sebagai Masjid Jami Ama Haji Umar, menjadi Masjid Jami Ad-Da'wah atas saran almarhum KH. Dadun Kohar. Tak berselang lama, bangunan masjid kembali direnovasi menjadi bangunan permanen dengan lantai yang telah menggunakan tegel.

Namun karena kondisi perekonomian kala itu yang tidak seperti sekarang, semen dan besi sangat sulit ditemukan. Sehingga konstruksi bangunan masjid tidak menggunakan campuran semen dan besi. Melainkan hanya menggunakan kayu rasamala dan pohon kelapa sebagai tiangnya serta campuran kapur dan tanah merah yang dibakar untuk temboknya. Meski demikian, kondisi bangunan masjid tanpa besi dan semen ini mampu bertahan hingga akhir tahun 2017.

Kasepuhan almarhum Mualim Idin di Masjid Jami Ad-Da'wah berjalan hingga wafatnya pada tahun 1993. Untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya, estafet Kasepuhan masjid kemudian dilanjutkan oleh almarhum Mualim Endang Hasbullahuddin putra dari almarhum Abah Numri adik kandung almarhum Mama Cece Asy'ari yang juga cucu almarhum Ama Haji Umar dari garis keturunan Umi Ucung.

Di masa Kasepuhan Mualim Endang Hasbullahuddin bangunan masjid kembali mengalami renovasi sekitar tahun 1995. Sebagian bangunan masjid mulai menggunakan besi di tiang penyangga jendelanya serta mulai menggunakan jendela kaca. Kondisi bangunan masjid yang direnovasi Mualim Endang

Hasbullahudin tersebut bertahan hingga tahun-tahun berikutnya dan hanya mengalami sejumlah perbaikan dan renovasi hingga tahun 2017.

Sepeninggal almarhum Mualim Endang Hasbullahuddin, estafet perjuangan Kasepuhan masjid dilanjutkan oleh almarhum Mualim Zaenal Arifin atau yang dikenal sebagai Mualim Ejen. Almarhum Mualim Ejen merupakan cicit dari almarhum Ama Haji Umar dari garis keturunan Aki Hasid anak dari istri Ama Haji Umar yang bernama almarhumah Ma Enyeng.

Selama menjadi Kasepuhan masjid, Mualim Ejen didampingi oleh almarhum Mualim Usman adik kandung almarhum Mualim Oking yang tinggal di Balandongan wetan. Kasepuhan Mualim Ejen berlangsung hingga akhir hayatnya pada tahun 2004. Sepeninggal almarhum Mualim Ejen, estafet Kasepuhan masjid dilanjutkan oleh suami dari cucu Ama Haji Umar, yakni almarhum H. Abas Bhaskara yang sebelumnya merupakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid At-Taqwa yang berada di wilayah Cipoho Gang Sadar yang dibangun bersama masyarakat di Cipoho dan mertuanya almarhum Haji Sambas, anak bungsu Ama Haji Umar yang hijrah ke Cipoho di masa Kolonial.

Almarhum H. Abas Bhaskara merupakan mantan anggota RPKAD atau yang sekarang dikenal sebagai Kopassus yang menikah dengan Hj. Sopiah puteri dari almarhum Haji Sambas. Almarhum hijrah dari Cipoho ke Balandongan sekitar tahun 1999 setelah pensiun dari militer dan memilih hidup bertani dan membuka toko material di Balandongan. Almarhum menjadi Kasepuhan masjid hingga akhir hayatnya pada tahun 2008.

Sepeninggal almarhum H. Abas Bhaskara, Kasepuhan masjid untuk pertama kalinya beralih keluar garis keturunan Ama Haji

Umar, yakni ke Ustadz Dayat yang berasal dari Bogor. Kasepuhan diberikan keluar garis keturunan Ama Haji Umar karena keturunan Ama Haji Umar yang ada di Balandongan saat itu tidak ada yang sanggup meneruskan estafet Kasepuhan masjid. Sehingga Kasepuhan masjid diberikan kepada Ustadz Dayat asal Bogor.

Kasepuhan Ustadz Dayat berjalan dari tahun 2008 setelah wafatnya almarhum H. Abas Bhaskara hingga akhir tahun 2017 atau sekitar 9 tahun. Di masa Ustadz Dayat, masyarakat secara gotong royong mengumpulkan dana patungan membeli tanah milik keluarga almarhum Mualim Idin yang berada di depan masjid dengan luas sekitar 1,52 are, agar masjid mempunyai halaman.

Hampir seluruh masyarakat Balandongan dan keluarga besar almarhum Ama Haji Umar, baik yang tinggal di Balandongan maupun yang sedang merantau bekerja di luar pulau Jawa dan luar negeri, ikut terlibat mengirimkan uangnya untuk dititipkan melalui keluarganya yang berada di Balandongan. Hingga akhirnya masjid bisa mempunyai halaman dan posisi masjid tidak lagi berada di dalam gang melainkan berada di sisi jalan kampung yang juga dirintis oleh Ama Haji Umar.

e. Pembangunan Ulang Masjid Jami Ad-Da'wah

Memasuki tahun 2015, salah seorang cicit Ama Haji Umar bernama Ustadz Yudha Bhaskara yang merantau bekerja sebagai jurnalis di media televisi nasional selama 10 tahun di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat kembali ke Balandongan untuk menemani ibunya Hj. Neneng Sopiah. Kepindahan Ustadz Yudha dari Sumbawa ke Balandongan karena wilayah pekerjaannya yang semula di Pulau Sumbawa, dipindahkan oleh pihak kantornya ke wilayah Tangerang.

Saat mengetahui kepindahan cicit Ama Haji Umar, Ustadz Dayat yang juga mengaji di Majelis Ta'lim milik Hj. Neneng Sopiah, ibunda Ustadz Yudha, memintanya untuk bergabung memakmurkan masjid, karena masih keturunan Ama Haji Umar dan mempunyai background pesantren selama enam tahun di PP. Daaruttaqwa Cibinong Bogor dan PP. Almasthuriyah Sukabumi serta lulusan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tawaran itu ditolaknya dengan alasan tidak berani menambah beban tanggung jawab nanti di akhirat dan masih sibuk bekerja untuk menafkahi anak istri dan keluarganya. Namun tiga bulan kemudian, saat akan salat Jumat, di hadapan jamaah salat Jumat, Ustadz Dayat mengumumkan sendiri jika Jumat depan akan ada khatib baru bernama Ustadz Yudha anak dari almarhum H. Abas Bhaskara yang juga cicit Ama Haji Umar dan akan mulai menjadi khatib pada Jumat berikutnya.

Ustadz Yudha yang waktu itu masih bekerja di media televisi nasional SCTV, mau tidak mau harus mulai membagi waktunya antara pekerjaan dan tugas menjadi khatib Jumat dan penceramah pekanan di pengajian jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja di Masjid Jami Ad-Da'wah. Pada tahun 2016 kemudian ditetapkan menjadi Wakil Ketua DKM mendampingi Ustadz Dayat.

Di masa itulah rencana yang semula baru sebatas wacana untuk membangun ulang Masjid Jami Ad-Da'wah dari nol mulai direalisasikan. Seluruh pengurus dan jamaah masjid dikumpulkan di dalam Masjid Jami Ad-Da'wah untuk musyawarah bersama terkait wacana pembangunan ulang masjid. Saat itu pembangunan ulang harus dilakukan karena kondisi bangunan masjid yang sudah tua dan mulai rapuh, sehingga bisa membahayakan generasi selanjutnya.

Rencana ini sempat menjadi pro dan kontra. Sebagian tokoh masyarakat menganggap bangunan masjid masih layak dan seharusnya dana yang sudah terkumpul dijadikan dana produktif untuk memberi modal usaha jamaahnya. Namun asumsi ini ditentang oleh kepengurusan masjid saat itu. Bahkan Ustadz Yudha yang kala itu masih menjadi Wakil Ketua DKM langsung mendatangi sebagian Tokoh Masyarakat tersebut dan menjelaskan terkait kondisi masjid yang sebenarnya.

Kepengurusan masjid kala itu bersikeras, masjid harus dibangun ulang karena diperkirakan lima atau sepuluh tahun ke depan bangunan masjid akan ambruk. Sehingga generasi selanjutnya akan menanggung beban untuk membangun ulang masjid. Maka beban berat itu harus diambil alih oleh generasi sekarang, agar anak cucu generasi selanjutnya hanya tinggal menikmati dan fokus beribadah di masjid yang sudah dibangun oleh leluhurnya.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan di dalam masjid yang dihadiri hampir seluruh tokoh masyarakat, diputuskanlah jika masjid akan dibangun ulang. Untuk sementara pendanaan akan dilakukan secara swadaya melibatkan seluruh jamaah masjid, tanpa mengharap bantuan dari luar seperti dana hibah dari Arab ataupun bantuan instansi tertentu. Segala sumber daya jamaah pun diberdayakan dengan berbagai cara, demi terkumpulnya dana untuk pembangunan ulang masjid.

Sebagian jamaah ada yang menyanggupi ikut mengumpulkan dana melalui kotak amal yang disimpan di rumah masing-masing sebesar 2.000 rupiah per hari yang disebut dengan Koropak 2000. Namun setelah program Koropak 2000 berjalan, ternyata jumlah yang didapatkan tak bisa menutupi biaya pembangunan karena setiap satu pekan hanya terkumpul antara 1 juta rupiah hingga 1,5

juta rupiah. Sementara untuk biaya gaji pekerja saja mencapai 6 juta hingga 7 juta rupiah per pekan, belum lagi biaya belanja kebutuhan material selama pembangunan.

Jika pun tetap dipaksakan, maka pembangunan masjid bisa dilakukan paling cepat antara 6 hingga 10 tahun jika hanya mengandalkan Koropak 2000, atau bahkan bisa lebih lama lagi. Artinya masyarakat akan terbebani selama 10 tahun lebih untuk pembangunan masjid, karena rencana anggaran bangunan diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 Miliar Rupiah.

Maka digagaslah membentuk tim pencari dana yang beroperasi di Jalur Lingkar Selatan sebagai dukungan dana pembangunan agar estimasi lamanya waktu pembangunan bisa dipercepat antara 3 sampai 4 tahun. Pembentukan tim pencari dana di Jalur Lingkar Selatan awalnya menerapkan sistem komisi. Yakni tim pencari dana langsung mengambil uang komisi dari hasil infak sebesar 20% dari pendapatan.

Namun setelah dikaji secara fikih, hal tersebut masuk tasawwul atau meminta-minta yang diharamkan. Maka Ustadz Yudha mengubah sistem komisi 20% tersebut menjadi sistem gaji. Tim pencari dana di Jalur Lingkar Selatan statusnya sebagai pegawai masjid yang ditugaskan mencari dana untuk pembangunan dan digaji oleh masjid sebesar 70 ribu rupiah per orang per hari. Selain lebih besar pendapatannya juga lebih maslahat bagi tim pencari dana dan pembangunan masjid.

Sebagai bentuk motivasi untuk masyarakat, sebelum salat Idul Fitri pada tahun 2017, Ustadz Yudha berbicara di depan ratusan jamaah Masjid Jami Ad-Dawah terkait rencana pembangunan ulang masjid dengan menyatakan keluarganya siap menyediakan seluruh bata merah selama pembangunan masjid hingga selesai.

Motivasi ini laksana gayung bersambut, para Aghniya yang ada di masjid Jami Ad-Da'wah, dan para Pembina Masjid, turut mengulurkan tangannya dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembelian material pembangunan masjid sesuai dengan kemampuannya.

Di antara yang turut menyuplai material bangunan masjid adalah Keluarga besar Hj. Sopiah cucu Ama Haji Umar dan keluarga Kolonel Saepul MG yang bersedia membantu pembangunan masjid dengan menyediakan puluhan ribu bata merah hingga pembangunan selesai, ratusan sak semen serta sejumlah truck pasir dan split untuk pengecoran. Demikian pula keluarga besar Pembina Masjid lainnya yakni keluarga H. Asep Syamsuddin turut memberikan dana cash pada awal pembangunan, sejumlah material, kelistrikan dan suplay konsumsi selama pengecoran masjid dari awal hingga selesai.

Pun para pembina masjid lainnya seperti Bapak Hardian Wiracahya turut memberikan dana pribadinya serta menggalang dana dari relasinya, serta Hj. Lilis Haji Burhan selaku cicit Ama Haji Umar yang turut mewakafkan granit untuk sebagian lantai satu. Keluarga besar almarhum Mualim Endang Hasbullahuddin yang turut menyumbangkan hartanya demi terlaksananya pembangunan ulang masjid. Keluarga besar almarhumah Hj. Zubaidah serta seluruh jamaah masjid Ad-Da'wah yang ikut mengisi Koropak 2000 seluruhnya ikut berjuang demi selesainya pembangunan masjid ini.

f. Periode Awal Pembangunan Ulang Masjid

Tepatnya pada tanggal 9 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1438 Hijriyah, masjid jami yang didirikan oleh Ama Haji Umar mulai dibangun ulang. Dengan dana awal yang terkumpul sekitar 180 juta rupiah, pembangunan masjid dimulai

dengan memperkerjakan sekitar 12 pekerja bangunan. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap, bangunan lama tidak langsung dirobohkan agar jamaah bisa tetap melaksanakan salat lima waktu dan pengajian, tetapi bangunan baru didirikan di luar bangunan lama dengan sistem "Gelong" atau ditelan.

Pembangunan dimulai dari bagian depan masjid dengan mengutamakan tempat wudhu agar jamaah bisa leluasa mengambil air wudhu meski pembangunan sedang berjalan. Selama proses pembangunan ulang ini, ketidaknyamanan beribadah sangat terasa. Walaupun masjid masih bisa digunakan untuk kegiatan salat lima waktu dan pengajian. Namun kegiatan salat Jumat tidak bisa dilaksanakan karena atap bangunan sudah mulai dirobohkan dan sangat membahayakan jamaah. Sehingga pelaksanaan salat Jumat terpaksa dipindahkan ke halaman rumah pembina masjid H. Asep Syamsuddin untuk menjaga keselamatan jamaah.

Selain atap yang sudah dirobohkan, kondisi tembok bangunan utama yang sudah rapuh juga sangat membahayakan. Bangunan utama masjid tidak menggunakan besi sebagai tiangnya melainkan hanya menggunakan kayu rasamala dan pohon kelapa yang sudah dibangun sejak tahun 1978-an atau telah berusia 39 tahun.

Hanya karena adanya perlindungan dari Allah-lah bangunan lama masjid masih bisa tegak berdiri meski sudah beberapa kali mengalami gempa bumi. Padahal saat dirobohkan pada tahun 2017, tembok bangunan utama masjid begitu mudahnya roboh. Hanya sekali dorong menggunakan bambu, tembok bangunan utama masjid yang dibangun sejak tahun 1978-an itu langsung rata dengan tanah.

Hari berganti, bulan berjalan. Tanpa terasa pembangunan telah berjalan selama enam bulan. Namun progres pembangunan

terasa sangat lambat. Meski selama enam bulan itu masyarakat "diwajibkan" menyediakan makanan untuk pekerja bangunan. Namun kinerja para pekerja dinilai lambat dan banyak menuai kritikan dari masyarakat.

Untuk pembangunan tempat wudhu dan toilet saja, selama satu bulan setengah tidak selesai sehingga membuat Ustadz Yudha berang dan memarahi para pekerja. Setelah dimusyawarahkan dengan pengurus dan masyarakat. Maka untuk sementara pekerjaan pembangunan masjid dihentikan.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mencari tim pekerja baru menggantikan tim pekerja lama agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun setelah satu pekan diliburkan, belum juga menemukan tim pekerja yang baru, maka Ustadz Yudha menghubungi tim pekerja dari Parung Seah agar pembangunan ulang masjid bisa segera dimulai kembali. Sehingga terkumpul lah sekitar 10 orang pekerja yang diberikan pengarahan agar bekerja secara sistematis, cepat dan efektif. Dengan konsekuensi jika banyak menuai kritikan dari masyarakat akan siap diberhentikan kapan pun.

Beban masyarakat yang selama ini harus menyediakan jamuan makan untuk pekerja senilai 100 ribu rupiah per kepala keluarga juga dihapuskan oleh Ustadz Yudha karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Seluruh pekerja diterapkan sistem "lepasan" tidak lagi disuguhi jamuan makan. Akan tetapi masyarakat yang tetap ingin memberi makanan dan menyumbang ke masjid bisa mengantar nya sendiri, atau menggantinya dengan uang seikhlasnya yang akan dipergunakan untuk pembelian bahan material bangunan masjid.

Di saat pembangunan masjid baru berjalan 20%, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2017 di hadapan masyarakat sebelum salat

Jumat Ustadz Dayat menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DKM karena alasan sakit di bagian kepala dan tidak lagi sanggup mengurusi pembangunan masjid. Untuk menghindari kekacauan saat proses pembangunan, maka tanggung jawab pembangunan dilanjutkan sementara oleh wakil Ketua DKM Ustadz Yudha.

Pembangunan ulang Masjid Jami Ad-Da'wah tetap berjalan dan diusahakan agar memberikan progres yang memuaskan untuk masyarakat. Segala bentuk pengeluaran yang tidak perlu dihapuskan oleh Ustadz Yudha demi efisiensi anggaran. Pekerjaan bangunan dilakukan secara sistematis dengan dikomandoi langsung oleh Ustadz Yudha. Setiap pagi para pekerja dikumpulkan dan dilakukan pembagian tugas masing-masing agar pekerjaan pembangunan masjid yang baru berjalan 20% bisa segera diselesaikan.

Pekerjaan mulai menggunakan sistem target per-minggu. Setiap pekerja diharuskan menyelesaikan pekerjaannya sesuai target agar pembangunan masjid bisa dipercepat. Sehingga masyarakat pun turut terpancing semangatnya dan selalu hadir setiap kali diumumkan kerja bakti di masjid.

Tak berselang lama, sebanyak 13 orang atas nama tokoh masyarakat Balandongan yakni. H. Asep Syamsuddin, Uwen Juweni, Aih Susandi, Hendra Bachtiar, Ujang Syarifudin, Babas, Acu, Nandar, Adi Supyan, Wahyu, Abah Oman, Hilman, dan Abah Rokib membuat petisi dengan tanda tangan mengangkat Ustadz Yudha Bhaskara, SHI sebagai Ketua DKM Masjid Jami Ad Da'wah menggantikan Ustadz Dayat. Keputusan hasil musyawarah masyarakat ini diumumkan sendiri oleh Ustadz Dayat di hadapan ratusan jamaah saat salat Jumat di halaman rumah H. Asep Syamsuddin.

Keputusan ini sempat ditolak oleh Ustadz Yudha karena pada awalnya hanya dipersiapkan untuk menggantikan sementara tugas Ketua DKM yang sakit, bukan menggantikan secara permanen. Terlebih begitu beratnya tanggung jawab memimpin masjid yang baru saja dirobohkan.

Kondisi masjid yang baru 20% progres pembangunannya, dipastikan akan memerlukan perjuangan panjang dan sangat menyita waktu untuk bisa kembali tegak berdiri. Namun setelah salat istikharah meminta petunjuk pada Allah dan bermimpi sebanyak tiga kali, atas bujukan pembina masjid H. Asep Syamsuddin, akhirnya Ustadz Yudha menerima tanggung jawab berat melanjutkan pembangunan masjid dan kepemimpinan DKM Masjid Jami Ad-Da'awah sepenuhnya.

Keraguannya mereda setelah dari hasil istikharahnya diperlihatkan dalam mimpinya bertemu dengan seseorang yang membawanya keliling Masjidil Haram, Air Zam-zam dan Ka'bah. Kemudian bermimpi lagi melihat kondisi masjid sudah jadi lengkap dengan kubahnya. Saat masuk ke dalam masjid dalam mimpinya, melihat almarhum ayahandanya H. Abas Bhaskara bersama sembilan orang lainnya yang diperkirakan Kasepuhan masjid, seluruhnya memakai pakaian serba putih, dan sorban putih sedang berdzikir berkumpul di dalam masjid dan seluruhnya melihat ke arah Ustadz Yudha sambil tersenyum.

Terakhir Ustadz Yudha bermimpi saat melihat pengecoran lantai tiga, atap masjid roboh. Untuk mimpi yang ketiga ini langsung diberitahukan kepada para pekerja bangunan dan diperintahkan agar memperkuat tiang penyangga coran untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Namun qadarallah, pada saat pengecoran lantai tiga mimpi itu terjadi, dua lembar bondek roboh dan menjatuhkan sekitar empat molen coran semen ke lantai dua dengan suara dentuman yang sangat keras hingga seluruh pekerja dan masyarakat yang sedang gotong royong di lantai tiga dan lantai dua berlarian menyelamatkan diri ke lantai dasar, beruntung pada saat kejadian itu tidak sampai jatuh korban jiwa.

g. Kepemimpinan Cicit Ama Haji Umar

Ustadz Yudha Bhaskara, SHI merupakan cicit kandung almarhum Ama Haji Umar. Mempunyai ibu bernama Hj. Neneng Sopiah yang menikah dengan almarhum H. Abas Bhaskara purnawirawan RPKAD. Hj. Neneng Sopiah merupakan anak kandung dari Haji Sambas. Haji Sambas adalah anak bungsu Ama Haji Umar dari istri ketiganya Umi Ucung.

Di bawah kepemimpinan Ustadz Yudha, pembangunan masjid yang baru berjalan 20% dilanjutkan. Seluruh pekerja bangunan yang dinilai kurang produktif, diganti untuk efisiensi anggaran dan kecepatan proses pembangunan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan masjid didata ulang dan dipisahkan antara dana pembangunan masjid dengan dana kas operasional masjid, agar kegiatan masjid bisa tetap berjalan meskipun sedang menjalani pembangunan.

Sumber dana pembangunan masjid dikhususkan dari Koropak 2000, penggalangan dana di Jalur Lingkar Selatan, Uang Penggani Ransum dan infak pribadi masyarakat. Sementara uang dari kotak amal Hari Jumat, pengajian Bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu dikhususkan untuk Kas Operasional Masjid serta Kas Anak Yatim. Sehingga seluruh kegiatan masjid bisa tetap berjalan meski masjid sedang dalam tahap pembangunan ulang.

Laporan keuangan pun direformasi. Pengelolaannya wajib transparan dan akuntabel. Bagi pengurus yang tidak sanggup akan diganti oleh pengurus yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan laporan keuangan diubah total dan dibuka seluas-luasnya ke khalayak umum dengan cara diumumkan setiap hari Jumat dan disebarkan secara online melalui media Whats Apps Grup Masjid dalam format pdf.

Kepengurusan diharuskan mengedepankan pelayanan kepada jamaah bukan untuk dilayani. Sistem gaji per bulan mulai diterapkan kepada empat pengurus masjid yang selama ini menangani kebersihan dan muadzin sesuai dengan kemampuan masjid kala itu. Untuk Imam salat subuh diharuskan digilir karena selama ini jamaah masjid yang qunut merasa tidak terwakili, sehingga imam salat subuh harus digilir antara yang qunut dan yang tidak qunut.

Bagi jamaah yang ingin salat qabliyah sebelum khutbah Jumat juga diberikan waktu. Sehingga semua pihak merasa diberikan kesempatan yang sama. Kegiatan pengajian Yasinan malam Jumat diaktifkan kembali dan peringatan malam Nisfu Sya'ban serta salat gerhana bulan dan gerhana matahari digalakkan.

Menjelang Idul Fitri, seluruh jamaah teladan yang istiqomah salat berjamaah di masjid Jami Ad-Da'wah dan yang rajin kerja bakti selama pembangunan masjid diberikan insentif berupa baju koko, kain sarung dan mukena baru untuk lebaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan masjid kepada jamaahnya yang sangat antusias memakmurkan masjid dan turut kerja bakti selama pembangunan.

Penghargaan atau reward itu sejatinya tak seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan masyarakat untuk menyelesaikan

pembangunan masjid. Namun itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian meskipun masjid sedang menjalani masa pembangunan. Masyarakat kala itu tak peduli panas dan hujan, setiap kali diumumkan kerja bakti, masyarakat selalu datang berbondong-bondong sehingga pembangunan masjid benar-benar sangat terbantu berkat adanya bantuan dari seluruh jamaah masjid yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kerja bakti di Masjid Jami Ad-Da'wah.

Sebagai timbal balik dan untuk meringankan beban masyarakat. Ustadz Yudha juga menghapuskan pungutan uang kematian. Tetapi dengan jaminan seluruh Jamaah Masjid Ad-D'awah yang meninggal dunia tetap akan ditanggung seluruh biaya pemulasaraan jenazahnya berupa pemandian mayit, kain kafan dan biaya penguburan jenazah oleh Masjid. Setiap satu bulan sekali jamaah yang istiqomah salat berjamaah di masjid diberikan penghargaan secara bergilir agar kebutuhan alat rumah tangganya sedikit terbantu. Di antaranya dengan membagikan rice cooker, mixer, blender, kompor gas, dispenser, setrika dan lain sebagainya agar jamaah semakin semangat salat berjamaah.

Sunnatullah pun terjadi, ketika seseorang lebih menyenangi hal yang sifatnya ukhrawi, maka dunia akan menjauh darinya. Terlalu asyik dengan kegiatan di masjid, konsentrasi Ustadz Yudha terpecah antara memilih tetap fokus dalam pekerjaannya sebagai Jurnalis di media televisi nasional SCTV-Indosiar atau fokus dalam dakwah dan pengabdian kepada masyarakat di masjid? Hingga akhirnya Ustadz Yudha memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Jurnalis, agar bisa lebih fokus menyelesaikan pembangunan dan pengabdian di sisa umurnya untuk agama Allah dengan segala risiko yang harus ditanggungnya.

Berbekal relasi dan koneksi serta dukungan dari seluruh pembina masjid, Ustadz Yudha mulai bergerak mendatangkan donatur untuk membantu mempercepat pembangunan masjid. Satu persatu donatur berdatangan menyumbangkan hartanya agar pembangunan Masjid Jami Ad-Da'wah bisa dipercepat. Para donatur berdatangan ke masjid diawali datangnya puluhan Kyai dan Asatidz yang tergabung dalam Majelis Khatmil Quran yang datang bersilaturahmi dan mengkhatamkan Al-Quran di Masjid Jami Ad-Da'wah.

Sebagian di antara para Kyai dan Asatidz yang datang tersebut merupakan kawan satu pesantren dengan Ustadz Yudha. Para Kyai ini datang untuk mendoakan pembangunan dan mengkhatamkan Al-Quran di Masjid agar pembangunan masjid diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Sekaligus menyampaikan amanah dana bantuan senilai 25 juta rupiah dalam bentuk besi batangan berbagai ukuran untuk keperluan tiang penyangga lantai dua masjid. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ustadz Ismatullah pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah yang diterima langsung oleh Ustadz Yudha yang sama-sama alumni Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Tipar Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Demikian pula Komandan Kodim Sukabumi Letkot. Inf. Mohammad Mahfudz As'at yang diundang langsung oleh Pembina Masjid Kolonel. Arh. Saepul MG turut datang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid dalam bentuk 168 sak semen. Demikian pula dari Perwira Menengah di Sesko TNI, serta rekan-rekan SMA Kolonel Saepul MG, yang juga kakak iparnya Ustadz Yudha, turut menyumbangkan uangnya hingga puluhan juta rupiah yang dipergunakan untuk pembelian material bangunan. Tak ketinggalan keluarga besar CEO PT. Nuansa Ilham, H. Isep

yang juga sepupu Ustadz Yudha, ikut memberikan sumbangannya berupa semen dan kaligrafi stainless yang dipasang di bagian depan masjid.

Waktu pun terus berjalan. Dalam hitungan dua bulan lantai satu dan dua masjid telah selesai dikerjakan. Donatur pun silih berganti terus berdatang menitipkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami Ad-Da'wah. Hingga akhirnya Ustadz Yudha dipertemukan dengan salah seorang dermawan bernama Abah Haji Dodi Kardian, SH putra dari almarhum Abah Ajun Junaedi Tipar. Dari pertemuan ini terungkap jika ayahanda Abah Haji Dodi merupakan rekan sejawat ayahanda Ustadz Yudha, almarhum H. Abas Bhaskara. Maka silaturahmi kedua orang tua ini pun dilanjutkan oleh silaturahmi kedua anaknya.

Abah H. Dodi yang sebelumnya dikenal sering membantu pembangunan ratusan masjid di Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada awal bulan Maret 2018 memutuskan ingin melihat langsung proses pembangunan dan mendatangi masjid dengan membawa tujuh rol Karpet Turki untuk disumbangkan ke Masjid Jami Ad-Da'wah. Berkat sumbangannya seluruh lantai satu Masjid Jami' Ad-Da'wah dari depan hingga belakang bisa tertutupi karpet sehingga ibadah jamaah menjadi lebih nyaman.

Bahkan saat kunjungan pertamanya ke Masjid Jami' Ad-Da'wah itu, keperluan cat tembok dan keperluan pengairan untuk wudhu jamaah dibiayai seluruhnya Oleh Abah Haji Dodi dengan mengirimkan cat tembok Jotun dan Lenkote serta tim pekerja untuk pengeboran air lengkap dengan toren kapasitas 1050 liter dan mesin jetpamnya. Serta untuk keperluan audio masjid berupa 6 buah speaker Toa lengkap dengan Ampli Toa 240 Watt diberikan langsung oleh Abah Haji Dodi kepada Ustadz Yudha.

Tidak berhenti sampai di sana. Abah H. Dodi kembali menawari Ustadz Yudha terkait keperluan besi Ribdeck atau Boundeck serta besi Wiremesh untuk keperluan seluruh lantai tiga. Bahkan saat Abah H. Dodi berada di Tanah Suci saat sedang menjalankan Ibadah Umrah, kerap menelpon Ustadz Yudha menanyakan berapa keperluan Besi Boundeck dan Wiremesh untuk lantai tiga agar pembangunan masjid bisa segera diselesaikan.

Hingga akhirnya sepulang menjalankan ibadah umrah, besi Boundeck serta besi Wiremesh senilai 73 juta rupiah diantar langsung oleh Abah Haji Dodi ke Masjid Jami Ad-'Da'wah dan diterima langsung oleh Ustadz Yudha dan Pembina Masjid Kolonel. Saepul MG. Langsung dinaikkan ke lantai dua masjid oleh masyarakat dengan penuh antusias, agar bisa segera digunakan.

Berkat bantuan besi Boundeck dan Wiremesh dari Abah Haji Dodi ini pembangunan lantai tiga Masjid Jami Ad-Da'wah dengan ukuran luas bangunan 14 m X 25 m bisa selesai hanya dalam waktu lima bulan usai serah terima jabatan ketua DKM dari Ustadz Dayat kepada Ustadz Yudha. Tidak hanya itu, sebanyak empat buah kubah masjid juga disanggupi seluruh biayanya oleh Abah Haji Dodi dengan nilai sekitar 180 juta rupiah.

Alasannya cukup membuat merinding bagi siapa saja yang selama ini merasa dirinya lebih mengerti soal agama. Abah Dodi berbicara langsung kepada Ustadz Yudha, beliau ingin sebelum ajal datang menjemput, hartanya sudah habis untuk kepentingan agama agar kelak di akhirat beliau mempunyai bekal. Sebuah cita-cita mulia yang kemungkinan belum tentu bisa dilakukan oleh kyai sekalipun.

Maka diakui ataupun tidak, bantuan yang datang terus menerus dari Abah Haji Dodi ke masjid Jami Ad-Da'wah ini sangat

meringankan beban seluruh jamaah masjid yang semestinya harus menanggung beban dan tanggung jawab selama 4 tahun bahkan bisa jadi 10 tahun ke depan untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Namun berkat bantuan dari Abah Haji Dodi hanya dalam waktu enam bulan Ustadz Yudha bisa menyelesaikan pembangunan masjid hingga 90% lengkap dengan kubah utama yang telah berdiri megah di lantai tiga.

Bahkan lantai satu dan lantai dua masjid sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun 1439 H yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2018 atau hanya 11 bulan lebih usai pembangunan pertama yang dimulai pada tanggal 15 Syawal 1438 H atau tanggal 9 Juli 2017. Jika dikalkulasi dengan logika, tentu pembangunan masjid dengan anggaran 1,3 Miliar Rupiah dengan luas 14m X 15m tiga lantai dengan jumlah tiang fondasi beton lebih dari 30 tiang seperti ini tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat hanya 11 bulan sudah selesai 90% pengerjaannya jika tidak ada pertolongan dari Allah SWT melalui tangan para donatur.

Terlebih masyarakat setempat tak satu pun yang sanggup menutupi kekurangan anggaran hingga Setengah Miliar Rupiah seperti yang dilakukan oleh Abah Haji Dodi. Untuk itu, seluruh jamaah Masjid Jami Ad-Dawah selayaknya berterima kasih kepada seluruh para dermawan yang digerakkan hatinya oleh Allah SWT hingga mau menyisihkan hartanya untuk selesainya pembangunan masjid.

Kenyamanan ibadah seluruh jamaah Masjid Jami Ad-Da'wah pada hari ini merupakan buah kebaikan seluruh dermawan yang datang menginfakkan hartanya saat pembangunan dan pengembangan masjid. Sejatinya mereka tidak akan rugi jika masjid ini tidak selesai. Mereka bisa saja menggunakan harta dan

waktunya untuk keperluan yang lain yang bisa jadi jauh mereka perlukan daripada menyumbang ke masjid.

Namun karena hati mereka telah digerakkan oleh Allah, maka jumlah ratusan juta yang menurut sebagian orang merupakan jumlah yang sangat besar. Bisa menjadi kecil untuk orang-orang yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah SWT. Waktu dan harta yang sangat berharga untuk kepentingan dunia, dengan ringan mereka korbankan untuk kemakmuran masjid Jami Ad Dawah.

Namun tidak semata Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi melainkan akan menjadi sunnatullah akan adanya dua mata koin yang berbeda dalam kehidupan. Ketika ada kebaikan di situ akan selalu bersilang dengan keburukan. Kebaikan Abah Haji Dodi dan kerja keras Ustadz Yudha untuk mempercepat pembangunan masjid tetap saja akan melahirkan hitam putihnya sejarah. Sempat beredar isu jika masjid telah digadaikan oleh Ustadz Yudha untuk kepentingan politik sesaat, karena pada pembangunan masjid bertepatan dengan perhelatan Pilkada di Kota Sukabumi.

Namun waktu pun menjawab dengan sendirinya. Usai Pilkada, apa yang difitnahkan tak terbukti. Donatur yang menyumbang ke masjid Jami Ad-Da'wah sedari awal memang didasari keikhlasan, hanya saja bertepatan dengan momen Pilkada sehingga dengan mudah dibelokkan oleh orang-orang yang tak mampu menyumbang ke masjid seakan penuh kepentingan Pilkada.

Namun usai Pilkada, tak perduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bantuan untuk mempercepat pembangunan Masjid Jami Ad-Da'wah justru tetap mengalir. Abah Haji Dodi kembali mengirimkan 210 dus granit untuk seluruh lantai dua dengan nilai 33 juta rupiah lebih. Bahkan di lantai tiga masjid dipercantik dengan diteruskannya pembangunan dua buah kubah yang seluruhnya

dibiayai oleh Abah Haji Dodi. Bahkan untuk kaligrafi kubah bagian dalam dan pemagaran seluruh lantai dua menggunakan stainless dengan harga puluhan juta rupiah juga dibiayai Abah Haji Dodi karena kedekatannya dengan Ustadz Yudha. Ternyata dalam kehidupan, apa yang kita lihat belum tentu itu yang terlihat.

Ketika seseorang datang membantu kita, selayaknya kita berbaik sangka padanya. Bisa jadi mereka yang datang ke kita merupakan hasil doa permintaan kita pada Allah. Begitu indahnya Allah menurunkan bantuan-Nya kepada hamba-Nya. Ketika kita menginginkan masjid segera selesai pembangunannya. Allah tidak menurunkan bantuannya langsung menjatuhkan semen atau menara dari langit. Melainkan Allah akan mengutus siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya untuk menyampaikan rezeki yang hakikatnya dari Allah.

Tujuannya agar manusia bisa saling berterima kasih sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah seseorang disebut pandai bersyukur pada Allah, jika dia tak pandai bersyukur pada manusia." Karena hakikatnya, manusia yang datang membantu kita merupakan jawaban dari permintaan kita pada Allah SWT. Demikian pula kepada seluruh donatur yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masjid. Sudah semestinya kita berterima kasih pada mereka, sebagai bentuk terima kasih kita pada Allah SWT.

Bukan saja harta, tapi tenaga juga harus kita hargai. Termasuk ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang begitu antusiasme terhadap pembangunan masjid ini. Baik dari internal jamaah masjid Ad Da'wah, maupun jamaah dari masjid lainnya seperti jamaah masjid Al-Ikhlas, jamaah Masjid Al-Mizan dan jamaah Masjid Al-Istiqomah yang turut berperan

penting sehingga pembangunan masjid bisa begitu cepat selesai. Seluruhnya harus diberikan apresiasi yang tinggi. Karena tanpa keberadaan mereka, Masjid Jami Ad-Da'wah tentu belum tentu bisa seperti sekarang.

Suka duka. Pahit manis selama proses pembangunan masjid dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat selama pembangunan. Tak terhitung jamaah yang terluka dan merasakan teriknya matahari selama pengecoran lantai dua dan lantai tiga masjid. Seluruhnya harus kita apresiasi. Karena tanpa kebersamaan, mustahil masjid bisa berdiri megah dengan kondisi 90% hanya dalam waktu 11 bulan. Yang sangat jauh dari perkiraan awal. Hingga sejarah ini ditulis, pembangunan Masjid Jami Ad-Da'wah masih terus dilakukan dengan target keseluruhan bangunan masjid akan selesai dalam jangka waktu 1,5 tahun, Insya Allah.

h. DKM Masjid Jami Ad-Da'wah 2018

Begitu luar biasa Jamaah Masjid Jami' Ad Da'wah, meski kondisi masjid berada dalam masa-masa sulit, namun para aghniya di internal Masjid Jami' Ad Da'wah tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-Nya. Di tengah masa pembangunan yang masih terus berjalan, kegiatan kurban pada Idul Adha tahun 1439 Hijriyah tetap berjalan. Bahkan syukur Alhamdulillah... Di tengah masa-masa sulit masjid masih bisa kurban dua ekor Kerbau dan tiga ekor Domba... Jazakumullah untuk seluruh Jamaah yang telah berkurban dan menjadi panitia kurban semoga menjadi amal sholeh untuk kita... Amin...

Kedatangan bantuan kubah dan menara dengan nilai ratusan juta rupiah dari salah seorang pembina dan donatur masjid Abah Haji Dodi disambut baik oleh seluruh Jamaah dengan bahu membahu membantu proses penurunan dari Truck hingga

pengangkatan ke lantai tiga masjid. Qadarallah, cita-cita awal pembangunan yang menginginkan kubah, diijabah Allah melalui jalan silaturahmi dan hubungan baik tanpa mengeluarkan dan ataupun membebani masyarakat.

2. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi bersifat independen, mulai awal membangun masjid melibatkan masyarakat secara swadaya dengan kemampuan masing-masing jamaah ataupun masyarakatnya. Biaya pembangunan masjid sekarang ini sudah mencapai 2 miliar lebih, tidak minta bantuan satu rupiah pun dari pemerintah.

Kepengurusan masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan berbagai macam sumber daya manusia (SDM) dilibatkan, tidak hanya alumni pesantren di antaranya seperti; Harjani (pimpinan Bank Sutra Pusat), Kolonel. Saepul (Mabes Polri), H. Asep Samsuddin (Bisnismen Kurnia Meubel - Sukabumi) mereka itu pembina Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan.

Berbagai macam gagasan, ilmu ada pada pengurus masjid, termasuk dalam penerapannya tidak hanya fokus ibadah mahdah. Salat fardhu lima waktu, salat Jumat, salat Idul fitri dan Idul Adha, tarawih Ramadhan, pengajian bapak-bapak malam rabu, pengajian ibu-ibu rabu pagi, pengajian remaja masjid malam Selasa, pengajian anak-anak setiap ba'da magrib, pelatihan qori ba'da Ashar.

Di samping itu pengurus masjid mendidik masyarakat dalam bidang ekonomi, membangun BMT (Baitul Maal Watha'mil Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan) dengan aset mencapai 150 juta rupiah. Warung usaha mikro di sekitar masjid hampir seluruhnya

dipinjamkan modal antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- tanpa bunga.

Termasuk dimasa COVID-19 yang lalu (Maret – Juli 2020) banyak membantu masyarakat membagi sembako 100 paket, kegiatan ini tidak minta bantuan ke pemerintah malahan meringankan beban pemerintah. BMT Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan sistemnya semacam koperasi, anggotanya menabung Rp. 20.000,-/bulan, namun kendalanya kadang terjadi macet penunggakan.

Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan sudah memiliki mobil ambulance sendiri menggunakan dana BMT Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan, membayar nyicil dengan cara kas masjid ke BMT masjid subsidi silang, tidak mengandalkan bantuan jamaah. Bila ada gagasan bisa berjalan sendiri anggarannya, termasuk pengadaan kurban satu minggu sudah ada dua sapi.

Ketua DKM masjid hanya menyampaikan gagasan selanjutnya di musyawarahkan, sebab SDM-nya berbagai macam karakter dan latar belakang cepat meresponsnya. Pertama, kesadaran jama'ah sudah bagus, tidak bergantung kepada bantuan luar. Kedua, ibadah mahdah rutin. Ketiga, pengajian selalu dilaksanakan termasuk bidang ekonomi.

a. Isu Keagamaan yang Berkembang di Masyarakat dan Direspons Masjid dalam bentuk Moderasi Beragama

Pengurus Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan semasa COVID-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga sekarang selalu berpegang kepada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah virus COVID-19. MUI menyebut sejumlah ibadah, seperti majelis taklim, salat Jumat berjamaah, salat wajib berjamaah, salat tarawih, dan salat

Ied. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi. Dewan Masjid Indonesa sebagai salah satu ormas keagamaan juga mengeluarkan berbagai surat edaran terkait salat berjamaah maupun salat Jumat di masa Pandemi COVID-19.

Kota Sukabumi saat peneliti berada di lapangan awal Juli 2020 untuk wilayahnya zona hijau COVID-19. Awalnya zona biru COVID-19, berubah menjadi hijau COVID-19 sebab di Bayangkara ada beberapa perwira diklat terindikasi positif COVID-19, akhirnya tergerus semua Kota Sukabumi, pada hal di Kecamatan Baros termasuk di wilayah Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan adalah 0% COVID-19.

Tapi penerapan ibadah mahdah tetap berjalan dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Waktu itu Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan membutuhkan alat dan cairan disinfektan dengan menggunakan dana swadaya bantuan donator masjid, pembina masjid, sebagian kas masjid, termasuk termometer emfralite yang digunakan setiap Jumat, kegiatan-kegiatan tertentu, bahkan semua jamaah terlebih dulu dilakukan discaner. Bagi yang tidak punya masker dibagikan sebanyak 1.000 lebih gratis sewaktu masih zona biru (pertengahan Maret - Mei 2020). Termasuk untuk salat berjamaah tetap menggunakan garis petunjuk (jarak).

Berikutnya karena Kota Sukabumi sudah zona hijau, sekarang dicabut garis petunjuk (jarak salat), namun masker tetap diwajibkan dipakai. Bila ada gagasan, pengurus masjid Jami' Ad-Da'wah Balandongan bertemu dengan pembina masjid, mereka merespons dan membantu, ada yang nyumbang berupa 200, 300 masker dan sebagainya. Sewaktu lebaran dilakukan salat Idhul Fitri dengan

jarak, pakai masker, cairan hand Sanitizer, discnaer suhu tubuh, dan termometer impralite yang sesuai protokol kesehatan.

Pengurus masjid salah satu pembinanya Saepul seorang Kolonel. TNI, sewaktu rapat pengurus masjid sempat setengah marah katanya kita harus disiplin dan di Kelurahan Sudajaya Hilir Ketua Satgas COVID-19 seorang purnawirawan TNI. Pada prinsipnya jangankan ada tamu dari luar, penduduk asli setempat yang datang bila di zona merah harus di karantena dulu minimal 1 - 2 mingggu tidak boleh ke luar rumah. Termasuk bila jamaah discaner termometer lebih dari 37 derajat (suhu panas) disuruh pulang, sejak Maret – Juli 2020 diakui tidak ada satu orang pun yang positif COVID-19.

Mengantisipasi pencegahan COVID-19 ada pengumuman ditempel di bagian tertentu masjid, ketentuan salat Idhul Fitri dibuat pasal-pasalnya. Untuk manula dan anak-anak kecil dianjurkan salat di rumah masing-masing, sudah diberikan bahan-bahan khutbah untuk di salat Idhul Fitri di rumah baik melalui Ustadz Yudha (penyuluh agama), Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sukabumi ataupun Pokjaluh Kota Sukabumi.

Hasil musyawarah dengan pembina dan pengurus masjid ditentukan bahwa bagi yang sehat memenuhi sendiri protokol kesehatan dipersilakan salat di masjid. Untuk manula, anak-anak dan yang kurang sehat silahkan salat Idhul Fitrinya di rumah masing-masing, disosialisasikan/share melalui WhatsApp. Pas waktunya Idhul Fitri yang salat Idhul Fitri di rumah ada juga tidak masalah, maksudnya pihak pengurus masjid tidak merasa disalahkan, suatu saat ada yang protes tidak akan terjadi masalah, karena fatwa MUI membolehkan.

Bila ada perbedaan pendapat misalnya antara jema'ah dengan pengurus, atau pengurus dengan pengurus, bisa dilihat dulu masalahnya untuk dicarikan penyelesaiannya. Contoh pengurus Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan bila ada masalah biasanya terlebih dulu dikunjungi secara personal, misalnya bila ada orang menolak kebijakan masjid. Alasannya apa, biasanya tidak terima dikaitkan dengan taqdir (qadha dan qadhar), pihak pengurus masjid menjawab dengan pelan-pelan. Kebijakan masjid tidak 100% mereka terima, pihak pengurus masjid berusaha meminalisir agar tidak terjadi konflik, penolakan itu pasti ada, contoh lainnya ke masjid dibandingkan ke pasar di masa pandemi, kenapa ke masjid ketat tapi ke pasar bebas.

Hal itu, menjadi bahan diskusi saja, dalam pengajian dibahas pelan-pelan, cara menjelaskannya kita harus ikhtiar dulu. Sayidina Umar bin Khattab ketika masuk Syam, terjadi wabah akhirnya Sayidina Umar bin Khattab memilih pulang, itu diserahkan akidah dan bagian dari ikhtiar, pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Diajarkan dalam Islam, Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Di masyarakat hal itu hanya keluhan-keluhan saja.

b. Cara Pandang, Sikap dan Praktik Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Aktivitas Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan sangat dinamis, jama'ahnya ada NU, Muhammadiyah, PERSIS, PUI, bahkah para ustadz, ustadzahnya baik dari NU Muhammadiyah, PERSIS, PUI dilibatkan semua. Ketika yang tidak qunut jadi imam salat tidak masalah, yang qunut tetap qunut tidak ada masalah, yang penting masalah khilafiyah sewaktu penyampaian fiqih 4 imam mazhab. Ustadz Yudha mazhabnya sendiri adalah paham Imam Syafi'i, bagi

yang lainnya mazhab paham Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dipersilahkan.

Terkadang seseorang mengamalkan mazhab Imam Hambali, dia sendiri tidak tahu sedang mengamalkannya. Ketika orang lain mengamalkan mazhab Imam Syafi'i awalnya menyalahkan. Setelah Ustadz Yudha Bhaskara sampaikan inilah dalilnya yang bapak amalkan, namanya ikut mazhab Imam Hambali. Dalilnya mazhab Imam Syafi'i ini baru beliau terbuka, katanya menjelaskannya butuh waktu panjang.

Perbedaan agama di sekitar Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan maupun lingkungan Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros hampir tidak ada penganutnya selain Islam. Ada cerita orang non muslim (Kristen) yang berasal dari luar belakangan masuk Islam di masjid Jami' Ad-Da'wah Balandongan. Awalnya anak itu berulang kali menginap di rumah temannya, kebetulan temannya remaja masjid, entah kenapa selalu mendengar ceramah, diskusi tentang ke-Tauhitan, lama-lama tertarik akhirnya masuk Islam (muallaf). Pandangan pengurus maupun jamaah Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan terhadap berbeda agama tidak ada masalah, saling hormat menghormati.

3. Model Pengembangan Masjid Ad-Da'wah Balandongan

Di Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan secara pandangan, sikap dan praktik perbedaan mazhab yang saling mempertahankan pendapatnya terjadi semasa tahun 1970-an, dimasa kakek-kakek mereka dulu, ada yang membawa golok dalam masalah perbedaan paham mazhab, padahal masyarakat di beberapa wilayah sekitarnya Jumatan di masjid itu. Dijelaskan ketika terjadi 1978 waktu itu, Ustadz Yudha merasa masih muda supaya tidak salah pahaman bertanya kepada yang sepuh-sepuh. Bagaimana dulunya sekitar

tahun 1978 terjadi perubahan dari qunut menjadi tidak qunut terjadi konflik, orang bilang paham lama masuk ke wilayah masyarakat setempat.

Tahun 1980-an akhirnya salat Jumat mereka berpisah, bahkan ketua pengurus masjidnya ikut pisah. Ketika Ustadz Yudha tahun 2015 menjadi wakil pengurus masjid itu masih bimbang juga, Ustadz Yudha saja tidak qunut selama 2 tahun, padahal beliau sendiri alumni pesantren terbiasa qunut, karena ingin menghargai perbedaan, lama kelamaan tetap harus Ustadz Yudha disampaikan juga. Dibahaslah dalam pengajian masalah qunut, akhirnya disepakati ternyata yang qunut dalilnya kuat dan tidak qunut juga dalilnya kuat. Kita sama-sama kuat, kenapa harus ribut. Ada yang bilang Ustadz Yudha hati-hati tahun 1978-1980-an hampir terjadi bentrok bawa golok gara-gara qunut.

Tahun 2015 mulailah digilir imam salatnya, imamnya diatur secara bergantian. akhirnya ibadah lainnya seperti setiap nisfu sa'ban sudah rutin dulu tidak ada, yasinan dulu tidak ada sekarang sudah ada tanpa ada yang protes. Ramadhan dulu hanya qiyamul lail jam 2 malam tidak ada tarawih, sekarang tarawih sudah ada 23 rakaat, kalau yang 11 rakaat mereka pulang, sampai sekarang tetap berjalan.

Jadi bebas kita mau masuk surga semua, susah juga kalau memaksakan pemahaman kita kepada orang yang meskipun berpendidikan rendah, setidak-tidaknya pelan-pelan sewaktu pengajian menggunakan kitabnya bulughul-maram dijelaskan semua haditsnya. Apabila memakai qunut haditsnya ini, tidak qunut haditsnya ini, tarawih yang 8 rakaat haditsnya ini, tarawih yang 20 rakaat haditsnya ini disampaikan semua. Mereka dapat

menerimanya, Ustadz Yudha sendiri mazhabnya Imam Syafi'i, kalau jamaah silakan ada yang berbeda mazhabnya.

Di masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan penceramahnya banyak, ada: 1) Ustadz Yudha ceramahnya kajian hadits, fikih, hadits kajiannya 4 mazhab beliau alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2) Ustadz Anas Saifullah kajian tafsir, 3) Uen Juwaini kajian umum (adab) alumni pesantren, 4) Ustadz Jamil (aluni pesantren) kajian akidah ahlu sunnah wal jama'ah. Pengajian ibu-ibu, 1) Ustadz Yudha, 2) Ustadz Yusuf Mulyadi (NU), 3) ustadzah Hj. Aisyah (Aisyiah Muhammadiyah). Pengajian remaja, ustaznya hanya ada 2 orang, kajiannya fikih dengan 4 mazhab. Kendalanya alasannya para remaja sibuk dengan dunia maya (medsos).

Hubungan agama dengan negara yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara di kalangan pengurus masjid, jamaah masjid maupun masyarakat tidak ada masalah, hanya sebatas membuka wawasan. Ustadz Yudha sering memberikan masukan-masukan yang suka demo-demo HTI tentang khilafah, kadang ada juga yang bertanya Ustadz Yudha apa itu khilafah. Dijelaskan bahwa Pancasila itu ulama yang merumuskan termasuk di antaranya tokoh Sukabumi yaitu Almarhum K.H. Ahmad Sanusi beliau ulama yang ikut merumuskan Pancasila, dalam pandangan Ustadz Yudha seperti itu. Karena beliau sendiri keluarga aparat, orang tuanya sendiri seorang Kopasus pangkat Kolonel tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila, ketika ada jama'ah yang bertanya hanya membuka wawasan saja, mereka ingin tahu.

Pada masa pandemi ini pihak Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan melakukan kerja samadengan pihak Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros dan Puskesmas Kecamatan Baros ketika penyemperotan desfensitan, dijelaskan secara protokol

kesehatan penyemperotan disinfektan tidak boleh kena mata dan kulit, bahan cairan memanfaatkan daun sirih (wawancara dengan ibu Ati – kader Posyandu Kelurahan Sudajaya Hilir).

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pendidikan moderasi beragama di Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan kadang berpengaruh di satu lokasi kadang juga tidak berpengaruh di lokasi yang lain. Selama ini faktor penyampaian ceramah dan latar belakang keluarga Ustadz Yudha selaku tokoh pendiri masjid sangat berpengaruh. Sebelumnya pernah ada yang mencoba pendidikan moderasi beragama justru ditantang masyarakatnya seperti penceramah pendatang, lebih bagus lagi orang asli sekitar, dalam penyampaiannya-pun tidak menyalahkan salah satu kelompok. Misal Ustadz Yudha NU, tidak pernah membatasi penceramah harus NU, baik Muhammadiyah, PERSIS, maupun PUI dikasih waktu.

Paling tidak penceramah lihat situasinya cara penyampaian dan kepribadian orang yang menyampaikan, tidak menyalahkan salah satu kelompok dan hanya memaparkan saja, bahwa yang qunut dalilnya ini, yang tidak qunut dalilnya ini, tarawih yang 11 rakaat dalilnya ini, tarawih yang 23 rakaat dalilnya ini, di akhir pengajian baru ditutup kalau Ustadz memilihnya yang ini, tapi bapak-bapak silakan memilihnya, jadi tarawih-pun demokratis, yang 11 rakat pulang sendiri dan tidak menyalahkan.

Contoh lainnya waktu pandemi COVID-19 waktu di masjid pembagian 1000 masker gratis sangat efektif, tidak dipilih siapa pun mazhabnya tetap dibagi, termasuk pembagian 100 sembako tidak pilih-pilih, tidak harus orang NU, justru pengajian menghadirkan

Banser digabung dengan FPI, seperti penyemprotan desinfestan Banser, Ketua kelurahan FPI Sudajaya Hilir datang ikut menyemprot di masjid.

Setiap penyampaian materi ceramah sangat penting konsep Islam washatiyah disampaikan ke jamaah ataupun masyarakat. Pengurus DKM Jami Ad-Da'wah Balandongan mencoba meniru walaupun tidak sama yakni di masjid harus punya 4 karakter sahabat seperti; Saidina Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali untuk mendukung suksesnya dakwah Ketua DKM. 4 Orang yang berkarakter ini dijadikan pembina masjid.

Contoh H. Asep Samsuddin dianggap Saidina Usman karena setiap acara masjid pasti beliau membantu. Ketua DKM mempunyai Kakak Kolonel. Saepul dianggap Sayidina Umar karakternya masuk di situ, kalau ada yang ribut-ribut di masjid Kolonel inilah yang menangani masalah. Abah Rokib orang yang paling tua usianya dianggap orang tua sendiri diibaratkan Sayidina Abu Bakar, Ketua DKM selalu minta pendapatnya. Yadi pensiunan TNI namun jiwanya masih muda diibaratkan Sayidina Ali, siap mendukung apa pun konsekuensinya sampai siap berantam, menurut Ustadz Yudha selama merasa benar silakan bila, kalau salah jangan dibela.

b. Faktor Penghambat

Untuk memulai pendidikan moderasi beragama di wilayah kampung Balandongan Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros kata orang Sunda selama ini "paketrok", bentrok gelas sama gelas, piring sama piring. Kadang kala ada ketersinggungan ustadz-ustadznya dari masjid-masjid yang lain, di Balandongan masih ada amaliahnya NU harus NU yang lain dianggap beda akidah. Menurut Ustadz Yudha pernah dianggap ustadznya tidak punya mazhab, tidak jelas mazhab imam Syafi'i atau mazhab imam apa.

Padahal Ustadz Yudha mencoba memoderasi saja di masjid Jami Ad-Da'wah Blandongan, terutama jama'ah punya dalil masing-masing silakan.

Masjid lain sementara belum bisa seperti itu, nampaknya jamaah yang awam bisa terpropokasi. Ustadz itu engga benar emegenya harus siap konsekwensi seperti itu, kadang jamaah ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang mengaji di masjid Jami Ad-Da'wah ada yang hanya mengaji di masjid lain, kalau orang yang mengaji di masjid Jami Ad-Da'wah sudah paham karekter Ustadz Yudha seperti apa, tidak pernah menyalahkan mazhab yang lain. Sementara yang mengaji di masjid lain ilmunya hanya satu orang saja.

C. Temuan Lapangan - Masjid Agung Sukabumi

1. Sejarah Masjid Agung Sukabumi

Sukabumi pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Tjiandjur dan memiliki penduduk mayoritas Islam, hanya saja Sukabumi baru berkembang sebagai pemukiman pada abad 19. Sehingga masjid-masjid yang dibangun di Sukabumi jauh lebih muda dibandingkan dengan masjid yang terdapat di wilayah-wilayah Demak, Cirebon, Tjiandjur, dan lain-lain (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 2).

Masjid tertua yang berada di Sukabumi adalah Masjid Agung Kota Sukabumi. Masjid ini memiliki arsitektur yang sederhana sama seperti bangunan-bangunan masjid yang berdiri pada masa itu. Masjid Agung adalah tempat aktivitas salat berjamaah, belajar mengaji, dan berinteraksi sosial masyarakat seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, Isra Mi'raj, Salat Ied, dan tempat melangsungkan akad nikah (Ima Mariah, 2011: 2).

Masjid Agung Kota Sukabumi secara astronomis terletak pada koordinat 60 55’ 16” Lintang Selatan dan 1060 55’ 30” Bujur Timur (Eddy Sunarto, 2011: 63). Secara administratif berada dalam wilayah Kampung Kaum RW. 04 Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 3).

Bangunan masjid yang dibangun di atas tanah seluas 3.779 m2 ini terletak antara alun-alun Kota Sukabumi dengan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Selain alun-alun dan pendopo lokasi Masjid Agung Kota Sukabumi pun berdekatan dengan pasar, kantor pos, kantor polisi, kantor kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain ((Munandi Shaleh, dkk, 2013: 3).

Hingga tahun 2013 tercatat Masjid Agung Sukabumi sudah mengalami pemugaran sebanyak 6 (enam) kali. Pemugaran yang dimaksud merupakan pemugaran yang bersifat besar sedangkan untuk perubahan-perubahan dan perawatan dengan tujuan memperindah dan menjaga kekokohan bangunan masjid, seperti penambahan menara, kubah, interior, dan lain-lain sudah sering dilakukan tanpa diketahui berapa kali dilakukan perubahan dan perawatannya (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 3-4).

Masjid Agung Kota Sukabumi pada awalnya bernama Masjid Jamie Sukabumi, namun oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama Masjid Kaum. Hal ini sangat beralasan melihat hubungan erat antara Masjid Jamie Sukabumi dengan Pakauman, selain itu karena status Masjid Jamie Sukabumi yang kelak berubah menjadi Masjid Kaum Sukabumi (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 4).

Masjid Jamie Sukabumi sudah berdiri pada akhir abad ke-19, hal ini terlihat pada gambar tertahun 1890, pada gambar tersebut Masjid Jamie Sukabumi sudah berdiri dikelilingi oleh rimbunnya

pepohonan yang berada di sekitar Masjid Jamie Sukabumi (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 4).

Bangunan masjid didirikan di atas tanah wakaf dari Patih Sukabumi (Underafdeling Soekabumi), yaitu Tumenggung Raden Soerja Nata Brata atas inisiatif dari Hoofd Pengoeloe Tjiandjur yang bernama Hadji Said (Asep Mukhtar Mawardi dkk, 2011: 57).

Namun menurut R. Maman Muhammad, Putra dari R.H. Ahmad Djoewaeni menyebutkan bahwa Masjid Jamie Sukabumi sudah dibangun pada tahun 1838 oleh leluhurnya yang bernama R.H. Nu'man diatas tanah milik pribadi.

Legalisasi adminstrasi pemerintahan mengenai status tanah dan bangunan Masjid Agung Kota Sukabumi diurus secara formal oleh R.H. Ahmad Djoewaeni selaku Hoofd Pengoeloe Sukabumi sekitar tahun 1937 dengan didaftarkan tanah dan bangunan tersebut sebagai wakaf atas nama beliau R.H. Ahmad Djoewaeni (Munandi Shaleh, dkk, 2013: 5-6).

Masjid Jamie Sukabumi hingga akhir abad ke-19 menjadi satu-satunya masjid yang berdiri di tengah Kota Sukabumi. Baru ketika memasuki abad ke-20, dibangun beberapa masjid di wilayah Kota Sukabumi, di antaranya Masjid Sarikat Islam di Kebonjati dibangun sekitar tahub 1918 dan Masjid Pesantren Syamsul'Ulum Gunungpuyuh yang didirikan oleh K.H. Ahmad Sanusi di jalan De-Vogelweg 100 pada tahun 1932 bersamaan dengan pendirian pondok pesantren (Asep Mukhtar Mawardi dkk, 2013: 34).

2. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Masjid Agung Kota Sukabumi merupakan tempat sentral peribadatan di Kota Sukabumi, dari segi pengurus sudah beberapa

periode langsung ditangani oleh exsekopio Wali Kota Sukabumi. Bidang-bidangnya menyangkut imaroh, idorah, dan riayah.

Di imaroh terutama dalam hal kegiatan keagamaan, Pak H. Achmad Fahmi, S.Ag. M. Pd selaku Wali Kota Sukabumi dan Ketua Umum DKM menginginkan semua unsur keagamaan bisa menyelenggarakan kegiatan di masjid; bentuknya pengajian, dakwah Islamiyah rutin, peribadatan sedapat mungkin semua terkapar, para dai terlayani, anggaran kegiatan sebagian besar diperhatikan pemerintah Kota Sukabumi (wawancara dengan Aang Zainuddin --- Sekretaris Umum DKM Masjid Agung Kota Sukabumi, di Komplek Masjid Agung Kota Sukabumi, tanggal 3 Juli 2020).

Bidang imaroh, pertama dari segi ibadah perekrutan imam, ada kriterianya, di antaranya; harus hafal beberapa juz, dan eks juara kota minimal dibidang tilawah, tahapan pertama seleksinya seperti itu untuk imam. Termasuk pembinaan setiap bulan tanggal 2 ada sejenis pembinaan para imam, bukan saja masalah tilawahnya termasuk fiqihnya, karena di sini mayoritas mazhab imam syafi'i, maka yang dikaji kitab ri'anah, untuk perbandingan mazhabnya dipakai hadits ibadatul ahkam serta bulughul maram.

Maksudnya imam diberi pengarahan supaya benar-benar berkualitas, karena sekarang ini seakan-akan rukun salat itu 1 (satu) fatihah saja, siapa yang bagus baca fatihahnya, padahal rukun salat ada 17 (tujuh belas) sebagaimana yang kita ketahui, maka setiap tanggal 2 ada pembinaan para imam, untuk rekrutmen terhadap imam, insya Allah yang terbaik untuk mereka. Untuk imam Masjid Agung Kota Sukabumi sebanyak 10 orang, ada imam harian dan ada imam insidental setiap Jumat saja, imam harian setiap hari ganti-ganti.

Kedua muadzin, muadzin juga sama ada rekrutmen, dengan kriteria; pernah juara Kota Sukabumi MTQ atau pernah mengikuti sebagai finalis MTQ Kota Sukabumi, dan usianya juga ada persyaratan-persyaratan, jadi tidak sembarang kita bisa masuk ke Masjid Agung Kota Sukabumi. Demikian pula khatib sama seperti itu ada persyaratan-persyaratan dan kriterianya. Khatib Masjid Agung Kota Sukabumi ada 15 orang, itu dibidang imaroh.

Untuk pengajian, di Masjid Agung Kota Sukabumi ada pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu dan pengajian remaja masjid. Pengajian bapak-bapak malam ahad ba'da magrib, karena kondisi COVID-19 dibulan Juli 2020 sudah diawali ri'anatulihin, dan ada khusus spesial tazwid malam kamis, yang datang disinfektan untuk alim ulama, para khatib dan imam, meskipun ada juga yang umum suka hadir. Jamaah yang hadir kalau ibu-ibu penuh, untuk bapak-bapak karena baru mulai sekitar 30 – 40 orang tapi yang bawa kitab semua, ketika mau booming mereka semua mau hadir, diberhentikan alasannya bertepatan karena COVID-19. Kelihatannya akan gaung, karena setiap DKM dan setiap punya pesantren diberitahu, mereka antusias sekali. Kalau ibu-ibu dilaksanakan setiap pagi hari Senin, pagi ada istighasah lebih dulu baru pembinaan secara rutin.

Pengajian khusus Jumat pagi setelah salat subuh dihadiri seluruh pejabat pemerintah daerah Kota Sukabumi termasuk Pak Walikota Sukabumi, semua instansi hadir. Kondisi COVID-19 sekarang ini mengalami kepakeman kecuali salat berjamaah dan salat Jumat sejak bulan Juni 2020, yang lainnya belum dilaksanakan karena posisi seperti itu. Kebijakan ini ada di kepala daerah (wali kota) Sukabumi. Ketika peneliti di lapangan awal Juli 2020, salat Jumat di Masjid Agung Kota Sukabumi baru dilaksanakan 5 kali

sejak awal Juni 2020 selama ada COVID-19 di pertengahan bulan Maret hingga sekarang dengan protokol kesehatan.

Ada lagi pengajian remaja masjid, pembinaannya di antaranya pak walikota-pun ikut di dalamnya untuk pembinaan remaja masjid, ada pengajian muslimat diketuai ibu Fitri, jadi seperti itu pembinaan dalam spesifik peribadatan dan pengajian-pengajian.

3. Isu Keagamaan yang Berkembang di Masyarakat dan Direspons Masjid dalam bentuk Moderasi Beragama

Untuk mengantisipasi perbedaan paham mazhab pihak masjid punya cara sendiri, seperti imam-imam latar belakang berbeda, setiap tanggal 2 awal bulan menyamakan persepsi. Kebetulan K.H. Abdullah Fawzy selaku pembinanya, jika kita mengadu dalil pasti semua punya, tapi bukan itu yang dikehendaki, persamaannya ini benar lalu bagaimana yang disamakan. Sebelum ke masyarakat sudah digodok dulu di masjid, kita buka kitab syafi'inya adalah ria'natulibin untuk perbandingan mazhabnya ibadatul ahkam dan bulughul maram, orang pasti menerima bila dengan hadits itu. Tapi tetap karena di sini kita mayoritas maka ikuti yang mayoritas, mereka pun ikuti maksudnya tidak ada masalah.

Itulah di antaranya kenapa kita perlu adanya musyawarah, karena bila kita adu dalil tidak ada yang kalah menang, sebab kita kuat dua-duanya, tapi ketika bicara dalam satu meja tidak ada yang kelihatan. Seperti halnya dalam khutbah Muhammadiyah 1 dan PERSIS 1 dalam hal salat Idhul Fitri, tapi ketika musyawarah MUI dan Kemenag menyatakan 2. Ini seharusnya satu sisi kita ada kelemahan, seharusnya "ketika imam/pemimpin sudah menentukan maka ikhtilaf sudah tidak ada". Kementerian Agama sudah menetapkan tanggal 1 Ramadhan hari rabu tidak ada ikhtilaf

seharusnya, karena membingungkan umat yang bodoh, ini di antaranya kelemahan pemerintah, seharusnya pemerintah tegas.

Wawasan kebangsaan (4 pilar kebangsaan) bagi pengurus, jamaah dan masyarakat sudah harga final, apalagi Ketua DKM-nya bapak Walikota Sukabumi, kebetulan di Sukabumi ada tokoh nasional yakni K.H. Ahmad Sanusi yaitu dalam persiapan kemerdekaan (BPUPKI), dulu itu dengan Wahid Hasyim satu livel. Karangan buku-buku beliau banyak disimpan di negara Belanda.

4. Cara Pandang, Sikap dan Praktik Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Peningkatan pendidikan moderasi beragama terutama dari segi fisik bangunan masjid dari masa ke masa ada mengalami kemajuan, yang jelas tidak stagnan. Ada progres dari perubahan kepengurusan, satu contoh dari peralihan yang pertama Muhammad Murad 2013-2018 waktu itu belum keluar peraturan dari kementerian agama, sekarang Achmad Fahmi selaku Wali Kota Sukabumi dan Ketua Umum DKM ada progres di antaranya baik secara fisik maupun secara kurikulum.

Dari fisik tampak kelihatan progresnya, kebetulan ada seorang darmawan yang menyumbang totalitas tidak menggunakan APBD, berarti ini ada satu kemajuan, tahun kemarin tidak bisa membangun sekarang bisa membangun tanpa mengeluarkan APBD dan tanpa mengeluarkan anggaran DKM. Kedua rekrutmen imam, khatib dan muadzin menggunakan kriteria, dan setiap bulan ada pembinaannya.

Di Kota Sukabumi mayoritas ada mazhab imam syafi'i termasuk PUI dan NU dalam ibadahnya sama, secara keorganisasian yang dominan adalah NU, PUI, dan Muhammadiyah, tapi karena mayoritas mazhabnya imam syafi'i maka diterapkan SOP-nya

mazhab imam syafi'i. Yang minoritas bukan tidak diakomodasi, namun minoritas mengikuti yang mayoritas dan harus seperti itu seharusnya. Kalau minoritas harus disamakan dengan mayoritas itu salah, tetap saja minoritas harus ikut kepada mayoritas karena sama-sama baik, kearifan lokal sangat diperlukan dalam hal ini.

Fasilitas imam dari DKM sudah ada antar jemput, ada honor per bulan. Ada juga honor harian dengan insidental seperti khutbah Jumat beda, menyesuaikan pendapatan dari pengelolaan masjid. Imam harian 1,8 juta per bulan, bila dikalkulasikan imam dan khatib Jumatan masing-masing Rp. 500.000,-, muadzin Rp. 200.000,-, selain itu imam dan khatib mendapatkan santunan BPJS.

5. Model Pengembangan Masjid Agung Kota Sukabumi

Pengelolaan Masjid Agung Kota Sukabumi dikelola oleh pemerintah, sebetulnya dalam aturan Kementerian Agama tidak ada istilah exsikopio wali kota, kebetulan selalu terpilih pak wali kota, sebab di Sukabumi selalu wali kotanya muslim, mungkin untuk memudahkan koordinasi dan anggaran masjid.

Penceramah di Masjid Agung Kota Sukabumi dalam waktu sebulan biasanya akhir bulan mengambil penceramah dari luar, dimaksudkan untuk pencerahan, seperti Ustadz Chairul Anam dari Ciamis, merupakan Ustadz nasional. Pihak pengurus menentukan penceramah berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Di lingkungan masjid Agung Kota Sukabumi terdapat lembaga pendidikan Taman Pendidikan Ilmu Qur'an (TPIQ), lembaga ini di bawah DKM, mereka itu adalah di SK-kan DKM, sepekerja-pekerja yang dinaungi DKM. Termasuk tempat pertemuan sebagai pemasukan dana untuk DKM juga ada. Di masjid Agung Kota Sukabumi juga ada badan usaha BMT di SK-kan pengurus DKM, pengelolaan gedung serba guna, biasanya nikahnya di masjid

dilanjutkan resepsinya di gedung serbaguna masjid di sebelahnya. Masjid Agung Kota Sukabumi juga memiliki perpustakaan meskipun belum sempurna, pos kesehatan juga sudah ada, biasanya setiap hari Jumat petugas kesehatan untuk pemeriksaan, setelah ada COVID-19 tidak ada.

Pengurus masjid berbagai unsur latar belakang, ada dari NU, Muhammadiyah, PUI, PERSIS. Namun pihak DKM punya SOP tersendiri, seperti misalkan imam latar belakangnya dari Muhammadiyah atau PERSIS tetap saja harus mengikuti SOP masjid. Menyatukan visi misinya dan persepsinya jelas, jangan sampai makmum bingung, walaupun latar belakangnya beda tapi disatukan dalam SOP, ada aturan mainnya.

Ketika ada COVID-19 pihak DKM masjid Agung Kota Sukabumi melihat anjuran-anjuran, terutama fatwa MUI, surat edaran Kementerian Agama, Kepolisian terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi, bertolak dari situ mereka melakukan rapat koordinasi, waktu itu dilaksanakan di gedung Islamic Center dipimpin langsung Ketua MUI dan Ketua Umum MUI diputuskan saat itu Masjid Agung Kota Sukabumi harus mengikuti protokol kesehatan apabila akan melaksanakan kegiatan keagamaan. Karena melihat kondisi yang ada di Masjid Agung Kota Sukabumi saat itu dibatasi pembatasan ibadah, kebetulan pihak masjid memiliki rencana untuk renovasi masjid, hanya menyelenggarakan kegiatan peribadatan dengan protokol kesehatan jumlahnya secara kecil. Pengajian distop dulu, disarankan ikut di masjid-masjid yang mampu melaksanakan protokol kesehatan.

Diakui tidak ada respons negatif dari masyarakat sekitar, meskipun ada perasaan kehilangan, karena Masjid Agung Kota Sukabumi adalah masjid yang sentral, fenomenal, ada yang

menyayangkan tapi memahami kondisi yang ada sekarang. Salat berjamaah 5 waktu tetap dilaksanakan hanya dibatasi jumlah yang terbatas di bagian luar masjid, sebab bagian dalam mengalami renovasi. Namun salat Jumatan tidak dilaksanakan, kenapa tidak bisa menyelenggarakan Jumatan, terutama yang hadir di masjid adalah betul-betul tidak bisa terdeteksi siapa-siapa orangnya, apalagi ada jurusan Sukabumi – Bogor, sedangkan Bogor sudah zona merah, maka Pak Wali Kota Sukabumi sebagai ketua DKM mengambil keputusan kita tidak menyelenggarakan Jumatan, dan salat Idhul Fitri.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Ke depan pengembangan moderasi beragama pihak Masjid Agung Kota Sukabumi mengarah kepada kualitas di antaranya untuk menyamakan persepsi imam atau pimpinan lebih dulu maka pihaknya memberikan pemahaman tentang ikhtilaf mazahibul arba'ah berupa himbauan, jangan sampai keluar dari itu sehingga toleransi internal Islam betul-betul toleran. Sekarang kenapa kelihatannya umat Islam banyak, tapi seperti buih di atas lautan, tasamuhnya/toleransinya kurang, contoh menentukan 1 Ramadhan saja tidak bisa bersatu.

Langkah yang ditempuh di antaranya sering pertemuan tanggal 2 setiap bulan dalam rangka pembinaan imam, pembinaan khatib dan sebagainya sehingga menimbulkan tasamuh/toleran yang sangat baik dengan dalil-dalil yang cukup. Tasamuh jangan sampai tasamuh buta, kita toleransi! Toleransi! tapi mereka menjadi ahli bid'ah, itu juga tidak baik.

Ketika Muhammadiyah dalilnya kuat, PERSIS dalilnya kuat, NU dalilnya kuat, maka di situ tali tasamuh harus terbentang,

jangan sampai ego masing-masing yang lebih dominan, akhirnya yang paling bingung adalah umat. Langkahnya di antaranya memperbanyak silaturrahim dan mengkaji kajian-kajian di antaranya ibadatul ahkam yang sifatnya ikhtilaf.

Di Kota Sukabumi ada FKUB, kebetulan orang yang ada di DKM Masjid Agung Kota Sukabumi terlibat di FKUB, begitu juga orang yang ada di FKUB terlibat di DKM Masjid Agung Sukabumi, silaturrahimnya nyambung semua ketika ada masalah dengan non muslim sudah bisa kondusif, karena kita masuk ke ranah FKUB dan MUI.

Dalam hal menjalin hubungan antar umat beragama ranahnya FKUB di antaranya bila mereka peduli dengan muslim begitu pula non muslim. Dalam sosial contoh non muslim membantu beras 5 ton tapi melalui FKUB, umat muslim misalnya terjadi bencana dan sebagainya, mungkin ada yang membantu salurkan melalui FKUB sesuai ranahnya.

b. Faktor Penghambat

Pendidikan moderasi beragama secara khusus atau terlalu berat kendalanya tidak ada, namun masalah perjuangan pasti ada kendalanya, karena selalu berkomunikasi dengan FKUB termasuk dengan Fastur, Romo, dan tokoh agama lainnya. Satu contoh ada orang menghina agama Islam di fecabook dengan membakar al-Qur'an, berikutnya ormas-ormas Islam mau menyerang langsung, pihak Kristen datang ke MUI dan FKUB minta maaf dan sebagainya, lalu dimediasi oleh MUI dan pengurus FKUB.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kota Sukabumi pada tahun 2013 mayoritas penduduknya 95.86% beragama Islam, selebihnya menganut Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu dan lainnya. Tempat peribadatan didominasi umat Islam yaitu masjid, musala, dan langgar sebanyak 1.129 (98,26%) dari 1.149.

Masjid Jami Ama Haji Umar sekarang dikenal Masjid Jami Ad-Da'wah, masjid bersejarah yang berada di wilayah Balandongan, Kel Sudajaya Hilir, Kec Baros. Sedangkan Masjid Agung Kota Sukabumi pada awalnya bernama Masjid Jamie Sukabumi, oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama Masjid Kaum.

Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama. Masjid Jami Ad-Da'wah bersifat independen, melibatkan masyarakat secara swadaya. Berbagai macam SDM dilibatkan dalam kepengurusan, tidak hanya alumni pesantren. Berbagai macam gagasan, ilmu pengurus masjid, termasuk penerapannya tidak hanya fokus ibadah mahdah, mendidik masyarakat dalam bidang ekonomi, membangun BMT (Baitul Maal Watha'mil).

Masjid Agung Kota Sukabumi tempat sentral peribadatan, pengurus beberapa periode ditangani Wali Kota Sukabumi. Bidangnya imaroh, idorah, dan riayah. Perekrutan imam keriteria; harus hafal al-qur'an beberapa juz, eks juara kota minimal dibidang tilawah. Muadzin, kriteria; pernah juara Kota Sukabumi MTQ atau pernah mengikuti finalis MTQ Kota Sukabumi, usianya ada persyaratan. Demikian pula khatib ada persyaratan dan kriterianya.

Isu keagamaan di masyarakat selalu direspons. Pengurus Masjid Jami Ad-Da'wah semasa COVID-19 hingga sekarang selalu berpegang kepada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah Virus COVID-19. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi. Surat edaran Dewan Masjid Indonesia terkait salat berjamaah maupun salat Jumat di masa Pandemi COVID-19. Bila terjadi perbedaan pendapat antara jamaah dengan pengurus, atau sesama pengurus, dilihat dulu masalahnya untuk dicarikan penyelesaiannya.

Sedangkan Masjid Agung Kota Sukabumi mengantisipasi perbedaan paham mazhab punya cara sendiri, seperti imam-imam dengan latar belakang berbeda, setiap tanggal 2 (awal bulan) menyamakan persepsi. Digodok lebih dulu di masjid sebelum ke masyarakat, kajian kitab syafi'inya ria'natulibin untuk perbandingan mazhabnya ibadatul ahkam dan bulughul maram.

Cara Pandang, Sikap dan Praktik Pendidikan Moderasi Beragama. Aktivitas Masjid Jami Ad-Da'wah sangat dinamis, jamaahnya ada NU, Muhammadiyah, PERSIS, PUI, bahkah para Ustadz, ustadzahnya sangat beragam. Ketika yang tidak qunut jadi imam salat tidak masalah, yang qunut tetap qunut, yang penting masalah khilafiyah sewaktu penyampaian dibahas fiqih 4 imam mazhab.

Masjid Agung Kota Sukabumi mayoritas mazhab Imam Syafii termasuk PUI dan NU dalam ibadahnya sama, secara keorganisasian yang dominan adalah NU, PUI, dan Muhammadiyah, tapi karena mayoritas mazhabnya imam Syafi'i maka diterapkan SOP-nya mazhab Imam Syafii.

Model Pengembangan Masjid. Masjid Jami Ad-Da'wah perbedaan mazhab yang saling mempertahankan pendapatnya

terjadi semasa tahun 1970-an. Ketika Ustadz Yudha tahun 2015 menjadi wakil pengurus masjid sempat bimbang, padahal beliau sendiri alumni pesantren sudah biasa qunut. Karena menghargai perbedaan, tetap harus disampaikan. Dibahaslah dalam pengajian masalah qunut, akhirnya disepakati ternyata yang qunut dalilnya kuat dan tidak qunut dalilnya kuat. Karena itu, sama-sama kuat kenapa harus ribut.

Pengurus Masjid Agung Kota Sukabumi berbagai latar belakang, ada NU, Muhammadiyah, PUI, dan PERSIS. Namun pihak DKM punya SOP sendiri, misalkan imam latar belakangnya Muhammadiyah atau PERSIS tetap harus mengikuti SOP masjid. Menyatukan visi misinya dan persepsi jelas jangan sampai makmum bingung.

Faktor pendukung pendidikan moderasi beragama. di Masjid Jami Ad-Da'wah faktor penyampaian ceramah dan latar belakang keluarga Ustadz Yudha selaku tokoh pendiri masjid sangat berpengaruh. Paling tidak penceramah melihat situasi, cara penyampaian dan kepribadian orang yang menyampaikan, tidak menyalahkan salah satu kelompok dan hanya memaparkan saja.

Pengembangan moderasi beragama Masjid Agung Kota Sukabumi mengarah kepada kualitas di antaranya untuk menyamakan persepsi imam atau pimpinan lebih dulu, maka pihaknya memberikan pemahaman tentang ikhtilaf mazahibul arba'ah berupa himbauan, jangan sampai keluar dari situ sehingga betul-betul toleran.

Faktor penghambat pendidikan moderasi beragama. Untuk memulai pendidikan moderasi beragama di wilayah kampung Balandongan Kelurahan Sudajaya Hilir kata orang Sunda selama ini "paketrok", bentrok gelas sama gelas, piring sama piring. Kadang

kala ada ketersinggungan ustadz-ustadznya dari masjid yang lain, di Balandongan masih ada amaliahnya NU harus NU yang lain dianggap beda akidah.

Masjid Agung Kota Sukabumi pendidikan moderasi beragama masalah perjuangan, contoh ada orang menghina agama Islam di Facebook dengan membakar al-Qur'an, ormas-ormas Islam mau menyerang langsung. Pihak Kristen datang ke MUI dan FKUB minta maaf dan sebagainya, dimediasi oleh MUI dan pengurus FKUB.

E. Rekomendasi

Masjid Jami Ad-Da'wah Balandongan dan Masjid Agung Kota Sukabumi sudah banyak melakukan pendidikan moderasi beragama. Meskipun kegiatan kedua masjid tersebut tidak tampak (tersirat) apa yang dimaksud "moderasi beragama". Mereka juga melakukan dengan cara dan praktik yang berbeda, serta mengalami proses beberapa perubahan dari pengurus sebelumnya.

Kedua masjid sama-sama merespons positif meskipun berbeda cara terkait fatwa MUI, surat edaran Kemenag, Kebijakan Perda, surat edaran Dewan Masjid Indonesia (DMI), dalam hal kondisi pandemi COVID-19 sejak pertengahan Maret 2020 hingga sekarang sesuai protokol kesehatan.

Untuk menindaklanjuti berbagai upaya kedua masjid yang telah mereka lakukan "moderasi beragama", tujuan untuk memakmurkan jamaah dan masyarakat sekitarnya. Sangat penting bagi Pemkot Sukabumi, Kemenag Kota Sukabumi, ormas-ormas Islam melakukan pendekatan persuasif ke berbagai masjid dengan penguatan moderasi beragama melalui komunikasi dan koordinasi

agenda kegiatan keagamaan, menghargai perbedaan keragaman paham maupun perbedaan antar agama.

Tradisi moderasi beragama sebaiknya bagi pemimpin pemerintah kota/kab dan Kemenag menjadi teladan bagi pengurus DKM dan masyarakat agar dapat memahami dan mengamalkan hakikat moderasi beragama yang sebenarnya. Diharapkan peran pengurus DKM dan ormas-ormas Islam terbuka dan moderat dalam menyikapi berbagai keragaman paham maupun perbedaan agama. Bagi pemerintah pusat diharapkan memfasilitasi, mendorong agar pendidikan moderasi beragama mendapat respons positif dari umat Islam termasuk umat beragama lainnya.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Al Wiqoyah dan Masjid Al Ma'mur (Jagakarsa) Jakarta Selatan

Oleh: Moh. Zaenal Abidin Eko Putro

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Seperti halnya disebutkan di muka, Kecamatan Jagakarsa memiliki ciri khas yaitu dengan dinobatkannya Kampung Betawi di sekitar Situ Babakan. Di wilayah ini, didirikan rumah adat Betawi yang terintegrasi dengan situ sebagai sarana pariwisata. Diterbitkannya Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/2005 tentang pelestarian kebudayaan Betawi menjadikan Jagakarsa sebagai kantung keberlangsungan budaya Betawi. Selanjutnya, dibangunnya kampung-kampung budaya Betawi merupakan realisasi dari bunyi perda tersebut.

Masyarakat Jagakarsa mayoritas beragama Islam dan dikenal pula sebagai Islam tradisional yang bersinggungan dengan budaya Betawi. Banyak kegiatan keagamaan bernuansa keislaman dapat dijumpai di wilayah ini, mulai dari kegiatan pengajian kaum ibu,

remaja hingga majelis-majelis keagamaan. Pada peringatan hari besar Islam misalnya, biasanya diselenggarakan pengajian atau tabligh akbar di berbagai masjid dan tempat lain di wilayah ini.

Keberagaman masyarakat Jagakarsa juga dapat dilihat dari berdirinya berbagai bangunan masjid, musholla dan rumah ibadah lainnya. Menurut data Jagakarsa Dalam Angka Tahun 2019 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah masjid di Kecamatan Jagakarsa berjumlah 119 bangunan, sedangkan mushalla berjumlah 217 bangunan. Jumlah rumah ibadah (masjid) dan tempat ibadah (mushalla) umat Islam ini jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang jumlah rumah ibadah umat agama lain di 6 kecamatan ini. Data yang sama menyebutkan, gereja berjumlah 7 buah, sementara rumah ibadah lainnya 1 buah.

Secara khusus, penelitian ini mengambil dua lokasi kelurahan yang mana di masing-masing kelurahan tersebut berlokasi masjid yang diteliti. Kelurahan pertama adalah Kelurahan Jagakarsa, sedangkan kelurahan kedua adalah Ciganjur. Tipe masyarakat di dua kelurahan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda. Ditambah lagi, masjid yang diambil di dua kelurahan juga merupakan masjid tertua di kelurahan tersebut.

Secara demografis, data penganut Agama di Kelurahan Jagakarsa tahun 2018 menurut website data.jakarta.go.id - Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta sebagai berikut, umat Islam berjumlah 69.541 jiwa, Kristen sebanyak 2.638 jiwa, Katolik tercatat 1.203 jiwa, Hindu sebanyak 90 jiwa, Buddha 104 jiwa, Konghucu berjumlah 7 jiwa dan aliran kepercayaan 4 jiwa. Adapun menurut sumber yang sama, data penganut agama di kelurahan Ciganjur sebagai berikut, penganur Islam sebanyak 43.133 jiwa, penganut Kristen 1.420 jiwa, Katolik tercatat 561 jiwa, Hindu sebanyak 29

jiwa, Buddha berjumlah 49 jiwa, Konghucu 0 jiwa dan Kepercayaan 0 jiwa.

Semaraknya kegiatan keagamaan di wilayah ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu Pemda DKI. Setiap bulan, Pemda DKI membantu operasional masjid sebesar Rp. 2 juta yang sekarang melalui skema Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI). Perhatian juga diberikan oleh individu yang merawat masjid. Para penjaga dan perawat masjid alias marbot mendapat tunjangan per bulan sebesar Rp. 600 ribu. Menurut informasi Nasruddin, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, perhatian pemda terhadap masjid ini terutama sejak era pemerintahan Fauzi Bowo (Wawacara tanggal 8 Juli 2020).

Namun demikian, maraknya kegiatan keagamaan di masjid-masjid dan mushalla itu juga tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi. Menurut Nasruddin, tantangan yang dihadapi masjid-masjid di Jakarta Selatan terkait dengan kuatnya perasaan sentimen terhadap jamaah yang bukan menjadi jamaah tetap di masjid tersebut. Masih terdapat anggapan pengajian masjid hanya untuk anggota yang rutin saja. Jika ada jamaah dari luar yang ikut cenderung dicurigai.

Selain itu, masih menjadi masalah terkait dengan banyaknya masjid yang status IMB belum jelas. Hal ini cukup rumit mengingat masih banyak masjid yang status wakafnya masih belum jelas dan bahkan terjadi konflik kepengurusan. Oleh sebab itu, Pemda DKI cukup berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Disebutkan oleh Nasruddin, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pernah membatalkan tanda tangan peresmian sebuah masjid di Jakarta Selatan. Saat itu, sambil memegang spidol bersiap tanda tangan, Gubernur Fauzi Bowo menanyakan apakah masjid tersebut telah selesai IMB-nya.

Ketika dijawab belum, seketika Fauzi Bowo 7 membatalkan rencana tanda tangan peresmian pemugaran masjid tersebut. Kejadian itu disaksikan banyak pihak yang hadir dalam acara peresmian oleh gubernur DKI Jakarta tersebut.

Selanjutnya menurut Nasruddin yang berkarir dari penyuluh, Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga berperan besar dalam membina masjid di Jakarta Selatan. Lembaga ini terutama menjadi perantara bantuan pemda ke masjid-masjid. Namun mereka ini tidak memiliki perangkat hingga ke lapis bawah. Maka oleh karena itu, lembaga ini disupport oleh Kemenag dengan para penyuluhnya. Khusus di Jakarta Selatan terdapat 95 penyuluh Non PNS dan 45 penyuluh PNS. Adapun jumlah masjid 900 lebih. Selain peran DMI, peran MUI juga ada walaupun tidak terlalu kuat. Akan tetapi, pada kenyataannya menurut Nasruddin, personel DMI dan MUI hampir sama.

Mengenai kiprah DMI Jagakarsa, menarik menelusuri jejak DMI Kecamatan Jagakarsa di bawah kepemimpinan HIA. Ghozi. Bersama dengan Ketua MUI Jagakarsa, Sulaiman Rahimin, DMI Jagakarsa mengeluarkan surat himbauan bernomor 055/DMIJGKS/SH/III/2017 yang pada intinya menghimbau pengurus takmir masjid di lingkungan kecamatan Jagakarsa untuk menolak bantuan dan kedatangan timsel Ahok/RelaNU. Dalam surat tersebut juga jelas-jelas dikatakan Ahok dan relaNU sebagai kuffar (orang-orang kafir). Karena itu tidak mengherankan jika di wilayah ini, suara Ahok dan pendukungnya dikalahkan oleh suara Anis Baswedan-Sandiaga Uno (Anis-Sandi). Bahkan dukungan terhadap pasangan Anis-Sandi juga kuat disuarakan dan diudarakan oleh radio yang berada di kawasan Jagakarsa saat itu.

1. Masjid Al-Wiqoyah

Masjid Jami Al Wiqoyah dikenal sebagai masjid termegah di Kecamatan Jagakarsa. Masjid ini juga tercatat sebagai masjid tertua di Kelurahan Jagakarsa. Berdiri sejak tahun 1964, saat ini masjid ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi lebih dan berada persis di persimpangan jalan yang sangat strategis di antara Jagakarsa dan Kebagusan. Oleh sebab itu, sering pula orang menyebutnya Kebagusan Wates.

Menara tinggi dan gedung berlapiskan karamik sangat terlihat dari kejauhan. Dengan kondisi yang cukup megah sekarang ini, masjid ini dipugar selama 7 tahun hingga menjadi bentuknya sekarang dengan menghabiskan dana Rp. 7 hingga 8 milyar dan peresmiannya dilakukan oleh Wamenag Nasaruddin Umar. Konstruksi bangunan lama tidak lagi dipertahankan.

Dalam kesehariannya masjid ini dikelola warga Kelurahan Jagakarsa sendiri. Dana renovasi sebesar itu diperoleh dari para donator dan juga ngencleng di jalan. Adapun bantuan dari pemerintah (Pemda DKI) tercatat Rp. 28 juta. Hal inilah yang menyebabkan pengurus DKM ini lebih memiki sikap independent terutama ketika berhadapan dengan institusi pemerintah, baik dari Pemda DKI maupun terhadap Kementerian Agama. Bahkan mereka dapat menjaga jarak, dalam artian tidak terlalu dekat, dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masjid ini sangat berperan dalam mengorganisir masjid ini, baik dalam sisi idaroh, imaroh dan riaayah. Tidak banyak merujuk pada otoritas kemasjidan seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), pihak DKM berinisiatif sendiri untuk melakukan inovasi pengelolaan masjid dengan mengadaptasi dari berbagai tempat. Kebetulan, DKM masjid ini pernah menjuarai

Program Bina ul Masaajid (PBM) yang diselenggarakan oleh Pemda DKI atas inovasinya dan kerapian dalam manajemen masjid. Aspek manajemen (idaroh) dapat dibilang berjalan dengan baik di masjid ini. Masjid ini memiliki 4 marbot dan 6 security. Kemudian dari aspek imaroh, masjid ini memiliki unit usaha berupa aula yang dapat disewa untuk acara perkawinan.

Secara geografis, masjid ini menjadi masjid publik untuk masyarakat di dua RW dan 17 RT di Kelurahan Jagakarsa. Posisinya yang strategis, ditambah lahan parkir yang cukup luas, sering kali masjid ini digunakan untuk kegiatan masyarakat. Aula yang tersedia mampu menampung ratusan orang yang dapat memanfaatkan aula tersebut untuk kegiatan resepsi pernikahan. Berikutnya juga di masjid ini ditempatkan stasiun relay jaringan internet milik beberapa provider. Untuk dua unit bisnis ini, dipercayakan pengelolaannya pada Yayasan Al Wiqoyah yang memiliki manajemen tersendiri.

Setiap Jumat, infak masjid ini mampu mencapai Rp. 15 juta. Paling sedikit Rp. 10 juta. Angka ini merupakan kumulatif dari jumlah infak dalam seminggunya yang dihitung pada setiap Jumat. Kotak-kotak infak dibuka setiap Jumat. Masyarakat atau jamaah dapat memasukkan infaknya setiap saat. Pengeluaran masjid ini mencapai Rp. 40 juta dalam setiap bulannya.

Keinginan terbesar yang masih dipendam pengurus DKM masjid ini yaitu ingin membantu jemaatnya mandiri secara ekonomi. Hal ini tidak lain karena tepat di seberang masjid, terdapat kantor rentenir yang nyata-nyata banyak memiliki nasabah masyarakat di sekitar masjid. Karena itu pengurus DKM masjid ini sedang menyusun strategi untuk memaksimalkan unit bisnisnya, sehingga dapat membantu jamaah masjid yang kesulitan keuangan dan ekonomi agar terlepas dari rentenir.

Belum lama ini, pihak masjid ini ditawari oleh pihak kecamatan untuk dijadikan masjid besar. Namun karena mempertimbangkan dukungan terbesar justru datang dari masyarakat donator ketimbang dari salah satu pihak, misalnya pemerintah, maka pihak DKM masjid ini memutuskan untuk menolak tawaran dari pihak kecamatan tersebut. Masjid ini disebut sebagai masjid warga Jagakarsa.

2. Masjid Al Makmur

Berikutnya, Masjid Al Makmur. Masjid ini tertua di Jagakarsa, berdiri sejak tahun 1920an. Dalam bentuknya sekarang dipugar tahun 1970an. Lokasi masjid ini berada di Kelurahan Ciganjur, tepatnya di Jalan Kahfi I, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di belakang masjid ini, terdapat kantor kelurahan Cipedak yang juga masih masuk dalam wilayah Jagakarsa. Artinya posisi masjid ini sebetulnya berada di wilayah perbatasan antara Ciganjur dan Cipedak.

Ketua DKM sekarang Umar Muhammad (70) adalah cucu pendiri masjid ini, alm. H Amsar. Umar Muhammad adalah pensiunan guru PAI di SMA Borobudur, Jakarta Selatan. Salah satu muridnya adalah Yenny Wahid, putri alm. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Posisinya sekaligus juga sebagai nadzir dari tanah wakaf yang sekarang didirikan masjid. Karena itu, hampir tidak dapat dilepaskan pengelolaan masjid ini dari keluarga pendirinya, walaupun kini telah menjadi masjid publik.

Luas areal masjid ini 1.500 meter. Hampir semua lahan telah berdiri bangunan. Hanya sedikit lahan kosong untuk parkir kendaraan roda dua. Masjid ini termasuk masjid yang mendapat subsidi dari Pemda DKI melalui skema Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) sebesar Rp. 2 juta per bulan. Selain mengurus perihal

kemasjidan, pihak pengelola masjid ini juga mendirikan Yayasan yang mengelola bidang pendidikan, peribadatan dan kematian. Untuk bidang pendidikan, didirikan sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMK yang berlokasi berseberangan dengan Masjid Al Makmur.

3. Perbedaan Manajemen Kedua Masjid

Dalam hal manajemen masjid, membandingkan dua masjid ini akan menemukan tingkatan yang berbeda. Seiring dengan dipugarnya masjid menjadi bentuknya sekarang, di AlWiqoyah telah terjadi regenerasi kepemimpinan yang sekarang dipegang kalangan muda. Hampir tiga puluh tahun kepemimpinan dipegang oleh ketua sebelumnya, yang puncaknya kemudian direnovasinya masjid hingga bentuknya sekarang, saat ini kepemimpinan dipegang oleh Nurjaya, salah satu cucu dari imam masjid ini pada saat mulai didirikan tahun 1964. 10 Nurjaya terpilih menjadi ketua DKM untuk periode tahun 2015-2020. Bulan November ini akan diselenggarakan rapat pemilihan ketua DKM Alwiqoyah.

Hal berbeda di masjid al Makmur yang saat ini manajemen lebih banyak bertumpu pada perorangan, ketua DKM sendiri yang dibantu oleh dua orang marbot. Di lokasi masjid sendiri hampir tidak dapat ditemukan unit bisnis yang dapat menjadi sumber pendapatan masjid. Konsentrasi untuk sumber pemasukan difokuskan pada pengoperasian Yayasan yang membidangi tiga hal tersebut.

B. Upaya Pendidikan Moderasi

1. Moderasi; Memadukan antara Keinginan Pengurus dan Keinginan Jamaah

Di masjid al Wiqoyah, selain kegiatan ritual seperti salat rawatib dan salat Jumat, jadwal pengajian dalam durasi 1 minggu juga telah tersedia. Kitab kuning yang dikaji antara lain irsyadul ibaad, arbaiin Nawawi, dan juga dibacakan diba barzanji pada Kamis malam. Namun mengherankannya di masjid ini juga sering dipanggungkan para penceramah yang dikenal keras terhadap pemerintah dan dikenal intoleran, sebut misalnya Alfian Tanjung, Tengku Zulkarnain, Yahya Waloni dan Abdul Somad. Karena itu barangkali dapat dikatakan moderasi yang digaungkan di masjid ini belum sepenuhnya mengikuti model moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah (Kementerian Agama).

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Wiqoyah, Nurjaya memiliki alasan tersendiri mengapa masjidnya sering mengundang muballigh yang dikenal sering menyerang pemerintah. Menurutnya, masjid Alwiqoyah kedatangan para Ustadz yang dikenal publik cukup 'galak' tersebut, sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginan jamaah yang hendak mendengar langsung pandangan dari dai atau Ustadz yang dianggap galak dan sering menyampaikan kritik pedas, baik kepada pemerintah maupun kelompok lain. Jamaah lebih dulu mengetahui keberadaan muballigh tersebut dari media, baik media sosial maupun media elektronik seperti televisi. Memperhatikan suara jamaah tersebut, kemudian DKM berinisiatif mendatangkan muballigh yang dimaksud. Akan tetapi, setelah ceramah dari Ustadz tersebut dipanggungkan, belum pernah terjadi reaksi selanjutnya dari Jamaah masjid. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa mereka hanya sebatas memahami saja

apa yang disampaikan Ustadz yang terkenal karena kritik pedasnya tersebut (wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Selain itu, untuk menanamkan ciri khas keislaman yang sesuai dengan manhaj Syafiiyah, seluruh imam dan muballigh yang rutin bertugas di masjid ini diambil dari penduduk setempat. Pihak DKM memonitor orang-orang setempat yang leluhurnya memiliki jejak terhadap masjid tersebut dan apalagi misalnya pernah belajar di pesantren. Maka, walaupun 11 pernah ada kritikan dari jamaah tentang kualitas suara seorang imam yang ditunjuk oleh DKM tersebut, maka pihak DKM pun ganti menjelaskan kepada jamaah yang protes tersebut akan kelebihan dari imam tersebut, walaupun dari sisi suara kurang memuaskan.

Hal yang tidak jauh berbeda berlaku di Masjid Al Makmur, Ciganjur. Menurut Ketua DKM masjid ini, Umar Muhammad yang juga pensiunan guru di lingkungan sekolah di bawah Kemenag, dalam hal menanamkan sikap moderasi beragama, di masjid ini selalu diwaspadai kemungkinan dari adanya penyusupan paham-paham wahabi. Karena itu, pihak DKM mengusahakan untuk selalu tersedia imam yang memimpin salat. Sejak beberapa tahun belakangan, fenomena jamaah yang menggunakan baju gamis terus muncul di Masjid Al Makmur. Disampaikan oleh Umar Muhammad (wawancara tanggal 13 Juli 2020), pernah pula serombongan dari mereka yang berpakaian gamis dan bukan warga setempat, mereka berempat, kemudian membentuk pengajian dengan sang penceramah dari kelompok yang berbaju gamis itu duduk di tempat imam. Kontan saja, hal ini kemudian dilarang pihak DKM masjid ini. Mereka tidak ingin masjid mereka dikuasai kelompok tertentu. Ketua DKM ini sangat membentengi masjidnya agar tidak seperti dikuasainya Masjid Nurul Iman yang berada di Curug, Tanah Baru

Depok yang sekarang berganti pengelola dan berganti paham. Oleh sebab itu, masjid ini juga lebih banyak memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi imam dan penceramah di masjid ini. Apalagi, nuansa hubungan keluarga masih kuat bersemayam di masjid ini, sebagaimana halnya disinggung oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Jakarta Selatan di atas.

Namun menariknya, dalam hal interaksi dengan penganut agama lain, Masjid al Makmur lebih memiliki perasaan akan kedekatan dengan umat agama lain. Jamaah masjid di sini mengenal keberadaan umat agama lain yang cukup lama berdiri di dekat Kawasan Ciganjur, yakni Srengseng Sawah yaitu dengan adanya Yayasan Katolik Desa Putra. Bahkan sebagian dari mereka ada yang bersekolah di Panti Asuhan Desaputera dan Yayasan Melania, Srengseng Sawah, Jagakarsa yang berada di bawah naungan sebuah ordo Katolik ini. Di komplek Desaputera bahkan sekarang ini juga telah didirikan rumah sakit. Bagi kalangan jamaah dan DKM masjid ini, keberadaan institusi milik Katolik tersebut bukanlah hal yang asing. Bahkan di antara mereka ada yang bersekolah di Desaputera hingga bekerja di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, sejauh ini belum pernah terjadi hubungan timbal balik dan toleransi aktif yang dilakukan pihak DKM Masjid Al Makmur dengan lembaga Katolik tersebut.

Pengurus DKM masjid ini mengaku sangat mengagumi pemikiran Gus Dur, yang notabene tidak jauh kediaman alm Gus Dur dengan masjid ini. Namun, ketika disinggung pada peristiwa tahun 2017 tentang perpolitikan di DKI Jakarta yang memanas dengan isu non Islam, 12 Ketua DKM masjid ini jelas-jelas tidak menginginkan gubernur dari non Muslim. Alasannya jika ada calon yang seiman dan sekeyakinan, mengapa memilih yang berbeda

keyakinan. Karena itu pada saat pilkada lalu, mereka tidak memilih calon dari non Muslim.

Berbeda dengan Masjid Al Wiqoyah yang pengalaman bersentuhan dengan umat agama lain tidak sekuat dengan jamaah masjid Al Makmur. Di sekitar masjid Al Wiqoyah, tidak banyak penganut agama selain Islam. Dari sedikit penganut agama lain itu, telah dikenali pula dan dekat dengan pengurus DKM Al Wiqoyah. Selama ini, tidak ada komplain terhadap syiar masjid ini, misalnya dalam menyuarakan azan dari mesin pengeras suara. Bahkan, di masjid ini, 10 menit sebelum waktu salat tiba dan artinya azan dikumandangkan, diperdengarkan suara tarkhim terlebih dahulu.

2. Moderasi dan Sikap Masjid Terhadap COVID-19

Bagaimana sikap kedua masjid tersebut terhadap surat himbauan dari MUI tentang tata cara ibadah selama pandemi? Pada saat pandemi, masjid Alwiqoyah sempat mengabsenkan salat Jumat selama 8 kali Jumat. Namun, masjid ini tidak sepenuhnya lockdown. Sebab, jamaah tetap berdatangan ke masjid pada waktu salat tiba. Dengan demikian, pada salat rawatib sebenarnya masjid ini tetap diadakan jamaah secara diam-diam. Berikutnya juga pada waktu salat tarawih pada Bulan Puasa yang baru lewat. DKM memilih sikap demikian karena mereka melihat tidak jauh dari tempat ini, pusat kulineran terus ramai walaupun dalam situasi lockdown. Tidak berlaku PSBB di tempat kulineran itu. Diam-diam, DKM tetap menggelar kegiatan salat jamaah pada saat social distancing, namun secara diam-diam. Pada bulan puasa juga tidak diadakan kegiatan, kecuali salat tarawih yang dilakukan oleh sedikit jamaah dan lampu dalam keadaan dimatikan. Selebaran protokol di masa pandemi yang diterbitkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga

tertempel di beberapa sudut masjid. Selain itu, spanduk protokol COVID-19 juga dipajang di depan masjid.

Lain halnya pada masjid Al Makmur, pada masa PSBB, masjid ini meniadakan salat Jumat serta salat rawatib. Di masjid sekarang juga diberlakukan shaf berjarak dengan penanda berupa solatif yang tertempel di lantai secara bersilangan. Dua orang marbot terus berjaga untuk mengawasi gerak-gerik jamaah dan juga orang-orang baru yang mampir untuk salat.

Di beberapa tempat disediakan cairan hand sanitizer yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh jemaat. Adapun di masjid ini sangat mengikuti himbauan dari pihak DMI dalam hal protokol COVID-19. Hal ini dapat dilacak dari ditempelkannya surat dari DMI atas penanganan protokol COVID-19 di masjid di mading dan beberapa sudut di tembok masjid.

C. Simpulan

Membandingkan bagaimana pendidikan moderasi itu disuarakan di kedua masjid ini akan menemukan tingkatan yang agak berbeda. Untuk moderasi beragama, masjid Alwiqoyah hanya menyalurkan kebutuhan jamaah akan informasi yang disampaikan seorang Ustadz maupun muballigh yang nge-top di media sosial (youtube) maupun tv. Sebagian jamaah hendak mendengar langsung pandangan dari dai atau Ustadz yang dianggap galak dan sering menyampaikan kritik pedas, baik kepada pemerintah maupun kelompok lain. Akan tetapi, setelah ceramah dari Ustadz tersebut dipanggungkan, belum pernah terjadi reaksi selanjutnya dari Jamaah masjid. Mengapa pendapat jamaah lebih didengar oleh pengurus DKM masjid ini, tidak lain karena jemaatlah yang menyokong segala kegiatan masjid, baik dari sisi kehadiran,

partisipasi termasuk donasi keuangannya. Apalagi masjid juga memiliki unit bisnis yang dikelola oleh Yayasan. Untuk mengundang penceramah bukan sesuatu yang memberatkan.

Hal ini pula yang menyebabkan protokol COVID-19 tidak sepenuhnya dapat berjalan di masjid ini. Walaupun terdapat anjuran salat di rumah, namun ternyata Jamaah tetap saja datang di masjid. Oleh karena itu, pihak DKM pun mengikuti kemauan Jamaah dan tetap melaksanakan salat berjamaah walaupun secara terbatas. Begitu pula pada saat salat tarawih yang diikuti juga oleh sedikit jamaah dan dalam kondisi lampu dimatikan.

Agak berbeda di masjid Al Makmur yang masih kuat unsur keluarga wakif. Di masjid ini cukup tegas sikapnya dalam melihat kemungkinan adanya paham wahaby yang berpotensi menggusur pengelolaan masjid ini. Pihak DKM selalu diwaspadai kemungkinan dari adanya penyusupan paham-paham wahabi. Karena itu, pihak DKM mengusahakan untuk selalu tersedia imam yang memimpin salat. Sejak beberapa tahun belakangan, fenomena jamaah yang menggunakan baju gamis terus muncul di Masjid Al Makmur. Secara kebetulan, imam dan penceramah masjid ini juga diprioritaskan kepada warga sekitar masjid.

Di tengah masyarakat yang telah menguat kesadaran keagamaannya dan relatif independen terhadap peran negara, maka sangat dimungkinkan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan pemerintah belum seluruhnya diaplikasikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jaringan yang tepat untuk mengaitkan program dan pesan pemerintah dalam hal keagamaan kepada jamaah dalam kondisi kemandirian masjid dan jemaatnya. 1

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Bintaro Jaya

Oleh: Abdul Jamil Wahab

A. Temuan dan Pembahasan

1. Sekilas tentang Masjid Raya Bintaro Jaya

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) berada di bawah Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ). Secara resmi MRBJ diserahkan kepengurusannya dari PT Jaya Real Property (Pengembang Bintaro) kepada YMRBJ pada Maret 2017. MRBJ memiliki luas bangunan 2.500 m2/ 5.044 m2. Kapasitas jamaah sebanyak 2.000 jamaah. Lokasi masjid terletak di Jl. Maleo Raya, Bintaro Jaya Sektor IX Tangerang Selatan.

MRBJ memiliki visi dan misi. Visi MRBJ yaitu menjadi masjid percontohan/role model masjid di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu menjadikan masjid sebagai: (1) Pusat dakwah, (2) Pusat pemecahan masalah jamaah, (3) Pusat pendidikan pembelajaran dan pengembangan Islam, (4) Menyalurkan zakat infaq, sadaqoh; mengelola wakaf produktif, (5) Pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Gambar: Papan Nama Masjid Raya Bintaro Jaya

Selain itu, YMRBJ memiliki paham keagamaan yang telah ditetapkan berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj Asyariyah dan Maturidiyah, Berfiqih 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Serta bertasawuf dengan mengikuti Imam Al-Ghazali. Hal demikian sekaligus menunjukkan cara pandang dan sikap moderat dalam hal paham keagamaan.

Gambar Struktur Kepengurusan MRBJ

Selain memiliki struktur pengurus, juga terdapat Dewan Pembina, Pengawas, dan Pertimbangan Syariah. Dewan Pembina terdiri dari: Suwandi (ketua), Arief Budi Santoso, Bambang Sutadi, Darwin Chalidi, Indra Djaman, dan Rachman Notowibowo.

Dewan Pengawas terdiri dari: Moersoetidarno (ketua), Ardhin Ichwan, Nurcholis, Ifandi Subik, dan Marjana. Sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari: Prof. DR. Said Husin Al- Munawah, MA, KH. Teungku Zulkarnain, MBA, DR. Muchlis Hanafi, DR. Ali Nurdin, KH. Sofyan Nizhomi, Ketua MUI Tangerang Selatan (ex officio) KH M. Saidih, S.Ag.

2. Aktivitas Sosial Keagamaan

Secara umum, Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) memenuhi tiga unsur utama fungsi masjid yaitu meliputi fungsi peribadatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal menjalankan fungsi peribadatan, masjid MRBJ merupakan pusat tempat peribadatan umat Islam yang ada di kawasan kompleks Bintaro Jaya. Untuk fungsi pendidikan, MRBJ memiliki beberapa unit pendidikan bagi masyarakat, baik formal maupun informal, khususnya bidang pendidikan Islam. Sedangkan fungsi sosial kemasyarakatn, MRBJ memiliki banyak aktivitas yang sifatnya pengembangan masyarakat.

Di bawah ini beberapa aktivitas di bidang peribadatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dari daftar aktivitas ini, terlihat bahwa aktivitas keagamaan MRBJ tampak relatif padat, beberapa kegiatan yang telah berjalan efektif yaitu:

a) Wakaf, ZIS, Ekonomi Syariah,

b) Dakwah: kajian subuh, kajian magrib, kajian muslimah, kajian remaja.

c) Program Pilar Dakwah: kajian Al-Quran, kajian Hadits, tabligh akbar, peringatan hari besar Islam, kegiatan Ramadhan.
d) Program Pilar Pendidikan: Taman pendidikan Al-Quran (TPQ), pembekalan guru TPQ, tadabur Al-Quran, Pesantren kilat anak-anak, tahsin Al-Quran.
e) Program Pilar Sosial: pelayanan kesehatan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, laboratorium klinis, pengurusan jenazah.
f) Penyewaan Ruang Serba Guna: pernikahan, seminar, wisuda.
g) Pengembangan Ekonomi: bazar, kedai kuliner, kedai Ramadhan.
h) Program Sosial Kemasyarakatan: bimbingan mualaf, bansos bencana alam, BMT, ATM beras.

Kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya dakwah di MRBJ juga dipromosikan, selain melalui media cetak dalam bentuk buku, majalah, buletin, atau flayer, juga disosialisasikan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga channel Youtube. Pemanfaatan media online berbasis internet tersebut menjadikan kegiatan-kegiatan MRBJ mudah diketahui dan diakses masyarakat secara lebih luas.

3. Peran Masjid dalam Pendidikan Moderasi Beragama

a. Platform Ahlussunnah Wal Jamaah

Program dan aktivitas sosial keagamaan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) berjalan di bawah platform keagamaan yang memiliki karakter moderat yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bermanhaj Asyariyah dan Maturidiyah, berfiqih 4 madzhab dan bertasawuf Al-Ghazali. Platform tersebut ditegaskan dalam profil masjid yang

menjelaskan tentang visi dan misi, serta penjelasan lainnya terkait aktivitas masjid.

Mengapa dipilih Ahlussunnah wal Jamaah ? Menurut Mukhlis Hanafi, salah satu anggota dewan Syariah, masjid memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Islam yang rahmatan lil'alamin. Masjid harus menjadi pusat dalam menyebarkan ide-ide Islam yang damai, toleran, anti kekerasan. Mengingat saat ini banyak paham yang sering menyebar kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda, mengajarkan permusuhan, dengan mengatas namakan ajaran Islam, maka sejak awal, masjid sudah memberikan "garis pembatas", bahwa ajaran yang boleh dikembangkan dan diterapkan di masjid ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran yang sudah terbukti, banyak dianut oleh mainstream muslim Indonesia yang cinta damai dan membawa kehidupan yang harmonis dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan, MRBJ memiliki paham keagamaan yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj Asyariyah dan Maturidiyah, Berfiqih 4 madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Serta bertasawuf dengan mengikuti Imam Al-Ghazali. Hal demikian sekaligus menunjukkan cara pandang dan sikap moderat dalam hal paham keagamaan.

Pendiri aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Abu Hasan al-As'ary, lahir 260 H/ 873 M di Basrah, dan meninggal di Baghdad tahun 324 H/ 935 M. Semula beliau adalah murid dari al-Jubba'i, tokoh komunitas Mu'tazilah di Basrah. Abu Hasan al-As'ary keluar dari lingkungan Mu'tazilah dan mengikuti pendapat para penentang Mu'tazilah seperti Imam Ahmad bin Hambal.

Beberapa pendapat Abu Hasan al-As'ary yang penting antara lain adalah:

a. Bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang kekal seperti sifat melihat, mendengar, berbicara, dan lain-lain. Sedangkan Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat-sifat yang di luar Dzat-Nya.
b. Bahwa ayat-ayat tajassum, seperti "tangan Allah", dan lain-lain, memang bukan bersifat jasmani, tetapi memang bagian dari atribut Allah yang hakikinya tidak diketahui. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan ayat seperti itu harus ditakwil menjadi kekuasaan Allah, dan sebagainya.
c. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan Mutazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.
d. Bahwa melihat Allah pada hari akhirat nanti adalah sesuatu yang akan menjadi kenyataan meskipun kita tidak memahami bagaimana cara melihatnya itu; sedangkan Mutazilah menyatakan Allah tidak akan dapat dilihat karena hal demikian berarti Allah itu mempunyai jasad seperti benda.
e. Bahwa segala perbuatan manusia itu adalah ketentuan Allah, tetapi manusia diberi kekuatan akal untuk berikhtiar mengambil pilihannya sendiri (kasb). Sedangkan kaum Mutazilah berpendapat bahwa setiap perbuatan manusia adalah pilihan manusia sendiri.
f. Bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin tetapi di akhirat harus di hukum terlebih dahulu di neraka. Sedangkan kaum Mutazilah berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa bukanlah orang beriman tetapi juga bukan orang kafir (al-manzilah baina manzilatain).

Pendapat-pendapat Abu Hasan al-As'ary tersebut kemudian posisi-posisi teologis yang diikuti oleh para penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Kekuatan utama pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah terletak pada konsep teologinya yang memegangi prinsip moderasi (moderation). Sebagaimana mengenai pendapatnya tentang kasb (ikhitar), dan tentang pelaku dosa besar di atas. Pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah bersifat seimbang antara tekstualitas dan rasionalitas.

Selain aliran Abu Hasan al-As'ary, terdapat pula di Samarkand suatu aliran yang bermaksud menentang aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi yang wafat pada tahun 944 M. Aliran ini pada perkembangan selanjutnya terkenal dengan aliran teologi Al-Maturidiyah. Aliran ini tidak memperlihatkan sikap tradisional sebagaimana yang diperlihatkan Abu Hasan al-As'ary, tetapi tidak liberal sebagaimana Mutazilah. Aliran ini kemudian terbagi lagi dalam dua cabang yaitu cabang Samarkand yang bersifat mendekati Mutazilah dan cabang Bukhara yang lebih mendekati As'ariyah.

Antara Maturidi Samarkand dan Maturidi Bukhara terdapat perbedaan yang berkisar pada persoalan kewajiban mengenai Tuhan. Pertama, Maturidi Samarkand mewajibkan mengetahui Tuhan dengan akal, sedangkan Maturidi Bukhara tidak demikian halnya. kewajiban mengetahui Tuhan dicapai dengan wahyu. Kedua, Maturidi Samarkand mewajibkan mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk karena diketahui akal dan tidak harus dengan wahyu. Sementara menurut Maturidi Bukhara, kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, tidak dapat diketahui dengan akal, melainkan dengan wahyu.

Ahlussunnah wal Jamaah juga dikenal dengan pahamnya yang menolak pengkafiran (takfiri) terhadap sesama muslim. Sebagaimana banyak diketahui, paham "takfiri" pada awalnya muncul dan dikembangkan oleh kelompok Khawarij. Kelompok ini mengeluarkan fatwa yang menghalalkan tindakan membunuh dan memerangi mereka yang dipandang kafir. Saat ini, paham takfiri dikembangkan kembali oleh beberapa kelompok keagamaan berhaluan radikal dan ekstrem, seperti al-Qaidah dan ISIS. Mereka membunuh, menghancurkan, dan mengebom berbagai fasilitas miliki pemerintah atau milik asing (Barat), bahkan rumah ibadah. Yang menyedihkan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas nama Islam dan syari'atnya yang toleran.

b. Pendidikan Moderasi Beragama

Umat Islam baru mengenal sekolah seperti bentuknya saat ini pada abad ke 5 H atau abad ke 11 M. Sebelum ada sekolah, maka masjid merupakan pendidikan luar sekolah yang menjadi institusi utama dan penting dalam mendidik dan membina umat. Perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari peran masjid. Sejarah pendidikan Islam memiliki ikatan yang kuat dengan masjid. Sejak masa Rasulullah, masjid telah digunakan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat mengenai masalah-masalah keagamaan maupun keduniaan.

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) menjadikan masjid sebagai sarana pendidikan Islam bagi masyarakat di bawah platform Ahlussunnah wal Jamaah. Materi pendidikan Islam di MRBJ meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Metode yang dipakai, disesuaikan dengan kondisi jamaah, paling sedikit terdiri atas: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi/praktik. Sedangkan bahan ajar, diutamakan menggunakan kitab atau buku yang banyak

dipakai di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, atau buku pegangan seperti diktat, modul, atau buku pedoman.

Pendidikan di MRBJ, umumnya bisa dikategorikan pendidikan informal, yaitu terdiri dari majelis taklim (pengajian) dan lembaga pendidikan bagi anak-anak (semi madrasah). Layanan pendidikan sangat penting, karena akan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan jamaah. Kajian-kajian ke-Islam-an baik yang sifatnya mendasar maupun membahasa isu-isu kontemporer dilakukan dengan melibatkan para guru agama yang dipilih, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan pedagogi, serta memiliki pengetahuan agama yang memadai.

Majelis taklim (pengajian) yang diselenggarakan oleh MRBJ antara lain: kegiatan-kegiatan pengajian setelah shalat rawatib (ba'da Subuh dan ba'da Maghrib) dan setiap hari di MRBJ ada jadwal pengajian, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), pengajian bagi kalangan executive, serta pengajian remaja (Remisya). Selain itu, MRBJ juga menyelenggarakan pengajian ibu-ibu yang tergabung dalam lembaga Majelis Taklim (MT) Khairunnisaa.

Sedangkan pendidikan semi formal (dengan sistem kelas), MRBJ menyelenggarakan beberapa aktivitas pendidikan antara lain: TPQ, Anak Asuh dan Yatim, dan FHQ. Pengajaran B. Arab, serta kegiatan tadabur alam. Pendidikan tersebut, ditujukan bagi anak-anak, sebagai materi tambahan pendidikan keagamaan sekolah. Secara formal, anak-anak tersebut, pada umunya mengikuti pendidikan formal di SD atau SLTP atau sekolah formal lainnya.

Dengan platform Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, maka secara tidak langsung, pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh MRBJ menolak berbagai paham keagamaan yang secara konten ajarannya mengandung pemahaman yang ekstrem atau radikal.

Misalnya dalam khutbah dan ceramah-ceramah keagamaan, kandungan yang disampaikan tidak bertentangan dengan konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain konsensus kebangsaan tersebut, materi yang disampaikan juga tidak mempertentangkan unsur-unsur yang bermuatan penodaan, penghinaan, pelecehan terhadap unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), yang bisa menimbulkan perselisihan atau permusuhan (konflik), hingga mengganggu kerukunan intra maupun antar umat beragama. Pengurus MRBJ juga menegaskan, materi yang disampaikan oleh khatib maupun penceramah, tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif dan anarkis, serta tidak bermuatan politik praktis.

Penegasan larangan unsur-unsur tersebut penting ditegaskan, karena ada kekhawatiran bahwa masjid saat ini banyak yang justru menjadi tempat menyemai benih-benih perpecahan umat. Beberapa masjid bahkan terang-terangan dijadikan sarana kepentingan politik kekuasaan, sehingga tidak bisa menjadi pemersatu umat, tapi menjadikan umat terpolarisasi atas dasar pilihan politik masing-masing.

Masjid idealnya memiliki peran sebagai pusat pembinaan umat, memberdayakan, dan mempersatukan potensi umat, demi mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Untuk itu, terkait materi khutbah Jumat atau ceramah dalam pengajian harus disampaikan dalam kalimat yang santun, dengan ukuran kepatutan dan kepantasan sebuah kegiatan keagamaan. Materi tidak disampaikan dengan ujaran kebencian, hasutan, umpatan, makian

yang dilarang oleh agama. Aktivitas khutbah atau ceramah tersebut, dilaksanakan dalam suasana mendidik, memberikan pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural.

Komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Atas dasar pertimbangan tersebut, MRBJ memilih para khatib yang mengisi khutbah Jumat dan penceramah yang mengisi majelis taklim (pengajian) dengan sejumlah ketentuan seperti: berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai, memiliki visi perdamaian umat manusia, memiliki keteladanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta memiliki komitmen mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin.

4. Peran Masjid dalam Pelayanan Umat

Masjid memiliki dua dimensi. Di satu sisi masjid adalah "rumah Allah", tempat umat Islam menjalin pertalian ruhaniyah dengan Allah. Di sisi lain, masjid adalah rumah Allah, tempat di mana umat Islam menjalin hubungan dengan sesama manusia (habl minannas), secara lahir batin, merajut persaudaraan sejati sebagai sesama hamba, makhluk yang paling dimuliakan Allah.

Atas pemikiran tersebut, kualitas sebuah masjid, tidak hanya dilihat dari aspek fisik bangunan yang mewah, luas, besar, dan megah, tapi juga sejauh mana masjid berfungsi dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap umat. Pelayanan terhadap umat melalui masjid, dapat dibagi dalam pelayanan ritual ibadah dan sosial kemasyarakatan.

Dalam QS at-Taubah: 18 dinyatakan, "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada

Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

Dalam ayat tersebut secara implisit kaum Muslimin diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Masjid yang makmur mengandung pengertian, bahwa ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu meliputi fungsi sebagai sarana atau tempat ibadah, tempat pembinaan dan pencerahan umat baik di bidang pemahaman keagamaan, pengetahuan umum, ekonomi umat, dan bidang yang terkait dengan kesejahteraan lainnya.

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), selain menjadi sarana peribadatan yang nyaman dan memadai, juga memiliki banyak aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah atau masyarakat sekitar. Selain memiliki BMT, MRBJ juga memiliki klinik kesehatan, lembaga pengelolaan wakaf produktif, dan LAZ yang berfungsi menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS). Dalam tradisi Islam, upaya membantu kelompok kurang mampu, dikenal dengan istilah zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Para ulama Islam umumnya membedakan zakat, infaq, dan shadaqah, hanya dari sisi bobot perintahnya. Zakat sebagai hal yang diwajibkan, sementara infaq dan shadaqah sebagai hal yang disunnahkan. Melalui program-program tersebut MRBJ menjadi lembaga yang juga bergerak bagi pemberdayaan umat.

Setiap bulan, MRBJ memberikan santunan bagi 200 fakir miskin, mereka terdiri keluarga kurang mampu yang ada di wilayah yang tidak jauh dari masjid. Keanggotaan 200 orang tersebut telah melalui seleksi, sehingga merupakan anggota masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Mereka juga menerima kartu khusus (seperti kartu keanggotaan), sehingga tidak bisa ditukar/tertukar dengan orang lain yang tidak berhak menerima

bantuan. Selain memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, MRBJ juga memberikan santunan kepada anak-anak yang masuk kategori yatim piatu.

Dalam pengelolaan dana sosial umat tersebut, MRBJ menerapkan sistem pengelolaan yang transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah dana infak yang relatif besar yang diterima MRBJ. Dalam laporan yang dipampang di salah satu dinding bagian masjid, per tanggal 31 Mei 2020, tercatat total penerimaan dana sosial dari zakat, wakaf, infak pengajian, dan lainnya mencapai 2 milyar. Sementara saldo kas MRBJ per tanggal tersebut mencapai 2,278 Milyar.

5. Pengelolaan Masjid di Era Pandemik COVID-19

Menghadapi pandemi COVID-19 di tanah air, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di tengah Pandemi Wabah COVID-19. SE itu berisi antara lain: pelaksanaan tarawih agar dilakukan di rumah dan tidak menyelenggarakan shalat Idul Fitri. Sebelumnya, MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020.

Fatwa itu cukup progresif, antara lain memuat seruan untuk tidak wajib shalat Jumat bagi daerah zona merah, tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti shalat rawatib, tarawih, dan shalat Ied Fitri dan Idul Adha di masjid atau tempat umum lainnya. Fatwa juga dikeluarkan oleh ormas keagamaan lain seperti NU dan Muhammadiyah.

Fatwa-fatwa keagamaan tersebut, sangat relevan dalam konteks pencegahan penyebaran virus COVID-19, dan paralel dengan kebijakan pemerintah, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Fatwa-fatwa tersebut, secara substansi mengandung

paradigma, bahwa ketuhanan dan kemaslahatan manusia tidak terpisahkan.

Sejak lama para sarjana Islam memandang ibadah harus paralel dengan kemaslahatan (keselamatan dan kesejahteraan) manusia. As-Syatibi memiliki teori Maqasidhus Syariah (tujuan-tujuan syariat), di mana salah satunya adalah menjaga jiwa (khifzhu an-nafs), artinya keselamatan jiwa menjadi prioritas pertimbangan penetapan suatu hukum. Sementara Izzuddin bin Abdissalam dikenal dengan pernyataannya, bahwa semua aturan dan perintah Allah, acuannya adalah kemaslahatan umat manusia. Ibnu Hajar al-Asqalani, memiliki tulisan khusus membahas tentang pandemi Tho'un, pandangannya sangat kontekstual dan sejalan dengan ahli kesehatan dalam menghadapi wabah.

Menghadapi Pandemik COVID-19, Pengurus Masjid mengeluarkan surat No 798/ 01/ 01/ 03/ 2020 yang isinya antara lain, pertama, menghimbau agar para jamaah melaksanakan shalat fardhu di rumah masing-masing menggantikan shalat jamaah di MRBJ. Kedua, menghimbau jamaah agar melaksanakan shalat dhuhur di rumah masing-masing sebagai pengganti shalat Jumat. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020 hingga tanggal 30 Maret 2020, dan akan dievaluasi hari ke hari mengikuti perkembangan.

Pada periode berikutnya, Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) juga merespons dengan baik seruan pemerintah melalui Kepmenkes dan SE Menag, terkait diperbolehkannya masjid digunakan kembali untuk ibadah, dengan menetapkan sejumlah ketetapan protokol kesehatan. Pengurus menyampaikan beberapa ketentuan antara lain: 1) mewajibkan jamaah memakai masker, baik di dalam maupun di area sekitar masjid, 2) di dalam masjid, diterapkan

jaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah, 3) jamaah wajib membawa sajadah, 4) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, 5) tidak membolehkan bersalaman, cium tangan, atau berpelukan, 5) melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk masjid, 6) larangan masuk masjid bagi jamaah yang sakit, demam, pilek, flu, atau lainnya yang berkaitan dengan gejala COVID-19. 7) lantai masjid tidak menggunakan karpet, 8) melakukan pembersihan dan disinfektan area masjid, dan 9) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah, tanpa mengurangi ketentuan minimal dalam ibadah.

B. Penutup

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) selain menjadi sarana peribadatan yang nyaman dan memadai, juga menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan menghadirkan wacana keIslaman yang moderat dengan menetapkan platform Ahlussunnah wal Jamaah. Moderasi beragama diterapkan dalam rekrutmen guru agama (penceramah), pemilihan materi, pendekatan atau metode, dan media yang dipakai.

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) juga memiliki banyak aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah atau masyarakat sekitar. MRBJ mengelola wakaf produktif, pengelolaan ZIS, dan dana infak lainnya. MRBJ juga menyalurkan santunan/ bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan bagi yatim piatu, dan bantuan bea siswa, serta klinik kesehatan. Program-program tersebut MRBJ menjadi lembaga yang juga bergerak bagi pemberdayaan umat.

Menghadapi Pandemik COVID-19, Pengurus Masjid merespons positif himbauan pemerintah. Pada periode 20-30 Maret tidak ada

pelaksanaan ibadah berjamaan, namun sesuai perkembangan dan kebijakan pemerintah, kegiatan pelaksanaan ibadah berjamaah dibolehkan dengan menetapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun demikian, kegiatan-kegiatan pengajian umum, hingga kajian ini dilakukan belum bisa dilaksanakan.

Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama Tahun 2020

(Studi Kasus Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon)

Oleh: Ibnu Hasan Muchtar

A. Gambaran Umum Kota Cirebon

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Kota Cirebon adalah salah satu tujuan wisata religi umat Islam salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam wilayah III (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), terletak di pesisir utara Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang Surabaya. Letak inilah yang menjadikan kota Cirebon sebagai salah satu tujuan wisata yang cukup strategis. Terlebih lagi saat ini kota Bandung yang selalu menjadi tujuan wisata sudah mulai padat dan diterpa kemacetan, maka kota Cirebon berpotensi besar sebagai alternatif pilihan destinasi wisata berikutnya di Jawa Barat. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta (www.jabarprov.go.id).

Kota Cirebon menyimpan banyak potensi baik dari segi pariwisata, sumber daya alam maupun sosial budayanya. Sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat, Kota Cirebon memiliki banyak potensi wisata. Dalam website Disporbudpar Kota Cirebon, Wisata Kota Cirebon terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu Wisata Perdagangan dan Jasa (Wisata Belanja, Wisata Alam dan Wisata Kuliner), Wisata Ekonomi Kreatif (Wisata Kerajinan dan Wisata Kesenian) dan Wisata Budaya (Wisata Budaya, Wisata Sejarah dan Wisata Ziarah), diantara yang menjadi tujuan wisata religi adalah tempat-tempat seperti: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Kacirebonan, Taman Air Sunyaragi, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Panjunan dan Masjid Raya At-Taqwa. (Ikhwan Nugraha, 2019).

Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2019, jumlah keseluruhan perolehan jumlah kursi di DPRD Kota Cirebon yakni 35 Kursi, yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (2 Kursi), Partai Gerindra (6 Kursi), Partai PDI-Perjuangan (6 Kursi), Partai Golkar (3 Kursi), Partai Nasdem (4 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (3 Kursi), Partai Amanat Nasional (3 Kursi), Partai Hanura (1 Kursi), dan Partai Demokrat (4 Kursi).

Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Cirebon yang digelar di Griya Sawala (12/8). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.619-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 325.767 jiwa dengan

luas wilayah 37,36 km^2 dan sebaran penduduk 8.719 jiwa/km^2. Wilayah Kota Cirebon Sebelah Utara dibatasi Sungai Kedung Pane, Sebelah Barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, Sebelah Selatan dibatasi Sungai Kalijaga, Sebelah Timur dibatasi Laut Jawa.

Luas wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon adalah 38,10 km^2, pada tahun 2014 terdiri dari 5 wilayah kecamatan, 22 kelurahan, 247 Rukun Warga (RW), dan 1.352 Rukun Tetangga (RT). Harjamukti merupakan kecamatan terluas (%47), kemudian berturut-turut Kesambi (%22), Lemahwungkuk (%17), Kejaksan (%10), Pekalipan (%4).

Sejarah Cirebon (1927). Menurut Manuskrip *Purwaka Caruban Nagari*, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah *Ki Gedeng Alang-Alang* yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Pajajaran). Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. *Ki Gedeng Alang-Alang* memindahkan tempat permukiman ke tempat permukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala permukiman baru diangkatlah *Ki Gedeng Alang-Alang* dengan gelar Kuwu Cerbon.

Pada Perkembangan selanjutnya, *Pangeran Walangsungsang*, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar *Cakrabumi*. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon Untuk menanyakan upeti rebon terasi ke Adipati Cirebon, namun

ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah cirebon.

Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan Pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar *Cakrabuana*. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1681 Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC, setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC.

Pada tahun 1858, di Cirebon terdapat 5 toko eceran dua perusahaan dagang. Pada tahun 1865, tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan (kuintal), dan pada tahun 1868 ada tiga perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabang di Cirebon. Pada tahun 1877 Cirebon sudah memiliki pabrik es. Pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artesis dengan perumahan dibangun pada tahun 1877.

Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon disahkan menjadi *Gemeente Cheribon* dengan luas 1.100 ha dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Kemudian pada tahun 1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 ha dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi *Kotapraja* dengan luas 3.300 ha, setelah ditetapkan menjadi *Kotamadya* tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 ha. (http://www.cirebonkota.go.id Profil Sejarah Pemerintahan)

B. Profil Masjid Agung At-Taqwa Kota Cirebon

1. Sejarah berdiri

Masjid ini semula bernama "Tajug", dibangun berbarengan dengan Pendopo Kabupen Cirebon. Pendopo menghadap ke Utara sedangkan Masjid menghadap ke sebelah Barat. Di Jalan Singsingamangaraja berdiri kokoh penjara dengan arsitektur masa lalu, sementara di sebelah Selatan berdiri pasar (Pasar Esoek). Kawasan Pendopo Kabupaten Cirebon dirancancang sebagai pusat pemerintahan pribumi sebagai realisasi politik desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda awal Abad XX.

Sejak tahun 1903 Regent Tjirebon (Bupati Cirebon) masa kolonial Belanda, mulai merintis pembangunan pusat pemerintahan Cirebon yang terdiri dari Pendopo Kabupeten, alun-alun Kejaksaan dan Tajug Agung Kabupaten (sekarang Masjid Raya At-Taqwa). Sebagai penjajah Belanda paham betul bahwa masyarakat Cirebon tidak apat dipisahkan dari Tajug (masjid), kebudayaan dan tradisi Cirebon yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan tradisi Islam. Mereka tetap melestarikan peran Tajug dalam pemerintahan. Namun mereka juga menghadirkan cara-cara penghormatan terhadap para sultan, kiyai, ki penghulu, pemimpin keagamaan, bupati serta pangrehpraja secara berlebihan. Tradisi "taklid buta" dan pengkultusan diciptakan sehingga menimbulkan perpecahan di atara umat Islam. Berbagai bentuk penghormatan yang berlebihan di antaranya berjongkok, mengesod, tradisi menyembah dan bersujud atau tradisi ngaras. Akhirnya oleh Bupati Cheribon Raden Adipati Salmon Salam Soerjadiningrat (1902-1918) "Tradisi Ngaras" pada 14 Juli 1915 secara resmi dilarang karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan diganti dengan tradisi salam, mengucapkan salam dan

berjabat tangan "bersalaman" sesuai syariat Islam. (Badar Syaeful, 2017).

2. Perkembangan Masjid Raya At-Taqwa dari Masa ke Masa

Cirebon yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan Pemerintahan Kerajaan Islam di Nusantara menjadi kebanggaan Jawa Barat sebagai kota termaju di wilayah pantai utara Jawa Barat masa kini, bukan hanya dapat dipandang sekedar kota dan kabupaten sebagaimana kita liat saat ini. Cirebon tempo dulu tercatat dalam sejarah memiliki pusat penyebaran seni budaya, yang hingga kini bangunan cagar budaya berupa keraton dan beberapa bangunan tua yang masih terpelihara, termasuk beberapa bangunan Masjid Kuno seperti Masjid Jagabayan, Masjid Merah, Masjid Pangeran Kejaksan, Masjid An-Nur, Masjid Keraton Kanoman disamping dua Masjid Besar yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Alun-Alun Kesepuhan dan Masjid Raya At-Taqwa di Alun-Alun Kejaksan. Kedua masjid besar ini ibarat dua pilar kekuatan ruh Cirebon sebagai Kota Wali.

Sebagaimana disebut di atas bahwa Masjid Raya At-Taqwa ini awal mula didiran pada tahun 1903 yang terdiri dari dua bagian, sebagian digunakan sebagai Tajug Agung (Masjid Raya At-Taqwa saat ini) dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai Alun-Alun (Alun-Alun Kejaksan sekarang). Penamaan Masjid Raya At-Taqwa sebagai ganti dari Masjid Agung karena di Kota Cirebon sebelumnya sudah ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa di alun-alun Kesepuhan, sehingga tidak mungkin dalam satu kota terdapat 2 (dua) Masjid Agung. Maka akhirnya Masjid Agung At-Taqwa disebut sebagai Masjid Raya, padahal dalam nomenklatur yang dikeluarkan oleh

Kementerain Agama adalah Masjid yang berada di suatu Pusat Kota Provinsi itulah disebut Masjid Raya.

Adalah seorang Kepala Koordinator Urusan Agama Cirebon yang bernama Raden Mas (RM) Arhatha yang mempunyai gagasan untuk merenovasi Tajug Agung itu di tempat yang lama kemudian mengganti nama dengan Masjid Raya At-Taqwa. Sebelumnya Tajug Agung bangunannya sudah tua dan lama, letaknya kurang menghadap Kiblat dan ruangannya terlalu kecil. Pada tahun 1951 terwujudlah Masjid Raya At-Taqwa yang memiliki banyak ruangan yang serba guna walaupun setelah mengalami banyak hambatan dan kendala.

Pembangunan dari waktu ke waktu dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya terus berlanjut yang awalnya Masjid Raya ini terdiri dari dua bangunan kemudian disatukan menjadi satu bangunan sampai sekarang ini. Sebagai icon Kota Cirebon Masjid Raya ini merupakan Masjid yang secara tidak langsung kepemilikan dan kepengurusannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Cirebon. Terlihat dari catatan yang ada selama ini bahwa kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Raya At-Taqwa ini selalu dipimpin oleh Kepala Dinas, Kepala Kantor dan atau Direktur BUMD yang ada di Kota Cirebon. Selain itu peran unsur birokrasi dalam pembangunan sejak awal terus berlanjut. Luas Masjid Raya At-Taqwa sebelumnya kurang lebih 100 m^2 tidak bertingkat hanya dapat menampung kurang lebih 2000 jemaah, saat ini bertingkat 2 (dua) lantai dengan luas lantai dasar 1.749 m^2 dan luas lantai atasnya 926 m^2, jadi luas total adalah 2.675 m^2, dapat menampung kurang lebih 5.500 jemaah.

Perkembangan Masjid Raya At-Taqwa ini juga tidak terlepas dari peran serta dari remaja masjid yang sebagiannya adalah

remaja masjid An-Nur yang beralamat di Jalan Kantor bergabung dengan aktivis remaja masjid dari seluruh Kota Cirebon yang kemudian membentuk Forum Komunikasi Remaja Masjid (FKRM) Kota Cirebon dan menjadikan Masjid Raya At-Taqwa sebagai Sekretariatnya. Menempatkan Masjid Raya ini sebagai pusat kegiatan remaja masjid se-Kota Cirebon menguntungkan secara politis bagi FKRM, berbagai kegiatan dilakukan seperti Porseni Remaja Masjid I & II, Festival Remaja Masjid, dan Jamhore Anak-Anak Islam Cirebon serta Koperasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Cirebon.

Dinamika Pemuda dan masyarakat Kota Cirebon yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia luar juga diikuti oleh geliat Masjid Raya At-Taqwa dengan berbagai kegiatan yang dipelopori oleh ramaja masjid yang mampu melahirkan ide dan gagasan untuk menata dan membangun Koat Cirebon yang religius dan agamis sesuai dengan kultur Kota Wali. Diawali oleh Walikota Cirebon dan Kepala Kantor Departemen Agama pada waktu itu (Drs. H. Lasmana Suriatmadja, M. Si dan Drs. H. Endang Misbahuddin) sistem pemilihan formatur untuk pertama kali digunakan untuk penyusunan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya At-Taqwa periode 2002 – 2007 dengan melibatkan langsung unsur jamaah dan tokoh masyarakat, ini merupakan terobosan yang sangat berbeda dari system kepengurusan DKM At-Taqwa sebelumnya.

Masjid Raya At-Taqwa terus berbenah untuk kenyamanan para jamaah dan para tamu yang berkunjung agar tenang dan khusu' dalam menjalankan ibadat. Lebih dari itu berbagai fasilitas dibangun seperti Gedung Islamic Centre, Guest House, Pusat Kuliner, Koperasi, dan Ruang Pertemuan serta membangun

gedung sekolah Taman Kanak-Kanak dan Rumah Tahfizd Qur'an. Berbagai sarana informasi juga disediakan untuk kebutuhan para pengunjung Masjid ini seperti menerbitkan Islamic News, Booklet Ramadlan, Buku Naskah Khotib dan Radio Dakwah At-Taqwa.

Puncak dari beberapa perubahan baik dari segi fisik dan perubahan model manajemen pengelolaan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan jamaah pada tahun 2005 dengan melakukan renovasi secara total dari bangunan masjid yang semula 1 (satu) lantai menjadi 2 (dua) lantai serta ditambah bangunan menara setinggi 65 M dan 4 (empat) minaret setinggi masing-masing 25 M. Demikian pula dalam hal manajemen yang semula berbasis birokrasi diubah menjadi berbasis jamaah.

Berikut dinamika perubahan fisik dan perubahan manajemen dari tahun ke tahun Masjid Raya At-Taqwa sbb:

TAHUN	**RI'AYAH (TATA KELOLA FISIK)**	**IMARAH (TATA KELOLA PROGRAM)**	**IDAROH (TATA KELOLA ADMINISTRASI)**
1918	Bangunan permanen di Kampung Kejaksaan bernama Tajug Agung At-Taqwa.	Kegiatan Ibadah Rutin	Manajamen berbasis tokoh
1951	Renovasi I: At-Taqwa diberi nama Masjid Raya	Kegiatan Ibadah Rutin	Manajemen berbasis tokoh

1963	Renovasi II: Ciri khas: Momolo/Kubah Aluminium	Kegiatan Ibadah Rutin dan Kuliah Subuh	Manajemen berbasis Birokrasi Manajemen berbasis Birokrasi (Kepengurusan ditentukan Pemerintah Kota Cirebon) dari mulai Kepala Kemenag, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, dll)
1984	Renovasi III: Momolo Kubah diganti menjadi bentuk Joglo	Kegiatan Ibadah Rutin dan Kuliah Subh dan Pengajian Umum dan Tabligh Akbar.	
1990 - 2002		Kegiatan Ibadah Rutin, Kuliah Subuh, TKA/TPA, RA, Pengajian Umum dan Remaja Masjid.	

2002 – 2007	Renovasi IV: Bangunan Masjid total diubah dari 1 lantai menjadi 2 lantai dan ditambah Menara setinggi 65 M.	Program DKM cukup beragam, selain pelayanan Ibadah Rutin, kegiatan dakwah: Majelis Taklim, Kuliah Subuh, Pengajian Umum, Diklat-Diklat, Seminar, Kursus B. Arab dan Inggris, Pesantren Kilat, pendirian Lebaga Zakat/ LAZISWA.	Dimulai Manajemen berbasis Jama'ah, Kali pertama Ketua DKM At-Taqwa dipimpin dari unsur jama'ah dan dipilh dengan system formatur. Kepengurusan DKM dikukuhkan dengan SK Walikota Cirebon Ketua DKM: H. Abas Sirad, SH dan diperpanjang sd. 2010.
2005 - 2009	Yang tersisa dari bangunan sebelumnya adalah 4 tiang di ruang utama.		

2005	Islamic Centre Kota Cirebo (ICC) berdiri. Dilengkapi ruang pertemuan / geduang serbaguna dan kantor secretariat.	Program focus pada kajian dan dakwah Islam, koordinasi Lembaga dan Ormas Islam serta memperkokoh jaringan dakwah dan pelayanan umat, seperti ikrar masuk Islam, Pembinaan muallaf, dll.	Manajemen ICC berbentuk Yayasan (Pusat Kajian dan Dakwah Islam Cirebon). Kepengurusan ICC dipilih oleh Dewan Pembina dan dikukuhkan oleh Walikota Cirebon sebagai Ketua Dewan Pembina. Sekretaris Umum dan Bendahara Umum DKM Raya At-Taqwa Kota Cirebon dijabat orang yang sama, untuk memudahkan koordinasi dan manajemen pelaksanan kegiatan.

2007			Wacana penggabungan manajemen At-Taqwa dan ICC untuk efektivitas dan sinergitas pelaksanaan program. Wacana merger berbalut dengan menunggu masa bakti Kepengurusan ICC berakhir tahun 2010.
2010		Penguatan dan standarisasi petugas ibadah: Imam Hafidz Al-Qur'an Penguatan Pelayanan Ibadah Sosial.	Pembina ICC yang secara personal sama dengan Pembina DKM At-Taqwa bersepakatan untuk mengubah bentuk Yayasan menjadi non Yayasan dengan Akte Notaris: Lia Amalia, SH. No: 53 Tanggal 15 September 2010.

2011		Penguatan anajemen dan standarisasi pelayanan jama'ah. Diversifikasi program ibadah ritual menjadi social.	Penggabungan DKM At-Taqwa dan ICC resmi dilakukan denganSK Nomor: 451.1/Kep.46-Adm Kesra/2011 tanggal 26 Januari 2011. Dengan Ketua Umum 1 Prof. Dr. HM. Imron Abdullah, M. Ag (alm).
2011 - 1012	Penambahan fasilitas Islamic Guest House untuk memperluas layanan social, ambulan gratis, dll		Ditunjuk Plt. Ketum DKM At-Taqa dan ICC Sdr. Ahmad Yani, M. Ag menggantikan Prof. Dr. HM. Imron Abdullah, M. Ag yang wafat tahun 2011. Salah satu poko Plt. Menyempurnakan AD/ART gabungan DKM At-Taqwa dan ICC

2013	Penambahan fasilitas at-Taqwa Bussnes Centre (ABC) untuk penunjang kegiatan dakwah		Berdasarkan AD/ ART gabungan, Sdr. Ahmad Yani terpilih menjadi Ketua Umum Pertama DKM At-Taqwa dan ICC (At-Taqwa Centre) Kota Cirebon masa Khidmat 2013 – 2018 yang dikukuhkan dengan SK Walikota Cirebon Nomor 451.1/ Kep.31-Adm Kesra tanggal 14 Januari 2013
2014	Pembangunan Gedung Rumah Tahfidz At-Taqwa	Dibuka program Tahfidz Qu'an di RTQ	
2017	Akhir Desember 2017 dimulai Pembangunan Gedung RA Tahfidz Qur'an RKB RA At-Taqwa 2	Pembukaan Pesantren Digital Preneurship At-Taqwa	MOU At-Taqwa Centre dengan Bank Indonesia KPW Cirebon.

Sumber: **Menebar Masalah Meraih Berkah:** *Catatan Perjalanan 22 Tahun Kang Yani Mengabdi di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.*

3. Visi, Misi dan Tujuan At-Taqwa Centre

Penggabungan antara DKM Masjid At-Taqwa dan Islamic Centre berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 451.1/Kep.31-Adm-Kesra/2013 menjadi At-Taqwa Centre dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada jamaah masjid dan umat Islam dalam masalah keislaman dan sosial. At-Taqwa Centre adalah wadah untuk mempersatukan wawasan pandangan keislaman dan kegiatan sekaligus, sehingga diharapkan dapat menjadi cerminan dan indikator kemajuan keberagamaan masyarakat Kota Cirebon. Penggabungan ini semata hanya dalam manajemen, karena pada hakekatnya masjid juga merupakan Islamic Centre yakni Pusat Kegiatan Keislaman, tidak hanya untuk tempat shalat belaka, sedangkan Islamic Centre merupakan lembaga dakwah dan pendidikan keislaman yang tidak terlepas dari orientasi kemasjidan.

Untuk itu yang menjadi Visi At-taqwa Centre adalah sebagai Pusat Kajian dan Dakwah Islam yang maju di Jawa Barat. Sedangkan untuk Misinya sebagai berikut:

1. Melayani jamaah dalam melaksanakan ibadah dengan nyaman, aman, tentram, tertib dan khusyu'.
2. Membina jamaah agar memiliki kualitas iman, ilmu dan amal serta akhlak karimah.
3. Melakukan kajian ke-Islaman dalam berbagai perspektif.
4. Melakukan dakwah amar ma'ruf nahi-munkar dan pendidikan.
5. Menata lingkungan At-Taqwa Centre sebagai kawasan religious.

Yang menjadi tujuan At-Taqwa adalah untuk meningkat keimanan dan ketakwaan jama'ah, menjadikan At-Taqwa Centre

sebagai pusat pelayanan ibadah yang nyaman dan khusyu' bagi jama'ah, menjadikan At-Taqwa Centre sebagai sarana pembinaan dakwah, dan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.

4. Fasiltas At-Taqwa Centre

Untuk mendukung dan terlaksananya visi, misi dan tercapainya tujuan At-Taqwa Centre maka diperlukan fisilitas yang mendukung. Sampai saat ini fasilitas yang dimiliki oleh At-Taqwa Centre diantara adalah:

1. Masjid

   Masjid Raya At-Taqwa yang cukup megah merupakan salah satu dari 100 masjid terindah di Indonesia dan 10 Masjid terindah dan termakmur se-Indonesia. Terdiri dari 2 lantai berkapasitas 5000 jemaah dengan halaman parkir yang cukup memadai. Selain untuk ibadah shalat rutin, juga untuk acara Tabligh Akbar, prosesi akad nikah, Majelis Taklim dan kegiatan Islam lainnya.

2. Islamic Guest House

   Gedung penginapan berstandar hotel berbintang yang tidak terpisah dari Islamic Centre diperuntukkan untuk masyarakat umum yang ada kepentingan dalam kunjungannya ke Kota Cirebon, dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Gedung Utama

   Gedung ini dipergunakan untuk acara serbaguna seperti pernikahan, seminar, workshop, diklat dll. Gedung yang full AC ini, berkapasitas 1000 orang ini dilengkapi dengan sound system, kursi ekslusif 250 buah, ruang rias/panitia, ruang prasmanan, meja standar 8 buah dan toilet 8 kamar.

4. Ruang Madya

   Ruangang full AC ini dipertuntukkan untuk pertemuan-pertemuan terbatas berkapasitas 75 orang dilengkapi dengan sound system dan infocus.

5. Meeting Room

   Ruang kedua full AC yang diperuntukkan untuk pertemuan berkapasitas 50 orang dengan pasilitas hanya sound system

6. Tambahan

   Pasilitas tambahan ini dimaksudkan untuk penyediaan pasilitas yang memungkin diperlukan sewaktu-waktu ketika yang sudah tersedia dirasakan masih kurang oleh custumer/pelanggan seperti sound system, kursi, in focus, laptop, screen, catering. Hiburan berupa nasyid, gambus, rebana dll, MC, Muballigh, fotografer, vedio shooting dan EO (Event Organizer).

5. Unit-Unit Kegiatan Masjid (UKM) At-Taqwa

Dalam rangka memenuhi harapan para jamaah maka At-Taqwa Centre telah memiliki beberapa unit kegiatan yang dapat saling menunjang satu dengan lainnya, setidaknya sudah ada 11 (sebelas) unit kegiatan yaitu:

1. Nama Kegiatan: Kuliah Subuh Masjid At-Taqwa (KUSUMA), mulai berdiri pada tahun 1963, Program yang dilakukan diataranya: a). Pengajian Umum, b). Ziarah Wali Sango, c). Bakti Sosial, d). Khitanan Massal, dan Santunan Anak Yatim.
2. Raudlatul Atfal (RA) At-Taqwa, beridiri mulai tahun 1990 dengan Akreditasi A (Amat Baik), program yang dilakukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. At-Taqwa Language Centre (ALC) tahun berdiri sejak 1996 dengan kegiatan kursus: a). Bahasa Inggris, b). Bahasa Jepang, c). Bahasa Arab dan d). Kursus Komputer.
4. Kegiatan Lembaga Zakat Infaq, Sodakoh dan Wakaf (LAZISWA), beridir sejak tahun 2002, dengan orogram dan kegiatan: a). Penerimaan Zakat, Infaq dan Sodakoh, b). Beasiswa Pendidikan, c). Santunan Fakir Miskin, d). Bina Ekonomi Umat, e). Pendataan Mustahiq, f). Dompet Fisabilillah, g). Bina Muallaf, h). Diklat Manajemen Zakat, i). Konsultasi Zakat, j). Bantuan Musafir dan Orang Terlantar.
5. Remaja Masjid At-Taqwa (RMA), berdiri sejak tahun 1990 dengan program: a). Studi Islam Intensif, b). Menthorin Kuliah Dhuha, c). Kajian Mingguan, d). Super Camp, e). Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT), f). Goes To School dan g). SRPH (Semarak Ramadhan Penuh Hikmah).
6. PRIMKOPJAMAS (Primer Koperasi Jamaah Masjid), sejak beropersi tahun 1992 dengan program: a). At-Taqwa Mart, b). Simpan Pinjam dan c). Sembako.
7. Perpustakaan Masjid berdiri sejak tahun 2005, dengan program kegiatan Leterasi Masjid dan Taman Bacaan Masjid.
8. Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ) At-Taqwa, beroperasi sejak tahun 2014, program yang sudah ada saat ini: a). Tahfidz For Kids, b). Tahfidz Lisyabab (Remaja), c). Tahfidz Berasrama, d). Tahfidz Tebar Guru Ngaji, e). Tahfidz Muaskar Ramadhan (Tahfidz Karantina, dan f). Majelis Tahsin Tilawah Qur'an.
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) At-Taqwa, beroperasi sejak tahun 1992 dengan kegiatan: TPQ Dasar dan TPQ Menengah.

10. Radio Dakwah At-Taqwa (Duplek Radio Maritim 102,6 FM), mengudara sejak tahun 2015 dengan program: a). Gelaran Dakwah At-Taqwa (Geladak), b). Geladak Ramadhan dan c). Geladak Shalat Jum'at.
11. Pesantren At-Taqwa Digital Preneurship, mulai berkegiatan tahun 2017 dengan program: a). Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Masjid dan b). Pendidikan Ekonomi Kreatif.

C. Peran Masjid At-Taqwa Dalam Penanganan COVID-19

Terkait dengan peran masjid dalam penanganan pandemi COVID-19, sejak awal Masjid At-Taqwa telah terlibat dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 dengan membentuk Gugus Tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Harian At-Taqwa Centre Kota Cirebon (DKM Raya At-Taqwa dan Islamic Centre Kota Cirebon) tanggal 9 April 2020 dengan susunan personalia lengkap dari penanggungjawab, pengarah, ketua dan divisi-divisi yang dianggap perlu seperti divisi kesehatan, divisi peralatan tanggap bencana dan lainnya.

Masjid At-Taqwa sebagai mitra pemerintah dalam penanganan COVID-19, ikut andil dalam menyukseskan penanganan wabah COVID-19 secara kolektif dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI, kampus-kampus dan lembaga/komunitas lainnya. Dalam konteks penanganan COVID-19, masjid tidak hanya mengedukasi masyarakat dari pendekatan spiritual semata tapi juga dari pendekatan-pendekatan lainnya (kesehatan). Dalam hal inilah masjid menjadi center/pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya budaya sehat dan keselamatan diri.

Adapun peran Masjid At-Taqwa yang dilakukan selama merebaknya wabah COVID-19 ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang perlunya penerapan protokol kesehatan

Ketika diumumkan oleh Pemerintah Daerah tentang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat oleh Gubernur maka otomatis juga berlaku untuk wilayah Kota Cirebon, untuk itu Masjid At-Taqwa langsung melakukan langkah-langkah untuk tidak melakukan shalat secara berjamaah sebagai mana biasanya dengan mengumumkan kepada jamaah bahwa Masjid At-Taqwa untuk sementara waktu tidak melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya seperti shalat 5 (lima) waktu secara berjamaah, shalat Jumat dan kegiatan lainnya seperti kuliah subuh dan aktivitas Pendidikan seperti TPA dan Raudatul Atfalnya dihentikan sementara waktu. Hal ini berlaku hampir 2 bulan karena ada 3 kali perpanjangan waktu. Setelah dihentikannya PSBB dan memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk wilayah Jawa Barat, maka masjid At-Taqwa mulai membuka kegiatan yang terbatas hanya untuk shalat 5 (lima) waktu dan shalat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di antara metode sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menempelkan berbagai pengumuman berupa spanduk dan sticker di dalam maupun di sekitar masjid baik di dinding maupun pagar masjid. Untuk penerapan protokol kesehatan di masjid At-Taqwa telah melakukan hal-hal sebagai beriku:

a. Menyemprot luar dalam dengan disinfektan.

   Penyemprotan lingkungan masjid dengan disinfektan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mendapat sumbangan dari para jamaah shalat Jumat.

b. Membuat posko COVID-19

Posko ini dianggap penting agar ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang berkenaan dengan penyakit COVID-19 ini segera dapat tertangani karena sudah tersedia posko khusus untuk menanganinya.

c. Membuat rambu2 COVID-19

Rambu-rambu ini dibuat untuk memudahkan para jamaah dan atau penziarah yang berkesempatan mampir di Masjid At-Taqwa mudah memahami dan mengerti alur yang perlu dilakukan ketika berada di lingkungan Masjid At-Taqwa

d. Menyediakan wastafel

Penyediaan wastafel adalah bagian dari anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam protokol kesehatan yaitu untuk cuci tangan, diharapkan para jamaah yang ingin mengikuti shalat berjamaah baik 5 (lima) waktu atau shalat Jumat sebelum memasuki masjid hendaknya mereka melakukan mencuci tangan terlebih dahulu bagi yang belum berwudlu dari rumahnya masing-masing.

e. Cek suhu setiap jamaah sebelum masuk ke masjid

Pengecekan suhu tubuh jamaah sebelum masuk ke dalam masjid adalah hal yang menjadi bagian penting untuk mengetahui seseorang dalam kondisi sehat atau kurang sehat sehingga yang hasil pengecekannya melebihi batas yang telah ditentukan maka jamaah yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk masuk dan mengikuti kegiatan shalat berjamaah.

f. Membuat himbauan dengan suara yang direkam disiarkan setelah selesai adzan

Pengumuman yang disampaikan setelah azan dan sebelum waktu iqomat untuk menunaikan shalat dianggap penting untuk mengingatkan para jamaah apa yang harus dilakukan ketika sudah di dalam masjid, bunyi himbauan dimaksud seperti: “Assalamu’alaikum wr wb. diinformasikan bahwa selama masa pandemi COVID-19, maka pengaturan shof diberlakukan, shof terdepan mengikuti tanda lakban hitam yang ada di barisan shof depan, shof belakang mengikuti shof terdepan begitu selanjutnya, Jamaah harus memakai masker, membawa sajadah sendiri, sebelum berwudlu harap cuci tangan memakai sabun. Bagi jamaah yang sedang batuk, pilek, demam, panas serta sesak nafas sebaiknya tetap berada di rumah. Ayo kita tetap perhatian agar kita tetap terhindar dari virus Korona COVID-19 dan jangan berhenti terus berdoa agar wabah COVID-19 segera musnah. wassalamu’alaikum wr wb.”

g. Membagikan masker kepada jamaah

Kegiatan membagikan masker kepada para jamaah yang datang dan masuk ke masjid tetapi tidak menggunakan masker oleh disebabkan lupa membawa atau tidak memiliki masker maka pengurus masjid berinisiatif untuk menyiapkan masker yang dibeli oleh pihak masjid maupun didapat dari sumbangan jamaah, dengan maksud agar Jamaah semuanya dapat mengikuti protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dan dihimbau secara terus-menerus oleh pemerintah.

Melakukan diskusi melalui webinar yang masih berlangsung rutin setidaknya sudah empat kali dengan judul yang berbeda salah satunya yang peneliti dapat ikuti adalah tentang “Masjid sebagai Inspirasi Moral dan Sosial Menghadapi Dampak COVID-19”.

Dalam rangka untuk tidak terputusnya kegiatan yang sudah berlangsung lama dalam bentuk pengajian khusus dan pengajian subuh namun terhenti sementara sampai saat ini dengan turunnya wabah COVID-19 maka dilakukan kegiatan seminar melalui daring (webinar) dan sudah berlangsung ketiga kalinya. Untuk kali ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi Masjid dan pondok pesantren seperti Dr. Didin Wahidin, Prof. KH. Ahmad Syafe'i Mufid, Prof. Adang dan Dr. Miqdad dan Dr. Ahmad Yani dengan mendiskusikan tema yang sedang hangat yaitu tentang Masjid sebagai inspirasi moral dan sosial menghadapi dampak COVID-19. Di antara hal yang dapat diambil kesimpulan dari webinar ini adalah:

1. COVID-19 memunculkan dampak kesehatan yang dulu dalam memegang pasien biasa saja sekarang pakai alat, dulu tidak gunakan cuci tangan sekarang harus sering-sering cuci tangan dan harus menjaga jarak dll. Dari segi ekonomi di mana-mana ditemukan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang, dalam hal politik akan berdampak pada pilkada yang sudah dijadwalkan, dalam bidang kebudayaan tentu berdampak pada pendidikan anak-anak kita yang dulu harus tatap muka sekarang dengan menggunakan daring. Maka ada perbedaan saat ini dunia kita sekarang, semua sedang menggunakan daring kalau ini dievaluasi dan ternyata hasilnya bagus maka ke depan semua akan dilakukan melalui daring maka betapa banyak penghematan keuangan dan waktu yang bisa dihemat dalam diklat-diklat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Dalam memasuki dunia baru ini di mana posisi masjid kita yang menjadi institusi luar biasa bagi muslimin nah ini di mana

posisinya? Saat ini kegiatan masjid sedang dibatasi kegiatannya akan sampai kapan ini yang belum ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir. Ini yang perlu dipikirkan oleh kita orang-orang masjid, nah ini yang perlu di mana posisi agama dalam kondisi sekarang karena sepanjang pemerintah lakukan yaitu mengikuti protokol WHO yaitu sains, agama hanya mengikuti.

3. Dalam konteks temuan dan kajian yang ada maka agama diposisikan mengikuti sains, namun perlu dilihat adalah masalah pandemi COVID-19 ini banyak sekali hoaks tentang pemberitaan yang simpang-siur sehingga menimbulkan kegamangan di masyarakat.
4. Mantan Wapres menyampaikan bahwa masjid dijadikan garda terdepan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan masjid bisa menjadi inspirasi penyebaran informasi yang baik. Karena segala sesuatu yang keluar dari masjid dan benar-benar maka sungguh ini dapat dijadikan alat untuk membatasi penyebaran COVID-19 nah jika informasi itu keluar dari masjid masyarakat akan ikut.
5. Saat ini pemerintah masih kurang melibatkan para kyai atau ulama padahal peran para ulama ini sangat penting, di Jawa Timur misalnya kan masyarakat Madura banyak dan kita mengetahui masyarakat Madura sangat patuh sekali kepada kiyai atau ulama.
6. Terjadi ada perbedaan di antara umat dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini setidaknya ada 3 (tiga) pertama Tasyaddud yaitu rigit yang memahami benar-benar terhadap hal yang memungkinkan modlorot yang lebih besar sehingga dia super hati-hati mereka adalah teman-teman dokter dan perawat, teman-teman yang melek secara rasional, kalau di

IAIN ini jurusan biologi kalau di partai ini PKS dan teman-teman di Muhammadiyah jujur ini perfect berdasarkan emperis dan kenyataan. Kedua kelompok Tawassut, kelompok rasional tetapi berbeda dengan Muhammadiyah mereka mempunyai nilai-nilai spiritual yang cukup melihat fenomena ini sebagai ujian hakikatnya tetapi berikhtiar juga penting. Ketiga kelompok Tasahhul/memudahkan kelompok yang benar-benar liberal dalam konteks memahami ini dalam fatalisme sehingga bagaimana Gusti Allah saja. Kasus kecil misalnya di Masjid At-Taqwa ketika diterapkan protokol kesehatan walaupun kelompok kecil saja 2/3 mereka tidak mau pakai masker dan jaga jarak sampai-sampai mereka mengikuti jamaah tahap kedua karena tidak mau shalatnya berjarak.

7. Masjid sebagai sumber otoritas, hingga masjid juga digunakan sebagai tempat untuk kontestasi otoritas termasuk soal COVID-19. Oleh karena itu terjadi perbedaan antara satu masjid dengan lain dalam menyikapi fatwa dan anjuran pemerintah ada yang taat ada yang tidak menghiraukan karena persoalan trust and distrust terhadap otoritas. Jadi saat ini bukan hanya krisis ekonomi namun juga krisis otoritas yang mana yang bisa diikuti, dalam kondisi seperti ini bagaimana mendudukkan masjid sebagai sumber otoritas.
8. Kasus di Cirebon memang disparitas itu diakui. Kembali kepada otoritas manajemen person per person siapa yang mengelola masjid itu, kalau yang mengelola kelompok yang tasahul, tasyaddud itu menentukan kebijakan di lingkungan masjid yang dia kelola.
9. Masjid tetap akan menjadi dipercaya dan diharapkan, maka ketika sebagian kepala daerah mengatakan gagal

menanggulangi permasalahan COVID-19 ini karena mereka melupakan peran masjid dan peran kiyai.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Seluruh pengurus (DKM) Masjid Raya At-Taqwa yang terdiri dari berbagai latar belakang (tingkat/ragam pendidikan dan ormas keagamaan) sangat kompak dengan visi dan misi yang sama untuk kemajuan umat Islam khususnya masyarakat Kota Cirebon

b. Dukungan jamaah sangat besar khususnya dalam bidang pendanaan baik pembangunan dan kesuksesan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Masjid At-Taqwa.

c. Walaupun Masjid Raya At-Taqwa merupakan Masjid Pemerintah Kota Cirebon, namun sepenuhnya pengelolaannya diserahkan kepada DKM yang telah ditunjuk dan di-SK kan oleh Walikota.

2. Faktor Penghambat

a. Walaupun tidak menjadi hambatan yang berarti namun kadang dirasakan kurang dukungan Pemda dari segi pendanaan rutin untuk gaji dan honor pegawai, yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cirebon hanya sebatas pembayaran listrik bulanan.

b. Dampak dari terjadinya wabah COVID-19, maka seluruh kegiatan yang bersifat terjadinya pengumpulan masyarakat, baik pengajian rutin, Pendidikan tahfidz Al-Qur'an, Raudlatul Athfal dan kegiatan lainnya belum bisa berjalan sebagaimana biasanya.

E. Simpulan

Dilihat dari sejarah dan secara syar'i fungsi masjid tidak saja sebagai tempat ibadat, namun lebih dari itu masjid juga berfungsi sebagai sentral pendidikan, sosial, budaya dan politik. Masjid juga merupakan tempat menyatukan umat dari perpecahan dan perbedaan pandangan menurut madzhab dan pandangan keagamaan yang berbeda dalam persoalan cabang-cabang bukan pokok dari ajaran Islam baik urusan internal umat Islam maupun gesekan sosial yang terjadi antar umat beragama. Dalam kaitannya dengan kajian tentang fungsi rumah ibadat (masjid) berkenaan dengan pendidikan moderasi beragama di masa pandemik yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon dalam disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dan telaah dokumen bahwa Masjid At-Taqwa sudah menerapkan pendidikan moderat terhadap masyarakat atau jamaahnya terlihat dari pandangan, sikap dan penerapan yang dilakukan oleh jamaah, pengurus masjid dan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masjid At-Taqwa.
2. Hampir seluruh kegiatan masjid At-Taqwa saat penelitian dilakukan sedang dihentikan sementara dampak dari pandemik, terkecuali kegiatan shalat lima waktu dan Jumat setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut dan memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) oleh Gubernur Jawa Barat.
3. DKM Masjid At-Taqwa ikut aktif dalam menanggulangi dan mencegah menyebarnya COVID-19 dengan melakukan sosialisasi himbauan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya peraturan Walikota Cirebon dalam menerapkan

protokol kesehatan baik di lingkungan masjid At-Taqwa maupun untuk masyarakat luas dengan membentuk Tim Gugus Tugas DKM masjid At-Taqwa.

4. Selama masa COVID-19 ini, walaupun sebagian besar kegiatan DKM Masjid At-Taqwa dihentikan sementara namun DKM terus melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi umat berupa diskusi berkala melalui webinar dengan tema-tema yang menarik salah satunya tentang "Masjid sebagai Inspirasi Moral dan Sosial Menghadapi Dampak COVID-19".
5. Tidak terdapat kendala yang berarti selama ini DKM At-Taqwa dalam menjalankan tugas-tugas selain kondisi pandemik yang masih berlangsung.
6. Masjid At-Taqwa Kota Cirebon adalah masjid yang secara kepemilikannya kepunyaan Pemerintah Kota Cirebon, namun demikian dukungan dana dari pemerintah daerah sangat minim hanya menanggung biaya listrik bulanan, selain dari itu dari hasil usaha DKM At-Taqwa

F. Rekomendasi

Walaupun selama ini persoalan keuangan/pendanaan operasional Masjid At-Taqwa dapat diatasi oleh usaha para pengurus/DKM, namun selama masa pandemik ini dirasakan usaha-usaha yang dijalankan sangat jauh berkurang, oleh karena itu diharapkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon sangat diharapkan selain pembiayaan untuk listrik setiap bulannya.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Jami Asyiqien, Masjid Islamic Center Baitusalam, dan Masjid Besar Nurul Ittihad Kabupaten Tegal

Oleh: Raudatul Ulum

Penelitian ini berjenis kualitatif, dengan kata lain perspektif yang digunakan adalah konsepsi deduktif ideografik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan analisis dokumen, kemudian focused group discussion. Wawancara dilakukan terhadap subjek kemasjidan, mereka yang terlibat dalam hal pengambil keputusan di mesjid, sampai dengan dengan rancang teknis kegiatan rutin. Subjek penelitian dianggap memahami semua kegiatan di mesjid baik secara normatif, termasuk nilai yang dijunjung, sampai dengan tindakan signifikan pada tema pendidikan moderasi beragama. Adapun observasi adalah cara peneliti langsung mendatangi lokasi, jika mungkin mengikuti kegiatan di mesjid yang berhubungan dengan topik penelitian, serta memberikan informasi relevan

terhadap pendidikan moderasi beragama dan informasi kegiatan di masa pandemi COVID-19. Sedangkan dokumentasi dan analisis dokumen adalah teknik pengumpulan data berdasarkan data sekunder berupa foto, dokumen profil mesjid serta dokumen kegiatan penting yang relevan dengan tema penelitian.

Penelitian Fungsi Mesjid sebagai Pusat Moderasi Beragama di Kabupaten Tegal terdiri dari beberapa pihak yang dianggap memahami tentang berbagai hal terkait mesjid terpilih untuk dijadikan lokasi penelitian: a) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal, Sukarno; b) Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Tegal, Syaifudin Zuhri; c) Fungsional kemasjidan di Seksi Bimas Islam Kabupaten Tegal, Ahmad Subhan; d) Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tegal, 1) Bani, 2) Yusuf, 3) Masruri. e) Ketua DMI Kabupaten Tegal, KH Nurratib; f) Pengurus Mesjid Baitusalam Islamic Center, 1) Bambang; 2) Holil. g) Pengurus Mesjid Besar Kecamatan Adiwerna: 1) Moh. Fattah; 2) KH Muhammad; 3) Najmudin; 4) Ustadz Zakariya; 5) Sekretaris Takmir Mesjid. h) Pengurus Mesjid Jamik Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, 1) Agus Kurniawan; 2) Muslihun; 3) Gilang Ramadhan; 4) Ghufron, i) Pengurus Muhammadiyah (PDM Kabupaten Tegal), Fatin Hamami, j) PCNU Kabupaten Tegal, Nurkholis, Sekretaris PCNU Kab Tegal.

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Tegal menjadi sasaran lokasi penelitian dengan berbagai pertimbangan, secara khusus dianggap memiliki hubungan erat dengan pergerakan manusia dengan Jakarta. Hal tersebut secara bersamaan dan konteks kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kabupaten Tegal

sempat kedatangan banyak sekali pemudik, Kecamatan Lebaksiu sempat menutup lokasi, hanya satu desa yang membuka mesjidnya. Dipilih satu mesjid di Desa Lebakgowah yaitu Masjid Jami' Assiqien yang cukup tua umurnya, sempat mengalami penutupan selama tiga kali shalat Jumat. Kemudian masjid kedua adalah Masjid Islamic Center Baitussalam, cukup unik selain karena posisi di pinggir jalan, kemudian memiliki lembaga pendidikan, kegiatan penunjang kemakmuran di masjid juga cukup semarak, kemudian memiliki unit kegiatan sosial seperti penyediaan ambulans gratis dan membagi makanan dan sembako. Pilihan masjid ketiga adalah Masjid Besar Nurul Ittihad Kecamatan Adiwerna, kelembagaan pendidikan yang semakin berkembang serta komitmen terhadap moderasi menjadi alasan yang relevan terhadap penelitian.

2. Profil Mesjid

a. Profil Masjid Jami Asyiqien

Masjid Jami Asyiqien berlamat di Jl. Masjid Jami Asyiqien 01/03 Lebakgowah Lebaksiu Tegal, Pada awal berdirinya sekitar tahun 1891, bangunan ini oleh KH. Utsman diperuntukkan sebagai langgar (mushalla), langgar difungsikan sebagai tempat mengerjakan shalat berjama'ah bagi warga sekitar, sedangkan shalat Jumat dikerjakan di tempat lain.

Seiring berjalannya waktu, warga yang tinggal semakin banyak, maka pada tahun 1921 oleh penerus dari KH. Utsman yaitu KH. Asyiqien, langgar diperbesar dan berubah menjadi masjid, sehingga fungsinya bertambah sebagai tempat mengerjakan shalat Jumat.

Pemugaran dilakukan pada tahun 60-an dengan bentuk masjid mirip dengan masjid yang ada di Demak, bangunan ini memiliki bangunan induk dan serambi, Bangunan induk memiliki

empat tiang utama yang disebut saka guru, saka guru dibuat dari tumpukan batu bata merah melingkar sampai ke atas sebagai penyangga kubah.

Pemugaran dilakukan kembali pada tahun 1990-an dengan pengecoran pada beberapa tempat dan mengubah soko guru di bangunan induk dengan cor beton agar lebih kuat menyangga atap dan kubah masjid, lantai diganti dengan keramik putih ukuran 30 cm2 jendela kayu diganti dengan jendela kaca, agar pencahayaan di ruangan induk lebih maksimal, penambahan raung gudang di samping kanan kiri mihrab

Pemugaran terbaru dilakukan pada tahun 2017, dengan mengganti keramik putih ukuran 30 cm2 dengan granit ukuran 60 cm2 dan memperkuat tembok bagian bawah dengan granit agar menambah keindahan dan mengurangi biaya pengecatan, menambah kaligrafi diruang utama / induk.

Nama dan Lokasi (alamat) :

Nama Masjid : Masjid Jami Asyiqien

Alamat : Jl. Masjid Jami Asyiqien 01/03 Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 52461

Latitude : -7.032473 dan Longitude : 109.127206 (google maps)

Status Tanah

Masjid Jami Asyiqien Lebakgowah dibangun di atas tanah wakap Keluarga Besar Bani Dibol, dengan pembangunan awal oleh KH. Utsman (keturunan ke-3 dari Bani Dibol) kemudian dilanjutkan oleh KH. Asyiqien (Keturunan ke-4 dari Bani Dibol) dilanjutkan oleh K. Zainudin (mantu) suami dari Hj. Khuriyah (keturunan ke-5 dari Bani Dibol) dan saat ini dilanjutkan oleh KH.

A. Syaifuddin Zuhri, S. Ag (keturunan ke-6 dari Bani Dibol) dan KH. A. Syaifuddin Zuhri, S. Ag saat ini tercatat sebagai salah satu Kasi di Kemenag Kab. Tegal

Visi & Misi

Visi : Menjadi pusat peningkatan kualitas ibadah umat secara komprehensif.

Misi: 1) Masjid sebagai Pusat Peradaban & Pengembangan potensi ummat. 2) Menyelenggaran Pendidikan Non Formal, Seperti Pelatihan dan Kajian Ke Islaman

Fungsi & Tujuan

Tujuan: Memberikan kenyamanan dalam beribadah & memberikan tarbiyah kepada ummat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Mencetak Ummat yang cerdas, bijak, & mandiri.

Fungsi & Peranan: a) Menjadi Pusat Kajian Islam. b) Menjadi Pusat Pembinaan Ummat, baik mental maupun spiritual. c) Menjadi Pusat Pengembangan Kemandirian Ummat. d) Menjadi Pusat Pendidikan Islam Unggulan, untuk kaderisasi pemimpin umat.

Program

a. Ubudiyah & Pelayanan Ummat : 1) Menyelenggarakan ritualitas ibadah mahdhoh, seperti shalat berjama'ah dengan imam yang berkualitas. 2) Membuat jadwal ta'lim & kajian rutin, seperti khutbah Jumat, serta hari-hari besar Islam. 3) Memberikan layanan fardu kifayah berupa pengurusan jenazah.

b. Kajian & Konseling : 1) Mengadakan pendidikan & pelatihan, penyuluhan di majelis-majelis ta'lim Masjid/Mushalla & event penting lainnya. 2) Memberikan layanan bimbingan & konseling.

c. Penerbitan & Publikasi :Melakukan sosialisasi melalui media-media strategis, seperti internet.

d. Umum : 1) Melakukan perawatan fisik Masjid dari berbagai aspek, baik struktur bangunan & kebersihan. 2) Melakukan pengamanan Masjid secara intensif, sehingga jama'ah merasa nyaman dalam beribadah.

Daftar Kegiatan Masjid Jami Lebakgowah

1. Shalat Berjamaah
2. Pengajian: a) Pengajian Harian, yang meliputi Kuliah Subuh, Pengajian Ba'da Maghrib (Belajar Membaca Al-Qur'an Dan Iqro), b) Pengajian Mingguan yang meliputi a) Pengajian Ba'da Shalat Jumat, b) Pengajian Remaja Al-Fatah, c) Pengajian Bulanan yaitu Pengajian Malam Sabtu Kliwon Kaum Masjid Jami, d) Pengajian Tahunan yang terdiri dari: Halal Bi Halal Kaum Masjid, Halal Bi Halal Masyarakat Desa Lebakgowah, Isro Mi'roj, Maulid Nabi Muhammad Saw, Khotmil Qur'an, Tahun Baru Hijriyah. e) Kegiatan Kemasyarakatan yang terdiri dari Musyawarah Desa, Musyawarah Kaum, Musyawarah Pengurus NU Lebakgowah, Kegiatan Ikatan Pemuda Desa Lebakgowah, Kegiatan Ronda, Kegiatan Kepemudaan (Sepak Bola, dan lain-lain), dan f) Kegiatan Lain yang terdiri dari: Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah, Penyembelihan Hewan Kurban, Santunan Anak Yatim, Kuliah Ashar Bulan Ramadhan, Buka Bersama Bulan Ramdhan, dan Latihan Rebana

b. **Profil Mesjid Islamic Center Baitusalam (ICB Slawi Kabupaten Tegal)**

Berawal dari mushalla kecil didirikan oleh almarhum H.Romli di Selatan jalan AIP KS Tubun. Kemudian dilanjutkan oleh anak pertama H.Romli yaitu almarhum H. Abdul Rahman Romli, M.M (WAFAT 10 Maret 2013) membangun Masjid berlokasi di seberang mushalla di sebidang tanah770 m2 saat ini telah menjadi 1118 m2.

1) Peletakan batu pertama pembangunan masjid pada awal Januari 2005;
2) Selesai dan diresmikan tanggal 21 Maret 2008
3) Bangunan awal 12 x 20 m satu lantai, kini telah 25 x 40 m menjadi dua lantai
4) Dayatampung700 jamaah

2.1. Visi

Menjadikan Masjid Islamic Center Baitussalam Yang Makmur Sebagai Tempat Pusat Kajian Islam

2.2. Misi

Mengembangkan dakwah dan pembinaan Jamaah, melalui Khutbah Jumat, kegiatan hari-hari besar Islam, Majelis Ta'lim serta kajian-kajian yang berkesinambungan. Mengembangkan Pendidikan Islam bagi jamaah melalui Tahsin Alquran, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan rumah tahfidz. Mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan Jamaah melalui kegiatan amil zakat, infak dan shadaqah serta kurban. Mengajak seluruh Jamaah untuk bersama-sama memakmurkan masjid dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui berbagai kegiatan ekonomi & sosial

seperti Kantin, pembelian sembako HATI (Hanya Allah Ta'ala tujuan Investasi kt) dan Bank Infaq. Menjaga dan memelihara keindahan, ketertiban serta kebersihan masjid sehingga memberikan suasana yang nyaman, aman dan kondusif bagi jamaah. Menggunakan Teknologi Informasi sebagai salah satu sarana untuk pengembangan informasi dan dakwah Islamiyah.

Kelurahan Pakembaran memiliki 6 wilayah (DUKUH) 1. Dukuh Kalijembangan; 2. Dukuh Kemanglen; 3. Dukuh Kembaran ; 4. Dukuh Karang Jongkeng ; 5. Dukuh Cergomas; 6. Dukuh Mingkrik.

Luas Tanah : 1118 m2 Luas Bangunan : 700 m2; Lantai 1 : 387 m2; Lantai 2 : 400 m2; Area Parkir Kendaraan : 750 m2; Jumlah Lantai : 2; lantai Ruang Utama : 1 buah; Serambi : 2 buah; Ruang Serbaguna : 1 buah; Ruang Penginapan : 2 buah; Ruang Kantor Sekretariat : 1 buah; Ruang Sound system dan CCV : 1 buah; Ruang Gudang : 2 buah; Tempat Wudhu : 5 buah; Kamar Mandi : 10 buah; Ruang Dapur : 1 buah.

2. Profil Masjid Besar Nurul Ittihad, Kecamatan Adiwena

Berdasarkan data SIMAS Kementerian Agama Kabupaten Tegal Mesjid Besar Nurul Ittihad Adiwerna didirikan pada tahun 1908, versi pengurus merujuk pada menara yang dirobohkan saat dibangun ulang (renovasi) 5 April 1986, tertera tulisan angka 1928. Kemungkinan angka tersebut merupakan waktu pendirian mesjid, atau bisa juga menara mesjid secara terpisah.

Lokasi Mesjid Adiwerna berada persis di samping kantor kecamatan, dulunya kantor tersebut merupakan kawedanan, kantor Wedana Adiwerna. Struktur Kawedanan berada satu tingkat di bawah kabupaten, berfungsi sebagai koordinator beberapa kecamatan. Setidaknya, keberadaan mesjid dimaksud awalnya

dibuat untuk kebutuhan buruh pabrik yang di Adiwerna, Suiker Fabrieg Adiwerna terletak di sebuah tempat bernama Ujungrusi (Oejoengroesi), sisa sisa roli, rel dan beberapa bangunan masih tersisa. Sedangkan bagunan utama dan area telah menjadi markas TNI AD Yonif 407 Padmakusuma. Fungsi tempat peribadatan buruh pabrik, dipicu oleh ancaman mogok karena minimnya fasilitas ibadah di dalam area pabrik, setelah berkonsultasi dengan tokoh agama setempat, pihak pabrik gula akhirnya mendirikan musholla kecil di samping kawedanan (wawanacara dengan penyuluh agama Islam, Yusuf, 6 Juli 2020).

Fungsi kedua dari Mesjid Nurul Ittihad adalah pendamping pemerintah kawedanan adiwerna (Wawancara dengan Moh. Fatah, 5 Juli 2020), semangatnya adalah untuk menjadikan penyeimbang terhadap aktivitas pemerintahan. Sekarang kawedanan menjadi Kantor Camat Adiwerna, semangat keseimbangan tersebut tetap berjalan dengan formasi pemerintahan yang berbeda dengan di zama kolonial, orde lama dan orde baru.

Renovasi penting, sampai dengan bentuk bangunan yang sedemikian besar, sekaligus diberi nama resmi Nurul Ittihad, terjadi pada tahun 1994 (21 Ramadhan/4 Maret 1994) diresmikan oleh Menteri Penerangan H. Harmoko. Pemilihan nama Nurul Ittihad itu juga menggambarkan semangat persatuan, mesjid menjadi meleburnya berbagai mazhab dan perbedaan etnis dan fatsun politik. Rancang sosialnya di sekitar masjid cenderung bercorak urban, masyarakat pekerja sektoral, mulai dari profesi karyawan sampai dengan pedagang di pasar, hal tersebut itu juga membuat kegiatan mesjid sempat tidak terjadwal dengan baik (wawancara dengan Fatin Hamami, 7 Juli 2020). “Jadi dulu azan di mesjid tidak tepat waktu, azan dhuhur bisa jam dua, atau sudah hampir

mendekati asar, begitu juga dengan azan Ashar" (wawancara Fatin Hamami, 7 Juli 2020). Perbaikan terhadap bangunan mesjid juga mengikuti dari kemakmuran yang diciptakan, donatur dan pengurus mesjid berlatar belakang dua organisasi kemasyarakatan, yaitu kultur NU dan Muhammadiyah, leburan antara dua latar belakang tersebut tetap dipelihara sampai dengan 2020 (wawancara dengan Kyai Muhammad, 5 Juli 2020).

a. Lembaga pendidikan

Nama lembaga: MDTA NURUL ITTIHAAD

Tahun Pendiria:22 Oktober 2002

NSDT : 311233280147

Alamat : Jl. Singkil RT. 19 RW. 06 Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Bermula dari kekhawatiran warga lingkungan Masjid Besar Nurul Ittihaad dengan pergaulan anak waktu itu dan pendidikan agama yang dianggap masih belum mencukupi untuk anak, maka mereka mendesak Pengurus Masjid untuk memfasilitasi anak untuk belajar di Majelis taklim yang diadakan oleh Pengurus Masjid dan diisi oleh Lulusan Pontren yang ada dilingkungan Masjid.

Dengan dukungan masyarakat dan kesemangatan Pengurus Masjid yang waktu itu diketuai oleh Bapak H. Sutrisno (Alm) maka diadakanlah kelas madrasah yang diikuti oleh santri sebanyak kurang lebih 25 santri. Dengan berjalannya waktu Pengurus Masjid menginginkan untuk menjadikan majelis tersebut sebuah Madrasah yang diakui di Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Maka Pada tanggal 22 Oktober 2002 Pengurus mengajukan Proposal Izin Operasional pendirian Madrasah Nurul Ittihaad Adiwerna, Alhamdulillah dengan bantuan Ibu Hj. Subeni selaku

istri dari Bapak H. Sutrisno yang waktu itu kebetulan bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Tegal berhasil mendaftarkan Madrasah Nurul Ittihaad Adiwerna dengan NSDT : 311233280147.

Dan pada tahun 2020 Pengurus masjid mengajukan izin operasional pendirian TPQ Nurul Ittihaad. Visi : "Terbentuknya generasi yang berpendidikan Agama Islam berhaluan ahlussunnah wal jama'ah, berakhlakul karimah, berkualitas, dan cinta Al-Qur'an"

b. Misi Pendidikan Madrasah Nurul Ittihad

1) Melakukan pembelajaran sesuai dengan ajaran Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menggunakan kitab klasik (Kitab Kuning)
2) Melakukan Pengamalan yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah
3) Membiasakan santri mengamalkan 5S senyum, salam, sapa, sopan dan santun
4) Membangun watak dan kepribadian peserta didik yang cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual sebagai pembiasaan
5) Membiasakan santri ahli fikir dan dzikir
6) Membiasakan santri membaca Al-Qur'an sebelum dan Sesudah KBM
7) Mengadakan program unggulan Kelas Tahfidz minimal Juz 30

c. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sejalan

dengan tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan pendidikan MDTA Nurul Ittihaad Adiwerna Sebagai berikut :

1) Menghasilkan generasi santri yang berpengetahuan dan beramal ala ahlussunnah wal jama'ah sesuai ajaran ulama salaf
2) Terbentuknya karakter santri yang menghargai dan menyayangi semua makhluk Allah dengan dasar pengetahuan yang tepat
3) Mencetak lulusan berkualitas yang memiliki kemampuan "Baca, tulis, Alqur'an serta kitab aswaja yang mantap dan berpikir logis, kreatif, inovatif dan mampu mengkomunikasikan dalam berbagai kegiatan".
4) Mencetak generasi yang lancar dan benar dalam membaca Al-Qur'an

d. Fasilitas Belajar

1) Bangunan Madrasah yang menawan
2) Ruangan belajar yang lengkap dengan peralatan – peralatan penunjang program pendidikan yang memadai.
3) Ruang Aula/Pertemuan
4) Kantor Kepala dan Ruang Guru
5) Toilet yang bersih
6) Halaman yang luas

e. Ekstrakurikuler

1. Kelas Tahfidz Juz 30
2. Seni Hadroh
3. Marching Band
4. Seni Kaligrafi
5. Pencak Silat (Pagar Nusa)

6. Public Speaking (Khitobah)

f. Kegiatan Santri

1. Pesantren Kilat
2. Peringatan Tahun Baru Islam
3. Upacara Hari Santri Nasional
4. Halal Bi Halal
5. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
6. Class meeting

g. Sistem Belajar

Sistem pembelajaran Santri MDTA Nurul Ittihaad mengikuti Kurikulum FKDT / Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yaitu Kurikulum perpaduan Kurikulum Kementerian Agama dan Pesantren.

A. Temuan dan Pembahasan

Sikap Mesjid terhadap Kebijakan PANDEMI

Pemerintah bersama dengan ormas keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah sepakat untuk menghimbau dan menyediakan protokol kesehatan dalam penggunaan rumah Ibadah, khususnya masjid saat musibah wabah COVID-19 sampai ke Indonesia. Wabah penyakit melalui virus berbahaya tersebut memberikan dampak begitu masif dan sistemik pada seluruh sendiri kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan. Terutama dalam hal ini mesjid juga mengalami pergeseran dalam berbagai praktik keagamaannya, mulanya shalat berjamaah rapat kemudian berjarak, hal tersebut memicu perdebatan fikhiyah, tata cara peribadatan dielaborasi kembali disesuaikan dengan kondisi wabah.

Begitu juga dengan aktivitas pengajian, salat sunnah berjamaah turut mengalami perubahan signifikan, aktivitas pengajian rutin menurun drastis bahkan tidak ada aktivitas pengumpulan fisik selama pandemi, setidaknya dimulai dari akhir Februari sampai dengan Juli 2020 pola tersebut berlangsung. Untuk mengisi kekosongan dakwah secara langsung diganti dengan daring melalui berbagai channel yang memopulerkan aplikasi Zoom Meeting, Meet, WebeX, Google Classroom dan beberapa lainnya menjadi alternatif menyampaikan pesan keagamaan.

Sehubungan dengan protokol penutupan rumah ibadah, di Kabupaten Tegal tidak semua mesjid dapat melakukannya, berbagai pertimbangan diutarakan, "Tanggal 27 Maret itu sempat berhenti, Jumatan sempat berhenti sekali. Kita rapat pengurus, ketua (Takmir) di Jakarta pakai zoom meeting, dianjurkan jalan, tidak ada tuntutan, jamaah maunya juga tetap ada kegiatan. Mereka bingung, pada protes, kita tutup pintu awalnya tidak ada yang shalat, hanya waktu itu saja" (Wawancara dengan Bambang, mewakili takmir Mesjid Baitussalam Slawi, 2 Juli 2020). Mesjid yang memiliki visi besar untuk menjadi mesjid ideal dan pemersatu umat dari berbagai mazhab dan golongan ini, meskipun masih setingkat desa tetapi ke depan menginginkan kemakmuran dengan konsep integratif. Pada saat himbauan dari pemerintah dan MUI terbit sempat menghentikan aktivitas sekali Jumat, tetapi kemudian dibuka kembali di Jumat berikutnya dengan menyediakan fasilitas cuci tangan thermo gun dan menerapkan protokol shalat berjamaah berjarak. Meskipun awalnya cukup janggal dilakukan jamaah namun beberapa waktu berikutnya bisa dimaklumi dan dilaksanakan seperti biasa (Wawancara dengan Bambang, 2 Juli 2020). Begitu juga saat pelaksanaan New Normal awal Juni 2020, berbagai perangkat dan tata cara yang disyaratkan tidak

menyulitkan bagi Mesjid Batussalam, karena di masa Ramadhan mereka tetap melakukan i'tikaf bersama dengan jamaah internal, serta dengan berat hati melarang pihak luar terlibat. Hal tersebut juga untuk menjamin kenyamanan jamaah yang tetap ingin i'tikaf, jika beberapa orang singgah di siang hari dipersilahkan untuk tidak menggunakan mesjid, apalagi untuk istirahat perjalanan. Pengurus atau petugas piket mesjid dengan berat hati mengusir dengan halus orang-orang yang singgah istirahat (wawancara dengan Holili, 2 Juli 2020).

Mesjid Baitusalam begitu memedulikan jamaah dan masyarakat sekitar yang mengalami dampak pagebluk COVID-19, mereka memang memiliki banyak program sebelumnya, namun menjadi intens saat musibah datang. Pembagian sembako gratis itu juga sebelumnya adalah sembako murah, dibeli sendiri oleh DKM dan dijual kembali dengan selisih harga tipis dari pusat grosir. Pembagian sembako dimaksudkan juga sekaligus untuk tetap membangun kemakmuran mesjid, konsep pemberdayaan berjalan secara aktif terintegrasi dengan kegiatan di mesjid. Mesjid Baitussalam sendiri bahkan memiliki sampai lima shaf shalat subuh, di samping antusiasme para jamaah juga komunikasi terus diselenggarakan di masa pandemi, mereka terdampak akan mendapatkan bantuan uang dan ongkos juga saat datang ke masjid. Pengurus DKM sendiri mengetahui dengan persis kelompok yang mengalami langsung pagebluk, para pedagang kecil dan pekerja yang kehilangan pekerjaan dikenal secara rinci karena jika pun tidak terlalu aktif di mesjid sebagian dari mereka anaknya sekolah di TPQ Baitussalam.

Selain sembako dan santunan saat pandemi melalui program yang integral pada kegiatan di masjid, bank infaq merupakan program inisiasi baru yang menjanjikan.

Alhamdulillah ada bank infaq juga, modal awal 10-20 juta, kita segerakan, dari pengurus yang infaq, dari jamaah juga, ada rekening sendiri. Tiap Sabtu, empat kali pertemuan sebulan, ada ceramah untuk taklim untuk mengisi materi. Ada infaq rutin, ada infaq sukarela. Baru kemudian kita buat SOP untuk pengembaliannya. Yang pinjam juga yang taklim, mikro, dari 500rb-5jt, berjenjang, pertama 500, jika setornya 5 minggu lancar, sampai 21 minggu, jika tidak lancar, tidak bisa meningkat. Jika bisa, maka bisa meningkat ke 1jt. Angsuran tergantung mereka sendiri, mampunya berapa dalam seminggu. Berapa saja. Kita tidak ada agunan, saratnya cuma taklim. Jamaah taklim dicatat, diabsen, tiap anggota ada ketua regunya. Sehitung ganjil anggotanya, 5 7 11. Sudah bergulir, cicilan pertama sudah mulai. (wawancara dengan Bambang, 2 Juli 2020).

Bank infaq sendiri merupakan inisiasi nasional yang digerakkan oleh Sandiaga Uno, berkembang secara berantai pada mesjid-mesjid di Indonesia. Diluncurkan sejak Juli 2019, Bank Infaq diharapkan mampu memberikan layanan lembaga keuangan bagi masyarakat berbasiskan majelis taklim (https://www.antar anews. com/berita/1037874/diluncurkan-sandi-bank-infaq-kini-ada-di-sembilan-lokasi). Pengurus DKM Baitussalam sendiri cukup yakin dengan program bank infaq sebagai solusi pemberdayaan, prospeknya cukup baik, meskipun dijalankan di masa pandemi.

Selain alasan tuntutan jamaah yang meminta mesjid tetap dibuka, pengurus juga menyadari sebagaimana mesjid lainnya, biaya operasional cukup tinggi jika tanpa kontribusi jamaah maka kas akan kesulitan. Sebulan bisa sampai dengan lima juta rupiah,

bagaimana pengurus bisa menutupinya (wawancara dengan Bambang, 2 Juli 2020). Modal bergulir yang diselenggarakan oleh bank infaq menyasar pedagang kecil, uangnya disetor langsung pada rekening bank infaq, dibayar secara mengangsur tanpa bunga dan uang jasa. Dilakukan setiap sabtu saat pengajian, taklim, di samping membuka kotak amal untuk memberikan makan jamaah juga ditarik angsuran bank infaq.

Pengembangan bank infaq dibekali dengan pelatihan yag diselenggarakan oleh tim Sandiaga Uno, tahun 2019 Bambang dan beberapa pengurus mesjid lain se Indonesia dilatih di Jakarta, berpusat di Masjid Istiqlal. Desember di tahun 2019, bank infaq di Masjid Islamic Center Baitussalam Slawi Kabupayen Tegal terbentuk, sempat mengalami kendala karena datangnya pandemi COVID-19, tetapi pihak yang diberi tanggung jawab sepakat untuk melanjutkan.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsepsi penerimaan terhadap kebangsaan, baik yang mewujud pada bentuk kenegaraan (NKRI), kebinekaan (keragaman), konstitusi sebagai negara republik, sampai dengan Pancasila sebagai simpul kesepakatan sebagai bangsa. Menyikapi hal ihwal kebangsaan, sebagai masjid yang terbuka tidak hanya menyangkut soal khilafiyah dalam agama, terhadap keseluruhan konsepsi kebangsaan sejalan dengan pengembangan nilai yang ingin dicapai pada dakwah dan taklim di mesjid Baitussalam, secara tegas juga disampaikan tidak memiliki afiliasi politik bahkan kecenderungan pada ormas tertentu. Toleransi di Masjid Baitussalam dijaga, karena secara jarak juga tidak terlalu jauh dengan instansi pemerintah,

jadi yang shalat di masjid saat siang dan Jumat sebagian besar dari kepolisian.

Berkaitan dengan politik, pada saat demo 212 masjid sempat dijadikan tempat pemberangkatan ke Jakarta, padahal bukan penyelenggara, hal tersebut sempat memicu kehadiran polisi dan intel hampir 24 jam. Sampai zaman pelaksanaan pemilu dan pilpres 2018 juga begitu, mengalami berbagai situasi yang sebenarnya tidak dikehendaki, tapi harus dihadapi. Jika pun satu atau beberapa pengurus mesjid terlibat bersifat pribadi tidak bisa mengatasnamakan lembaga mesjid. Untuk mempertegas komitmen terhadap NKRI, DKM tidak memberikan izin pada aktivis HTI melakukan aktivitas di area masjid.

Indikator moderasi, tentang toleransi, setiap penyelenggaraan taklim semua dai atau muballigh, cenderung merangkul semua golongan. DKM memastikan masjid sifatnya nasional. Bambang mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan perbedaan, mereka jamaah mengetahui juga, mubalighnya campur, khotibnya juga begitu.

Mereka sudah mengerti, namanya Islamic center, untuk semua umat. Terhadap LDII, ya kelompok sendiri, itu tidak mau Jumatan dengan kita, tidak ada juga LDII sekitar sini. Ahmadiyah juga tidak ada, kalau Muhammadiyah dan NU juga umumnya tidak ada masalah. Syiah juga begitu, tidak begitu tampak. Dulu sempat dicurigai, khatibnya (katanya) begitu, setelah kita ajak obrol, ternyata bukan, karena beliau dekat dengan orang Syiah saja suka dicurigai.

Pada prinsipnya mesjid memberikan ruang yang cukup luas pada perbedaan mazhab, bahkan juga terhadap penganut agama lain dalam hal membina kebangsaan. Hanya saja perjumpaan

dengan penganut agama lain tidak banyak dialami oleh kalangan pemeluk di Kabupaten Tegal. Hal tersebut diakui oleh ketua DMI (Dewan Mesjid Indonesia) sekaligus sebagai pengurus FKUB kabupaten, toleransi dan kerja sama di kalangan pemeluk berlangsung sedemikian baik, tahun 2020 mestinya kegiatan ketiga kemah pelajar antar pemeluk tetapi karena musibah, anggarannya ditarik kembali oleh Pemkab (wawancara dengan Nurratib, Ketua DMI Kabupaten Tegal, 2 Juli 2020).

Menurut Nurratib, minoritas agama, atau pemeluk agama selain Islam di Kabupaten Tegal cukup diberikan tempat dan dilindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak ada hambatan dalam hal pelaksanaan ibadat, belum pernah ada kejadian sepanjang pengalamannya menjadi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tegal, kemudian aktif di MUI dan DMI begitu juga tidak pernah mendapatkan kabar atau laporan kejadian benturan antar pemeluk agama. Meskipun jumlah pemeluk Islam bisa dikatakan sembilan puluh persen tetapi pemeluk agama lain juga banyak di sini (wawancara dengan Nurratib, 2 Juli 2020). Bahkan menurutnya, pemeluk Hindu Jawa juga ada, mereka tidak banyak tetapi memiliki tempat ibadat sendiri biasanya menyatu dengan rumah, di situ dibangun pemujaan, hanya saja regenerasinya sering kali tidak jalan, anaknya memeluk Islam.

Dalam hal mengembangkan pendidikan di Masjid Islamic Center Baitussalam dirancang untuk penyediaan pada usia belia, TPQ (Taman Pendidikan Quran), menyasar anak didik sekitar mesjid, areanya setingkat RW, sebenarnya bisa sampai ke tingkat kelurahan atau kecamatan, tidak tertutup. Dimaksudkan untuk menyiapkan sejak dini generasi Qurani, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Seperti kebijakan masjid yang

moderat, wasatiyah maka karakter yang dibangun pada pendidikan dini juga merujuk dan mengharapkan santri dapat bersikap moderat.

Sikap moderat juga diterapkan oleh Masjid Besar Nurul Ittihad Adiwerna, sebagai rumah ibadah yang berkomitmen menjadi pendamping pemerintahan setingkat kecamatan maka mesjid berkomitmen terhadap kebangsaan sedemikian tegas. Diwujudkan dalam pola interaksi sehari-hari pada pengajian sampai pada kurikulum pendidikan MDTA dan MDTW. Seperti awal berdirinya mesjid dimaksudkan untuk menampung para pekerja pabrik gula (Wawancara dengan Yusuf, penyuluh agama kabupaten Tegal, 7 Juli 2020), kemudian berkembang fungsinya sebagai pendamping kawedanan, dengan demikian masjid besar Adiwerna menjadi simbol pendamping pemerintahan (wawancara dengan Moh. Fattah, ketua Takmir Mesjid Nurul Ittihad Adiwerna, 4 Juli 2020).

Mesjid Nurul Ittihad sendiri berusaha menjadi penyeimbang terhadap berkembangnya aliran keagamaan yang menentang NKRI, sering muncul dengan komentar tentang bentuk negara, begitu juga dengan praktik keagamaan di sekitar Adiwerna (Wawancara Muhammad, 4 Juli 2020). Pernah masjid didatangi oleh kelompok salafi entah itu jamaah tabligh atau salafi wahabi, awalnya mereka mengikuti kegiatan di masjid baik cara shalat berzikir sampai dengan maulidan, tetapi belakangan hari kemudian malah mulai komentar miring terhadap perilaku keagamaan masyarakat sekitar (wawancara dengan Moh. Fattah, 4 Juli 2020). Akhirnya kita hentikan dia karena sebagian besar di sekitar masjid adalah warga nahdlilyyin, cukup membuat resah, kuatir menimbulkan reaksi yang besar. Ketegangan dengan orang salafi ini memberikan inspirasi pada pendirian madrasah, karena sempat muncul protes

dari masyarakat untuk pendidikan agama yang sempat diisi oleh kelompok tersebut (wawancara dengan Moh. Fattah, 4 Juli 2020). Akhirnya pengurus sepakat untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmil Awwaliyah, mengikuti kurikulum Kementerian Agama, mendapatkan izin operasional sejak tahun 2001. Dibangun secara mandiri dari stakeholders masjid, selanjutnya berkembang dengan berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto, setingkat tsanawiyah, adapun izin operasional sedang dalam proses.

MDTA dan MDTW, secara konsep dan praktis menyelenggara kan pendidikan yang berkomitmen pada kebangsaan, diterapkan pada penerimaan kurikulum pemerintah, menghidupkan nyanyian yalal wathon, menyanyi Indonesia Raya pada kegiatan ekstrakurikuler. Madrasah mengadakan upacara bendera setiap 17 Agustus, sampai saat ini sistim yang dirancang memang untuk menguatkan sendi kebangsaan dengan spiritualitas dan religiusitas yang tinggi (wawancara dengan Muhammad, 4 Juli 2020).

Begitu juga dengan toleransi, anak didik di Madrasah diarahkan untuk selalu bersikap terbuka pada perbedaan, menghormati satu sama lain sebagai satu bangsa berbeda agama berbeda mazhab. Di tegal tidak terlalu bermasalah dengan perbedaan, karena memang jumlah penganut agama lain juga sedikit, tidak terlalu banyak mengalami perjumpaan, tetapi ketegangan tidak dipelihara (wawancara dengan Subhan, staf Kementerian Agama Tegal 15 Juli 2020). Perbedaan antar mazhab, mestinya antar ormas tepatnya di sekitar mesjid Nurul Itthad berjalan dengan baik, sempat mengalami kerenggangan dengan berdirinya Masjid Attaqwa Ringin Ireng, sekitar 500 meter dari Masjid Nurul Ittihad. Masjid Attaqwa sempat dipahami sebagai inisiasi jamaah berafiliasi Muhammadiyah untuk memisahkan diri dari Nurul Ittihad, meskipun tidak sampai dengan

konflik namun keterikatan masyarakat terhadap mesjid asal tetap tinggi. Seperti diketahui bersama, diakui juga oleh Muhammad peran orang-orang Muhammadiyah cukup tinggi terhadap berdiri dan berkembangnya mesjid sehingga diharapkan tidak ada demarkasi antar afiliasi ormas sampai pada tata cara peribadatan (wawancara dengan Muhammad, 5 Juli 2020). Beliau sendiri mengatakan juga bahwa pengurus masjid Nurul Ittihad, terdiri dari berbagai latar belakang aliran keagamaan, paling kental NU dan Muhammadiyah.

Konspsi penerimaan terhadap budaya lokal, sedikit perbedaan cara pandang, Fatin Hamami sebagai pengurus Muhammadiyah Kabupaten Tegal memandang proses akomodasi terhadap budaya lokal tidak bisa dihindari, hanya saja harus benar-benar dipastikan tidak bertentangan dengan syariat. Jika Muhammadiyah melihat budaya itu tidak pada praktik keagamaan tetapi pada simbol keseharian melekat sebagai suku bangsa dan kedaerahan, misalnya baju batik serta sikap kebersamaan saling mengunjungi, namun tidak mesti dianggap sebagai kegiatan yang harus dilakukan, seperti ajaran agama, tidak mesti begitu. Berbeda dengan NU yang memraktikkan banyak sekali kegiatan keagamaan, seperti tahlilan, yasinan, maulidan dan ziarah kubur. Fatin Hamami melihat kegiatan keagamaan apa pun itu harus selesai saringannya terhadap syariat (wawancara dengan Fatin Hamami, 6 Juli 2020) sedangkan Kyai Muhammad menganggap beberapa tradisi di kalangan nahdliyyin adalah sesuatu yang sudah selesai dibahas pendahulu, hanya sering kali tidak terlacak, tapi pasti ada dasarnya (wawancara dengan Muhammad, 5 Juli 2020).

Dakwah Islam itu pada dasarnya anti kekerasan, menghormati jiwa manusia dan ramah terhadap lingkungan bahkan di saat

perang pun tidak boleh merusak, demikian pemahaman keislaman muslim yang menempatkan wasatiyah sebagai jalan menyebarkan agama. Sekarang sudah tidak zamannya lagi juga mengedepankan kekerasan, perbedaan selayaknya diselesaikan dengan dialog dan kekeluargaan (wawancara dengan Muhammad. 5 Juli 2020). Pada pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya menanamkan cinta tanah air, fungsi kesehatan di mesjid sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi. Unit kesehatan secara kelembagaan Mesjid Besar Adiwerna dan Masjid Islamic Center Baitussalam tidak memiliki, tetapi aktivitas layanan secara seadanya disediakan, satu kendaraan ambulans selalu siap sedia di Baitussalam. Unit ambulans disediakan oleh yayasan, pengguna masyarakat sekitar mesjid Baitussalam tanpa membayar, sopirnya juga disediakan, terdiri dari pengurus siapa saja bisa membawa, siapa yang piket saja (Wawancara dengan Bambang, 2 Juli 2020).

Masjid Assyqien Lebaksiu menjadi bagian dari mesjid yang sempat menutup aktivitas Jumat sejak pandemi melanda Indonesia. Menurut Gilang, mayoritas penduduk Lebakgowah terutama mereka yang datang pulang kampung berprofesi sebagai sopir atau pekerja bangunan (Wawancara tanggal 6 Juli 2020). Secara kultural adalah masyarakat desa yang pergi musiman untuk bekerja (Wawancara dengan Syaifudin Zuhri, Kasi Kemenag Kab. Tegal, 5 Juli 2020), saat mereka pulang kampung karena tiba musim tanam atau panen, begitu juga saat hari besar, misalnya Idul Fitri dan Idul Adha merayakan bersama keluarga di desa. Saat terjadi pagebluk COVID-19, mereka yang datang pulang melakukan isolasi mandiri tanpa dipaksa dan diperintahkan, umumnya sudah mengerti dengan sendiri, tidak keluar tetap di rumah sampai 14 hari. Begitu lima hari sudah pada tidak tahan, banyak yang keluar rumah (Wawancara dengan Ghrufron, 5 Juli 2020).

Masjid Assyiqien tergolong tua, sudah empat generasi penanggungjawab dari sejak berdiri, praktik keagamaannya terafiliasi pada Nadhlatul Ulama, cenderung moderat terhadap perbedaan meskipun tidak menutup celah cukup keras terhadap berbagai isu keagamaan (wawancara dengan Syaifudin Zuhri, 5 Juli 2020). Secara formal tidak memiliki kelembagaan pendidikan, meskipun madrasah Ibtidaiyah dengan kurikulum kementerian agama berada bersebelahan dengan masjid. Pemisahan pada yayasan tersendiri membuat masjid dan madrasah tidak dikelola oleh pengurus mesjid, namun memiliki kedekatan karena ikatan darah, satu keluarga besar.

Pengaruh mesjid cukup besar, ditandai dengan banyaknya aktivitas di lingkungan, bahkan sampai dengan urusan desa. Rapat desa terutama yang berhubungan dengan keagamaan atau kemaslahatan umat diselenggarakan di masjid (wawancara dengan Syaifudin Zuhri, 5 Juli 2020), sehingga mesjid menjadi makmur dari sisi kegiatan dan kegunaan yang multifungsi. Banyak sekali produk keumatan yang lahir dari lingkungan masjid. Tradisi memusatkan kegiatan desa di mesjid sudah berlangsung lama dari sejak bangunan masjid berdiri dengan kokoh dan berfungsi dengan baik sebagai tempat pertemuan.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Al-Mashun, Mesjid Salsabila, Mesjid Al-Falah dan Mesjid Ar-Rahman Kota Medan

Oleh: Fatimah Zuhrah

Penelitian ini dilakukan di kota Medan yang diidentifikasi memiliki bangunan masjid dengan fungsi sebagai pusat pendidikan moderasi beragama. Sebagai ‚representasi⊠ mesjid yang dipilih adalah mesjid Raya al-Ma'sun Medan dan Mesjid di daerah yang teridentifikasi sebagai "daerah pertama zona merah" di Medan Tuntungan dan Sumatera Utara.

Mengapa masjid yang disasar, padahal fungsi pusat pendidikan moderasi beragama tidak hanya diperankan oleh masjid, tetapi juga oleh rumah ibadah lain. Masjid dijadikan sebagai unit analisis penelitian pada kajian saat ini, dengan alasan sebagai "kontra narasi⊠ temuan studi di atas yang menyatakan bahwa masjid sudah terpapar radikalisasi. Asumsinya bahwa ada prototipe masjid lain yang bercorak wasatiyah (tengah) yang dikembangkan oleh

masyarakat sebagai cara aksentuasi bahwa sebagai ‚rumah Tuhan’ masjid harus menebarkan perdamaian. Diharapkan kajian ini akan dapat menemukan model pendidikan moderasi beragama di masjid yang akan dikaji yang kemudian dapat dijadikan model (replika) untuk masjid yang lain.

Penelitian ini diawali dengan kajian pustaka berupa pengumpulan dan pemilihan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan menjadi informasi dan/atau pemetaan awal para peneliti sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya, penggalian data ditempuh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber melalui metode bola salju. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informan baru bermodalkan informasi dari narasumber yang telah diwawancarai. Wawancara akan berakhir begitu peneliti merasa jenuh, dalam arti tidak ada kebaruan informasi yang didapat.

Pengamatan lapangan dari para peneliti, selama melakukan penelitian lapangan, juga diharapkan dapat membantu penelitian ini agar menjadi se-objektif mungkin. Hal ini dilakukan bila keadaan memungkinkan, mengingat berbagai keterbatasan yang melingkupi penelitian ini.

Di hari terakhir penelitian, akan diselenggarakan FGD dengan beberapa narasumber untuk memperdalam dan memverifikasi ulang temuan di lapangan selama penelitian berlangsung. Memperdalam dalam arti bila terdapat narasumber yang tidak bisa ditemui selama penelitian berlangsung. Memverifikasi dalam arti bila terdapat informasi yang bertentangan antara satu narasumber dengan narasumber lain, juga menguatkan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti.

Sehubungan dengan fokus yang ingin didalami dan berbagai keterbatasan yang melingkupinya, penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah bagaimana pengurus masjid dan masyarakat (jamaah) melaksanakan moderasi beragama, guna memelihara dan meningkatkan moderasi beragama yang ada di berbagai masjid yang ada di wilayah Indonesia. Dalam bahasa lain, apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh pengurus masjid beserta ormas keagamaan dan masyarakat (jamaah) yang tergabung dalam organisasi, yang memiliki konsentrasi untuk mewujudkan toleransi aktif melalui moderasi beragama.

Dalam moderasi beragama yang dimaksud, penelitian ini menggali masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama dalam aspek: (1) pendidikan moderasi beragama di masjid yang dilakukan; (2) pengembangan pendidikan moderasi beragama dipilih sebagai salah satu program kemasjidan; (3) ide pendidikan moderasi beragama dipelopori dan respons jamaah serta masyarakat sekitar; (4) model pengembangannya; dan (5) faktor pendukung dan penghambat.

Adapun variabel untuk menggali pendidikan moderasi beragama tersebut adalah (1) cara pandang, sikap, dan praktik beragama; (2) harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) masjid sebagai pusat kontemplasi, pusat ritual, dan pusat kajian; (4) relasi agama dan negara berupa keberterimaan terhadap Pancasila sebagai bentuk nyata moderasi dalam konteks negara-bangsa; dan (5) faktor pendukung dan menghambat; (6) perkembangan teknologi informasi berupa new media yang terejawantahkan dalam bentuk berbagai platform online seperti whatsapp dan facebook misalnya, dilihat sebagai faktor yang turut memengaruhi moderasi beragama.

Informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yakni pengurus masjid dan masyarakat (jamaah). Informan yang mewakili pengurus masjid adalah siapa saja yang terlibat secara aktif dalam proses moderasi beragama. Sementara dari kalangan masyarakat jamaah adalah masyarakat dan/atau jamaah yang memiliki rekam jejak dalam proses moderasi beragama.

Dalam pemetaan awal, informan pengurus masjid dapat diwakili oleh pengurus ta'mir masjid dan dewan syariah masjid maupun ormas-ormas keagamaan, kepala Kemenag. Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat (jamaah) dapat diwakili oleh imam, muazin, marbud, jamaáh shalat 5 waktu, pengelola yayasan pendidikan masjid, panitia penyelenggara hari besar Islam (PHBI), pengurus MUI, NU dan/atau Muhammadiyah dan lain lainnya, sebagai ormas yang secara terang-benderang menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan daerah tersebut, didasarkan bahwa daerah tersebut sesuai kriteria masjid moderat: 1) Takmir masjid berasal dari ragam paham keagamaan, ormas keagamaan kultur keagamaan, 2) Khatib, penceramah mengakomodasi lintas mazhab, 3) ritual peribadatan mengakomodasi ragam mazhab, 4) isi ceramah/ khutbah menghargai berbagai mazhab dan paham keagamaan; 5) sumber bacaan mengakomodasi kitab-kitab lintas mazhab; dan 6) kelima karakteristik dimaksud terlembagakan dalam pendidikan moderasi beragama.

A. Konteks Penelitian

1. Masjid Raya Al-Mashun Medan

Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan Suku Melayu sang pemilik dari Kesultanan Deli (Kota Medan).

a. Sejarah Pembangunan

Sultan Ma'mun Al Rasyid Perkasa Alam sebagai pemimpin Kesultanan Deli memulai pembangunan Masjid Raya Al Mashun pada tanggal 21 Agustus 1906 (1 Rajab 1324 Hijriah). Keseluruhan pembangunan rampung pada tanggal 10 September 1909 (25 Syaban 1329 Hijriah) sekaligus digunakan yang ditandai dengan pelaksanaan Salat Jumat pertama di masjid ini. Keseluruhan pembangunannya menghabiskan dana sebesar satu juta Gulden. Sultan memang sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah, karena menurut prinsipnya hal itu lebih utama ketimbang kemegahan istananya sendiri, Istana Maimun. Pendanaan pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh Sultan, tetapi konon Tjong A Fie, tokoh kota Medan dari etnis Tionghoa yang sezaman dengan Sultan Ma'moen Al Rasyid turut berkontribusi mendanai pembangunan masjid ini.

Pada awalnya Masjid Raya Al Mashun dirancang oleh arsitek Belanda Van Erp yang juga merancang Istana Maimun, tetapi kemudian prosesnya dikerjakan oleh JA Tingdeman. Van Erp ketika itu dipanggil ke pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk

bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sebagian bahan bangunan diimpor antara lain: marmer untuk dekorasi diimpor dari Italia, Jerman dan kaca patri dari Tiongkok dan lampu gantung langsung dari Prancis. JA Tingdeman, sang arsitek merancang masjid ini dengan denah simetris segi delapan dalam corak bangunan campuran Maroko, Eropa dan Melayu dan Timur Tengah. Denah yang persegi delapan ini menghasilkan ruang bagian dalam yang unik tidak seperti masjid-masjid kebanyakan. Empat penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan atap tinggi berkubah warna hitam, melengkapi kubah utama di atap bangunan utama masjid. Masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tangga hubung antara pelataran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan, kecuali bangunan beranda di sisi mihrab.

Bangunan masjidnya terbagi menjadi ruang utama, tempat wudu, gerbang masuk dan menara. Ruang utama, tempat salat, berbentuk segi delapan tidak sama sisi. Pada sisi berhadapan lebih kecil, terdapat 'beranda' serambi kecil yang menempel dan menjorok keluar. Jendela-jendela yang mengelilingi pintu beranda terbuat dari kayu dengan kaca-kaca patri yang sangat berharga, sisa peninggalan Art Nouveau periode 1890-1914, yang dipadu dengan kesenian Islam. Seluruh ornamentasi di dalam masjid baik di dinding, plafon, tiang-tiang, dan permukaan lengkungan yang kaya dengan hiasan bunga dan tumbuh-tumbuhan, di depan masing-masing beranda terdapat tangga. Kemudian, segi delapan tadi, pada bagian luarnya tampil dengan empat gang pada keempat sisinya, yang mengelilingi ruang salat utama. Gang-gang ini punya deretan jendela-jendela tidak berdaun yang berbentuk lengkungan-lengkungan yang berdiri di atas balok. Baik beranda maupun jendela-jendela lengkung itu mengingatkan desain bangunan

kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol pada Abad Pertengahan. Sedangkan kubah masjid mengikuti model Turki, dengan bentuk yang patah-patah bersegi delapan. Kubah utama dikelilingi empat kubah lain di atas masing-masing beranda, dengan ukuran yang lebih kecil. Bentuk kubahnya mengingatkan kita pada Masjid Raya Banda Aceh. Di bagian dalam masjid, terdapat delapan pilar utama berdiameter 0,60 m yang menjulang tinggi untuk menyangga kubah utama pada bagian tengah. Adapun mihrab terbuat dari marmer dengan atap kubah runcing. Gerbang masjid ini berbentuk bujur sangkar beratap datar. Sedangkan menara masjid berhias paduan antara Mesir, Iran dan Arab.

b. Tipologi Mesjid

Secara tipologi maka mesjid Masjid Raya Al-Masun ini adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat kegiatan keagmaan tingkat pemerintahan provinsi.

c. Takmir Mesjid/BKM

Adapun kepengurusan Takmir Mesjid/BKM atau yang bertugas sebagai pengawas dan pengurus di Mesjid Raya ini diketuai secara langsung oleh keluarga Kerajaan Melayu Deli dan merupakan pengawas terhadap anggota pengurus BKM lainnya. Para pengurus BKM tersebut mengurus segala fasilitas masjid yang ada dan juga mengurus kegiatan masjid berlangsung setiap hari termasuk shalat berjamaah, penentuan imam, muazin ustaz/ khotib, bilal dan jadwal pengajian dan ibadah lainnya tentunya setiap takmir masjid juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam membenahi masjid yang diurusnya.

d. Jamaah Mesjid

Adapun Jamaah di mesjid ini terbagi pada 2 kategori, yakni jamaah tetap dan jamaah tidak tetap. Jamaah tetap adalah jamaah Yang berasal dari masyarakat muslim sekitar lingkungan mesjid, lebih kurang 40 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang berusia tua dan dewasa. Sementara jamaah yang tidak tetap berasal dari orang-orang yang berasal dari luar lingkungan mesjid, seperti pekerja kantoran, tamu hotel madani dan garuda hotel yang berada tidak jauh dari mesjid, orang-orang yang lewat.

2. Masjid Salsabila, Masjid Al-Falah dan Masjid Ar-Rahman.

Ketiga mesjid ini berada di Medan Tuntungan, Kota Medan. Alasan pemilihan mesjid ini karena mesjid ini berbeda dengan mesjid umumnya yang ada di kota medan. Mesjid ini berada di daerah zona merah. Mesjid Salsabila berada di pinggiran jalan lintas Medan Tuntungan, sedangkan Mesjid ar-Rahman dan al-Falah berada di kompleks perumahan di Medan Tuntungan.

B. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Mesjid

Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Norma umum yang ingin dikembangkan dalam moderasi beragama berupa setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik, harus saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka.

1. Sikap dan Praktik Beragama Moderat dalam Perbedaan Mazhab dan Aliran

Menurut informan terkait moderasi beragama dalam adanya perbedaan mazhab dan aliran dalam masyarakat di Kota Medan, maka dapat diuraikan beberapa penjelasan yakni:

a. Pada umumnya aliran mazhab yang dipakai dalam pelaksanaan ibadah di Mesjid-mesjid di Kota Medan adalah mazhab Syafi'iyah.

b. Adanya perbedaan pemikiran dan pandangan dalam mazhab/ aliran tertentu di masyarakat Muslim di Kota Medan seperti mazhab Syafii, kaum tua dan salaf, MTA (Majelis Tafsir al-Quran), Jamaah Tablig, dan aliran-aliran lainnya, tidak menimbulkan konflik internal di masyarakat Muslim, secara khusus dalam hal ibadah di mesjid. Masyarakat Muslim di Kota Medan lebih memilih untuk mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di dalam mesjid, tanpa mempermasalahkan masalah khilafiyah/ perbedaan mazhab. Seperti dalam hal cara shalat (qunut atau tidak), kaifiyah khutbah Jumat, dll.

   Dalam hal aturan dan tata tertib yang berlaku di masing-masing mesjid, maka hal tersebut menjadi kebijakan dan tanggung jawab pengurus BKM/ Takmir Mesjid.

c. Dalam hal dakwah yang dilakukan oleh mubaligh dan penceramah di masjid-masjid di kota Medan cenderung moderat dan menghindari berbagai perdebatan khilafiyah dan ujaran kebencian (hate speech) yang nantinya akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, demikian pula dengan perwiridan dan pengajian yang dilakukan masyarakat Muslim di luar mesjid.

d. Adapun mengenai materi dan isi ceramah/ khutbah yang ada biasanya mengacu pada kondisi dan trend yang sedang terjadi di masyarakat, misalnya saat Bulan Ramadhan, maka pemateri ceramah dan khatib akan bercerita tentang Puasa, Zakat dan hal terkait lainnya.
e. Adanya perbedaan pandangan dan pemikiran dalam organisasi masyarakat Muslim seperti organisasi Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, Al-Wasliyah dan Ittihadiyah dan lainnya, juga tidak pernah menjadi konflik internal dalam masyarakat Muslim di kota Medan.
f. Apabila terjadi perselisihan ataupun konflik internal antara jamaah dalam mesjid, maka solusi awalnya adalah dengan melakukan musyawarah di internal BKM mesjid, namun apabila tidak tuntas di BKM, maka masalah tersebut selanjutnya akan di bawa ke Kepala KUA sebagai Pembina BKM di Kecamatan.

2. Sikap dan Praktik Beragama Moderat Dalam Toleransi Hubungan Antar umat Beragama

Toleransi dapat dimaknai sebagai suatu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, mengemukakan pandangan sekaligus menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama dan/atau paham masing-masing. Toleransi aktif ini diperlukan untuk mewujudkan harmoni sosial, dengan fondasi berupa modal sosial (social capital), jaringan keterlibatan warga (civic engagement), dan kerja sama(resiprokal) antar warga lintas keyakinan.

Tentang bagaimana cara pandang terhadap agama lain dan toleransi hubungan antar umat beragama di Kota Medan, maka berdasarkan wawancara di dapat informasi bahwa:

a. Masyarakat Muslim dan Non Muslim sudah sejak lama hidup saling berdampingan di Kota Medan. Suku Melayu dan Batak, merupakan suku asli/pribumi di Kota Medan. Suku Melayu didominasi masyarakat Muslim, dan suku Batak didominasi non Muslim. Adanya perbedaan Suku tersebut tidak menyebabkan konflik antara masyarakat.
b. Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Kota Medan sangat memahami perbedaan agama dan menghormati seluruh pemeluk agama yang ada, dan selalu hidup berdampingan secara damai dan aman. Masyarakat sangat menjunjung tinggi tiap warga menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
c. Masyarakat Muslim dan Non Muslim selalu berinteraksi dan melakukan kerja sama dalam hal bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat tidak menjadi konflik dan isu SARA yang dapat merusak kondusivitas keamanan di Kota Medan
d. Di Kota Medan, masyarakat tidak mengenal agama minoritas atau agama mayoritas. Semua saling menghargai. Bahkan merupakan hal yang wajar jika ada satu keluarga yang memeluk lebih dari satu agama, tetapi tetap rukun. Kadang saudara tuanya agama Kristen, tetapi adiknya memeluk agama Islam. Misalnya di lingkungan keluarga suku Batak Karo di kota Medan. Mereka tinggal dalam rumah yang sama dengan praktik dan keyakinan yang berbeda, bahkan mereka tidak berbenturan karena memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.

3. Sikap dan Praktik Beragama Moderat dalam Menghadapi Wabah/Pandemi COVID-19

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, maka sikap moderat masyarakat Muslim di Kota Medan dalam beragama di antaranya yaitu pertama, bersabar dan banyak berdoa dalam menghadapi musibah COVID-19. Sikap sabar tersebut diimplementasikan dalam sikap menerima dan tabah dengan selalu berharap kepada Allah untuk segera mengubah keadaan ini. Kedua, mengikuti anjuran pemerintah dalam penanganan COVID-19 dengan aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan melalui media masa, para pakar kesehatan dan pihak berwenang. Ketiga, mengutamakan keselamatan umat

Terkait hal tersebut maka dalam menyikapi Pandemi COVID-19 dalam masyarakat di kota Medan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk bersikap waspada dan bersabar dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuntunan tersebut sebagaimana berikut:

a. Bahwa dalam menghadapi wabah COVID-19 kita secara bersama-sama dan bersungguh- sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
b. Bahwa semua musibah terjadi atas izin Allah SWT. yang memiliki hikmah dan semua orang beriman wajib meyakini musibah akan berakhir.
c. Sikap terbaik umat Islam menjadikan wabah yang sedang melanda negeri ini sebagai cobaan dan berdo'a semoga tidak berubah menjadi bencana yang merusak keimanan, kebangsaan dan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan kesabaran dalam penanganannya.

d. Mematuhi dan menaati panduan yang ditetapkan pemerintah dan MUI tentang penanganan COVID-19.

e. Dalam kondisi potensi penularan Coxid-19 berada pada zona merah, berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Medan, maka berlaku Fatwa MUI Pusat No. 14 tahun 2020 poin 3 huruf a yang isinya yaitu: “dalam hal ia berada di situasi kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan Salat Jumat dan menggantikannya dengan Shalat Zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu rawatib, tarawih dan 'id di mesjid atau di tempat umum lainnya. Dan muazzin tetap mengumandangkan adzan pada Salat lima waktu di setiap masjid”.

f. Dalam kondisi potensi penularan COVID-19 zona kuning dan hijau berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Medan maka penyelenggaraan ibadah secara beijamaah di masjid tetap dilaksanakan, seperti Salat jamaah rawatib/salat lima waktu, Salat Jumat, Salat Tarawih,dan Salat ‘led. Hanya saja sejumlah ketentuan harus diberlakukan: (a). Pengurus Badan Kenaziran Mesjid (BKM) secara rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan, terutama pada bagian lantai, ruangan dan pintu masuk ınasjid. (b). Setiap jaınaah memastikan dirinya bukan dalaın status ODP dan PDP atau tanda tanda/gejala yang mencurigakan terkait dengan COVID-19. (c). Setiap jamaah menggunakan masker (d.) Meınbawa sajadah sendiri. (e). Mencuci tangan dengan rnemakai sabun sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah (f). Setelah selesai pelaksanaan ibadah diharuskan untuk segera pulang ke rumah masing- masing.

Adapun ibadah yang dilaksanakan selama Bulan Raınadhan seperti:

a. Berbuka puasa bersama agar dilaksanakan dengan keluarga inti di rumah,
b. Tadarus Al-Qur an agar dilaksanakan di rumah,
c. Sahur keliling, tarawih keliling dan takbir keliling agar ditiadakan
d. Peringatan Nuzulul Qur'an secara berjamaah agar ditiadakan
e. Menyegerakan pembayaran zakat dan inendistribusikannya.
f. Kegiatan Halal bi Halal yang mengumpulkan orang banyak agar ditiadakan
g. Diminta kepada seluruh umat Islaır di Kota Medan untuk membaca QUNUT NAZILAH pada setiap Salat Fardhu,Salat Juın'at dan Salat Witir.
h. Diminta kepada seluruh umat Islam Kota Medan untuk memperbanyak infak dan sedekah.

Terkait dengan praktik ibadah di Mesjid selama masa pandemi COVID-19, maka MUI Provinsi Sumatera Utara dan MUI Kota Medan mengeluarkan 9 fatwa yang secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu pertama tata cara salat, kedua tentang pelaksanaan atau kegiatan di Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), dan terkait puasa serta zakat.

Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Kota Medan tersebut maka sebagian besar mesjid di kota Medan tidak melarang jamaahnya untuk shalat berjamaah di Mesjid, terutama daerah zona hijau dan kuning.

Sementara untuk zona merah seperti daerah Medan Tuntungan maka ada beberapa mesjid yang sengaja menutup kegiatan

berjamaah (shalat 5 waktu, dan Jumat) di mesjid selama 1 minggu, terutama mesjid yang berada di dalam komplek perumahan. Namun oleh desakan masyarakat/ jamaah tetap di mesjid tersebut, maka BKM kemudian membuka mesjid dengan pertimbangan bahwa jamaah tetap yang tidak bisa shalat di komplek tersebut, mencari mesjid lain untuk bisa shalat berjamaah, dan ini memunculkan resiko yang lebih besar yakni penularana dari jamaah di mesjid lain. Dengan melaksanakan protokol kesehatan maka kegiatan berjamaah di Mesjid tersebut dilaksanakan (shalat fardhu, Jumat, taraweh), namun kegiatan tadarus dilaksanakan di rumah masing-masing.

Selanjutnya ada mesjid yang tetap menyelenggarakan shalat fardhu dan Jumat namun tidak shalat taraweh, namun yang tidak melaksanakan shalat taraweh berjumlah sangat sedikit.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid

Sikap moderat adalah pilihan terbaik umat beragama untuk memelihara agama sebagai rahmat bagi segenap manusia dan alam. Moderasi adalah alternatif paling cerdas agar umat beragama tidak terjerembab pada ekstrimisme dan radikalisme. Lebih dari itu, sikap moderat merupakan kemuliaan setiap agama untuk menjaga harmonisasi hubungan antar umat beragama yang berbeda-beda. Namun kondisi ini sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak masyarakat dan penguasa. Dukungan masyarakat yang berasal dari pemahaman, cara pandang, sikap dan budaya serta adanya kesadaran untuk tidak menjadikan agama sebagai pemicu kekerasan dan kebencian terhadap penganut agama lainnya.

Kita tidak rela keberagamaan yang seharusnya menyejukkan dan mendamaikan, alih-alih memenuhi atmosfer publik dengan prasangka dan kedengkian. Kita juga tidak menghendaki agama yang mulanya memerankan diri sebagai juru damai dan keselamatan justru menjelma menjadi kekuatan pengoyak rasa aman masyarakat. Hakikat ajaran agama-agama yang sejuk-damai-toleran jangan sampai berubah menjadi pemicu kekerasan dan kebencian. Kesucian agama yang menjadi kekuatan khasnya tidak boleh dinodai oleh otoritarianisme hermeneutik, suatu klaim tafsir kebenaran yang menakutkan.

Di samping dukungan masyarakat dan penganut agama, maka moderasi beragama juga butuh dukungan para penguasa untuk mengekalkan dan melanggengkan kondisi ini.

D. Penutup

1. Moderasi beragama di Mesjid di Kota Medan dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama.
2. Adanya perbedaan pemikiran dan pandangan dalam mazhab/ aliran tertentu di masyarakat Muslim Kota Medan, tidak menimbulkan konflik internal dalam masyarakat Muslim secara umum.
3. Para mubaligh dan penceramah di masjid-masjid di kota Medan cenderung moderat dan menghindari berbagai perdebatan khilafiyah dan ujaran kebencian (hate speech).
4. Apabila terjadi perselisihan antara jamaah dalam mesjid, maka dicari solusi dengan musyawarah internal BKM mesjid dan Kepala KUA sebagai Pembina BKM di Kecamatan.

5. Masyarakat Muslim dan Non Muslim selalu berinteraksi dan melakukan kerja sama dalam hal bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat tidak menjadi konflik dan isu SARA yang dapat merusak kondusifitas keamanan di Kota Medan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan telah memberikan tuntunan kepada umat Islam dalam menykapi COVID-19-sehingga dalam kondisi potensi penularan COVID-19 zona kuning dan hijau berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Medan maka penyelenggaraan ibadah secara beijamaah di masjid tetap dilaksanakan, seperti Salat jamaah rawatib/salat lima waktu, Salat Jumat, Salat Tarawih,dan Salat 'led, dengan syarat dan ketentuan protokol kesehatan.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Agung Surakarta, Masjid Al Wustha Mangkunegaran, dan Masjid Takmirul Islam Kota Surakarta

Oleh: Wakhid Sugiyarto

Di Solo, penelitian tentang Pendidikan berbasis masjid ini difokuskan di masjid Agung Surakarta, masjid Al Wustha Mangkunegaran dan masjid Takmirul Islam, Alasannya adalah masjid Agung Surakarta dikenal masjid bersejarah dan moderat, sementara masjid Al Wustha Mangkunegaran di samping masjid bersejarah, telah terpapar paham ekstremisme bahkan radikalisme. Sementara masjid rakyat yang dipilih adalah masjid Takmirul Islam karena masjid ini di samping bersejarah juga sangat dikenal oleh masyarakat Solo raya.

Penelitian ini berusaha menggali data dan informasi berkaitan dengan; pertama, Pendidikan moderasi beragama yang dilakukan; kedua, dukungan dan hambatan Pendidikan moderasi beragama; dan ketiga bagaimana merespons kondisi pandemi COVID-19.

Respons terhadap COVID-19 harus dipahami sebagai tidak ada kaitan dengan ekstremisme dan radikalisme. Sangat aneh jika mengkaitkannya, karena realitasnya tidak dipaksakan apakah sebuah masjid Ketika tidak melaksanakan fatwa MUI dan surat edaran Kemenag akan dianggap ekstrem dan radikal. Kiranya terlalu dini jika menuduh demikian, bahkan terkesan paranoid banget.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hal, pertama, pendidikan moderasi beragama yang dilakukan; kedua, dukungan dan hambatan Pendidikan moderasi beragama; dan ketiga bagaimana merespons kondisi pandemi COVID-19 19

Penelitian ini adalah penelitian kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Artinya peneliti tidak akan menilai masjid yang diteliti sebagai masjid moderat atau ekstremis. Semua digambarkan saja, bagaimana pendidikan moderasi berjalan, daya dukung dan hambatannya apa serta bagaimana mereka merespons munculnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, informasi hanya mengandalkan wawancara belaka, karena aktivitas masjid sudah tidak ada dan kalaupun ada tinggal shalat berjamaah setelah lock down dilonggarkan. Observasi hanya dilakukan sekedar melihat bangunan fisik dan fasilitas yang dimilinya.

A. Temuan dan Pembahsan Hasil Penelitian

Masjid Agung Surakarta	Masjid Al Wustha Mangkunegaran	Masjid Takmirul Islam
Sejarah		
Masjid dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. (milik Kasunanan Surakarta/ Pemkot Surakarta), menyusul kemudian pesantren Jamsaren dan pesantren Mambaul Ulum.	Pembangunan Masjid Al-Wustho diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara-I (1725-1795) sehingga merupakan milik Pura Mangkunegaran yang setelah merdeka diserahkan pada Pemkot Surakarta)	Masjid Takmirul Islam adalah masjid swasta pertama di Surakarta yang dibangun mulai 28 Oktober 1928 dan selesai dibangun tahun 1929 oleh para pedagang batik Laweyan (miliki Yayasan Takmirul Islam), karena sebelumnya ada 4 masjid semua milik keraton, yaitu masjid Agung Surakarta, masjid al Wustha Mangkunegaran, masjid pasar kliwon dan masjid Laweyan.
Luas tanah sekitar 2 ha, luas bangunan 5 ribu meter2	Luas tanah sekitar 4.200 meter	
Paham keagamaan		
Paham keagamaan yang dikembangkan di masjid adalah gaya NU	Paham keagamaan yang dikembangkan di masjid adalah gaya NU	Paham keagamaan yang dikembangkan di masjid adalah gaya NU
Kegiatan kemasjidan		

1. Ada TPA dengan jumlah peserta didik 65 orang 2. Ada perpustakaan dengan 4.000 judul buku 3. Digunakan untuk berbagai kegiatan majelis taklim dari majelis taklim dari berbagai wilayah Solo, baik untuk anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Paling sering dan rutin adalah pengajian yang dilaksanakan oleh komunitas pedagang batik Pasar Klewer (setiap minggu pagi)	1. Ada majelis taklim secara bergantian kelompok jamaáh NU, 4 hari dalam seminggu dengan mengambil ruang khusus (bukan di dalam masjid atau serambi masjid) 2. Ada majelis taklim yang dulu berafilisasi ke HTI dan masih membekas sanpai hari ini. (seminggu sekali) 3. Pengajian untuk anak-anak, remaja/pemuda/ibu-ibu dan bapak-bapak.	1. Majelis taklim bergantian dari berbagai majelis taklim di sekitar masjid Takmirul Islam, utamanya wali musrid TK/TP/SD dan SMP Takmirul secara bergantian. 2. Ada TK dan TPA Takmirul Islam 3. Ada SD dan SMP Takmirul Islam (dikenal sebagai sekolah anak-anak orang kayan Muslim Solo) 4. Ada pondok pesantren Takmirul Islam dengan santriwan/wati dari berbagai wilayah Indonesia. 5. Taklim rutin mingguan oleh wali muris siswa TK, SD dan SMP Takmirul Islam
Praktik Pengembangan pendidikan moderasi beragama di Masjid		
Pengurus masjid di SK-kan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta. Walikota sebagai pelindung, Kemenag sebagai Pembina dan penghulu masjid (sekarang Muhtaram) sebagai Ketua pengurus takmir masjid Agung	Pengurus dipilih secara berkala dan demokratis untuk menampung dua kubu yang secara politik berseberangan tetapi sesungguhnya satu manhaj pemahaman keagamaan, yaitu model NU	Pengurus dipilih secara berkala, kecuali Ketua pengurus Takmirnya yang ditunjuk oleh Yayasan takmirul Islam
Hubungan Intern		
1. Khatib, mubaligh, guru ngaji dicari sendiri oleh pengurus masjid, dan memperhatikan tradisi yang sudah berjalan di masjid itu	1. Masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid yang terpapar ekstremisme keagamaan, bahkan radikalisme karena ada banyak mantan aktifis HTI di sini.	1. Pengurus takmirnya rata-rata pengurus Yayasan, hanya beberapa yang berasal dari luar Yayasan.
2. Memberi *warning* tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada jamaáh atau peserta taklim.	2. Kurang memperhatijan afilisasi paham keagamaan para khatif, dan penceramah di majelis masjid al Wustah.	2. Khatib, mubaligh, guru ngaji dicarih sendiri oleh pengurus masjid, dngan memperhatikan tradisi yang sudah berjalan di masjid itu

3. Masjid Agung adalah milik semua umat Islam, sehingga tidak diperkenankan membawa atribut ormas atau paham keagamaan tertentu ke dalam masjid Agung Surakarta.	3. Pengajian majelis taklim seperti terbelah dua, yaitu umum (NU cs dan HTI)	3. Memberi *warning* tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada jamaáh atau peserta taklim.
4. Aliasnis Nasional Anti Syiáh (ANAS) pernah akan mendeklarasikannya di masjid Agung ini tetapi ditolak oleh Muhtaram (ketua pengurus masjid), akhirnya deklarasi dilakukan di halaman parkir alun-alun utara Kasunanan Surakarta	4. Ketika HTI belum dilarang kegiatan taklim masjid al Wustha berjalan rutin dengan banyak jamaáh peserta.	
5. Di waktu yang telah lama, Abubakar Baásyir pernah menjadi mubaligh rutin untuk komunitas pedagang batik Pasar Klewer pada setiap minggu.	5. Ketika HTI dilarang, pengajian rutin di masjid langsung sempat hilang, meskipun sekarang telah menggeliat lagi.	
Hubungan Intern		
1. Hubungan internal di antara pengurus masjid, khatib, mubaigh dan guru ngaji terjalin dengan baik.	1. Hubungan internal di antara pengurus masjid, khatib, mubaigh dan guru ngaji terjalin dengan baik, meskipun berbeda manhaj politiknya.	1. Hubungan internal di antara pengurus masjid, khatib, mubaigh dan guru ngaji terjalin dengan baik.

2. Belum ada hubungan antar pengurus masjid satu dengan masjid lain di Surakarta, sehingga tidak diketahui seperti hubungannya. Hanya saja memang tidak pernah ada konflik antar masjid, karena semua sibuk dengan masjidnya masing-masing.	2. Tidak ada hubungan antar pengurus masjid satu dengan masjid lain di Surakarta, semua mengurusi masjidnya masing-masing. 3. Meskipun di masjid al Wustha ada mantan HTI yang kuat, tetapi hubungannya dengan non HTI cukup baik, tidak pernah konflik. 4. Ketika kelompok mantan HTI membagikan 450 bungkus nasi untuk buka kaum miskin dengan menggunakan uang kotak amal masjidpun, pengurus yang bukan mantan HTi bahkan Ketuanya sendiri tidak mempersoalkan.	2. Tidak ada hubungan antar pengurus masjid satu dengan masjid lain di Surakarta dalam rangka membangun jalin silaturahmi antar masjid.
Anggaran dari pemerintah Kota tidak pernah cair, sehingga sumber keuangan berasal dari donator dan kotak amal. Sayang anggaran dari Pemkot tidak pernah cair, kecuali untuk event-event tertentu seperti gerebek Asyura.	Sumber keuangan dari donator dan kotak amal masjid. Sebagai masjid pemerintah, ternyata masjid al Wustha hampir tidak pernah mendapat anggaran dari Pemerintah Kota Surakarta, termasuk Kementerian Agama.	Sumber keuangan dari donator dan kotak amal masjid. Anggaran takmirul berdatangan secara baik, sehingga dapat digunakan untuk mendanai pengembangan masjid dengan berbagai lembaga otonomnya.
Kegiatan Amal dan ibadah		
1. Kegiatan amal yang berjalan adalah pembagian zakat fitrah 2. Santunan anak yatim di acar Asyura, atau hampir bersamaan dengan grebeg sekatenan	1. Kegiatan amal yang berjalan adalah pembagian zakat fitrah 2. Nasi kota untuk buka bersama rata 450 bungkus setiap hari untuk orang-orang tidak mampu.	1. Kegiatan amal yang berjalan adalah pembagian zakat fitrah 2. Nasi kota untuk buka bersama rata 400 bungkus setiap hari untuk orang-orang tidak mampu, dengan memperhatikan protokol kesehatan

3. Buka Bersama, tetapi untuk tahun 2020 tidak ada karena dilarang berkerumun akbiat vovid 19	3. Sejak muncul pandemi tidak ada penghentian shalat berjamaáh.	3. Sejak muncul pandemi COVID 19 tidak ada penghentian shalat berjamaáh, tetapi mereka tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah merebaknya pandemi COVID-19
4. Bulan Maret – pertengahan Juli tidak ada shalat berjamaáh, baik itu tarawih Ramadhan, Idul fitri, maupun Idul Adha.	4. Shalat berjamaáh sejak awal tetap menggunakan protokol Kesehatan.	4. Shalat berjamaáh sejak awal pandemi tetap jalan tetapi memperhatikan protokol kesehatan.
5. Pembagian daging kurban secara terbatas	5. Di hari jumát, pintu utama ditutup agar tidak ada orang yang bukan lingkungan masjid Al Wustha bergabung dalam shalat jumát.	5. Tetap ada shalat Idul fitri dan Idul Adha.
	6. Tetap ada shalat Idul fitri dan Idul Adha.	6. Tetap ada pembagian dging kurbang seperti tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah yang tidak berkurang.
	7. Shalat berjamaáh sejak pandemi tetapi dilakukan karena, masyarakat sekitar umumnya hanya memiliki rumah satu ruang (untuk tidur, belajar anak, memasak dsb). Jika dilarang shalat di masjid, mereka tentu tidak ungkin melaksanakan shalat. Juga tidak mungkin shalat dengan menggelar sajadah atau tikar di gang untuk shalat rawatif.	
Hubungan eksternal		

1. Hubungan dengan pihak eksternal non muslim tidak dapat dideteksi, tetapi bahwa jamaáh masjid tidak pernah konflik dengan non Muslim itu pasti. Tetapi tidak ada realsi yang jelas dengan non Muslim itu. Apakah dapat dikatakan hubungan dengan pihak eksternal itu baik?	1. Hubungan dengan pihak eksternal non muslim belum terlihat terjalin secara baik, Pihak masjid belum pernah ada pertemuan khusus antara jamaáh masji al Wustha dengan penganut agama lain di Surakarta. Kalau secara individual, hubungan mereka sangat baik, memang betul. Belum pernah terjadi konflik komunal antara Muslim dan nan Muslim. Masalah keagamaan yang muncul di masyarakat umumnya malah intern Muslim sendiri.	1. Hubungan dengan Pihak eksternal non muslim belum terlihat terjalin secara baik. Pihak masjid belum pernah ada pertemuan khusus antara jamaáh masji Takmirul Islam dengan penganut agama lain di Surakarta.
2. Penggunaan speaker untuk tarkhiman, adzan dan pembacaan ayat suci al Qurán biasa dihdaptkan keluar dan tidak pernah ada yang protes. Apakah tidak ada yang protes berate hubungan eksternal umat Islam dan non Islam terjalin baik? Perlu kajian mendalam.	2. Di Al Wustha sendiri ada mantan-mantan HTI yang masih aktif dan masih mendominasi kegiatan kemasjidan, meskipun sudah tidak lagi mendakwahkan khilafah.	2. Jamaáh masjid Takmirul Islam umumnya adalah Muslim moderat, meskipun rada-rada ke kanan sedikit. Hal ini mungkin karena pengaruh masjid di Surakarta yang gaungnya banyak menjadi persemaian Msulim ekstrim, bahkan radikal.
	3. Penggunaan speaker untuk tarkhiman, adzan dan pembacaan ayat suci al Qurán biasa dihdaptkan keluar dan tidak pernah ada yang protes. Apakah tidak ada yang protes berat hubungan eksternal umat Islam dan non Islam terjalin baik? Perlu kajian mendalam.	3. Penggunaan speaker untuk tarkhiman, adzan dan pembacaan ayat suci al Qurán biasa dihadapkan keluar dan tidak pernah ada yang protes. Apakah tidak ada yang protes berarte hubungan eksternal umat Islam dan non Islam terjalin baik? Perlu kajian mendalam.
Respons Isu Keagamaan yang berkembang di masyarakat		

1. Masjid Agung adalah masjid pemerintah yang merupakan hibah dari Kasunanan Surakarta. Oleh karena itu isu-isu keagamaan di masyarakat yang dianggap menyebabkan kegaduhan keagamaan dipastikan tidak akan bisa masuk ke masjid Agung.	1. Masjid al Wustha Mangkunegaran sesungguhnya masjid miliki Pemerintah Kota Surakarta yang merupakan hibah dari Pura Mangkunegaran.	1. Masjid Takmirul Islam adalah masjid swasta pertama di Surakarta yang dibangun oleh para pedagang batik yang berdomisili di Laweyan.
2. Sebagai masjid pemerintah, masjid Agung tidak memperkenankan kelompok ormas keagamaan Islam mana pun membawa benderanya, hanya untuk memperlihatkan jatidiri dan eksistensinya.	2. Jamaáh Masjid al Wustha, cukup aktif sehingga terlibat dalam kegaduhan isu-isu keagamaan, utamanya berkaitan dengan politik umat Islam.	2. Ijin pembangunan masjid tahun 1928 dan mengadakan shalat Jumat sendiri pertama kalinya direstui oleh Sunan sejak tahun 1929.
3. Materi khutbah dan materi pengajian taklim sudah steril dari persoalan-persoalan yang debatable, karena sudah memiliki tradisi mapan.	3. Masjid al Wustha sering disebut salah satu masjid pemerintah yang terpapar ekstremisme dan radikalisme seperti dijelaskan Kepala Kemenag Kota Solo.	3. Materi khutbah dan materi pengajian taklim sudah steril dari persoalan-persoalan yang *debatable*, karena sudah memiliki tradisi mapan.
4. Masjid Agung sudah memiliki manhaj yang moderat yaitu manhaj Aswaja dalam praktik amal peribadatan di masjid (model NU).	4. Keberadaan mantan-mantan HTI sudah terlanjur kuat sejak HTI belum dilarang, tetapi selama ini tetap kondusif dan tidak terjadi kegaduhan di masjid al Wustha.	4. Masjid Takmirul Islam sudah memiliki *manhaj* yang moderat yaitu *manhaj* Aswaja dalam praktik amal peribadatan di masjid (model NU).

5. Pengurus masjid pun membiarkan saja ada yasinan secara berkala, tahlilan kematian, membaca qunut saat shalat subuh, bahkan sealama pandemi membaca *qunut* nazilah setiap shalat 5 waktu.	5. Materi khutbah dan materi pengajian taklim belum steril dari persoalan-persoalan yang *debatable*, karena sudah memiliki tradisi mapan.	5. Pengurus masjid pun membiarkan saja ada yasinan secara berkala, tahlilan kematian, membaca *qunut* saat shalat subuh, bahkan sealama pandemi membaca qunut nazilah setiap shalat 5 waktu.
6. Bagi yang berasal dari ormas yang bukan memegang tradisi NU, saat shalat berlangsung menggunakan tradisi NU, mereka ikut saja, tanpa mempersoalkannya.	6. Masjid al Wustha sudah memiliki manhaj yang moderat yaitu manhaj Aswaja dalam praktik amal peribadatan di masjid (model NU). Namun secara politik memiliki manhaj sendiri.	6. Jamaah masjid Takmirul Islam bersalal dari berbagai simpatisan ormas yang ada di Solo, tidak hanya simpatisan NU.
	7. Pengurus masjid pun membiarkan saja ada yasinan secara berkala, tahlilan kematian, membaca qunut saat shalat subuh, bahkan sealama pandemi membaca qunut nazilah setiap shalat 5 waktu.	
	8. Bagi yang berasal dari ormas yang bukan memegang tradisi NU, saat shalat berlangsung menggunakan tradisi NU, mereka ikut saja, tanpa	
Cara Pandang, Sikap dan Praktik moderasi di masa pandemi		

1. Pada awal adanya pemerintah mengumumkan wabah pandemi agar masjid melaksanakan *lockdown* masjid, maka masjid Agung langsung melakukan *lockdown* dengan menutup masjid sekitar 3 bulan.	1. Pada awal adanya pengumuman pemerintah untuk me*lockdown* masjid atau tutup total, telah menimbulkan pro kontra di masjid al Wustha Mangkunegaran.	1. Pada awal pengumuman merebaknya wabah pandemi oleh pemerintah dan memerintahkan umat Islam untuk *me-lockdown* masjid, masjid Takmirul Islam melakukan *lockdown* dengan tidak ke Masjid.
2. Semua aktivitas masjid seperti shalat rawatib, jumátan, shalat teraweh Idul Fitri, Idul Adha dihentikan.	2. Karena jamaah tetap masjid Mangkunegera yang tinggal di sekitar masjid sebagian besar hanya memiliki rumah satu ruang saja. Mereka di situ memasak, anak belajar, makan bersama, tidur dan ngesek. Akhirnya diputuskan, masjid tetap buka khusus untuk jamaah sekitar masjid dan pintu utama ditutup.	2. Masjid pun ditutup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, menunggu pengumuman pemerintah selanjutna.
	3. Shalat rawatib, shalat tarawih, buka bersama shalat Idul Fitri, dan Idul Adha jalan terus. Tentu saja memperhatikan protokol Kesehatan, karena menurut mereka kuncinya di situ, bukan menutup masjid.	3. Setelah ada pengumuman pelonggaran (PSBB) masjid Takmirul Islam buka Kembali dengan memperhatikan protokol Kesehatan.
	4. Buka bersama dengan 450 nasi bungkus pun tetap jalan yang diurus oleh mantan-mantan aktivis HTI jamaah masjid Mangkunegaran itu.	4. Semua aktivitas masjid selama pandemi dihentikan.

	5. Mereka mempersoalkan masih dibukanya pasar dan mall di masa pandemi, dan kehendak pemerintah yang meminta umat Islam menutup masjidnya untuk sementara waktu, sampai pandemi pergi.	5. Semua aktivitas di luar peribadatan masih dihentikan hingga sekarang.
	6. Masjid al Wustha tidak pernah melakukan *lockdown* dengan tidak ke Masjid atau menutup masjid, tetapi jamaahnya tetap jaga jarak saat shalat, menyiapkan hand sanitizer, pakai masker, cek suhu badan.	6. Aktivitas belajar mengajar di Lembaga pendidikan TK, SD, SMP dan pondok pesantren Takmirul Islam dilakukan secara Webiner sampai hari ini
	7. Aktivitas masjid di luar poin 4 memang dihentikan semua.	
Model Pengembangan Moderasi Beragama di Masjid Agung Surakarta		

Khotbah dan pengajian taklim semua kalangan jarang berbicara (tidak pernah) atau menyentuh tema komitmen kebangsaan. Bagi pengurus, komitmen jamaah sudah dipastikan terhadap kehidupan kebangsaan akan mengikuti yang ada saja. Terpenting adalah masjid tidak mengembangkan wacana di luar komitmen kebangsaan untuk menggantikan sistem politik dan pemerintahan Indonesia dengan model dan ideologi yang lain. Masjid Agung bukanlah penentu kiblat komitmen kebangsaan bagi masyarakat Solo, tetapi mungkin hanya bagian saja.	Khotbah dan pengajian taklim terpecah menjadi dua faksi yang sama kuat, yaitu umum dan mengandung term ekstremisme dan radikalisme. Dahulu Ketika HTI masih eksis, pengajian didominasi oleh pengembangan wacana politik HTI, terutama khilafah yang hendak menggantikan sistem politik dan pemerintah Indonesia dengan khilafah Islamiyah. Namun masjid al Wustha juga penentu arah perubahan komitmen kebangsaan, karena pendukungnya juga sedikit saja tetapi aktif, itu saja.	Khotbah dan pengajian taklim jarang berbicara (tidak pernah) membicarakan komitmen kebangsaan. Pendidikan komitmen kebangsaan telah ditanamkan di TK, SD, SMP dan pondok pesantren dengan kurikulum intra dan ekstra kurikulernya.
Faktor Pendukung dan Penghambat		
a. Sebagai masjid pemerintah, masjid Agung memiliki berbagai fasilitas untuk memakmurkan masjid.	a. Tersedianya fasilitas masjid secara fisik memadai	a. Masjid Takmirul Islam yang memiliki daya dukung, bukan hanya dari jamaah tetapi juga Lembaga Pendidikan yang dimiliki yayasan, maka tersedia fasilitas masjid secara fisik memadai

b. Pengurus masjid yang sebagian besar merupakan kerabat keraton, maka semua aktivitas dapat berjalan lancar.	b. Ketua DKM yang terbuka dan pelibatan semau pengurus dalam setiap pengambilan keputusan membuat semua aktivitas berjalan lancar	b. Ketua DKM dan Yayasan cukup terbuka dan pelibatan semau pengurus dalam setiap pengambilan keputusan membuat semua aktivitas berjalan lancar. Hal ini sudah dibuktikan dengan posisi TK. SD, SMP dan pondok pesantren Takmirul Islam yang sangat diperhitungkan oleh masyarakat Muslim Solo dan sekitarnya. Setiap tahun animo masyarakat untuk mengirim anak-anaknya ke TK, SD, SMP dan pondok pesantren selalu melebihi kapastisa ruang kelas yang dimiliki, sehingga banyak calon siswa dan santri yang ditolak.
Faktor Penghambat		
1. Tidak ada program yang berarti untuk mengembangkan moderasi beragama, kecuali hanya himbauan kepada khatib, mubaligh dan guru ngaji agar dalam penyampaian materi khotbah dan ceramah agama hanya menyentuh kepentingan yang umum-umum saja.	1. Di masjid al Wustha Mangkunegara tidak ada program khusus moderasi beragama, bahkan cenderung sangat tradisional. Semua materi khutbah dan taklim mengalir sesuai selera pelakunya, tidak tematik atau kurikulum khusus.	1. Pengurus masjid Takmirul Islam tidak memiliki program khusus Pendidikan moderasi beragama atau setara dengan itu.

2. Moderasi beragama berjalan mengalir saja, tidak terencana dari pengurus, padahal kondisi kota Solo sangat dinamis dengan munculnya berbagai wacana ekstremisme keagamaan, bahkan kekerasan sering terjadi di Solo.	2. Program aktivitas keagamaan yang benar-benar menyentuh dan berusaha mengubah pemahaman keagamaan secara politik malah dilakukan oleh mantan aktivis HTI.	2. Wacana keagamaan di Kota Solo dikuasai oleh kelompok Muslim ekstremis (Islamis), sehingga mestinya harus ada program khusus *counter* isu agar wacana Islam ekstrimis tidak berkembang dan menjadi mereka Muslim Solo.
3. Bisa dinyatakan bahwa pengelolaan masjid Agung secara strategis tidak ada.	3. Kalaupun ada kajian keagamaan, yang dilakukan oleh KH. …. Cenderung hanya diikuti oleh anak-anak muda NU yang menempati ruang khusus untuk kajian keagamaan di areal masjid, bukan di masjid.	3. Program kemasjidan masih agak tradisional, paling banter adalah pengajian taklim yang sama sekali tidak menyentuh isu-isu Islam ekstremis yang meresahkan masyarakat Muslim Solo itu.
4. Kegiatan hanya sekitar perawatan, penyediaan dan respons kecil terhadap bencana alam tanah air.		

B. Penutup

Dari matrik di atas, maka dapat disimpulkan, yatu;

1. Masjid Agung, al Wustha Mankunegaran dan masjid Takmirul Islam adalah masjid bersejarah di Kota Solo. Ketiga masjid ini sudah memiliki perjalanan panjang dalam sejarah dakwah Islam sudah teruji eksistensinya.
2. Masjid Agung dan masjid Takmirul Islam adalah masjid moderat yang tradisional
3. Masjid al Wustha adalah salah satu masjid di Solo yang sering disebut terpapar ekstremisme, bahkan radikalisme karena adanya banyak mantan aktivis HTI di situ.
4. Ketiga masjid tidak memiliki program khusus yang menggambarkan adanya pendidikan dan pengembangan moderasi beragama. Semua aktivitas mengalir seperti aliran air,

tak bervisi masa depan, sehingga tidak ada program-program kemasjidan yang dijadikan contoh pengelolaan masjid yang bagus di Indonesia. Semua, biasa saja, tidak ada yang istimewa. Masjid Agung hanya ramai waktu shalat rawatib, apalagi masjid al Wustha.

5. Daya dukung yang dimiliki ketiga masjid sebenarnya sangat bagus, tetapi belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin hanya masjid Takmirul Islam yanh terlihat nyata, karena telah mengelola TK/TPA/SD/SMP dan pondok pesantren dengan animo masyarakat yang luar biasa.

C. Rekomendasi

Dari impulan di atas maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah

1. Masjid Agung dan masjid al Wustha sebaiknya mendapatkan pembinaan dari pemerintah secara benar, khususnya Kementerian Agama. Kedua masjid ini tidak bisa hanya dibanggakan sebagai masjid bersejarah dan berjasa dalam pengembangan Islam di masa lalu, tetapi redup perannya di era kini. Peran kedua masjid perlu dikembalikan sebagai masjid perjuangan dakwah sebagaimana dilakukan oleh Sunan Pakubowono dan Raden Mas Said yang legendaris, dengan program-program yang peka terhadap kondisi umat Islam di Solo agar wacana ekstremisme keagamaan tidak semakin merebak di Solo raya.
2. Perlunya pemerintah melibatkan para pengurus ketiga masjid menjadi peserta kegiatan sosialisasi moderasi beragama, sehingga tergugah untuk menyusun program moderasi beragama. Hal ini adalah karena Kota Solo dikenal sebagai

sebagai gudangnya masjid yang digunakan untuk kegiatan mengumbar kebencian, mudah menyesatkan dan mengkafirkan Muslim lain di Solo raya dan sarang teroris. Apalagi di Solo juga banyak laskar-laskar sumbu pendek (reaktif) terhadap perbedaan.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Raya Padang, Masjid Raya Gantiang, Masjid Ikhwatun, dan Masjid Raya Kurao Kapalo Banda Kota Padang

Oleh: Warnis

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Masjid

a. Masjid Raya Padang

Mesjid Raya Sumatera Barat yang juga dikenal dengan nama Masjid Mahligai Minangkabau adalah salah satu masjid terbesar di Sumatera Barat dan termasuk jenis masjid besar. Mesjid ini terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan status tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan yang ada, yaitu lebih kurang 18.000 meter persegi, sehingga menyisakan halaman yang luas. Di halaman itu dibangun pelataran tempat parkir, taman, dan tempat evakuasi bila terjadi tsunami. Peletakan batu pertama

diawali pada 21 Desember 2007, dan pembangunan masjid selesai pada 4 Januari 2019 dengan menghabiskan biaya lebih kurang Rp. 325-330 miliar yang sebagian berasal dari APBD provinsi Sumatera

Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat gagasannya sudah bergulir semenjak tahun 2005. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beranggapan bahwa selaku ibu kota provinsi belum memiliki masjid yang representatif untuk menampung jamaah dalam jumlah banyak. Keinginan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk membangun masjid raya menguat, walaupun terdapat masjid Nurul Iman yang berukuran besar di Kota Padang.

Masjid Raya Sumatra Barat menampilkan arsitektur modern yang tidak identik dengan kubah. Bangunan utama Masjid Raya Sumatera Barat memiliki denah dasar seluas 4.430 meter persegi. Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografis Sumatra Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Masjid ini ditopang oleh 631 tiang pancang dengan fondasi berdiameter 1,7 meter pada kedalaman 7,7 meter. Dengan kondisi topografi yang masih dalam keadaan rawa, kedalaman setiap fondasi tidak dipatok karena menyesuaikan titik jenuh tanah.

Ruang utama yang dipergunakan sebagai tempat salat terletak di lantai atas berupa ruang lepas. Lantai atas dengan elevasi tujuh meter terhubung ke permukaan jalan melalui ramp, teras terbuka yang melandai ke jalan. Dengan luas 4.430 meter persegi, lantai atas diperkirakan dapat menampung 5.000–6.000 jamaah. Adapun lantai dua berupa mezanin berbentuk leter U memiliki luas 1.832 meter persegi.

2. Masjid Raya Gantiang

Masjid Raya Ganting (atau ditulis dan dilafalkan Gantiang dalam bahasa Minang) adalah masjid peninggalan abad ke-19

yang terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tercatat sebagai masjid tertua di Padang. Arsitekturnya merepresentasikan akulturasi etnis-etnis yang ada di Padang dengan pengaruh Neoklasik dari Eropa yang dominan pada bagian fasad. Berada di kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Ganting merupakan masjid terbesar di Minangkabau pada awal abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam setempat, menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan dalam masa genting saat Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Pamornya meredup seiring kehadiran masjid besar baru seperti Masjid Nurul Iman dan Masjid Taqwa Muhammadiyah serta adanya perluasan wilayah administrasi Kota Padang pada tahun 1980.

Masjid Raya Ganting berdiri di lahan seluas 9.751 m^2 yang dikelilingi oleh permukiman penduduk. Denah halamannya berbentuk trapesium dengan sisi miring di sebelah Barat, yang berbatasan dengan jalan raya dan diberi pagar setinggi 1 m. Terdapat pemakaman masyarakat dan bangunan sekolah di sebelah selatan. Di dalam kompleks Masjid Raya Ganting, terdapat bangunan pendukung berupa tempat wudu dan perpustakaan. Secara keseluruhan, luas area yang diperuntukkan untuk bangunan sekitar seperlima dari luas lahan. Halaman yang tersisa digunakan untuk pelaksanaan salat Ied pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Di belakang masjid, terdapat dua makam Regent Padang yang menjabat pada abad ke-19. Pada prasastinya, tertulis nama Yml. Radja Bidoe Glr. Marahindra Toeangkoe Panglima Radja di Padang dan Yml. Marah Soeib Glr. Marahindra Toeangkoe Panglima Regent di Padang.

3. Masjid Ikhwatun

Masjid Ikhwatun atau masjid Persaudaraan sesuai dengan namanya beralamat di Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang, Sumatera Barat, memiliki luas tanah lebih kurang 400 meter persegi. Masjid Ikhwatu dikatakan masjid persaudaraan, karena dalam sejarahnya masjid ini menyatukan tiga kompleks perumahan yaitu: Komplek Jondul 2, Wisma Indah VII dan Komplek Pola Mas 2 di Kelurahan Parupuk Tabing. Masjid ini terletak di pertigaan dan bersisian dengan ketiga kompleks perumahan tersebut.

Pembangunan masjid Ikhwatun berasal dari swadaya masyarakat yang tinggal pada tiga kompleks perumahan dan bantuan dari rantau yang juga sebagian besar keluarga dari masyarakat tiga kompleks perumahan tersebut. Secara fisik masjid Ikhwatun selesai dibangun lebih kurang sejat 4 tahun yang lalu. Masjid digunakan oleh jamaah tiga kompleks perumahan dalam melaksanakan shalat wajib, shalat Jumat, dan shalat tarawih serta dibuka selama 24 jam.

4. Masjid Raya Kurao Kapalo Banda

Masjid Raya Kurao Kapalo Banda dibangun pada tahun 1952. Masjid Raya Kurao Kapalo Banda merupakan kategori Masjid Umum, beralamat di Jl. RSUD Sungai Sapih Padang Sumatera Barat . Masjid Raya Kurao Kapalo Banda memiliki luas tanah 150 m2 , luas bangunan 400 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Raya Kurao Kapalo Banda memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang , jumlah muazin 9 orang , wirid remaja 40 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .

5. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Masa Pandemi COVID-19

a. Cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama

Perbedaan madzhab atau pemikiran keagamaan di kalangan umat beragama sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan madzhab atau pemikiran keagamaan dalam persoalan ijtihadiyyah kadangkala menyebabkan hubungan sesama umat Islam dalam masyarakat tidak harmonis. Sebenarnya, walaupun terdapat perbedaan pendapat, para ulama pendiri empat madzhab tidak pernah mencela satu sama lain, malahan keempat ulama tersebut tidak segan-segan berguru satu sama lain.

Indonesia sendiri memiliki dua organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU). Kedua organisasi Islam tersebut berpengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa di Indonesia terutama dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan politik. Perbedaan sering terjadi pada kedua organisasi Islam ini, yang disebabkan karena cara dan manhaj yang digunakan berbeda. Muhammadiyah menggunakan Majlis Tajrih dan beberapa Masail al Fikhiyyah diambil dari madzhab Hambali, sedangkan NU menganut paham Ahlussunah Waljamaah, dalam bidang fiqhnya lebih cenderung mengikuti madzhab Syafi'i. Perbedaan paham kedua organisasi Islam ini juga mempengaruhi kehidupan beragama di kalangan masyarakat Kota Padang.

Mencermati perbedaan madzhab atau pemikiran keagamaan yang terjadi di lapangan khususnya dikalangan masyarakat kota Padang lebih bersifat kasuistik. Perbedaan itu terlihat misalnya, ketika shalat subuh ada masyarakat yang menggunakan qunut dan ada yang tidak berqunut . Ada bacaan bismillah yang dikeraskan dan ada yang dibaca dalam hati, kemudian ada shalat tarwih

11 rakaat dan ada yang shalat tarawih 23 rakaat, dan ada juga sebagian masyarakat yang puasa dahulu dari puasa yang ditetapkan pemerintah dan lebarannya juga dahulu dari kebanyakan masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan seperti ini sudah lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi masyarakat yang memiliki paham keagamaan seperti itu.

Berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang berbeda madzhab, berdasarkan wawancara dengan takmir masjid menyatakan bahwa perbedaan madzhab tidak menjadi permasalahan, artinya tidak sampai menjadi konflik ditengah-tengah masyarakat. Takmir mesjid menyebutkan lebih lanjut bahwa untuk kota Padang sudah dipetakan masjid-masjid yang memiliki perbedaan madzhab atau pemikiran keagamaan yang berbeda. Biasanya untuk khotib, imam, dan penceramah masing-masing masjid sudah memiliki sendiri sesuai dengan madzhab yang dianut dan keinginan jamaah. Jika ada khotib, imam dan penceramah baru, menurut takmir mesjid akan diberitahu madzhap apa yang biasa digunakan jamaah di mesjid tersebut. Begitu juga dengan mubaligh, seperti di masjid Raya Padang takmir mesjid sangat selektif dalam memilih mubaligh atau penceramah. Hal ini dilakukan mengingat masjid Raya Padang adalah rujukan untuk kota Padang, apalagi Masjid Raya Padang merupakan masjid yang banyak dikunjungi oleh jamaah dari berbagai daerah. Dalam menentukan penceramah atau mubaligh yang akan mengisi tausiah dipilih yang tidak berpihak secara politis maupun materi yang akan disampaikan. Umumnya mubalig di Masjid Raya berasal dari UIN, UNP dan ulama-ulama yang dapat memberikan kesejukan bagi jamaah yang datang dalam menyampaikan tausiahnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, jika ada mubaligh atau penceramah yang tidak sesuai dengan madzhab atau pemikiran keagamaan yang di anut jamaah masjid, maka untuk masa yang akan datang penceramah tersebut tidak diundang lagi oleh takmir masjid. Hal yang sama juga berlaku terhadap materi tausiah yang disampaikan oleh mubaligh atau penceramah jika tidak berkenan dihati jamaah atau tidak disukai jamaah, maka untuk selanjutnya Ustadz atau penceramah tersebut juga tidak diundang lagi oleh takmir masjid.

Berkaitan dengan cara pandang terhadap agama lain, di kota Padang hampir tidak ada terjadi konflik berhubungan dengan agama yang dianut oleh masyarakat lain. Masyarakat muslim bebas melakukan ibadah menurut keyakinannya, sementara masyarakat non muslim juga tidak mendapat hambatan jika ingin melaksanakan ritual keagamaannya. Artinya, hubungan antar umat beragama untuk kota Padang cukup harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Adapun cara pandang keagamaan tentang wabah/pandemi COVID-19, umumnya penceramah dan jamaah masjid Ikhwatun menyatakan bahwa wabah/pandemi COVID-19 adalah ujian dari Allah yang diturunkan kepada manusia. Selanjutnya jamaah menyatakan bawah wabah/pandemi COVID-19 tidak di tempat kita saja, tapi hampir semua dunia dilanda pandemi COVID-19 ini. Sebagai manusia kita hanya bisa menerima dan berusaha menghindari agar tidak terkena dan terjangkit oleh wabah/pandemi COVID-19 ini. Senada dengan itu, Syatar mengungkapkan, COVID-19 menjadi bencana global yang tidak memilih targetnya berdasarkan pertimbangan agama, suku dan budaya serta aliran (Syatar et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mubaligh, terkait dengan umat Islam yang memiliki perbedaan madzhab/aliran atau pemikiran keagamaan kita menyikapi dengan menerima dan menghargai perbedaan tersebut sepanjang tidak menyimpang dari syariat Islam secara umum. Hal yang sama juga dilakukan terhadap agama lain, kita menghormati dan menghargai terhadap pilihan agama yang dianut dan hidup berdampingan saling harga menghargai. Lebih lanjut mubaligh menyebutkan bahwa, dengan adanya sikap saling menghormati, saling harga menghargai sesama antar umat beragama dan menjaga agar jangan sampai terjadinya konflik antar umat beragama. Dengan begitu keharmonisan antar umat beragama diharapkan selalu terjaga dimasa yang akan datang.

Selain itu, menurut mubaligh perlu menyikapi wabah/pandemi COVID-19dengan serius dan penuh dengan kehati-hatian. Hal ini disampaikan mengingat COVID-19 memiliki tingkat penularan yang sangat cepat. COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya infeksi pernafasan ringan seperti flu dan infeksi paru-paru, bahkan sampai berujung pada kematian. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kota Padang menunjukkan bahwa kota Padang termasuk zona merah dalam penyebaran pandemi COVID-19 sebanyak 661 kasus, sembuh 526 orang dan meninggal sebanyak 26 orang. Data ini mengisyaratkan kepada umat untuk mewaspadai pergerakan dan penyebaran virus COVID-19 dengan cepat. Adanya pandemi COVID-19 ini, mengingatkan kepada umat untuk mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan dengan membiasakan hidup bersih, disiplin, sering mencuci tangan, membiasakan diri mandi setelah bepergian atau keluar dari rumah, menjaga jarak (social dan physical distancing), selalu memakai masker, dan mengupayakan makanan yang dimakan memiliki gizi yang tinggi.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa sebagai umat Islam perlu meninjau kembali ajaran dan padangan keagamaan yang dianut selama ini. Hukum Islam memilik fleksibilitas yang menjadi dasar dari padangan keagamaan yang selama ini dijalankan. Melaksanakan ajaran agama semestinya didahulukan dari pelaksanaan kegiatan lainnya. Namun dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 saat ini menjaga kesehatan juga penting, pelaksanaan ajaran agama memiliki alternatif melalui rukhsah (keringanan) (Arsad, 2020). Artinya, kebiasaan selama ini melaksanakan shalat berjamaah di masjid bisa ditinggalkan dan menggantinya dengan melaksanakan shalat di rumah baik berjamaah maupun secara individu. Termasuk untuk tidak melaksanakan shalat Jumat sesuai dengan anjuran pemerintah dan fatwa MUI selama pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia (muamalah), bentuk kerja sama yang sudah dilakukan adalah dalam bentuk tidak mencampuri dan tidak mempengaruhi kegiatan keagamaan dan ritual ibadah masing-masing agama. Menghormati agama lain dan saling menghargai satu sama lain. Adapun kerja sama yang dilakukan pihak masjid dengan berbagai pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19, baru sebatas melaksanakan anjuran pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Belum ada masjid yang terlibat langsung dalam penanganan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di kota Padang.

b. Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

Harmoni dan kerukunan umat beragama juga terlihat ditengah-tengah masyarakat kota Padang, antara penganut muslim dan non muslim hidup dalam hubungan sosial yang harmoni. Sikap saling menghormati dalam bidang keagamaan dan non keagamaan

terlihat dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang keagamaan banyak kegiatan keagamaan yang digagas oleh umat Islam dibantu oleh non Islam termasuk pembangunan sarana ibadah (Sefriyono, 2014).

Integrasi sosial yang harmoni di kalangan masyarakat kota Padang antara Muslim dan non Muslim terjaga dengan baik. Ketika warga non Muslim mengadakan kenduri, mereka selalu mengundang tetangga mereka yang Muslim. Dalam acara makan mereka tetap memisahkan tempat makan antara Muslim dan Non Muslim. Begitu juga sebaliknya ketika yang punya hajat kenduri dari Muslim, mereka juga mengundang tetangga yang non Muslim tetap di undang walaupun mereka tidak masuk ke dalam masjid tetapi mereka disediakan tenda di luar masjid.

Selain hubungan antar umat beragama sebagaimana uraian di atas, kegiatan gontong royong juga sering dilakukan dalam rangka membersihkan rumah ibadah, melayat dalam acara kematian dan perayaan keagamaan hari raya Idul Fitri. Kegiatan sosial lainnya adalah arisan ibu-ibu yang ada di kelurahan. Terkait dengan hidangan yang disajikan dalam acara arisan, jika pelaksanaan arisan di rumah warga non Muslim maka makanan yang disajikan dibeli dari luar atau dipesan melalui katering. Hal ini dilakukan untuk menghormati warga Muslim terkait dengan kekhawatiran makanan yang disajikan bercampur dengan makanan tuan rumah yang kehalalannya menurut Islam diragukan.

Toleransi dalam keragaman agama antara Kristen dengan etnik Nias dengan Islam yang umumnya etnik Minangkabau, dan hubungan antar umat beragama yang harmoni dalam keragaman etnik dan agama berjalan dengan baik. Dengan memahami latar budaya mayoritas, dalam hal ini budaya Minangkabau oleh

penganut Kristen etnis Nias merupakan upaya yang baik dalam mempertahankan hubungan antar umat beragama yang harmoni di tengah mayoritas Minangkabau yang identik dengan Islam. Kondisi ini, semakin menyadarkan kelompok mayoritas dalam memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas dalam hal menunaikan hak-hak mereka seperti berkumpul atas nama agama untuk keperluan sosial maupun untuk keperluan kebaktian yang mereka perlukan.

c. Masjid sebagai Pusat Kontemplasi, Pusat Ritual dan Pusat Kajian

Al-Qur'an menyebutkan bahwa hakikat masjid adalah tempat untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah (QS. Al-JinL18). Masjid dibangun sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, dan mampu meningkatkan amaliah berupa pahala. Masjid semestinya dikelola dengan baik, dengan harapan dapat mewujudkan pembinaan umat maka proses pengelolaan dan sarana yang ada mampu memberikan kenyamanan bagi semua jamaah dari berbagai kalangan.

Secara sosiologis masjid diartikan sebagai tempat atau bangunan yang diperuntukkan bagi orang-orang Muslim untuk melaksanakan shalat wajib, shalat sunat baik dilakukan secara berjamaah maupun dilakukan secara sendiri. Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat Jumat (Muslim, 2004). Rasulullah saw. pada awal perjalanan dalam menyiarkan agama Islam, pertama sekali yang beliau lakukan adalah membangun masjid yang digunakan sebagai tempat untuk pengembangan ajaran Islam kepada umat dan pengikut beliau. Artinya, masjid digunakan sebagai tempat untuk membina umat yang berasal dari berbagai suku, ras dan agama. Masjid tidak saja digunakan sebagai tempat

shalat tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam dari perpecahan dan pengaruh konflik di antara umat, sebagai tempat pembinaan dan bimbingan terhadap umat Islam, dan tempat bermusyawarah untuk mengambil keputusan (Mulyono, 2017).

Keberadaan masjid sangat penting dalam membangun peradaban umat Islam dengan multi fungsi di antaranya adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat wajib, shalat Jumat, sebagai tempat zikrullah (Machendrawaty et al., 2020). Fungsi lainnya masjid adalah sebagai tempat pusat pendidikan dan pengajaran bagi umat Islam, sebagai pusat informasi Islam melalui dakwah, sebagai tempat menyelesaikan perkara hukum dan keadilan di kalangan umat Islam, dan sebagai tempat melakukan aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Selain itu masjid juga digunakan sebagai tempat melaksanakan shalat jenazah, dan upacara pernikahan.

d. Relasi Agama dan Negara

Moderasi beragama saat ini, mendesak untuk disosialisasikan dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat, mengingat telah terjadinya pergeseran etika berbangsa dan bernegara serta adanya ancaman disintegrasi di kalangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 pilar moderasi yang dikenal selama ini, yaitu komitmen dalam berbangsa dan bernegara, toleransi dan deradikalisme, dan anti terhadap perbuatan radikal. Sedangkan di dalam komitmen berbangsa dan bernegara sendiri juga ada empat pilar yang harus dipegang teguh oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Memperhatikan kondisi saat ini di kalangan masyarakat, dan berdasarkan wawancara dengan pengelola kegiatan pendidikan salah satu penyebab radikalisme itu antara lain adalah salah dalam

memahami ajaran agama, faktor kesenjangan ekonomi dan faktor sosial politik. Lebih lanjut diungkapkan oleh pengelola kegiatan pendidikan bahwa seseorang dapat dikatakan moderat apabila memiliki sifat terbuka, menyadari kelemahan, tawadhu atau tidak sombong, dan memiliki rasa kebersamaan untuk kemaslahatan umat semata. Selanjutnya masih menurut pengelola kegiatan pendidikan dalam hidup bermasyarakat sebaiknya bersikap tidak egois, tidak ekstrem, santun, tidak keras dalam berucap, tidak keras hati dan tidak memaksakan kehendak.

Sehubungan dengan itu, Islam merupakan agama yang moderat, bukan agama yang keras dan saling menghujat, melainkan Islam adalah agama yang saling menghargai dan saling menghormati. Artinya, dalam konteks pendidikan Islam moderasi beragama tidak hanya mengajarkan agama, dan tidak pula sekedar membentuk individu yang saleh secara personal, namun dalam mengajarkan agama juga harus mampu mengamalkan paham keagamaan yang sudah dimilikinya sebagai alat untuk menghargai dan menghormati umat beragama lainnya.

Berkaitan dengan esensi Pancasila relevan dalam menghadapi pandemi COVID-19-19, mubaligh menyatakan bahwa Pancasila masih relevan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan karena pandemi COVID-19adalah wabah yang sangat cepat penularannya, oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk bersatu dalam mencegah penularan COVID-19. Tanpa kerja sama yang baik di antara unsur masyarakat yang ada, penyebaran pandemi COVID-19 sulit ditanggulangi.

e. Cara Penyelesaian Masalah

Pandemik COVID-19 saat ini telah menjadi wabah hampir di seluruh dunia, memiliki dampak yang besar bagi seluruh

sendi-sendi kehidupan manusia. Wabah pandemik COVID-19 merupakan penyakit yang berasal dari virus yang tidak kelihatan jika dilihat dengan kasat mata, namun mampu meluluh lantakan aspek dan dimensi kehidupan yang juga telah mengubah pola dan cara hidup manusia saat ini. Dalam istilah undang-undang, wabah penyakit menular (1984) disebutkan "wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka". Nabi Muhammad saw. dalam sebuah riwayat memperingatkan kaum Muslim bahwa jika wabah melanda suatu wilayah yang mereka tidak ada di sana, maka mereka tidak boleh memasukinya (Rusyana et al., 2020).

Presiden Republik Indonesia dalam pernyataan resminya menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam). Pernyataan presiden tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengisyarakatkan bahwa dalam menanggulangi pandemi ini semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan pandemi COVID-19. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar pelaksanaan PSBB bukanlah suatu hal yang mudah, terutama berkaitan dengan kebijakan dari sisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut mensyaratkan banyak perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-

hari. Umat Islam harus siap mengubah kebiasaan beribadah secara berjamaah di mesjid menjadi beribadah di rumah masing-masing.

Berkaitan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 yang menghimbau untuk tidak mengadakan shalat Jumat dan shalat jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang penularan pandemi COVID-19 berada pada zona merah. Fatwa ini juga mengharamkan orang yang terinfeksi wabah tersebut untuk datang shalat Jumat dan shalat jamaah di masjid. Berbagai organisasi masyarakat baik dari NU, Muhammadiyah, lembaga-lembaga keagamaan lainnya maupun para tokoh agama mendukung fatwa MUI ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, berdasarkan wawancara dengan penceramah dan mubaligh Masjid Raya Padang menyatakan bahwa sebagai umat beragama kita menyikapi bahwa wabah ini terjadi adalah kehendak Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemik COVID-19 tidak melanda negara kita saja tetapi melanda seluruh dunia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri dan meningkatkan imun tubuh dan menjaga kesehatan supaya jangan sampai tertular dengan pandemik COVID-19.

Senada dengan uraian di atas, mubaligh/penceramah Masjid Raya Ganting menyatakan bahwa dalam keadaan wabah melanda sebuah negeri, maka hukum Islam rukhshah (keringanan) dalam melaksanakan ibadah dapat dilaksanakan karena ada dalil yang membolehkannya pernyataan ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Arsad, 2020). Misalnya pelaksanaan shalat Jumat bagi laki-laki hukumnya wajib, namun karena adanya pandemi COVID-19, maka pelaksanaan shalat Jumat di mesjid dapat diganti menjadi shalat

zuhur yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sudah menggariskan bagaimana cara penanganan yang harus dilakukan melalui menteri kesehatan, maka kita sebagai masyarakat tentu saja mengikuti pada arahan dan aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah demi kemaslahatan hajat hidup orang banyak.

Kebijakan terkait dengan perubahan pelaksanaan ibadah terutama umat Islam di kota Padang bervariasi oleh masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi sebagian masyarakat yang tidak setuju menyikapi dengan tidak mematuhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tetap melaksanakan ibadah di masjid baik shalat wajib, shalat Jumat maupun shalat tarawih selama bulan puasa. Bagi kasus seperti ini takmir masjid diundang oleh pihak pemerintah untuk bermusyawarah bersama tokoh agama dan pemuka masyarakat setempat. Bermusyawarah dengan tujuan untuk memberikan penyadaran dan memberikan penjelasan berkaitan dengan pencegahan dan penyebaran pandemi COVID-19. Akhirnya setelah melakukan dialog takmir masjid dan jamaah serta masyarakat dapat memahami dan kemudian melaksanakan kebijakan yang diambil pemerintah dan fatwa MUI. Namun dalam pelaksanaannya masih saja ada masjid yang tetap melaksanakan ibadah secara sembunyi, jika ada razia dari satpol PP yang datang mereka bubar, namun keesokan harinya mereka kembali melakukah ibadah di masjid.

6. Isu Keagamaan yang Sering Berkembang di Masyarakat dan Respons Masjid dalam Bentuk Moderasi Beragama

a. Komitmen Kebangsaan

Keberadaan agama di Indonesia dijamin secara konstitusional yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29. Negara menjamin keberadaan bagi stiap orang untuk memeluk dan mengamalkan agamanya serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Setiap orang wajib mematuhi batasan-batasan yang dibuat melalui undang-undang untuk mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moralitas, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu tatanan masyarakat demokrasi. Berkaitan dengan itu, pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi, dan sebaliknya watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah dan suka bergotong royong.

Prinsip-prinsip konstitusional bagi pengakuan atau jaminan terhadap eksistensi setiap penganut agama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menjadi dasar bagi pengelolaan keragaman agama di kota Padang. Artinya, prinsip-prinsip konstitusional ini menjadi landasan yang kuat dalam melakukan pelayanan sosial dan agama oleh pemerintah kota Padang dan masyarakat dengan latar keragaman agama yang ada.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perbedaan madzhab bagi masyarakat dan jamaah di kota Padang saat ini tidak menjadi persoalan dalam hubungan internal umat beragama. Perbedaan madzhab sudah terpolarisasi pada masjid-masjid tertentu dengan jamaah yang menggunakan madzhab tertentu pula. Bagi masjid yang dibina oleh Pemerintah Daerah yang juga dikenal dengan masjid pemerintah, segala kegiatan dan aktivitas yang

dilakukan mengacu kepada aturan dan garisan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sedangkan masjid yang didirikan dan dibangun dengan swadaya masyarakat, masjid ini bebas memilih mengikut salah satu madzhab sesuai dengan keinginan masyarakat dan jamaah di mana masjid itu didirikan.

Berdasarkan uraian di atas, khatib maupun penceramah selalu mengakomodir lintas madzhab, terutama pada masjid Raya Padang, karena jamaah yang datang beragam. Takmir masjid sebagai pengelola kegiatan masjid berusaha mendatangkan penceramah yang dapat mengakomodasi lintas madzhab, sehingga apa yang disampaikan oleh penceramah tidak menimbulkan keresahan bagi jamaah yang datang. Begitu juga untuk masjid Raya Ganting, masjid Ikhwatan, dan Masjid Kuaro Kapalo Banda sudah memiliki penceramah tetap dan jika ingin mendatangkan penceramah lain, penceramah yang diundang yang sudah diperkirakan oleh takmir masjid penceramah yang disukai terutama oleh jamaah masing-masing masjid.

Perlakuan yang sama juga dilakukan oleh takmir masjid dalam hal berkaitan dengan ritual ibadah dan isi ceramah atau materi pembelajaran yang disampaikan oleh penceramah, takmir masjid juga berusaha mencari penceramah yang dapat mengakomodasi ragam madzhab dan menghargai berbagai paham keagamaan. Dalam menyampaikan ceramahnya, penceramah berusaha berdiri ditengah-tengah madzhab yang ada dan tidak menyinggung atau menjelek-jelekan salah satu madzhab. Selain peran takmir dalam memilih penceramah, biasanya penceramah sendiri juga sudah tahu apa yang akan disampaikan terkait dengan isi/materi ceramah. Misalnya, untuk masjid Raya Padang isi/materi ceramah

disampaikan secara umum tidak memihak kesalah satu madzhab. Namun, jika terjadi isi/materi ceramah yang disampaikan oleh penceramah tidak disukai atau tidak sesuai dengan harapan jamaah, maka oleh takmir masjid penceramah tersebut tidak diundang lagi pada masa yang akan datang.

Masjid Ikhwatun, dan Masjid Kurao Kapalo Banda, penceramah ditentukan sendiri oleh takmir masjid atas permintaan jamaah. Begitu juga dengan isi/materi yang akan disampaikan berkaitan dengan madzhab/paham keagamaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat atau jamaah yang ada di sekitar masjid tersebut.

Takmir masjid dalam hal terjadi masalah baik terkait dengan penceramah maupun terkait dengan isi/materi ceramah yang disampaikan, maka takmir masjid bersikap netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun, sejauh ini permasalahan dapat diatasi dengan musyawarah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi ini menunjukkan bahwa takmir masjid sudah mengimplementasikan moderasi beragama dalam praktik pengelolaan masjid pada masjid Raya Padang, Masjid Raya Ganting, Masjid Ikhwatun dan Masjid Kurao Kapalo Banda. Hal ini juga disampaikan oleh takmir masjid Ikhwatun yang menyatakan bahwa sebagai pengelola masjid kita tidak boleh berpihak pada jamaah atau penceramah jika terjadi ketidak puasan jamaah terkait dengan isi/materi ceramah yang disampaikan. Takmir masjid harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan tidak berpihak pada jamaah atau penceramah. Hal yang sama juga disampaikan oleh takmir masjid Kurao Kapalo Banda, takmir masjid bersikap netral jika ada permasalahan dalam pengelolaan masjid.

Budaya masyarakat Indonesia, khususnya kota Padang adalah melakukan kegiatan ibadah di masjid seperti pelaksanaan shalat

wajib dan shalat Jumat. Namun, pada saat pandemi COVID-19 kegiatan ibadah di masjid dibatasi, untuk mencegah lajunya penyebaran COVID-19 di masjid. Sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pengaturan penggunaan rumah ibadah pada masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE: 1 tahun 2020 yang mengatur tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada rumah ibadah. Surat edaran ini berisi tentang pentingnya mencegah penyebaran COVID-19 di rumah ibadah dengan menganjurkan jajaran instansi Kementerian Agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Imam Masjid Kurao Kapalo Banda diketahui bahwa sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah agar penyebaran COVID-19dabat ditanggulangi ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di berbagai kecamatan di kota Padang, masyarakat terpolarisasi dalam merespons pandemi COVID-19. Sebagian masyarakat merespons dengan beranggapan bahwa wabah pandemi COVID-19 telah menjadi penghalang bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah di masjid. Sedangkan sebahagian yang lain masyarakat merespons dengan menerima pandemi COVID-19 ini sebagai musibah dan ini juga merupakan teguran Allah swt. kepada manusia. Sebagian yang lainnya, masyarakat berperan aktif dalam penanganan wabah pandemi COVID-19. Respons masyarakat yang bervariasi ini disebabkan oleh pengaruh teologis yang dianut, yaitu Jabbariyah dan Qadariyah serta pengaruh Islam Progresif. Pengaruh teologi Jabbariyah membawa respons masyarakat kepada sikap fatalisme, sedangkan pengaruh teologi Qadariyah membawa respons masyarakat kepada sikap menerima wabah pandemi COVID-19 sebagai musibah yang disebabkan kesalahan manusia. Adapun

pengaruh teologi Islam progresif membawa respons masyarakat sikap yang lebih moderat dalam menafsirkan Islam yang berakar pada konsep Maqasid al-syariah untuk mendahulukan pencegahan madharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma'ruf nahi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial (Hidayat, 2020).

Berkaitan dengan uraian di atas, berdasarkan observasi, fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 terlaksana pada kecamatan dengan zona merah. Zona merah artinya kecamatan di Kota Padang di mana warganya ada yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Pada kecamatan seperti ini sebagian tempat berjalan efektif. Tidak ada shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat tarawih di bulan Ramadhan. Namun disisi lain, baik di kecamatan zona merah, kuning, oranye atau bagi masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui status kecamatan di mana mereka tinggal, masih banyak masjid yang melaksanakan shalat lima waktu, shalat Jumat, dan shalat Tarawih semenjak awal Ramadhan seperti biasa, misalnya masjid Ikhwatun dan masjid Kurao Kapalo Banda.

Berdasarkan wawancara dengan jamaah masjid Ikhwatun dan masjid Kurao Kapalo Banda diketahui bahwa selama pandemi COVID-19, mesjid Ikhwatun dan masjid Kapalo Banda tetap melaksanakan ibadah seperti biasa baik ibadah shalat lima waktu, shalat Juma'at maupun shalat Tarawih. Walaupun jamaah yang hadir tidak sebanyak yang hadir seperti biasanya. Ketika melaksanakan shalat lima waktu, shalat Jumat dan shalat tarawih di mesjid, pengurus masjid tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggulung tikar masjid, menyediakan tempat cuci tangan, membawa sajadah dari rumah, berwudhu di rumah masing-

masing, memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk masjid dan menjaga jarak.

Menyikapi sikap masyarakat yang bervariasi terkait dengan fatwa MUI ini, pemerintah dan MUI tidak dapat berbuat banyak. Ada masjid yang dalam pelaksanaan shalat tarawih didatangi Satpol PP dan menegur pengurus masjid yang akan melaksanakan shalat tarawih, setelah berdialog akhirnya malam itu shalat tarawih ditiadakan dan jamaah dibubarkan, namun keesokan harinya, adzan tidak terdengar, shalah wajib dan shalat tarawih tetap dilaksanakan secara sembunyi bahkan ada yang mematikan lampu saat shalat sedang dilaksanakan. Menyikap kondisi ini MUI kota Padang sampai mengeluarkan pernyataan, jika masih ada masjid yang tetap melaksanakan ibadah shalat di masjid, selain mengikuti protokol kesehatan, jika ada jamaah yang tertular COVID-19 pengurus masjid harus bertanggung jawab termasuk bertanggung jawab dalam biaya pengobatan jamaah yang positif COVID-19. Dengan adanya pernyataan MUI tersebut ada pengurus masjid yang menghentikan kegiatan ibadah, tetapi tetap saja masih ada masjid yang melaksanakan kegiatan ibadah di mesjid.

b. Toleransi

Pemerintah kota Padang mengakui hak-hak beragama masyarakat, seperti hak beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini tercermin dalam bentuk saling menghormati dan menghargai setiap penganut agama sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut serta beribadah sesuai dengan sarana ibadah yang dimiliki. Setiap pemeluk agama di kota Padang memiliki rumah ibadah sebagai sarana untuk beribadah, walaupun bagi komunitas agama minoritas hal ini menjadi problematik. Masyarakat Muslim sebagai penduduk mayoritas memiliki sebanyak 680 masjid dan

sebanyak 676 mushalla, sebanyak 6 buah gereja, dan 4 tempat ibadah lainnya seperti Klenteng untuk penganut agama Budha. Bagi penganut agama lainnya seperti Konghucu masih ada yang beribadah di lembaga keagamaan yang tidak memiliki izin dan ada yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, hak pendirian rumah ibadah baru terutama bagi kelompok minoritas seperti Katolik, Kristen dan penguat agama minoritas lainnya masih mengalami kendala dalam bentuk sulitnya memperoleh izin pendirian rumah ibadah. Justru itu penganut agama minoritas mendirikan rumah ibadah tanpa izin dan menjadikan rumah tempat tinggal, gedung pertemuan, dan ruko sebagai tempat ibadah. Perjuangan mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas di kota Padang terkait dengan persoalan adat dan budaya Minangkabau yang terintegrasi dengan Islam. Dalam adat Minangkabau tanah dan teritorialnya merupakan hal yang sangat penting. Bagi sebagian tokoh adat, tanah di Minangkabau hanya diizinkan untuk pendirian rumah ibadah umat Islam. Hal ini disebabkan adat Minangkabau identik dengan Islam sebagaimana falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah.

Sehubungan dengan itu, pada awalnya kondisi ini menimbulkan gesekan sosial di tengah-tengah masyarakat, namun tidak sampai menjadi konflik antar pemeluk agama yang ada di kota Padang. Saling hormat menghormati dan saling harga menghargai terhadap kegiatan dan ritual keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama setempat merupakan bentuk toleransi yang tinggi di antara antar umat beragama di kota Padang.

Permasalahan yang timbul di antara antar umat beragama, dapat diselesaikan dengan mempertemukan pemuka agama

masing-masing agama dan melakukan dialog dan bermusyawarah yang dimediasi oleh pemerintah kota Padang yang dikenal dengan 'rembuk warga'. Dengan adanya rembuk warga semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pemeluk agama minoritas dapat melaksanakan ritual keagamaannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Berkaitan dengan perbedaan internal umat beragama sebagaimana sudah dijelaskan di atas, takmir masjid, khatib, penceramah, maupun ormas keagamaan mengakomodasi lintas mazhab yang terlihat dalam isi/materi ceramah agama yang disampaikan para mubaligh. Isi atau materi ceramah diupayakan untuk tidak menyinggung kelompok lain serta mengakomodasi sumber bacaan yang menjelaskan lintas madzhab sehingga semua perbedaan paham keagamaan dapat menerima perbedaan tersebut dengan dalil-dalil yang disampaikan. Hal yang sama juga terlihat pada takmir masjid, di mana takmir masjid menjadi penengah dalam mengimplementasikan pandangan keagamaan yang berbeda. Sehubungan dengan pendapat tentang ragam tafsir dan pemahaman keagamaan terhadap pandemi COVID-19 juga sudah banyak disampaikan oleh para penceramah dan mubaligh dalam ceramah yang disampaikan.

c. Anti Kekerasan

Sebagaimana yang juga telah diuraikan di atas, apabila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara takmir masjid, khatib, imam, mubaligh maupun pengelola kegiatan pendidikan, hal utama yang dilakukan adalah memanggil pihak-pihak terkait lalu melakukan musyawarah dan dialog dalam rangka mencari solusi atau jalan tengah dalam menyelesaikan kesalahpahaman. Dalam hal melakukan musyawarah dan berdialog, sebelum dimulai kepada

pihak yang berselisih paham diingatkan untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian atau menjelekkan salah satu pihak.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pendekatan agama antara lain takmir masjid memberitahukan kepada masyarakat dan jamaah melalui pesan berantai dari mulut ke mulut tentang pandemi COVID-19. Proses penularan COVID-19 dan tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi termasuk untuk tidak melaksanakan ibadah di mesjid dan cukup di rumah saja, misalnya dalam adzan menyerukan bahwa pelaksanaan shalat ibadah cukup di rumah saja. Upaya lain yang dilakukan seperti Masjid Raya Ganing Padang membuat spanduk Tatanan Kehidupan Baru (New Normal Masjid Ganting) Kota Padang) yang dipasang pada sisi kanan dan kiri pintu masuk masjid.

d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya Minangkabau memilik sifat egaliter, demokratis, dan sintetik, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan lainnya. Budaya Minangkabau memiliki falsafah adat Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitanullah (ABS-SBK). ABS-SBK merupakan landsan atau prinsip pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku yang sudah ada dalam masyarakat Minangkabau sejak dulu kala. Filosofi dari ABS-SBK adalah syarak mangato adat mamakai, yang artinya segala ketentuan dalam adat diimplementasikan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Masyarakat Minangkabau tidak kaku dalam keragaman, masyarakat Minangkabau dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan sangat terbuka. Hal ini terlihat

bahwa masyarakat Minangkabau dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Masyarakat Minangkabau juga dapat menerima tradisi, budaya perilaku keagamaan lainnya, sepanjang tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Dalam beberapa kasus ada pemahaman yang menolak kearifan loka secara mutlak, dan ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal pula ada tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam, dan ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak boleh dipakai, sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam boleh dipakai. Dengan begitu secara umum masyarakat Minangkabau sangat moderat terhadap budaya lokal yang berdasarkan kepada syarak sesuai dengan ajaran Islam.

7. Respons Jama'ah dan Masyarakat terkait Ide Pendidikan Moderasi Beragama

Hubungan antara masjid dengan pendidikan senantiasa menjadi salah satu karakteristik utama sepanjang sejarah Islam. Sejak awal, masjid merupakan pusat komunitas Islam, sebuah tempat untuk berdoa, meditasi, pengajaran agama, diskusi politik, dan sekolah (Mulyono, 2017). Dalam sejarah pendidikan Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Sebagai lembaga pendidikan, masjid merupakan pusat berlangsungnya proses pendidikan Islam, dilingkungan masjid dibangun tempat dan ruangan yang digunakan untuk belajar. Masjid dalam fungsinya sebagai pusat kebudayaan, merupakan markas bagi kegiatan sosial, politik budaya dan agama.

Sehubungan dengan fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan, masjid tidak hanya digunakan untuk tempat pendidikan orang dewasa (laki-laki), tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar bagi kaum wanita dan anak- anak. Bagi orang dewasa, masjid berfungsi sebagai tempat belajar al- Qur’an, hadits, fiqh, dasar-dasar agama, bahasa dan sastra Arab. Pendidikan dan pengajaran bagi kaum wanita diberikan satu kali seminggu. Mereka diajarkan al-Qur’an, hadits, dasar-dasar agama dan keterampilan menenun atau memintal. Pendidikan anak-anak juga diberikan di masjid, dalam pendidikan mereka disatukan tanpa adanya pembagian kelas. Anak-anak orang Islam yang sudah berumur enam tahun diharuskan belajar al-Qur’an, agama, bahasa Arab, dan berhitung, untuk seterusnya diajarkan pula menunggang kuda, berenang dan memanah (Mulyono, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa masjid merupakan tempat proses pendidikan dalam hal belajar dan praktik agama, mencari kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai agama yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Di samping itu, masjid juga digunakan untuk mendakwahkan agama yang sudah dipelajari untuk diberikan kepada orang lain sebagai panduan dalam kehidupan.

Terkait dengan moderasi sebagai cara pandang (perspektif) dalam menentukan arah penyebaran ajaran agama di masjid, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa masjid memang harus menjadi penggerak utama dalam mewujudkan moderasi melalui penyebaran agama. Masjid sebagai pusat dakwah ajaran Islam tidak memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu kelompok, dan jika terjadi

perbedaan pendapat dapat dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencari solusi.

Sehubungan dengan itu, takmir sebagai motor penggerak dalam kegiatan atau aktivitas di masjid harus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan terhadap jamaah, sehingga cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi netral, bertindak adil dan tidak ekstrem. Artinya, takmir mesjid selalu menjadi penengah terhadap persoalan yang menjadi kegaduhan dan keresahan di tengah jamaah dan masyarakat yang bersumber dari penyampaian ajaran agama. Masyarakat membutuhkan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong moderat dan tidak menunjukkan keberpihakan atau ekstrem. Ukuran moderat atau ekstrem jika terjadi pada jamaah atau masyarakat dapat diperbaiki dan diluruskan dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya seperti Al-Qur'an dan sunah, aturan dalam konstitusi negara, kearifan lokal dan kesepakatan bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus (Syatar et al., 2020).

Terkait dengan pandemi COVID-19, berdasarkan wawancara dengan pengurus Ormas Keagamaan dapat diketahui bahwa masyarakat diharapkan mematuhi anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama. Menurut pengurus Ormas Keagamaan sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Umat sebaiknya menjaga keselamatan diri dan masyarakat dari penularan pandemi COVID-19 salah satunya dengan tidak melaksanakan ibadah di masjid, tetapi melaksanakan ibadah di rumah, meningkatkan pemahaman tentang fiqh berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kedisiplinan dalam berperilaku, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak,

sering mencuci tangan, membiasakan hidup bersih merupakan sikap dan perilaku yang harus dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini.

8. Penggagas atau Inisiator Pendidikan Moderasi Beragama

Istilah Wasathiyah berasal dari Al-Qur'an yang berarti umat yang ditengah-tengah, umat yang bersikap adil tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sedangkan Islam Wasathiyah merupakan Islam yang moderat, namun bukan berarti memudahkan atau tidak memiliki prinsip dalam melaksanakan ajaran agama dan meninggalkan ibadah sama sekali. Selain itu, Islam Wasathiyah memiliki kecenderungan memilih yang mudah dan tidak berlebihan dalam segala hal, beribadah tanpa kehilangan sisi manusiawi, dan beribadah juga harus bersikap adil. Paham Islam Wasathiyah juga tidak boleh melakukan paksaan dalam beragama (Nadirsyah Hosen: 2019).

Sehubungan dengan uraian di atas, Pengurus MUI kota Padang menyatakan bahwa dalam memilih penceramah, takmir masjid sebaiknya memilih penceramah yang dapat menyampaikan ceramah dalam tausiahnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam Wasathiyah seperti bersikap adil dan tidak memaksa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sikap penceramah yang justru terkadang terjebak menghakimi orang lain dan menjelek-jelekkan paham keagamaan yang dianut kelompok lain dalam menyampaikan ceramahnya.

Berkaitan dengan itu, materi ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah harus mampu menyesuaikan pada keadaan dan latar belakang jamaah di mana ia akan berceramah. Penceramah agama harus mampu bersikap dan berada ditengah-tengah keragaman, perbedaan paham keagamaan serta mampu

bersikap kapan harus tegas dan kapan saat bersikap lunak dalam penyampaian materi ceramah di tengah jamaah yang beragam. Selanjutnya penceramah harus mampu menjadi penengah dari ajaran yang kaku di satu sisi dan menjadi perekat bagi jamaah yang memiliki paham keagamaan yang berbeda disisi lain sehingga moderasi beragama yang diharapkan dapat terwujud ditengah-tengah masyarakat. Ciri terakhir dari Islam Wasathiyah adalah keseimbangan, seimbang di sini maksudnya adil dalam membagi porsi dalam beribadah. Keseimbangan juga dapat dicontohkan adil dalam hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Porsi di antara kedua harus seimbang antara dunia dan akhirat.

9. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Masjid Raya Padang memiliki area yang luas yang dapat menampung 5.000 – 6.000 jamaah yang berasal dari berbagai daerah, karena masjid Raya Padang merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Masjid Raya Ganting memiliki area dan ruangan yang luas untuk melakukan kegiatan keagamaan, sebagai masjid tertua di kota Padang. Hal yang sama juga terlihat pada Masjid Ikhwatun dan Masjid Kurao Kapalo Banda sebagai masjid yang didirikan dengan swadaya masyarakat juga memiliki area yang cukup untuk menampung jamaah tetap yang berada di sekitar masjid.

b. Takmir masjid bersikap terbuka dan mau menerima masukan dari jamaah dan berbagai pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk dalam memilih penceramah dan mubaligh.

c. Secara umum masyarakat bersikap terbuka dan dapat menerima keberadaan agama lain dan saling menghormati antar umat beragama dan dapat hidup berdampingan dengan harmoni. Begitu juga dengan antar internal umat beragama dapat menerima perbedaan madzhab, aliran atau perbedaan pemikiran keagamaan.

d. Takmir masjid peduli terhadap pandemi COVID-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan ibadah shalat wajib, shalat Jumat dan shalat untuk menghindari penyebaran COVID-19.

2. Faktor Penghambat

a. Sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, sehingga ada yang melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah-rumah, ruko dan gedung pertemuan.

b. Masih ada masjid-masjid yang tetap melaksanakan ibadah shalat wajib, shalat Jumat, dan shalat tarawih selama pandemi COVID-19, walaupun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

B. Penutup

Secara histori dan syar'i fungsi masjid tidak saja sebagai tempat ibadah umat Islam, lebih dari itu masjid juga berfungsi sebagai sentral pendidikan sosial, budaya dan politik. Masjid juga merupakan tempat pemersatu umat dari perpecahan dan perbedaan madzhab dan pandangan keagamaan yang berbeda baik internal umat beragama maupun gesekan sosial yang terjadi antar umat beragama. Dengan demikian selain berfungsi sebagai tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai pemersatu umat yang pada akhirnya menciptakan hubungan inter umat beragama dan hubungan

antar umat beragama yang harmoni, hidup berdampingan, saling menghargai dan saling menghormati dalam melaksanakan ibadah dan ritual keagamaan masing-masing.

Masjid sebagai pusat pendidikan umat telah melaksanakan pembelajaran agama kepada jamaah yang disampaikan oleh mubaligh di masjid. Dalam hal ini takmir masjid berusaha memilih penceramah yang netral terhadap perbedaan madzhab atau perbedaan pemahaman keagamaan, begitu juga dengan isi/materi ceramah yang disampaikan tidak menjelek-jelekkan kelompok lain yang berbeda pada hal keagamaan. Takmir masjid bersikap netral dan berada ditengah-tengah jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan kegiatan keagamaan di masjid-masjid telah menerapkan moderasi beragama. Hal ini terlihat dari takmir masjid, khatib, imam dan pengelola kegiatan pendidikan keagamaan bersikap netral dan berada di tengah-tengah berkaitan dengan terjadi ketidak sepahaman dalam mengelola masjid. Hal yang sama juga terlihat dalam hal memilih mubalig dan menetapkan isi/materi yang akan disampaikan oleh penceramah.

Berkaitan dengan pandemi COVID-19 pemerintah telah menetapkan bencana nasional non bencana alam. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan MUI sebagai lembaga independen mengeluarkan fatwa No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Regulasi ini sejatinya acuan bagi umat Islam dan masyarakat dalam menyikapi pandemi COVID-19. Fatwa ini sepatutnya dijadikan dasar pelaksanaan ibadah di masjid dalam rangka mencegah

kemudharatan dan memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19.

Takmir masjid dan masyarakat di kota Padang, dalam menyikapi himbauan pemerintah dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ditanggapi beragam oleh masyarakat. Pada kecamatan dengan tingkat penyebaran pandemi COVID-19 berada dalam zona merah himbauan pemerintah dan fatwa MUI terutama dalam pelaksanaan ibadah di masjid efektif dilaksanakan terutama masjid yang dibina oleh pemerintah daerah. Namun kecamatan yang berada pada zona selain merah, masyarakat tetap melaksanakan ibadah terutama shalat lima waktu dan shalat Jumat apalagi masjid yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Terkait pelaksanaan ibadah di mesjid ini, takmir masjid, jamaah dan masyarakat sudah diberi pemahaman oleh pihak-pihak terkait seperti pemuka agama, satpol PP, namun takmir masjid, jamaah dan masyarakat masih saja tetap melaksanakan ibadah di masjid walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti pakai masker, berwudhu di rumah, mencuci tangan sebelum masuk masjid, membawa sajadah dari rumah dan menjaga jarak.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Agung Al Muhajirin Pancoran Mas, Masjid Raya Cinere, dan Masjid Jami' Al Istiqomah Mampang Kota Depok

Oleh: Elma Haryani

A. Temuan dan Pembahasan

1. Moderasi Beragama di Masjid Agung Al Muhajirin Depok

a. Deskripsi Moderasi Beragama

Masjid Agung Al Muhajirin ini terletak di Jl. Nusantara Raya No.313, Depok Jaya, Pancoran Mas, Jawa Barat. Bangunan Masjid al-Muhajrin ini didirikan pada tahun 1984 di atas bangunan luas tanah ±5504 m2. Secara status tanah masih belum wakaf. Masjid berdiri sendiri tidak di dalam tanah wakaf yayasan. Masjid masih dalam koridor tanah fasilitas sosial yang dimiliki perumnas, yang sekaligus menjadi milik pemerintah daerah.

Lokasi masjid berada di jalan satu arah, namun cukup mudah untuk dijangkau. Lokasinya yang berdekatan dengan pasar tradisional, membuat banyak orang dapat dengan mudah untuk menjalankan ibadah. Sebarang jalan ada pasar. Jadi sangat ramai ketika pasar masih buka. Penjual pasar yang dekat dengan jalan raya lebih memilih menyeberang jalan untuk menuju masjid, dibanding masjid yang ada di dalam pasar itu sendiri.

Masjid Al Muhajirin tidak pernah sepi, karena lokasinya di kompleks gedung sekolah. Pada jam waktu shalat dhuhur bergantian untuk berjamaah shalat dhuhur, karena tidak cukup kalau berbarengan. Ada gelombang masyarakat umum, gelombang siswa sekolah, biasanya siswa sekolah lebih dari satu gelombang, bisa sampai tiga gelombang jamaah. Jadinya pas waktu dhuhur ramai. Pada masa pandemi seperti sekarang ini agak sepi karena sekolah belum aktif. Belum lagi para musafir yang transit untuk melakukan shalat. Di samping memang sejak pandemi ada pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Dalam masjid terlihat garis silang yang konsisten, tempat cuci tangan depan pintu masuk dan pelaksanaan shalat Jumat di rumah sampai PSBB di buka.

Jamaah tetap berasal dari warga yang tinggal sekitar masjid, itu pun tidak banyak dan para pedagang di sekitaran masjid. Kebanyakan jamaah dari orang luar yang transit, karena lokasinya sangat strategis memudahkan orang untuk melaksanakan shalat di masjid ini.

Wajah moderasi beragama tampak dalam beberapa hal sebagai berikut: pertama, di lihat dari bentuk arsitektur Masjid Agung Al Muhajirin Depok bergaya bangunan masjid Pancasila yang diusung oleh Presiden Suharto pada zamannya. Masjid ini dibangun pada

tahun 1984. Menjadi ciri masjid Pancasila adalah bangunannya yang khas nusantara, beratap tiga tingkatan dan ujung puncaknya ada segi lima yang menimbulkan lima sila dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa masjid dibangun dapat dipastikan dalam kerangka menjaga komitmen kebangsaan, satu ciri moderasi beragama di Indonesia

Kedua, masjid ini mengembangkan nilai toleran, yaitu masjid yang tidak eksklusif dan dikuasai oleh suatu kelompok paham keagamaan. Semua umat terayomi dan bebas melaksanakan ibadah. Dari kegiatan-kegiatan yang ada relatif diperuntukkan untuk memahamkan Islam secara umum, dan tidak ada tendensi berpihak kepada sebuah kelompok keagamaan. Untuk menjaga kemajemukan jamaah, sehingga masjid tidak dikuasai oleh golongan tertentu, masjid Muhajirin Depok memosisikan masjid untuk semua (Masjid for All). Karena itu bentuk-bentuk ceramah yang dilakukan di masjid ini dihindari kesan penceramah yang ingin menggiring jamaah pada paham tertentu dan berbeda dengan paham umum yang mengayomi segala golongan.

Ketiga, masjid ini mengampanyekan dakwah atau transformasi keagamaan yang tidak menggunakan kekerasan. Kegiatan yang mendukung ini adalah kajian tentang sikap ramah terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif pengurus menggelar seminar parenting di Masjid Al Muhajirin. Seminar ini banyak dihadiri oleh para pasangan muda. Banyak dari mereka yang baru menyadari pentingnya membersamai tumbuh kembang anak.

Keempat, dari segi kearifan terhadap budaya lokal tampak dalam pilihan arsitektural yang lebih memilih konsep nusantara di mana kebanyakan bangunan konsep masjid lebih menyerupai bangunan gunung yang menjadi warna utama tekstur topografi

bangunan tinggi di wilayah kepulauan Indonesia. Arsitektur jenis ini dipandang paling cocok dengan iklim wilayah Indonesia yang memiliki curah hujan dan angin yang tinggi.

b. Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Al-Muhajirin

Selain sebagai tempat ibadah lima waktu, Masjid Al Muhajirin juga memberikan layanan pendidikan keagamaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), santunan sosial untuk yatim piatu dan dhuafa' dan menjadi tempat untuk berbagai kegiatan pemberdayaan sosial.

Kegiatan pengajian TPA dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada setiap sore pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Kegiatan dimulai habis Ashar dan berakhir sampai jam 17.00. Saat ini, jumlah santri yang belajar di TPA Al Muhajirin sebanyak 30 santri, terdiri dari siswa jenjang setingkat SD dan SMP. Proses pembelajaran di TPA ini melibatkan 4 Ustadz.

Kegiatan sosial santunan yatim piatu dan dhuafa dilakukan pengurus Masjid Al Muhajirin sebulan sekali. Ada sekitar 30-45 anak yatim piatu dan terlantar yang di santuni. Sumber santunan diperoleh dari donator dan tromol DKM (kotak amal). Pemberian santunan tidak di batasi dengan zonasi komplek, pemberian santuanan di berikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Kegiatan non DKM adalah kegiatan yang di inisiasi oleh orang di luar pengurus DKM. Bentuk kegiatannya bisa dalam pengajian umum, training, kajian tematik. Yang sering memakai masjid Agung Al Muhajirin adalah Komunitas Fokus Fajri. Di mana kegiatan ini lebih pada komunitasnya sendiri, dan jarang sekali di luar komunitas tersebut ikut dalam pengajiannya. Ada juga komunitas lain memakai masjid untuk kegiatan keagamaan.

Peran Masjid Al Muhajirin tidak lepas dari Yayasan Pembangunan Islam (YPI). Peran dari YPI ini menjadikan masjid Al Muhajirin banyak dikunjungi oleh jamaah, di dukung dengan kegiatan keagamaan siswa dan kegiatan jamaah pada waktu shalat Dhuhur dan Ashar. Kepengurusan tidak serta merta di topang dari orang YPI saja, namun dari berbagai kalangan bisa menjadi pengurus dan di perbolehkan memakmurkan masjid.

Kebijakan pendidikan pada masjid ini mengakomodasi lintas mazhab. Mengakomodasi ritual peribadatan ragam mazhab. Isi ceramah/khutbah atau materi pembelajarannya menghargai berbagai paham keagamaan serta tidak menjelek-jelekkan kelompok lain. Mengakomodasi sumber bacaan kitab-kitab lintas mazhab. Adapun jamaah pengajiannya adalah masyarakat perkotaan yang notabene sibuk dengan aktivitas masing-masing, jadi model kajiannya juga berpola tematik, rata-rata yang datang ikut pengajian adalah mengaji dengan mendengarkan (mustami') dan tidak membawa kitab. Pada saat yang bersamaan penceramah di tuntut untuk bisa menjelaskan isi kitab yang sesuai dengan konteks kekinian.

Implementasi moderasi beragama dimulai dari takmir masjid. Mereka mengambil jalan yang teduh dan damai dalam menyikapi sesuatu, ceramah dalam khutbah juga tidak keras, pembawaannya lebih teduh dan tidak menjelek-jelekkan kelompok lain dan atau bahkan agama lain. Hal tersebut terlihat dari pilihan khatib shalat Jumat yang bertugas, para penceramah dipilih yang berpikir terbuka.

Para pengurus masjid meminta tema yang di bawakan oleh khatib dan penceramah adalah tema yang membawa keteduhan dan santun dan menjadikan jamaah terasa lebih adem. Tema

yang disampaikan khatib Jumah misalnya lebih memilih tema-tema yang santun dan tidak menghujat kelompok-kelompok yang lain, lebih teduh di terima oleh semua kalangan dan jamaah dan mengakomodir lintas madzhab. Meski secara politis memang di daerah Depok didominasi oleh partai politik tertentu. akan tetapi di masjid Al Muhajirin ini lebih memilih model pengajian rutin untuk semua kalangan dan tidak terpengaruh oleh pengaruh dominasi politik tertentu tersebut. Bahkan para pengurus masjid memiliki jargon untuk bersama-sama memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan. (wawancara dengan Ali Ma'sum, pengurus masjid Al-Muhajirin 10/07/2020)

Siapa pun yang ingin mengadakan kegiatan di masjid ini dipersilahkan oleh pengurus masjid karna memang masjid Al Muhajirin terbuka untuk semua golongan. Lokasi masjid yang memang strategis, di tengah kota dekat dengan keramaian membuat masjid banyak diminati masyarakat untuk mengadakan kegiatan keagamaan di masjid Al Muhajirin. Menurut pengurus masjid ada kelompok tertentu yang sering mengadakan kegiatan yaitu dari kelompok "Komunitas Majid Fahri", kelompok mereka mengadakan kegiatan musiman sesuai dengan momen-momen tertentu dan tidak masuk dalam jadwal kegiatan DKM. Kegiatan tersebut di inisiasi oleh kelompok mereka, dan pihak DKM meminta semacam uang kas untuk masjid sebesar 300 ribu rupiah. Peserta pengajian ini lebih di dominasi oleh kelompok mereka sendiri, jarang sekali dari penduduk di sekitar masjid di luar kelompok mereka terlibat, bahkan mungkin tidak ada. Jika komunitas atau jamaah lain yang ingin mengadakan kegiatan keagamaan tidak akan dibedakan dan tetap di persilahkan saja, tidak ada larangan khusus.

Kajian kitab yang terhimpun dalam kegiatan rutin bisa di lihat dari jadwal kajian rutin yang selama ini sudah berjalan. Metode penyampaiannya dengan ceramah dan memilih tema-tema tertentu dan di kontekskan dengan kondisi sekarang. Seperti misalnya isi ceramah mereka tidak menjelek-jelekkan kelompok yang lain

Menghadapi Pandemik COVID-19 ini, pendapat dan tafsir dan serta pemahaman keagamaan terhadap pandemi memang diakui sangat beragam baik internal pengurus masjid ataupun eksternal jamaah masjid, akan tetapi tidak sampai pada pertentangan atau konflik antara yang pro dan kontra, karena pengurus masjid dan jamaah lebih memilih apa yang menjadi himbauan pemerintah dan berkompromi dengan himbauan agar semua masjid menggunakan standar protokol kesehatan. Lebih bersifat menjembatani keinginan jamaah dan instruksi pemerintah terutama ketika kajian rutin, shalat jamaah dan shalat Jumat. "jamaah tetap" Al Muhajirin memang tidaklah banyak, karena kebanyakan adalah "jamaah transit" dan jamaah yang berjualan di sekitar pasar dan ruko-ruko di sebarang masjid ataupun masyarakat yang dalam perjalanan dan berhenti untuk melakukan shalat di masjid Al Muhajirin.

2. Moderasi Beragama di Masjid Raya Cinere

a. Deskripsi Moderasi Beragama di Masjid Raya

Masjid Raya Cinere berlokasi di Jl. Plamboyan Blok F Depok Jawa Barat. Masjid ini dibangun pada tahun 1995. Masjid ini merupakan kategori Masjid Umum. Masjid Raya Cinere (selanjutnya disebut MRC) memiliki luas tanah 1.500 m2, luas bangunan 2.500 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Raya Cinere memiliki jumlah jamaah tetap kurang lebih 200 orang.

Masjid Raya Cinere mempunyai visi sebagai Masjid yang bisa dijadikan percontohan dalam berbagai kegiatan kemasjidan (Pusat kegiatan Islam) diwilayah Cinere dan sekitarnya. Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi layanan masjid, yaitu: 1) Menyelenggarakan kegiatan Peribadatan, Pendidikan dan keremajaan; 2) Memberikan pelayanan sosial kemanusiaan dan keagamaan kepada Jamaah dan masyarakat di wilayah Cinere dan sekitarnya; 3) Mengusahakan MRC sebagai penggerak perekonomian umat diwilayah Cinere dan sekitarnya; 4) Melaksanakan kegiatan aktif di bidang keagamaan antar masjid dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Depok.

Wajah moderasi beragama pada masjid Raya Cinere itu terlihat pada misinya yang ingin membuat masjid percontohan di daerah sekitar masjid dan hal itu terimplementasikan dalam visi-misinya.

Dalam konteks kebangsaan, Masjid Raya Cinere mencoba menggalang persatuan yang diwujudkan dalam pengembangan jaringan antar masjid dan pengembangan jaringan pada penyelenggaraan majelis taklim. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit hal tersebut dapat di simpulkan sebagai bentuk kegiatan dalam meningkatkan komitmen kebangsaan, ide pengembangan jaringan atau persatuan masjid telah mendukung ide sila ke-3 dari Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Karena dengan membangun silaturahmi antara masjid dan antar majelis taklim, maka komunikasi terbangun sesama warga bangsa juga terbangun. Hal ini juga meminimalisir dan ataupun menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi.

Dalam "konteks toleransi" sekalipun Masjid Raya Cinere memberikan Layanan Bina Mualaf (orang yang baru masuk Islam), namun masjid ini tetap mengedepankan masuk Islam tanpa

paksaan. Persoalan keinginan masuk Islam menurut pengurus masjid adalah mutlak soal hidayah dari Allah. Manusia tidak berhak memaksakan hidayah Allah kepada orang yang memang belum siap menerimanya. Bahkan di era pandemi ini MCR membuka "Layanan Konseling Psikologi" dan Konseling Spiritual, yang tidak membedakan agama dan latarbelakang apapun, semua yang datang dilayani dengan proporsional dan baik. Begitupun Bantuan Sosial (Bansos) yang diadakan sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk membantu korban pandemi, tidak dikhususkan untuk hanya muslim, targetnya semua tukang becak, ojol dan pemulung serta kelompok dhuafa yang lainnya. (wawancara dengan pengurus DKM, Juli 2020)

Dalam konteks pengembangan "budaya nir kekerasan", masjid ini mengembangkan nilai solidaritas sosial yang tinggi. Hal itu Nampak dalam kepedulian masjid ini dalam mengembangkan misi sosial masjid seperti pendampingan tukang becak (yang mengandalkan tenaga manusia) beralih profesi ke ojeg motor (layanan jasa yang mengandalkan mesin); pemberian bantuan kepada korban karena bencana alam; pemberian bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan .

Dalam konteks pengembangan "budaya berkearifan lokal", masjid ini mengakomodasi budaya bangunan Betawi. Masjid berarsitektur tradisional Betawi mempunyai ciri yang tidak pernah meninggalkan teras. Teras dibuat mengelilingi ruang ibadah. Sedikit sentuhan Timur Tengah dengan adanya menara dan kubah. Menara dibangun terpisah 10 meter disisi barat bangunan. Kubah tetap dalam bentuk tradisional, limas . Meskipun kebanyakan masyarakat yang datang ke masjid adalah masyarakat perkotaan kelas menengah (dilihat dari letak masjid yang berdekatan dengan

deretan perumahan mewah di sekitar wilayah Cinere), akan tetapi suasana alam dan adat lokal betawi masih terasa. Apalagi kebanyakan dari pengurus masjid adalah etnis Betawi. (wawancara dengan Achmad Kholady,10/07/2020)

b. Pendidikan Moderasi Beragama

Sistem pengajaran moderasi beragama pada Masjid Cinere Raya salah satunya bisa dilihat dari pemilihan para khatib ataupun penceramah yang beragama dan lintas mahdzab bahkan lintas background pendidikan; seperti ada yang lulusan Mesir, Syiria dan UIN. Yang menarik adalah setiap permintaan untuk menjadi penceramah atau khatib dalam kegiatan mereka di ingatkan untuk tidak menyampaikan masalah-masalah khilafiyah pada pengajian rutin dan kultum setelah shalat subuh setiap hari Sabtu dan Minggu.

Begitu pun salah satu Program yang diarahkan untuk membina rasa solidaritas sesama umat adalah melalui bantuan kemanusian tanpa memandang agama apa pun. sekaligus untuk menanamkan tradisi atas kepercayaan jamaah pada MRC untuk dapat menyalurkan barang/uang Jamaah secara cepat dan tepat. Untuk hal ini pada setiap musibah nasional MRC melalui keputusan bersama Pengurus mengajak kepada jamaah untuk dapat membantu saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang terkena musibah pandemi, bencana alam dll. MRC juga membuka Website MRC dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya seputar kegiatan MRC yang toleran dan terbuka pada dunia luar, sehingga di harapkan keberadaan MRC akan semakin memberikan manfaat bagi umat.

B. Misi Moderasi Beragama Berbasis Masjid di Masa Pandemik COVID-19

Fatwa MUl no 20 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan shalat idul fitri saat pandemi COVID-19, adalah Fatwa yang banyak dijadikan referensi bagi pelaksanaan ibadah bagi pelaksanaan ibadah di sebagian besar masjid di Indonesia. Tidak terkecuali Pengurus DKM Al- Muhajirin , tidak mengadakan jamaah shalat idul fitri, tetap mematuhi aturan pemerintah dengan melaksanakan shalat Idul fitri di rumah. Bahkan ketika pengurus DKM ditanya terkait fatwa tenaga medis melaksanakan shalat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menurut mereka itu sudah menjadi kajian para ahli dan sudah pasti menjadi bahan diskusi para Ulama-ulama MUI, jadi sah-sah saja.

Bagi pengurus masjid, pandemi COVID-19 adalah masalah bersama, dari aspek agama pelarangan shalat Jumat pada masa pandemi itu termasuk pada pemeliharaan diri. Pemeliharaan diri dalam hal ini mengacu dari Ushul Fiqh, dilaksanakan dengan isolasi dan membuat jarak dalam shof. Sementara itu di sisi yang lain dapat memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dengan mendengarkan ceramah jarak jauh. Hal tersebut merupakan pengejatawantahan dari pemeliharaan diri. sesuai dengan protokol kesehatan dan himbauan pemerintah. Sebagai upaya untuk menekan laju COVID-19.

Terkait Pandemi, secara konsisten mereka mengikuti himbauan pemerintah. Kegiatan yang terjadwal di liburkan selama pandemi. Pada bulan Ramadhan hanya mengadakan pengumpulan zakat dalam bentuk 2 tipe: 1) melalui online dengan mekanisme transfer, namun hanya sedikit melalui transfer, terhitung delapan orang yang zakat lewat online, 2) zakat melalui datang ke masjid dan diserahkan

amil zakat, metode ini lebih banyak dari panitia yang menyiapkan dan menggunakan protokol kesehatan.

Upaya melakukan penanganan pandemi dengan pendekatan agama dengan mematuhi standar aturan kesehatan, dan himbauan pemerintah dengan baik. Pihak masjid menyampaikan pada masyarakat atau jamaah bahwa pandemi ini adalah musibah dan tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain, harus di hadapi dengan sabar dan tawakal. Pola hidup yang bersih, rajin cuci tangan dengan sabun, memakai disinfektan, memakai masker dan menjaga jarak yang salalu dikampanyekan oleh pihak masjid kepada jamaah. Menurut pengurus masjid meski tidak mudah dalam memberikan edukasi kepada jamaah atau masyarakat sekitar masjid, namun upaya-upaya penyadaran selalu di kampanyekan dengan saksama, baik pendekatan agama dan kultural. Himbauan-himbauan tersebut bisa dalam bentuk baliho dan poster-poster, dan menyiapkan disinfektan di tempat masuk ke masjid dan tempat cuci tangan.

Akomodatif terhadap budaya lokal, Masyarakat di sekitar masjid kebanyakan adalah pendatang "muhajirin", kegiatan keagamaan berjalan biasa saja, sebagaimana peringatan hari besar Islam pada umumnya yang selalu dilakukan. Karena kebanyakan masyarakat di sini pendatang, dan pemilik ruko di sekitan pasar di seberang masjid kalau masih di jualan ketika memasuki waktu shalat, shalatnya di masjid ini.

Respons jamaah dan masyarakat sangatlah positif terkait ide pendidikan moderasi beragama dan peran masjid sebagai sarana pendidikan. Melalui kegiatan rutin yang sudah terjadwal dan memfungsikan Masjid sebagai tempat mendakwahkan agama dan praktik agama.

Meskipun istilah moderasi beragama masih terdengar asing, jamaah masjid dan pengurusnya memahami hal tersebut sebagai sebuah metode atau cara untuk menyampaikan agama yang teduh dan tidak marah-marah. Bagi mereka adalah kewajiban takmir menyampaikan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Pendidikan moderasi yang telah dipahami di tengah masa pandemi adalah menyampaikan pesan-pesan agama secara teduh dalam melakukan praktik ibadah dan kegiatan keagamaan tidak membeda-bedakan antara jamah satu dengan jamaah yang lainnya. Kita sama di mata Allah, tidak membeda-bedakan kelompok, suku ras dan budaya. sikap adil dan seimbang terhadap jamaah serta menyampaikan himbauan pentingnya menjaga kebersihan, sering cuci tangan dan menjaga jarak di masa pandemik.

Beralih ke Masjid Raya Cinere, MRC memiliki sistem pengajaran majelis taklim dan pengajian yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama. Kurang lebih seperti halnya masjid Al Muhajirin. Hal tersebut juga bisa dilihat dari Misi MRC yaitu menyelenggarakan kegiatan peribadatan, pendidikan dan keremajaan dengan memberikan pelayanan sosial kemanusiaan dan keagamaan kepada Jamaah dan masyarakat di wilayah Cinere dan sekitarnya. MRC diorientasikan agar bisa menjadi penggerak perekonomian umat diwilayah Cinere dan sekitarnya dan melaksanakan kegiatan aktif di bidang keagamaan antar Masjid dan Organisasi kemasyarakatan di wilayah Depok. Dengan kata lain MRC bergerak untuk memajukan banyak aspek dalam praktik keagamaan umat dengan berbasis nilai-nilai yang tidak berseberangan dengan moderasi beragama dengan menggunakan sistem pengajaran formal maupun non formal lewat bidang-bidang

Peribadatan, Pelayanan Masyarakat, Pendidikan, usaha, Umum dan Keremajaan.

C. Faktor pendukung dan penghambat

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia H Imam Addaruqutni mengatakan dalam kompas.com (05/07/2020) bahwa Pandemi COVID-19 sedang menguji kesadaran kemanusiaan kita. Masjid harus punya kontribusi dan peran dalam penanganan kemanusian agar masyarakat percaya bahwa masih ada kemanusiaan di tengah bencana, semboyan DKM adalah tidak ada lagi daerah di sekitar masjid. Hal tersebut sejalan dengan salah satu fungsi masjid yaitu tidak hanya sebagai tempat beribadah ritual tapi juga punya tugas sosial, sebagaimana juga dinegara-negara lain.

Moderasi agama sebagai metode atau cara atau perspektif dalam mengurai dan menyikapi keragaman dan moderasi agama sebagai nilai adalah hal baru yang perlu disosialisasikan secara maksimal pada masyarakat luas. Beberapa faktor yang menghambat berhasilnya sistem pengajaran di masjid, berdasarkan temuan lapangan adalah sebagai berikut;

1. Sosialisasi mengenai Moderasi beragama di masyarakat belum maksimal, tidak semua lapisan masyarakat tidak asing (familiar) dengan istilah moderasi beragama bahkan pada pengurus masjid sekalipun.
2. Kurang sinergi antara pengurus masjid dan Kemenag, sehingga program-program Kemenag berbasis Moderasi beragama belum optimal
3. Kemenag tidak memiliki data bank yang memadai tentang profiling masjid.

4. Penyikapan terhadap pandemi pro dan kontra

Sementara itu faktor pendukung yang ditemukan pada lokus penelitian, nyaris semua sama, yaitu

1. Misi dan visi masjid memuat nilai-nilai yang inklusif dan moderat
2. Pengurus masjid ataupun DKM memiliki mind set terbuka
3. Jamaah tetap adalah jamaah yang kebanyakan memang memiliki kecendrungan untuk menerima keragaman sesuai dengan semangat kearifan local yang dominan pada masjid terkait.
4. Pandemi dijadikan momen untuk lebih peduli dan lebih berhati-hati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa; sistem pengajaran atau pendidikan berbasis Moderasi Beragama pada masjid Al Muhajirin dan Masjid Raya Cinere memenuhi sarat bagi keberlangsungan nilai-nilai Moderasi Beragama yang memuat soal toleransi, nir kekerasan, komitmen kebangsaan, dan adaptif dengan budaya lokal.

E. Rekomendasi

Sebagaimana termaktub dalam buku Moderasi Beragama disebutkan bahwa tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Untuk itu sosialisasi dan keterlibatan semua pihak adalah keharusan untuk mencapai tujuan Moderasi beragama,

seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya sehingga menciptakan harmoni dan kerukunan umat beragama.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Al-Markaz Al-Islami dan Masjid Raya Kota Makassar

Oleh: Saprillah

A. Temuan-Temuan Lapangan

Masjid sasaran adalah Masjid Al-Markaz Al-Islami dan Masjid Raya (Masjid Pemerintah). Kedua masjid ini merupakan masjid besar dan menjadi kebanggaan masyarakat Islam di Makassar. Kedua masjid sangat strategis karena berada di pusat perkotaan Makassar

Dalam bidang keagamaan, Kedua masjid ini menjadi pusat ibadah umat di Kota Makassar dan sekitarnya. Banyak jamaah dari dalam dan luar kota melaksanakan shalat lima waktu di masjid ini. Apalagi pada hari-hari besar Islam, jumlah jamaah membeludak, melebihi hari-hari biasa. Secara keseluruhan, masjid ini mampu menampung sebanyak 10.000 jamaah. Bila memanfaatkan halamannya untuk kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan, diperkirakan bisa mencapai 50.000 jamaah. Di samping aktivitas

ibadah, kedua masjid ini juga memiliki sarana pendidikan, baik bagi anak-anak, remaja, mahasiswa, maupun orang dewasa. Untuk pendidikan tingkat anak-anak, jumlah muridnya. Dulu, masjid Raya menjadi pusat pengkaderan ulama-ulama muda moderat di Sulawesi Selatan

Peran masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama di masa pandemi, baik yang sifatnya internal agama ataupun antar agama, tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Peran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dan sikap keagamaan orang ataupun pihak lain. Edukasi itu dilakukan oleh pihak takmir dan imam masjid dengan cara memberikan pengumuman kepada jamaah yang tinggal di sekitar masjid, baik itu secara lisan lewat pengeras suara masjid ataupun tulisan berupa pengumuman berbentuk spanduk yang disebar di sekitar wilayah masjid. Selain itu, edukasi ini juga dilakukan oleh pihak pengelola dan imam masjid dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini dan juga dengan pemanfaatan media sosial yang dapat dijangkau oleh para jamaah. Sebagai catatan penting, pendidikan moderasi beragama sejak dini juga telah ditanamkan dan dipraktikkan oleh pengelola masjid terhadap anak-anak melalui instrumen pendidikan di tingkat TKA/TPA.

Terkait Pancasila sebagai dasar negara dan penerapan nilai-nilainya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, seluruh informan menyatakan hal yang senada bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah sudah final dan harus diterapkan dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam konteks kehidupan beragama dan penanganan pandemi COVID-19 ini. Terkait dua masalah

terakhir mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut, seluruh informan juga memberikan beberapa catatan, di antaranya agar lebih dimassifkan dan digalakkan, khususnya bagi para pemangku kebijakan.

Dampak pandemi COVID-19 ini terhadap relasi antar agama dan intra agama tidak didapatkan perubahan yang signifikan. Kondisinya tetap sama dengan kondisi ketika pandemi ini belum ada, kecuali dari sisi interaksinya yang sedikit berubah karena adanya penerapan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah dan juga sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam tentang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan saling menjaga diri satu sama lain (hifz an nafs).

Terkait dengan hubungan pengelola masjid dengan para jamaah dan hubungan antar sesama jamaah masjid juga tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali di masa-masa awal pandemi di mana terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini dalam hal peribadatan yang berlangsung di masjid, baik itu antara pengelola masjid dengan para jamaah dan antar sesama jamaah.

Pada era kenormalan baru ini (new normal), perbedaan pandangan itu tetap masih ada namun sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan dalam skala yang sedikit. Hal ini dikarenakan oleh peran pengelola masjid dalam memberikan pemahaman atau edukasi terhadap para jamaah masjid tentang pentingnya saling menghargai pendapat yang berbeda dalam konteks keagamaan.

Terkait perbedaan mazhab, pengelola masjid sangat akomodatif dalam hal tersebut. Begitu pun juga dengan pemilihan para penceramah/khatib dari latar belakang mazhab atau cara pandang

keagamaan yang berbeda tetap diterima, meskipun dengan seleksi yang ketat dan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh pengelola masjid. Meski demikian, dalam hal konten ceramah/ khutbah, pengelola masjid memberikan beberapa catatan, yakni isi ceramah/khutbah tidak boleh menyinggung hal-hal yang sifatnya khilafiyah, kecuali jika persoalan khilafiyah tersebut dijelaskan secara berimbang agar jamaah yang mendengarkan isi khutbah/ ceramah tersebut dapat tercerahkan dan mendapatkan pemahaman yang utuh atas persoalan khilafiyah tersebut. Selain itu, isi ceramah/ khutbah harus mengedepankan prinsip-prinsip washathiyah dalam ajaran Islam, agar terbangun kesadaran dan kesepahaman serta kesejukan di tengah-tengah umat beragama dan intra agama Islam.

Peran dan posisi perempuan dalam masjid atau dalam pengelolaan masjid sudah sangat setara. Kesetaraan itu ditunjukkan dengan pemberian ruang terhadap perempuan dalam mengelola masjid dan peran edukasi sejak dini yang lebih banyak dilakukan oleh kalangan perempuan. Hal yang sama juga terjadi dalam majelis-majelis ilmu dalam masjid, perempuan diberikan peran dan posisi yang cukup besar bahkan setara dengan kaum laki-laki, seperti sebagai penceramah atau pemberi tausiyah dan narasumber dalam kajian-kajian ilmiah keagamaan. Kajian-kajian ilmiah keagamaan ini bukan hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu majelis taklim, tapi juga diperuntukkan bagi khalayak umum (laki-laki dan perempuan). Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kajian-kajian ilmiah atau majelis-majelis ilmu sebagai kegiatan rutin dalam masjid tersebut untuk sementara ditiadakan sampai kondisi benar-benar telah kembali normal.

B. Rekomendasi

Masjid telah memainkan peran strategis dalam pendidikan moderasi beragama. Hal ini menghendaki agar kementerian agama lebih memberi perhatian terhadap pengembangan moderasi beragama di masjid.

Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid Darul Amal, Masjid Miftahul Jannah, dan Masjid Mathla'ul Anwar Kota Salatiga

Oleh: Arnis Rachmadhani

A. Temuan Hasil Penelitian

1. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masjid di Masa Pandemi

Pada awalnya Kota madya Salatiga hanya terdiri dari satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Salatiga. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah, Kota Salatiga mendapatkan beberapa tambahan daerah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Hingga sekarang, secara administratif Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan tersebut meliputi:

1. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan:

   Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan
2. Kecamatan Tingkir, terdiri dari 7 kelurahan:

Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah

3. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari 6 kelurahan:

   Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan

4. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari 4 kelurahan:

   Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing

   (https://salatiga.go.id/pembagian-wilayah/ diunduh tanggal 4 Juli 2020 pukul 06.53 WIB).

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Syamsul, Bidang Kemasjidan pada Seksi Bimas Islam menyampaikan, ada 227 masjid di Kota Salatiga yang sudah terdata dalam kartu ID Masjid, sehingga setiap masyarakat bisa melihat profil tersebut di internet setelah mengunduh program kartu id masjid (Wawancara, Syamsul, 9 Juli 2020).

Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga memastikan ditiadakannya pelaksanaan salat tarawih maupun Idul Fitri 2020. Keputusan tersebut ditempuh atas dasar belum terlihat tanda-tanda berakhirnya pandemi virus Korona (COVID-19). Wali Kota Salatiga Yuliyanto dalam surat edaran (SE) tertanggal 22 April 2020 mengatakan dalam rangka pencegahan sekaligus percepatan penanganan wabah virus Korona seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa agar ditiadakan sementara (https://jateng.tribunnews.com/2020/04/24/wali-kota-salatiga-keluarkan-surat-edaran-tak-ada-salat-tarawih-dan-idul-fitri-2020) diunduh tanggal 3 Juli 2020 pukul 20.05 WIB.

Pengembangan pendidikan moderasi beragama di masjid di masa pandemi secara aktivitas keagamaan memang berkurang

karena berdasarkan anjuran dari MUI yang mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 pada 16/3/2020. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni'am mengingatkan agar umat Islam menjadikan rumah sebagai sentra kegiatan ibadah. Masyarakat harus memahami Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah virus COVID-19. MUI menyebut sejumlah ibadah, seperti majelis taklim, salat Jumat berjamaah, salat wajib berjamaah, salat tarawih, dan salat Ied.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, masyarakat harus mulai terbiasa menyelenggarakan ibadah Ramadhan dengan kebiasaan baru, di situasi dan kondisi yang baru, namun tetap dalam tuntunan syariat Islam. Fatwa tersebut juga mengandung pengertian bahwa hendaknya masyarakat untuk tidak berkerumun di masjid atau musala selama bulan Ramadhan lantaran adanya pergeseran kegiatan ibadah. Namun, masjid dan musala tetap menjadi pusat penyiaran. Seperti azan yang dikumandangkan sebagai penanda waktu shalat.

Senada dengan MUI, Menteri Agama Fachrul Razi juga meminta umat Islam untuk melakukan tarawih dan tadarus di rumah masing-masing selama Ramadhan. Imbauan Menag ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut pemerintah menghimbau agar pelaksanaan shalat Tarawih cukup dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Kebijakan ini diambil agar physical distancing (jaga jarak) dapat dipatuhi sehingga laju penyebaran virus bisa terkendali.

Namun, hasil penelitian menemukan data bahwa ada masjid yang tetap melaksanakan kegiatan keagamaan ibadah shalat 5 waktu, ibadah shalat tarawih, dan ibadah shalat Idul fitri di Kota Salatiga. Hal itu, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1: Pelaksanaan Ibadah Shalat

No.	**Masjid**	**Salat 5 Waktu**	**Salat Taraweh**	**Salat Jumat**	**Salat Idul Fitri**
1.	Darul Amal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Miftahul Jannah	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Mathla'ul Anwar	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan tabel 1 di atas penyelenggaraan ibadah shalat yang tetap diadakan oleh takmir masjid dengan mematuhi protokol kesehatan dan surat edaran yang diterbitkan oleh Walikota Salatiga dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Takmir Masjid Math"laul Anwar tetap mengadakan ibadah shalat karena wilayah Desa Cebongan merupakan zona hijau di Kota Salatiga, sehingga takmir masjid berkeyakinan bahwa ibadah shalat tetap diselenggarakan dengan mematuhi anjuran pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan. Ibadah shalat hanya boleh dihadiri oleh masyarakat Desa Cebongan dan melarang warga dari luar daerah untuk mengikuti peribadahan di Masjid Mathla'ul Anwar (Wawancara dengan Takmir Masjid Darul Amal tanggal 10 Juli 2020 dan Takmir Masjid Miftahul Jannah tanggal 11 Juli 2020).

2. Isu Keagamaan yang Sering kali Berkembang di Masyarakat dan Direspons oleh Masjid dalam Bentuk Moderasi Beragama

Toleransi di kalangan umat beragama di negara ini tercermin dengan adanya beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 22.

Meskipun banyak persoalan konflik yang mengatasnamakan perbedaan agama, akan tetapi ada beberapa kota di Indonesia yang berhasil menerapkan toleransi. Toleransi berarti menghargai adanya kebebasan dan hak asasi manusia sehingga tercipta suatu perdamaian. Penelitian tentang Indeks Kota toleran yang dikeluarkan pada 2015 oleh SETARA Institute, menunjukkan adanya beberapa kota toleransi yang ada di Indonesia. Kota Salatiga sebelum terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional, para tokoh agama telah mempunyai organisasi kerukunan beragama yang disebut Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa). Di Kota Salatiga juga pernah ada permasalahan soal agama menjelang pilihan kepala daerah, namun tetap bisa menjaga toleransi beragamanya hingga sekarang.

Menurut KH. Rofiq, Ketua FKUB Kota Salatiga, meskipun Kota Salatiga telah 3 X mendapatkan predikat sebagai Kota Toleran di tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018, ada pula beberapa masjid yang masih mendapat perhatian dari FKUB Kota Salatiga, MUI Kota Salatiga, Dewan Masjid Indonesia Kota Salatiga, TNI, dan POLRI terkait aktivitasnya yang memiliki kecenderungan berbeda

dalam kegiatan keagamaannya yaitu Masjid Al Burhan dan Masjid Abu Bakar Asshidiq (Wawancara tanggal 7 Juli 2020). Menurut penjelasan dari Nur Cholis, Kasie Bimas Islam Kementerian Agama Kota Salatiga bahwa kedua masjid tersebut konservatif di Kota Salatiga. Ada pula pondok pesantren yang pengurusnya kurang kooperatif dengan Kementerian Agama dalam penyediaan data terkait kegiatan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Selain itu, ada pula stasiun radio yang dikelola oleh sekelompok muslim di Kota Yogyakarta yang siarannya berbeda dengan siaran stasiun radio lainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan soft approach kepada mereka yang memiliki kegiatan yang berbeda di kalangan umat Islam di Kota Salatiga (Wawancara tanggal 9 Juli 2020).

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk sampai di tingkat RT juga sangat bermanfaat dalam mencegah penyebaran virus. Namun, dengan adanya himbauan untuk menjalankan shalat di rumah saja, ada beberapa kelompok yang menanggapi berbeda dengan keyakinan mereka sehingga mereka merasa diatur dalam hal ibadah sehingga berkeinginan mendirikan masjid sendiri yang tidak diintervensi oleh kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah keagamaan. Namun, upaya mereka untuk mendirikan masjid sementara ini melalui pendekatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Salatiga dengan back up dari TNI, POLRI, Kesbangpolinmas, Kementerian Agama, dan stakeholder pemerintahan di Kota Salatiga mampu membuat oknum-oknum kelompok keagamaan mengurungkan keinginan tersebut (Wawancara tanggal 13 Juli 2020).

3. Model Pengembangan Moderasi Beragama di Masa Pandemi COVID-19

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh takmir masjid di Kota Salatiga. Sejumlah masjid di Indonesia tidak mengadakan salat berjamaah dampak pandemi Korona virus disease (COVID-19). Namun langkah inovasi dilakukan pengurus masjid untuk menyikapi hal ini. Salah satunya takmir Masjid Miftahul Jannah di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Peniadaan aktivitas ibadah di masjid tidak menyurutkan semangat takmir Masjid Miftahul Jannah di RW 07 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

Mereka menggagas berdirinya "pasar" di halaman masjid tersebut. Hampir sebulan penuh "pasar" itu memenuhi kebutuhan pangan warga selama pandemi COVID-19. Memang terlihat biasa, namun ada yang istimewa. Warga yang datang tidak perlu membayar sejumlah uang ketika mengambil kebutuhan pangan di sana. Takmir Masjid Miftahul Jannah menyebutnya sebagai pasar gratis. Pasar gratis ini dibuka setiap Jumat mulai pukul 14.00 WIB. Pasar gratis tersebut akan tutup saat kebutuhan pangan sudah habis diambil oleh warga yang datang. Sebagaimana pada Jumat 15 Mei, selepas Shalat Zuhur, takmir Masjid Miftahul Jannah sibuk menggelar lapak di jalan kampung depan masjid. Lapak-lapak itu kemudian diisi aneka kebutuhan pangan. Suasana bak pasar terlihat saat warga mulai berdatangan. Pasar gratis ini bukan hanya menjadi jujugan warga Mangunsari. Namun, warga dari kelurahan lain boleh datang untuk mengambil bahan makanan sesuai kebutuhan.

Sehari sebelumnya pengurus masjid juga menghubungi warga RW 07 yang mampu bersedekah. Hasil sedekah itu kemudian dibelikan bahan pangan. Pengurus masjid juga membuka donasi

berupa bahan pangan segar yang dibawa saat pasar gratis itu dibuka. Bahan pangan yang tersedia di pasar gratis Masjid Miftahul Jannah Salatiga antara lain sayuran, tahu, tempe, telur, mi instan, dan minyak goreng. Inilah bentuk moderasi beragama yang dilakukan oleh takmir masjid, bahwa pasar gratis berlaku untuk semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun non muslim.

Pasar gratis ini terbuka untuk umum. Semua warga yang membutuhkan bisa datang mengambil kebutuhan pokok. Begitu juga donasi untuk pasar gratis, warga yang merasa mampu bisa datang dan berdonasi. Meski ini kegiatan diselenggarakan oleh takmir Masjid Miftahul Jannah, namun semua warga baik Muslim maupun non-Muslim boleh memanfaatkannya. Banyak donatur yang ambil peran sehingga dapat membantu ekonomi warga kurang mampu. Tiap pengunjung pasar gratis ini harus memerhatikan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran COVID-19. Di antaranya mengenakan masker, mencuci tangan sebelum beraktivitas di lingkungan masjid, serta menjaga jarak.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Di masa pandemi COVID-19 mampu menumbuhkan semangat saling membantu. Di Kota Salatiga ada Program Lumbung Sembako yang dicanangkan di tiap Kecamatan hingga di tiap Kelurahan/Desa. Program ini mampu menjadi pendukung bagi masyarakat ketika dampak korona menyelimuti kehidupan bermasyarakat bahkan ada beberapa masyarakat yang di PHK dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Pengurus dan takmir masjid juga berinovasi melaksanakan kegiatan sosial melalui Jumat Sedekah, Jumat Berkah, dan santunan-santunan bagi lansia dan anak yatim. Namun, keadaan penyebaran COVID-19 ini juga menjadi penghambat bagi masyarakat muslim untuk beribadah

di masjid meskipun sebenarnya anjuran dari pemerintah juga sangat melindungi masyarakat muslim, namun masih ada yang berpendapat bahwa hidup dan matinya manusia hanya Allah yang mengetahuinya sehingga aktivitas keagamaan di beberapa masjid di Kota Salatiga tetap berjalan setiap harinya dan beraktivitas sebagaimana biasanya sebelum ada pandemi COVID-19.

Meneropong Masjid Al Barokah dan Masjid Nurul Hikmah di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid 19

Oleh. Reslawati dan Deva Sebayang

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada kriteria masjid moderat, dengan indikator: 1) Takmir masjid berasal dari ragam paham keagamaan, ormas keagamaan kultur keagamaan, 2) Khatib, penceramah mengakomodir lintas mazhab, 3) ritual peribadatan mengakomodir ragam mazhab, 4) isi ceramah/khutbah menghargai berbagai mazhab dan paham keagamaan; 5) sumber bacaan mengakomodir kitab-kitab lintas mazhab; dan 6) kelima krakteristik dimaksud terlembagakan dalam pendidikan moderasi beragama.

A. Temuan Dan Pembahsan

1. MASJID AL BAROKAH

a) Sejarah Berdirinya

Masjid berada di perumahan, yang awalnya dihuni mayoritas pensiunan Kostrad Cijunjung Permai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Lama kelamaan dihuni banyak masyarakat umum. Masjid ini dibangun tahun 1989 dan diresmikan oleh Pangkostrad yakni Mayjen Soegiono saat itu luasnya masih 10x10 M2. Purnawirawan Kostrad ini saat di ketentaraan biasa hidup dengan keragaman beragama, saling toleran, saling harga menghargai, kerja sama dan saling tolong menolong walau beda agama, apalagi satu agama. Ini terbawa juga saat mereka tinggal di lingkungan perumahan dan ketika mereka menjadi pengurus masjid.

Masjid al Barokah awalnya berukuran 10 X 10 Meter dan sudah direnovasi 5 kali sejak berdirinya tahun 1989. Masjid ini terus dikembangkan/renovasi hingga menjadi 420 meter. Pengurus dan jamaah Masjid Al Barokah banyak memegang mazhab yaitu: Maliki, Syafii, Hambali dan Hanafi. Dan pengurusnya juga beragam Ormas di antaranya HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan untuk jamaahnya juga beragam termasuk ada Jamaah Tabligh dan Sunda Wiwitan. Oleh karena itu masjid dibangun harus melambangkan kesatuan dan persatuan, di mana dicerminkan di setiap dinding atau tiang Masjid Al Barokah, yaitu:

- Pada pintu masuk masjid ada 3 buah yang melambangkan rukun iman, Islam dan Ihsan.
- Ada 2 tangga di belakang masjid artinya melambangkan al-Quran dan Hadist

- Ada 30 anak tangga dan rencana akan dibangun 2 tangga lagi sehingga menjadi 4 tangga, yang mencerminkan 4 mazhab dalam Islam yaitu mazhab Syafii, Hambali, Maliki dan Hanafi.
- Mihrab tersusun 5 artinya rukun Islam
- Qubah besar berdiameter sembilan dan tingginya sembilan meter, artinya ada 9 wali yang menyebarkan Islam dan mengislamkan Indonesia yaitu Wali Songo

b) Praktek Pengembangan pendidikan moderasi beragama di Masjid Al Barokah di Masa Pandemi

Dalam hal pemilihan kepengurusan masjid dilakukan pemilihan secara pemilu, Jemaah di setiap hari Jumat mengusulkan nama pengurus dan pada pertemuan Jumat berikutnya 3 orang calon dipilih salah satunya oleh Jemaah shalat Jumat yang hadir untuk dipilih salah satunya jadi ketua. Dalam hal penyusunan komposisi pengurus tidak melihat dari aliran atau mazhab dan ormas mana, tetapi dilihat dari potensi dan kompetensi individual. Saat menjadi pengurus masjid, semua baju ormas dan mazhab harus dilepaskan, semata-mata sebagai pengurus masjid al-Barokah tanpa mazhab dan aliran atau ormas tertentu. Setelah masjid terbangun pengurus membuat slogan2 masjid, seperti: Bersatu dalam Akidah, Berjamaah dalam Ibadah, Toleransi Iqhtilafiyah.

Adapun *magic word* pada tahun 2013 sampai sekarang berbunyi: Makmurkan Masjidnya, Makmur Jamaahnya. Secara praktik amalan keagamaan pengurus dan jamaah masjid al Barokah cenderung menerapkan tradisi NU (NU Kultural), namun masyarakatnya tidak mau dibilang warga NU. Adapun kegiatan masjid berupa: pengajian Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Dalam hal keuangan masjid ada donator, kropak/celengan masjid, website Al Barokah, streaming pengajian, pembagian sembako, PHBI. Terkait dengan

hubungan internal pengurus dan masyarakat muslim (Jemaah) terjalin secara baik, terbukti adanya pengajian yang diikuti oleh masyarakat sekitar masjid.

Pengurus Masjid Al Barokah memandang beragam ormas islam dan mazhab yang berbeda tidak menjadi persoalan, namun ketika bicara soal Ahmadiyah dan Syiah, beranggapan bahwa kedua aliran/mazhab tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama Ahmadiyah tidak dianggap bagian dari Agama Islam, karena ajarannya dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah nabi Muhammad SAW. Terkait hubungan pengurus masjid dengan non muslim terjalin secara baik, hal ini dapat terlihat sejak awal pembangunan masjid, di mana umat non muslim ikut berpartisipasi dalam menyumbang pembangunan masjid.

Saat Idul Qurban, umat non muslim yang tinggal di sekitar masjid mendapatkan daging kurban dari masjid (hasil wawancara dengan umat Kristen di sekitar masjid Al Barokah). Corong masjid digunakan untuk pengumuman bagi yang meninggal baik muslim maupun non muslim. Jika yang meninggal Islam maka dimulai dengan kalimat: innalilahi wa innailahi rojiun. Jika yang meninggal non muslim dimulai dengan kalimat: telah meninggal dunia saudara kita…..tanpa terlebih dahulu mengucapkan kalimat innalilahi wa innailahi rojiun. Dengan pengumuman ini masyarakat sudah paham dari umat beragama mana yang meninggal. Saat terjadi musibah kematian dan lain sebagainya, mereka saling berkunjung satu sama lain antara muslim dan non muslim. Non-muslim juga ikut menjaga keamanan lingkungan masjid.

c) **Isu Keagamaan yang berkembang di masyarakat dan direspons masjid Al Barokah dalam bentuk Moderasi Beragama**

Masyarakat sekitar masjid sangat memegang tradisi NU seperti ziarah kubur, tahlilan kematian, pengurus masjid tidak mempersoalkan hal tersebut, bahkan juga melakukan tradisi tersebut. Di masjid juga baca qunut saat shalat subuh. Bahkan saat pandemi masjid al-Barokah membaca qunut nazilah setiap shalat 5 waktu. Bagi yang berasal dari ormas yang bukan memegang tradisi NU, saat shalat berlangsung menggunakan tradisi NU, mereka ikut saja, tanpa mempersoalkannya. Saat shalat teraweh masjid Al Barokah menggunakan 11 rakaat dan 23 rakaat, jadi kedua-duannya di pakai.

d) **Cara Pandang, Sikap dan Praktik pendidikan moderasi di masa pandemi**

Masjid Al Barokah masuk dalam katagori zona hijau, namun demikian, awal adanya pengumuman wabah pandemi oleh pemerintah untuk me-lockdown masjid. Maka pengurus masjid Al Barokah melakukan lockdown dengan tidak mengizinkan jemaahnya ke Masjid. Semua aktivitas masjid dihentikan. Begitu diumumkan PSBB di perlonggar, saat dibolehkan shalat di masjid oleh pemerintah, pengurus membuka masjid untuk shalat di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan yaitu jaga jarak saat shalat, menyiapkan hand sanitizer, pakai masker, cek suhu badan. Untuk pengajian bapak-bapak sudah mulai kembali, sementara untuk pengajian ibu-ibu sampai penelitian berlangsung belum diadakan kembali pengajiannya secara tatap muka, tetapi ibu-ibu mengadakan pengajian via daring.

e) Model Pengembangan Moderasi Beragama di Masjid Al Barokah

Moderasi beragama menjadikan putra-putri bangsa memiliki daya tahan, menyuburkan komitmen kebangsaan berbasiskan pemahaman agama dan menggersangkan potensi-potensi segregasi yang memanfaatkan kesalahpahaman dari ajaran suci," kata Yaqut dalam video virtual Youtube Pendis Channel, Rabu (22/9/2021). Menurut Yaqut, sebuah perbedaan dalam umat beragama berpotensi memicu segregasi. Namun, hal tersebut juga bisa memperkuat integrasi dengan moderasi beragama. "Perbedaan, kadang kala berpotensi memicu segregasi, tapi juga berpotensi memperkuat integrasi. Tidak banyak cara memahami perbedaan sebagai karunia penuh kemewahan," ucapnya. Lebih lanjut, Yaqut menambahkan bahwa terkadang kepentingan sekelompok orang dapat menyeret sebuah agama untuk memancing perpecahan. Dalam hal komitmen kebangsaan pengurus masjid al-Barokah tidak perlu diragukan, hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga sekitar masjid, bahwa masjid senantiasa tunduk dan patuh pada aturan pemerintah, demi kebaikan bersama.

Semua kegiatan masjid diambil keputusan setelah di rapatkan bersama-sama, jika terjadi perbedaan maka dicarikan solusinya yang tidak menambah perbedaan menjadi lebih tajam. Terkait kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah selama pandemic, pengurus DKM mengajak jamaah, pengurus RT, pengurus RW untuk membahas masalah tersebut. Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bersama untuk tidak diadakan shalat Jumat dan shalat 5 waktu di masjid, namun muazin tetap mengumandangkan azan sehari 5 kali sesuai dengan jadwal shalat 5 waktu.

f) Faktor Pendukung dan Penghambat:

Ada dua faktor pendukung: 1) Tersedianya fasilitas masjid secara fisik memadai. 2) Adanya kepemimpinan Ketua DKM yang terbuka dan pelibatan semua pengurus dalam setiap pengambilan keputusan membuat semua aktifitas berjalan lancar.

Sementara itu, hampir tidak ada hambatan yang berarti, kalaupun ada satu dua org berbeda pendapat, mereka anggap bagian dari dinamika dalam menjalankan roda organisasi masjid. Dan beda pendapat ini justru datang bukan dari internal masjid, tapi dari salah satu ketua RT yang ada dilingkungan masjid Al Barokah, karena kadang merasa telat dikabari untuk kegiatan masjid yang melibatkan warganya, padahal menurut pihak masjid mereka sudah menginformasikan sebelumnya. Jadi ada miskomunikasi

2. MASJID NURUL HIKMAH

a) Sejarah Berdirinya

Masjid Nurul Hikmah adalah masjid Kampung, terletak di Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Masjid ini didirikan tahun 1975 yang pada saat waktu itu masih berbentuk mushalla. Baru pada tahun 1987, mushalla itu berubah menjadi masjid. Tanah masjid ini merupakan wakaf dari H. Baharudin Taher, BA, dengan luas tanah 206 M2.

Saat menjadi mushalla sudah dua kali pergantian kepengurusan. Dan setelah menjadi masjid belum pernah pergantian kepengurusan. Pemilihan pengurus DKM melalui rapat bersama dengan jamaah masjid. Masjid Nurul Hikmah memegang mazhab Syafii, walaupun demikian tetap menerima keberadaan 4 imam mazhab lainnya. Pengurusnya secara kultural tradisi yang di pakai dan kembangkan NU, namun jika di katakan NU mereka

menolak. Masjid Nurul Hikmah terbuka untuk semua mazhab dan aliran yang ingin shalat di sana.

b) Praktik Pengembangan pendidikan moderasi beragama di Masjid Nurul Hikmah di Masa Pandemi

Masjid Nurul Hikmah masjid kampung yang berada ditengah-tengah masyarakat, berdekatan dengan Gereja hanya berjarak 100 meter, dan jarak beberapa meter dari masjid tinggal masyarakat beragama non muslim. 300 meter dari masjid ada pemakaman China. Dalam hal pemilihan pengurus diadakan pemilu, di mana semua jamaah terlibat untuk memilih. Dalam hal komposisi kepengurusan, berdasarkan kemampuan individual masing-masing.

Pengurus DKM Masjid Nurul Hikmah tidak ada yang berafiliasi ke salah satu ormas dan aliran dalam Islam. Namun mereka memegang teguh mazhab Syafii, dengan tidak mengabaikan mazhab lainnya. Walaupun pengurus masjid tidak masuk dalam salah satu ormas keagamaan, namun masjid Nurul Hikmah menjalankan tradisii NU (NU Kultural) dalam menerapkan perilaku kesehariannya. Kegiatan masjid berupa taklim ikhwan, taklim akhwat, taklim gabungan (zikir, tawasul, yasian dan doa), PHBI, rutin khitanan masal, dan lain-lain. Materi dan penceramah ditentukan DKM. Namun untuk pengembangan materi diserahkan pada narasumber menyesuaikan tema saat itu, misalnya saat Ramadhan, berarti tema yang diangkat seputar Ramadhan. Keuangan masjid ini sumber utamanya adalah dari kropak masjid.

Kepada ormas lain dalam Islam cukup baik namun untuk Ahmadiyah dan Syiah mereka menolaknya bagian dari Islam. Hubungan dengan pihak eksternal masyarakat sekitar masjid non-muslim sangat baik. Bahkan saat Idul Adha, non muslim

mendapatkan pembagian qurban. Di masa pandemi, dari awal masjid tidak pernah tutup dan menjalankan shalat 5 waktu dan melakukan shalat Jumat, namun tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, dan pakai masker.

c) Cara Pandang, Sikap dan Praktik Isu Keagamaan dan pendidikan moderasi di masa pandemi.

Dalam praktik kesehariannya, masyarakat sekitar masjid sangat memegang tradisi NU seperti ziarah kubur, tahlilan kematian, sedekah untuk ucapan terimaskah musim panen. Dalam hal ibadah shalat, jamaah di masjid juga membaca qunut saat shalat subuh. Terhadap tradisi dan praktik keseharian jamaah masjid tersebut, pengurus masjid tidak mempersoalkannya, bahkan mereka juga melakukan tradisi tersebut.

Sikap dan cara pandang pengurus yang moderat ini, beririsan dengan pandangan konsep moderasi beragama yang mentoleransi budaya-budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercermin dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan.

Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusian akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya,

perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman (Fahrudin, 2019).

Untuk menerapkan moderasi (wasathiyyah) beragama dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang dikukuhkan oleh; a. pengetahuan/pemahaman yang benar, b. emosi yang seimbang dan terkendali, dan c. kewaspadaan dan kehati-hatian bersinambung (Shihab, 2020). Lebih lanjut, Shihab mengemukakan bahwa dengan Wasathiyyah, Islam hadir di tengah masyarakat majemuk/plural untuk berdialog dengan berprinsip nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan syura tanpa memaksa yang menolaknya untuk mengikutinya, dan yang menerima diberi kesempatan untuk melaksanakannya secara bertahap sesuai kemampuannya tanpa menggampangkannya (Shihab, 2020).

d) Model Pengembangan Moderasi Beragama di Masjid Nurul Hikmah

Sekalipun pemerintah telah memutuskan agar masyarakat beribadah di dalam rumah guna mencegah penyebaran virus corona, namun masih ada beberapa orang yang nekat melaksanakan salat di masjid. Terkait hal itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan pada dasarnya hal itu perlu diapresiasi, artinya orang tersebut memiliki rasa cinta kepada Allah SWT yang sangat tinggi. Hanya saja, di situasi pandemi virus corona hal itu membahayakan. Maka dari itu, Nasaruddin mengingatkan agar lingkungan perlu diberikan penjelasan betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa ini.

Hal semacam itu juga terjadi di masjid Nurul Hikmah. Pada awal terjadinya pandemi, alasan kenapa masjid tetap shalat masa pandemi, karena wilayah masjid termasuk zona hijau dan yang shalat di sana adalah orang-orang penduduk setempat saja, tidak

memperkenankan kepada orang. Kendatipun demikian, mereka tetap patuh pada anjuran pemerintah menerapkan protocol kesehatan.

e) **Faktor Pendukung dan Penghambat:**

Ada dua faktor pendukung, 1) Fasilitas masjid cukup mumpuni, dan terus berbenah kearah yang lebih baik lagi, dalam rangka memenuhi kebutuhan umat beragama, agar dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. 2) Adanya kepercayaan yang penuh oleh jamaah pada Ketua DKM mengakibatkan hampir tidak ada perbedaan pendapat dinternal pengurus masjid sehingga semua aktifitas berjalan lancar

Sementara itu, belum ada hambatan yang berati, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan yang mereka harapkan.

B. Simpulan

1. Berdasarkan sejarahnya Masjid Al Barokah dan Masjid Nurul Hikmah merupakan masjid yang keberadaannya cukup eksis di tengah-tengah masyarakat. Sejak awal, masjid Al Barokah dan masjid Nurul Hikmah sudah menetapkan diri sebagai Masjid yang terbuka untuk semua mazhab (Syafii, Hambali, Maliki, dan aliran dalam agama Islam, kecuali Syiah dan Ahmadiyah yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa ajaran Syiah dan Ahmadiyah seperti membenci para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW, mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sehingga dianggap keluar dari ajaran Islam. Kedua masjid tersebut juga menerjemahkan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Selain menjalankan ritual keagamaan seperti shalat lima waktu dan mengadakan

kajian keagamaan, masjid juga sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan dan kemanusiaan.

2. Masjid Al Barokah dan masjid Nurul Hikmah dalam melakukan praktik pengembangan pendidikan moderasi beragama di masa pandemi dengan cara membuka ruang demokrasi kepada pengurus dan jamaah untuk memberikan pendapat mereka dalam melaksanakan himbauan pemerintah dan fatwa MUI tentang menjaga protokol kesehatan covid, melakukan pemilihan pengurus secara demokratis, menjalin hubungan yang baik kepada non muslim yang tinggal di sekitar masjid, bahkan memberikan daging kurban pada mereka saat Idul Adha.
3. Masjid Al Barokah dan Masjid Nurul Hikmah sangat merespons isu keagamaan yang berkembang di masyarakat dengan sangat terbuka dan tidak mempersoalkannya sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Masyarakat sekitar masjid sangat memegang tradisi NU seperti ziarah kubur, tahlilan kematian, dan lain sebagainya. Walaupun mereka memegang tradisi NU, tetapi mereka tidak mau disebut sebagai orang NU.
4. Model Pengembangan Moderasi Beragama di Masjid Al Barokah dan Masjid Nurul Hikmah secara demokratis, keterbukaan dan dikerjakan secara bersama-sama. Mereka tetap mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah tentang pelaksanaan protokol kesehatan covid yaitu menjaga jarak (social distancing), pakai masker, melakukan cek suhu badan dan menggunakan hand sanitizer untuk jamaah.
5. Masjid Al Barokah dan Masjid Nurul Hikmah mempunyai dukungan yang sangat memadai, baik secara bangun fisik

masjid maupun dukungan internal pengurus. Hampir tidak ada hambatan yang berarti dalam melaksanakan aktivitas kegiatan masjid selama ini, di musim pandemi tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mendukung apa yang sudah dilakukan oleh masjid Al Baroqah dan Masjid Nurul Hikmah dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal pengembangan moderasi beragama di masjid dan lingkungannya, dengan cara meningkatkan status masjid yaitu dari masjid Jamik, menjadi masjid besar, memfasilitasi dan melibatkan kedua masjid tersebut dalam berbagai kegiatan pemerintah, karena selama ini mereka belum tersentuh oleh pemerintah (Kemenag dan Pemda) setempat.
2. Masjid Al-Baroqah dan Masjid Nurul Hikmah harus tetap mempertahankan sikap keterbukaan (moderat) dan kerja sama yang baik diinternal dan eksternalnya, bahkan makin memperkuat dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak yang lebih luas lagi seperti kerja sama dengan pondok-pondok pesantren, masjid-masjid dan pemerintah setempat dalam mengembangkan moderasi beragama yang sudah ada dan akan lebih terarah lagi sesuai dengan konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI.

BAB III:
DISKUSI

A. Kota/Kabupaten, Jumlah dan Tipe Masjid yang Diteliti

Penelitian ini mencakup 16 kota maupun kabupaten yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan telah ditentukan (purposive). Pemilihan kota dan kabupaten ini berdasarkan ketersediaan data dan jangkauan untuk field trip (penelitian lapangan), mengingat pada saat dilakukan penelitian, beberapa daerah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Adapun kota dan kabupaten yang diteliti yaitu antar a lain (wilayah barat); Kota Padang, Kota Medan, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, (wilayah tengah); Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, (wilayah timur); Kota Makassar.

Masjid yang diteliti berjumlah 38 masjid. Tipe masjid di sini dibedakan menjadi masjid milik atau setidaknya dekat dengan

pemerintah dan masjid masyarakat (kompleks perumahan dan kampung). Penelitian ini tidak terlalu memperhatikan tipologi masjid berdasarkan status skala, seperti raya, agung, besar, jamik dan seterusnya. Pemilihan masjid berdasarkan ekspektasi ketersediaan data.

B. Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi

Dalam hal pengembangan pendidikan moderasi beragama yang dikaitkan dengan berlangsungnya pandemi COVID-19, data dari lapangan menunjukkan tingkatan yang berbeda-beda. Berdasarkan data, sikap masjid terhadap pandemi menunjukkan 3 hal yang berbeda, yaitu pertama, masjid yang mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melangsungkan ibadah di rumah ibadah, kedua, menolak dengan diam-diam dan ketiga menolak secara terbuka.

Pertama, mengikuti anjuran pemerintah secara penuh ditunjukkan dengan ditutupnya masjid dari kegiatan keagamaan, termasuk salat Jumat, salat tarawih, salat lima waktu, tidak mengumandangkan suara azan, maupun pengajian. Kemudian disertai pembagian sembako, ada yang membuka pasar gratis dan juga cek kesehatan. Kedua, menolak dengan diam-diam, yaitu mereka menampilkan diri sesuai anjuran pemerintah, namun mereka sebetulnya masih tetap menyelenggarakan salat lima waktu, salat tarawih, dan salat Jumat. Mereka tidak memanfaatkan mesin pengeras suara luar ruang. Ketiga menolak secara terbuka. Terdapat masjid yang tidak menutup sama sekali kegiatan keagamaan dan tetap menjalankan ibadah bersama, seperti salat Jumat, salat tarawih, dan salat id.

Namun dari tiga sikap dan perlakuan masjid terhadap kebijakan pemerintah itu, terdapat benang merah yang dapat ditarik yaitu umumnya masih memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Setidaknya, masih diperhatikan status zonasi COVID-19. Apabila informasi yang diperoleh daerahnya berzona hijau, maka masjid tetap difungsikan. Namun ketiga tipe masjid dalam memperhatikan kebijakan pemerintah terhadap protokol COVID-19 ini, data menunjukkan umumnya masjid memperhatikan dengan berbagai tingkatan pelaksanaan protokol COVID-19.

C. Isu Keagamaan dan Moderasi Beragama

Dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa masjid menunjukkan adanya fenomena dan isu keagamaan yang sangat berpotensi mengganggu berjalannya moderasi beragama. Isu yang menonjol di antaranya muncul diskursus ekstremisme keagamaan (radikalisme) melalui media massa, media sosial, organisasi, dan/atau lembaga keagamaan tertentu yang mempengaruhi paham dan sikap keagamaan masyarakat. Ada masjid yang kerap didatangi penceramah yang menyerang pemerintah dan kelompok lain. Terdapat pula masjid yang pernah kedatangan kelompok berjubah dan hampir menguasai masjid dan dulunya pernah didominasi kelompok tertentu (salafy). Ada pula masjid yang sering dipinjam ormas, tapi mereka dilarang menggalang dana dalam kegiatan di masjid itu. Berikutnya, ditemukan pula masjid yang masih terus menjadi incaran kelompok intoleran/pro-khilafah dan kaum salafi.

D. Cara Pandang, Sikap dan Praktik Moderasi Beragama

Diperoleh data dalam penelitian ini bahwa cara pandang (kognisi), sikap dan praktik pelaksanaan moderasi beragama

berbeda-beda. Umumnya masjid yang diteliti telah menunjukkan tingkat moderasi beragama. Untuk variable ini, beberapa langkah takmir atau dewan kemakmuran masjid (DKM) yang dapat dicatat sebagai berikut; selektif dalam memilih mubaligh atau penceramah, menyerahkan bantuan kepada non Muslim dan menerima bantuan dari non muslim, terbuka terhadap berbagai mazhab/paham dan ormas, mengikuti pemikiran Gus Dur, pengurus masjid dari beragam ormas; HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, Persis. Kemudian, pengurus terpilih melalui pemilu, pengurus tidak alergi mazhab lain, kecuali terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Dekat atau bernaung dan bertanggung jawab kepada ormas NU, Muhammadiyah lebih moderat.

Ada pula yang pada saat demo 212 menjadi titik kumpul massa yang hendak berangkat ke Jakarta, walaupun bukan program takmir masjid. Ada pula yang menyediakan mobil Ambulans untuk umum/lintas agama gratis (kota) dan hanya ganti BBM untuk luar kota, sopir dari Babinkamtibmas Polsek.

E. Model Pengembangan Moderasi Beragama

Walaupun tidak semua data tentang masjid yang diteliti ini menyebutkan secara spesifik mengenai model pengembangan moderasi beragama, namun sebagian besar masjid menyebut pengembangan moderasi beragama itu melalui beberapa agenda, yaitu di antaranya pengajian, mengundang penceramah yang dikenal moderat, menyelenggarakan PHBI, kajian kitab kuning dan berzanji.

Selain itu, ada yang mengembangkan melalui penyebarluasan motto, melalui madrasah Diniyah dan wustho, penyelenggaraan

yasinan dan tahlilan, kajian budaya, pembinaan kelompok remaja Punk, dll.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pendidikan moderasi beragama di masjid, berdasarkan data penelitian ini menunjukkan beberapa faktor pendukung dan sekaligus faktor penghambat. Untuk faktor pendukung (+) antara lain masjid tersebut sebagai rujukan, memiliki area luas, didirikan swadaya masyarakat, jamaah masjid tinggal dalam keluarga multi agama, di bawah pengawasan langsung pemda/pemkot, dan seterusnya.

Namun begitu, terdapat pula penghambat untuk dilangsungkannya pendidikan moderasi beragama, yaitu antara lain status masjid mandiri, kurang dekat dengan pihak kecamatan (tidak mau dijadikan masjid besar), masjid masih dikelola keluarga waqif, jamaah belum pernah bekerja sama dengan non Muslim, lokasi terbatas, belum ada panduan Pendidikan MB di masjid, kelompok salafi masih eksis dan berpotensi menguasai masjid. IT belum maksimal dimanfaatkan, dan lain-lain.

G. Pembahasan

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bawah masjid sebagai pusat pendidikan moderasi beragama menunjukkan kondisi yang tidak seragam. Umumnya takmir masjid menunjukkan bahwa mereka memahami posisi perbedaan mazhab dan pemikiran dalam masyarakat Islam yang sangat berpotensi mempengaruhi pengelolaan terhadap masjid mereka. Untuk menyikapi hal ini, beberapa masjid mengakomodasi pengurus dari berbagai latar belakang, akan tetapi mereka sangat selektif dalam memilih penceramah. Siapa yang diundang untuk mengisi

kegiatan keagamaan terlebih dahulu ditelusuri latar belakangnya. Hal ini dapat dimaklumi melihat sebagian besar masjid yang diteliti merupakan masjid yang dekat atau di bawah pengawasan pemerintah, ataupun masjid yang diteliti berada di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat kompleks perumahan maupun masyarakat yang tinggal di perkampungan.

Dalam hal sikap terhadap seruan ibadah di rumah untuk menghindari penyebaran pandemi virus korona agar tidak semakin meluas, sikap masjid paling tidak terbagi menjadi tiga. Pertama, mengikuti anjuran pemerintah secara penuh ditunjukkan dengan ditutupnya masjid dari kegiatan keagamaan, termasuk salat Jumat, salat tarawih, salat lima waktu, tidak mengumandangkan suara azan, maupun pengajian. Kedua, menolak dengan diam-diam, yaitu mereka menampilkan diri sesuai anjuran pemerintah, namun mereka sebetulnya masih tetap menyelenggarakan salat lima waktu, salat tarawih, dan salat Jumat. Ketiga, menolak secara terbuka. Terdapat masjid yang tidak menutup sama sekali kegiatan keagamaan dan tetap menjalankan ibadah bersama, seperti salat Jumat, salat tarawih, dan salat id.

Berdasarkan data dari masjid yang diteliti, mereka telah menunjukkan pendidikan moderasi serta moderasi beragama menurut pemahaman mereka, bahwa mereka misalnya tidak mengunggulkan suatu paham atau mazhab tertentu dan tidak merendahkan kelompok atau paham tertentu, kecuali masih ada yang belum menerima Ahmadiyah serta Syiah. Pemahaman seperti ini dipertahankan dengan praktik ritual dan pengajian serta pendidikan formal yang ditawarkan. Praktik ritual yang dipertahankan misalnya yasinan dan tahlilan serta pembacaan barzanji. Kemudian untuk pengajian mulai dari bersifat tematik

dengan menghadirkan penceramah tertentu hingga kajian kitab kuning. Untuk pendidikan formal misalnya dengan mendirikan madrasah diniyah maupun TK. Ada pula masjid yang mulai merintis jalan dakwahnya melalui website.

Akan tetapi untuk kerja sama dengan non Muslim, data menunjukkan kebanyakan masih belum berjalan dengan baik walaupun sudah ada yang memiliki langkah maju, misalnya berdonasi kepada non Muslim dan menerima donasi dari Non Muslim. Namun, apa yang disebutkan terakhir ini masih sangat jarang. Apabila hal ini telah berjalan, maka sebetulnya ia mampu menjadi modal sosial yang menguntungkan. Setiap umat di suatu lokasi, sama-sama aktif untuk bekerja sama dalam urusan muamalah, bukan urusan akidah. Seperti disebutkan di atas, modal sosial (social capital) ini diperlukan sebagai syarat toleransi aktif. Bahwa semakin kuat jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan komunal antar warga (Putnam, 1993).

Pengarusutamaan moderasi beragama sebetulnya dapat digulirkan secara kontinyu mengingat ternyata di lapangan, data menunjukkan faktor pendukung yang cukup banyak. Faktor-faktor pendukung tersebut menjadi dasar dan fondasi yang baik untuk pemantapan pengarusutamaan moderasi dan juga pendidikan moderasi di kalangan pengurus masjid. Namun begitu, tidak dapat dilupakan juga adanya penghambat untuk dapat diterapkannya pengarusutamaan moderasi beragama serta pendidikan moderasi beragama. Namun data menunjukkan faktor pendukung lebih banyak ketimbang faktor penghambat.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan moderasi beragama di masjid di masa pandemi ini telah dilakukan dalam berbagai bentuk. Moderasi beragama sangat terkait dengan reaksi serta respons pengurus masjid terhadap seruan pemerintah dalam mengatasi penyebarluasan pandemi korona. Pendidikan berbasis masjid sebelum dan ketika pandemi menerjang sangat dirasakan perbedaannya. Dipahami bahwa perbedaan mazhab dan pemikiran dalam masyarakat Islam sangat berpotensi mempengaruhi pengelolaan terhadap masjid. Untuk menyikapi hal ini, beberapa masjid mengakomodasi pengurus dari berbagai latar belakang, akan tetapi mereka sangat selektif dalam memilih penceramah. Hal ini dapat dimaklumi melihat sebagian besar masjid yang diteliti merupakan masjid yang dekat atau di bawah pengawasan pemerintah, ataupun masjid yang diteliti berada di tengah-tengah masyarakat. Namun model pengembangan pendidikan moderasinya masih belum terpola dengan baik.

Masih ada masjid yang menghadapi ancaman infiltrasi dari kelompok pro khilafah maupun infiltrasi kelompok Salafi. Hal ini antara lain wacana maupun isu keagamaan yang dihadapi kalangan pengurus masjid untuk menyebarluaskan paham moderasi beragama melalui pendidikan berbasis masyarakat. Selain itu, juga masih ada faktor penghambat walaupun menurut data jumlahnya tidak sebanyak faktor pendukung diselenggarakannya pendidikan moderasi beragama di masjid.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini secara garis besar fokus pada 3 hal;

1. Perlunya sosialisasi konsep moderasi beragama di masjid.
2. Perlunya penentuan pola pendidikan moderasi beragama berbasis masjid.
3. Perlunya melibatkan ormas-ormas keagamaan untuk penyebarluasan pengarusutamaan moderasi beragama di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abegebriel, Agus Maftuh. 2004. Negara Tuhan. Yogyakarta: SR-Ins..

Abidin, Zaenal (ed), Pelayanan Keagamaan Masyarakat di WILAYAH Perbatasan Indonesia, Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2015

Adeney-Risakotta, Bernard T. 2007. Kearifan Budaya dalam Praktik Keagamaan Lokal. Yogyakarta: CRCS UGM.

Ahmad, Mohd Shafie Hj. 2011. "Analisis Keputusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terhadap Penyelewengan Aqidah Jemaah Darul Arqam". Skripsi Thesis. Riau; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Al Asqalani, Ibn Hajar. 1993, Taqrib al-Tahdzib, juz I.

Al-Mubarakfuri, Syekh Shafiurrahman. 2018. Ar-Rahiq al-Maktum Sirah Nabawiyah. Jakarta: Qisthi Press..

Appleby, R. Scott. 2000. The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publisher.

Arnold, Thomas W. 1981. Sejarah Da'wah Islam. Jakarta: Penerbit Widjaya.

Arsad, M. 2020. Efektivitas Rukhshah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi COVID-19. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6(1), 59–74.

Asiya, Nur, 2016. Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai Sarana Pembinaan BKMT dan Remaja di Sitinjau Laut, Tesis, IAIN Padang.

Azra, Azyumardi, CBE. 2020. Moderasi Islam di Indonesia: dari ajaran, ibadah, hingga perilaku. Jakarta: Penerbit Kencana.

Azra, Azyumardi, CBE. 2020. Relevansi Islam Wasathiyah: dari melindungi kampus hingga mengaktualisasi kesalehan. Jakarta: Kompas.

Azra, Azyumardi. 2013. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana-Prenda Media Group.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jagakarsa Dalam Angka Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2017. Bogor Dalam Angka 2017.

Bakti, AF. 2005. Islam and Modernity: Nurcholis Madjid Interpretation and Democracy, Asian Journal Of Social Science

Bhaskara, Yudha. 2019. Sekilas Sejarah Masjid Jami Ama Haji Umar {Masjid Jami Ad-Da'wah} Balandongan, tanpa penerbit.

Budiman, Mustofa. 2007. "Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Masjid dan Potensi Masjid, Solo:ziyad visi Media

Burhani, Haris. 2019. Policy Brief; Revitalisasi Fungsi Masjid Menyemai Nilai KeIslaman, Kemanusiaan dan Kebangsaan:

Membentengi paham ekstremisme-radikalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Burhani, Haris. 2019. Policy Brief; Revitalisasi Fungsi Masjid Menyemai Nilai Keislaman, Kemanusiaan dan Kebangsaan: Membentengi paham ekstremisme-radikalisme, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural.

Day, Tony dan Keith Foulcher. 2002. “Introductory Remarks” dalam Tony Day dan Keith Foulcher (eds). Dalam Clearing a Space: Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature. Leiden: KITLV Press.

Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI. 2019. Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen, Jakarta: Dirjen Bimas Kristen, Kemenag RI.

Eilenberg, Michael dan Reed L. Wadley. 2009. Masyarakat Iban di Kalimantan Barat. Jakarta: Institut Dayakologi.

Ensiklopedi Hukum Islam. 2000. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Fahri, Mohamad & Zainuri, Ahmad. 2019. Moderasi Beragama di Indonesia. Jurnal Intizar, Vol. 25, No. 2, Desember.

Fathurrahman, Oman. 2020. Staf Ahli Menteri Agama 2019-2024, pada Forum Majelis Reboan 1 April 2020, Jakarta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19

Glasse, Cyril. 2002. Ensiklpodi Islam, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada

Haikal, Muhammad Husain. 1986. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Litera Antar Nusa. Cet. Ke X..

Hamka. 1990. Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,

Hasyim, Ahmad Umar. 2007. Menjadikan Muslim Kaffah, Yogyakarta, Mitra Pustaka

Heijmen, E. 2005. Apalah Arti Sebuah Nama (Sebutan dan Istilah Berkenaan dengan Kecacatan dan Kebutuhan Pendidikan Khusus. Eenet Asia Edisi Perdana Juni.

Hidayat, R. (2020, April Thusday). Pemerintah Indonesia terkesan menyepelekan dan teledor dalam menangani kasus COVID-19. Retrieved April 30, 2020, from: www.tirto.id

Hosen, Nadirsyah. 2019. Islam Wasathiyah Moderasi tanpa Kehilangan Prinsip.

Humaedi, M. Alie (dkk). 2016. Dayak di Wilayah Perbatasan: Mengungkap Karakter Bahasa dan Budaya ditengah Pergaulan Negara Tetangga. Jakarta: LIPI Press.

Humaedi, M. Alie. 2015. "Disfungsi Peran Kelompok Haji di Sebatik". Dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. XVII, No. 2. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan.

Ibnu Hazm al-Andalusi. Intisari Sirah Nabawiyah. Jakarta: alvabet. 2018.

Ilyas, Yunahar. 2002. Kuliah Akhlak, Yogyakarta, Lembaga Kajian Pengamalan Islam

Kementerian Agama. 2019. Moderasi Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia

M. Daud Yahya. (2020). Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas Bangsa dan Dunia Global. LP2M UIN Antasari Banjarmasin.

Mabrur, Asrar Faza. 2018. Hadis tentang Tiga Fungsi Masjid, https://www.iainlangsa.ac.id/detailpost/hadis-tentang-tiga-fungsi-masjid, 5 Februari 2018.

Machendrawaty, N., Yuliani, Y., Setiawan, A. I., & Yuningsih, Y. 2020. Optimalisasi fungsi mesjid di tengah pandemi COVID-19: Telaah syar'i, regulasi dan aplikasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mariah, Ima, 2011. Masjid Agung Bandung. Sejarah dan Kedudukannya Sebagai Simbol Kota Lama, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Martin, Richard C. 2004, Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. II, 2004

Mas'udi Masdar Farid. 2007. Mambangun NU berbasis Masjid dan Umat. Lajnah Takmir Masjid Nahdlatul Ulama.

Menchik, Jeremy. 2016. Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalisme, Cambridge University

Moeldoko. 2014. Kebijakan dan Scenario Planing Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan). Jakarta: Lemhanas RI.

Moh. Ayub. 1996. Manajemen Masjid Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus, Jakarta Gema Islam.

Mukhtar, Asep Mawardi, dkk,. 2013. Citra Kota Sukabumi dalam Arsip, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Mukhtar, Asep Mawardi. 2011. Haji Ahmad Sanoesi dan Kiprahnya dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman dan Pergerakan

Kebangsaan Sukabumi 1888-1950. Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Mulyono, M. 2017. Rekonstruksi Peran dan Fungsi Masjid sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam. Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman, 7(01), 13–32.

Munir, Ahmad & Saputra, Agus Romdlon. 2019. Implementasi Konsep Islam Wasathiyyah Studi Kasus Mui Eks. Keresidenan Madiun. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Volume, 13 No. 1 Tahun

Muslim, A. 2004. Manajemen Pengelolaan Masjid. Aplikasia, Jumal Aplikasi Llmu-Ilmu Agama, 5(2), 105–114.

Nasution, Harun. 1995. Islam Rasional. Bandung: Mizan. Cet. ke II

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/2005 tentang pelestarian kebudayaan Betawi.

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2019, Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci dan Sehat

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2018, Gerakan Dakwah Berbasis Masjid di Indonesia

Rappler.com, 2015. “Setara Institute: Bogor Bekasi Kota Paling Intoleran di Indonesia. Jakarta: November 16. Diakses 21 Agustus 2020, jam 11:14 WIB. Website: https://rappler.com/ world/ setara-institute-bogor-bekasi-kota-intoleran-indonesia

Republika, 2018. “Penjelasan Survey P3M: Masjid Disusupi Radikalisme,” Jakarta: 19 November. Diakses 19 Agustus 2020, jam 10:22 WIB. Website: https://republika.co.id/ berita/pifsg1409/penjelasan-survei-p3m-masjid-disusupi-radikalisme

Rudiatin, Ending. 2012. Kegiatan Ekonomi di Sebatik Tengah. Jakarta: tp.

Rusyana, A. Y., Supriyadi, D., Khosim, A., & Nugroho, F. H. (2020). Fatwa penyelenggaraan ibadah di saat pandemi COVID-19 di Indonesia dan Mesir. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

Sarmili, Ade. 2017. Masjid Raya Bogor. Bogor: DKM Masjid Raya Bogor.

Sarup, Madan. 2003. Poststrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis. Yogyakarta: Jendela.

Sefriyono, S. 2014. Harmoni dalam Perbedaan: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama. Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 2(1), 1–16.

Seng, Ana Weng. 2005. Rahasia Arqam. Pahang: PTS Millenia Sdn Bdn.

Setara Institute, 2015. Bogor the Most Intolerant City in Indonesia. Diakses 15 Agustus 2020 jam 16:11 WIB, Website : http://setara-institute.org/en/english-bogor-the-most-intolerant-city-in-indonesia/

Shaleh, Muhammad, 2011. Riwayat Hidup dan Perjuangan Mr. R. Syamsoedin. Sukabumi: Munshal Press.

Shaleh, Munandi dkk, 2013, Masjid Agung dari Masa Ke Masa, DKM Masjid Agung Kota Sukabumi, cet ke-1.

Shihab, M. Quraish, 1994, Membumikan Al Qurán, Bandung, Mizan

Shihab, M. Quraish. 2005. Tafsir al-Mishbah, Ciputat: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2000. Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan. Cet. XI.

Sidi Gazalba, 1994. Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Al Husna.

Sihombing, U. 2001. Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat. In Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah (p. 186). Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Siswanto. 2005. Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid, Jakarta Pustaka Al-Kautsar.

Sudira, P., (n.d.), Pendidikan Berbasis Masyarakat, Retrieved May 14, 2016, from http://eprints.uny.ac.id/6077/1/043-Pendidikan_Berbasis_Masyarakat

Suharto, T., (2011), Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Sunarto, Eddy dkk. 2011. Profil Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jawa Barat, Bandung: Dinas Parawisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

Suryono, Yoyon & Tohani, Entoh. 2016. Inovasi Pendidikan Nonformal. Yogyakarta: Graha Cendekia.

Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an , Bandung Alfabeta, 2009.

Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., & Rahman, A. 2020. Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Korona Virus Desease 2019 (COVID-19). KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 13(1), 1–13.

The Wahid Institute. 2011. Lampu Merah Kebebasan Beragama di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute.

The Wahid Institute. 2015. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi. Jakarta: The Wahid Institute.

Tim Peneliti P2LP. 2013. Berbagai Persoalan di Perbatasan. Jakarta: P2P LIPI

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI.

Tohjiwa, Agus Dharma, Sugiono Soetomo, Joesron Alie Sjahbana, Edi Purwanto, Kota Bogor Dalam Tarik Menarik Kekuatan Lokal Dan Regional. Seminar Nasional Riset Arsitektur Dan Perencanaan (Serap), Humanisme, Arsitektur Dan Perencanaan 16 Januari 2010, Jurusan Teknik Arsitektur Dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada,

Tuntunan MUI Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Korona Virus Desease (COVID-19) Di Kota Medan.

Wahab, Abdul Jamil. Islam Radikal dan Moderat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2019.

Wahid, A. 1985. Religion, Ideology and Development, Archipel;

Yani, Ahmad. 2007. Panduan Pengelolaan Masjid sebagai Pusat Kegiatan Umat" Jakarta: Pustaka Intermas.

Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris bin. 1972. Maqayis al-Lugah, juz III:

Zubaedi. 2009. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Website

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/04/15mlajwz-pembangunan-masjid-agung-kotasukabumi rampungmei. Diakses penulis buku Masjid Agung dari masa ke masa tanggal 15 April 2013.

https://humpro.sukabumikota.go.id/2019/10/masjid-jadi-pusat-peradaban-Islam.html# Minggu, Oktober 27, 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Raya_Medan

https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-berdirinya-kota-sukabumi-sebagai-pusat-perkebunan-di-priangan/full, 17 Januari 2018 8:11.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-Korona-di-indonesia?page=all

https://news.detik.com/berita/d-4650151/bima-arya-ingin-perluas-kota-bogor-begini-angka-pertumbuhan-penduduknya

https://republika.co.id/berita/ntbo6r313/masjid-agung-sukabumi-pusat-dakwah-dan-pemersatu-umat-Islam, Rabu 19 Aug 2015 16:11 wib.

https://republika.co.id/berita/q8mc0m320/begini-dampak-COVID-19-terhadap-masjidmasjid-besar-dunia

https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-jumat-saat-pandemi-COVID-19-fFlw

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisikonten-khilafah-dan-jihad-di-buku-madrasah

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Moderasi beragama sangat terkait dengan reaksi serta respons pengurus masjid terhadap seruan pemerintah dalam mengatasi penyebarluasan pandemi korona. Pendidikan berbasis masjid sebelum dan ketika pandemi menerjang sangat dirasakan perbedaannya. Dipahami bahwa perbedaan mazhab dan pemikiran dalam masyarakat Islam sangat berpotensi mempengaruhi pengelolaan terhadap masjid. Untuk menyikapi hal ini, beberapa masjid mengakomodasi pengurus dari berbagai latar belakang, akan tetapi mereka sangat selektif dalam memilih penceramah. Hal ini dapat dimaklumi melihat sebagian besar masjid yang diteliti merupakan masjid yang dekat atau di bawah pengawasan pemerintah, ataupun masjid yang diteliti berada di tengah-tengah masyarakat. Namun model pengembangan pendidikan moderasinya masih belum terpola dengan baik.

Masih ada masjid yang menghadapi ancaman infiltrasi dari kelompok pro khilafah maupun infiltrasi kelompok Salafi. Hal ini antara lain wacana maupun isu keagamaan yang dihadapi kalangan pengurus masjid untuk menyebarluaskan paham moderasi beragama melalui pendidikan berbasis masyarakat. Selain itu, juga masih ada faktor penghambat walaupun menurut data jumlahnya tidak sebanyak faktor pendukung diselenggarakannya pendidikan moderasi beragama di masjid.

LITBANGDIKLAT PRESS
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Jl. MH Thamrin No.6 Jakarta 10340 | Telp. (021) 3920425
Fax. (021) 3920421 | Website : balitbangdiklat.kemenag.go.id
Email : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id